



RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021-2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021-2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX : Penutup

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Agustus 2021



BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Agustus 2021



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

MUHSIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR .04...**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN (4-88/2021)**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Agustus 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

MUHSIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR.....04...**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN (4-88 / 2021)**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**



**ZULEDI, SH., M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 196401031985121002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3	Maksud dan Tujuan	I-7
1.4	Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.5	Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD	I-10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Ogan Ilir	II-54
2.3	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Ilir	II-81
2.4	Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir	II-83
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu	III-27
3.3	Kerangka Pendanaan	III-32
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2	Isu-isu Strategis	IV-16
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-8
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-15
6.4	Arahan Kebijakan Pengembangan Kewilayahan (Kawasan Strategis)	VI-31
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2	Program perangkat daerah	VII-5

BAB VIII	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	VIII-1
8.1	Penetapan Indikator Kinerja	VIII-1
8.2	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VIII-34
8.3	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	VIII-37
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Wilayah Administrasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-2
Tabel II.2	Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-3
Tabel II.3	Tinggi wilayah dan Jarak Ke ibu Kota di Kabupaten Ogan Ilir	II-5
Tabel II.4	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-6
Tabel II.5	Rincian Jenis tanah yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir	II-7
Tabel II.6	Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan Peruntukan Pertanian Budidaya Tanaman Pangan	II-11
Tabel II.7	Persentase Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-15
Tabel II.8	Persentase luas Wilayah Kebanjiran Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	II-15
Tabel II.9	Desa Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Ilir	II-16
Tabel II.10	Luas Wilayah Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 s.d 2020	II-17
Tabel II.11	Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 s.d 2020	II-18
Tabel II.12	Rasio luas Wilayah Kekeringan Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-18
Tabel II.13	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-20
Tabel II.14	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-22
Tabel II.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-23
Tabel II.16	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-26
Tabel II.17	Angka Stunting Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-29
Tabel II.18	Indikator Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2019	II-30
Tabel II.19	Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015–2019	II-31

Tabel II.20	Jumlah Gedung Kesenian Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015–2019	II-31
Tabel II.21	Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015–2019	II-32
Tabel II.22	Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015–2019	II-32
Tabel II.23	Perkembangan Keolahragaan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 – 2019	II-33
Tabel II.24	Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 – 2019	II-34
Tabel II.25	Status dan peran/fungsi jalan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2020	II-35
Tabel II.26	Rasio Jalan dengan Penduduk di Kab. Ogan Ilir Tahun 2015- 2019	II-35
Tabel II.27	Kondisi jalan Menurut Jenisnya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-36
Tabel II.28	Capaian Akses Sanitasi KK Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-36
Tabel II.29	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-37
Tabel II.30	Hasil Tinjauan Usulan Lokasi Kawasan Kumuh Di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	II-37
Tabel II.31	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 s.d 2019	II-38
Tabel II.32	Jumlah Rumah tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018	II-39
Tabel II.33	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2019	II-40
Tabel II.34	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-40
Tabel II.35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2019	II-45
Tabel II.36	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2015-2019	II-46
Tabel II.37	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2105-2019	II-47
Tabel II.38	Realisasi PMDN dan PMA Tahun 2015-2019	II-48
Tabel II.39	Data Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-48
Tabel II.40	Data Perkembangan Urusan Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2015-2019	II-49
Tabel II.41	Data Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020	II-50
Tabel II.42	Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga	II-50

	Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020	
Tabel II.43	Indikator Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020	II-51
Tabel II.44	Angka Kriminalitas Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2015-2019	II-53
Tabel II.45	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020	II-56
Tabel II.46	Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2010) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	II-80
Tabel II.47	Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-86
Tabel II.48	Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2019	II-88
Tabel III.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III-3
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020	III-4
Tabel III.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2019 (Juta)	III-8
Tabel III.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)	III-10
Tabel III.5	Realisasi Anggaran Pemenuhan Target SPM Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dan 2020	III-13
Tabel III.6	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)	III-17
Tabel III.7	Rata - Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 - 2020	III-20
Tabel III.8	Rasio Lancar Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 - 2020 (dalam Jutaan)	III-24
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 - 2020 (dalam Jutaan)	III-25
Tabel III.10	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 - 2020 (dalam Jutaan)	III-26
Tabel III.11	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 - 2020 (dalam Jutaan)	III-27
Tabel III.12	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015- 2019 (dalam Jutaan)	III-27
Tabel III.13	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2019 (dalam Jutaan)	III-28
Tabel III.14	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2019 (dalam Jutaan)	III-29
Tabel III.15	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ogan Ilir Tahun	III-30

	2016-2020 (dalam Jutaan)	
Tabel III.16	Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-31
Tabel III.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-31
Tabel III.18	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-32
Tabel III.19	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026 (dalam jutaan)	III-37
Tabel III.20	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Kabupaten ogan Ilir	III-40
Tabel III.21	Proyeksi Anggaran Pendaoatan Belanja Tahun 2021-2026 Kabupaten Ogan Ilir (dalam Jutaan)	III-41
Tabel III.22	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)	III-44
Tabel III.23	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)	III-46
Tabel III.24	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-46
Tabel IV.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026	IV-15
Tabel IV.2	Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	IV-29
Tabel V.1	Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional	V-9
Tabel V.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026	V-18
Tabel VI.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026	VI-2
Tabel VI.2	Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2022-2026	VI-11
Tabel VI.3	Daftar Program Prioritas Kepala Daerah dalam Janji Kampanye	VI-17
Tabel VI.4	Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Straegi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026	VI-21
Tabel VI.5	Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	VI-32
Tabel VI.6	Penetapan dan Arah-an Penanganan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten	VI-34

	Ogan Ilir	
Tabel VII.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026	VII-2
Tabel VII.2	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026	VII-3
Tabel VIII.1	Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional	VIII-2
Tabel VIII.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026	VIII-3
Tabel VIII.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026	VIII-6
Tabel VIII.4	Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026	VIII-24
Tabel VIII.5	Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026	VIII-35
Tabel VIII.6	Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026	VIII-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-9
Gambar II.1	Peta Administratif Kabupaten Ogan Ilir	II-4
Gambar II.2	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
Gambar II.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-20
Gambar II.4	Nilai PDRB adh Berlaku Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-22
Gambar II.5	PDRB per Kapita Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-24
Gambar II.6	Indeks Gini Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-24
Gambar II.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-25
Gambar II.8	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-26
Gambar II.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-28
Gambar II.10	Angka Stunting Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018-2020	II-28
Gambar II.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-41
Gambar II.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020	II-42
Gambar II.13	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017-2019	II-43
Gambar II.14	Komponen Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-43
Gambar II.15	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Komunikasi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	II-52
Gambar II.16	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	II-54
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam miliar)	III-5
Gambar III.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)	III-6
Gambar III.3	Perkembangan Proporsi Belanja Urusan Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah (%)	III-12
Gambar IV.1	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Ogan Ilir	IV-3

	Tahun 2021-2026	
Gambar IV.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-5
Gambar IV.3	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-6
Gambar IV.4	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-7
Gambar IV.5	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-8
Gambar IV.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-9
Gambar IV.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-10
Gambar IV.8	Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-11
Gambar IV.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-12
Gambar IV.10	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	IV-14
Gambar IV.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Air Minum Bersih Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-15
Gambar IV.12	Angka Kriminalitas Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2019	IV-17
Gambar V.1	Elemen Visi Kabupaten Ogan Ilir	V-2
Gambar VI.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026	VI-9
Gambar VI.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Ogan Ilir	VI-33

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Ogan ilir merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan dan diresmikan pada tanggal 07 Januari 2004. Secara Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Ogan ilir adalah : 2.666,07 Km² yang terdiri dari 65% daratan dan 35% Rawa. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir terbagi dalam 16 kecamatan, dan masing-masing kecamatan terbagi atas 227 desa-desa dan 14 kelurahan, sedangkan setiap desa- desa dan kelurahan didalamnya terdiri atas dusun, lingkungan maupun rukun warga.

Pada Desember 2020 ini telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Ogan Ilir sebagai tanda berakhirnya periode pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 2016-2021

dan langkah awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2021-2026.

Pada periode ini, perlu dirumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang akan meningkatkan capaian target pembangunan daerah sehingga mampu mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Ilir yaitu “Terwujudnya Ogan Ilir yang Santri menuju Masyarakat Sejahtera”.

Berdasarkan hasil Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 004/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 bahwa pasangan Panca Wijaya Akbar, SH dan H. Ardani, SH., MH. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, maka selanjutnya berdasarkan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 perlu disusun rancangan awal RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Ogan Ilir dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Selain menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih dan penjabaran dari RPJPD, RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026 harus mempedomani arah kebijakan pada RPJPD. Pada saat bersamaan, RPJMD juga harus memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Ogan Ilir.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021–2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program Perangkat

Daerah (yang selanjutnya akan disingkat PD) dan lintas PD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra PD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Ogan Ilir.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh Kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang untuk kemudian ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

6. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD merupakan mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD harus memerhatikan kondisi gambaran umum Kabupaten Ogan Ilir untuk mengetahui refleksi dari kondisi daerah, sehingga diketahui permasalahan yang dihadapi Kabupaten Ogan Ilir. Langkah tersebut juga diimbangi dengan upaya untuk mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Ilir untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir di masa yang

akan datang. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir ini didasari oleh visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah serta

kebijakan umum guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir secara berkelanjutan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi lain yang berdekatan.
- d. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
- e. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.
- f. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah.
- g. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir.
- h. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

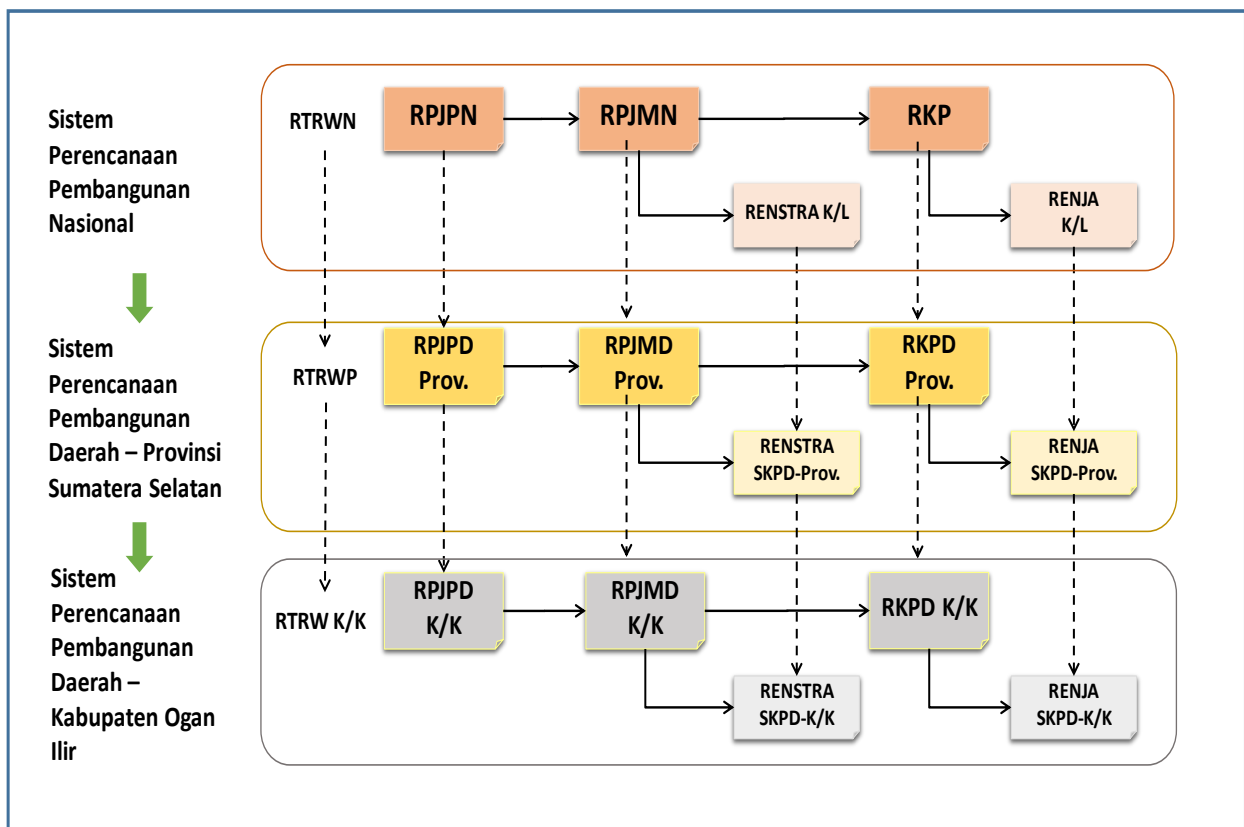
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan maupun penganggaran terutama RPJPD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan R-APBD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan

nasional serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir juga harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ogan Ilir untuk menyesuaikan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Ogan Ilir dengan kebijakan tahapan pembangunan dalam RPJMD. Sehingga hasil akhir yang diharapkan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 adalah merupakan pencapaian RPJPD Kabupaten Ogan Ilir dan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026 yaitu: **“Ogan Ilir menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika”**. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Ilir merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Ogan Ilir yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ogan Ilir dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan memerhatikan RPJM Nasional serta memuat

arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.

2. RPJMD Kabupaten Ogan Ilir merupakan acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategi PD yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
3. RPJMD Kabupaten Ogan Ilir yang berisi rencana pembangunan lima tahunan merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode tahunan.
4. RTRW Kabupaten Ogan Ilir menjadi pedoman dalam rencana pemanfaatan ruang. Dalam hal ini, antara RTRW dan RPJMD mempunyai kepentingan yang saling bersinergi, agar penyusunan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat diimplementasikan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang.
5. Dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD Kabupaten Ogan Ilir.
6. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dengan memerhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan prioritas dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RPJMD

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Ogan Ilir sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Bupati Ogan Ilir ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan usaha dan upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir serta pagu anggaran setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2022, 2023, 2024 2025, dan 2026 penanggung jawab bidang urusan/program Perangkat Daerah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terbaru.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir berada pada tahapan terakhir dari pelaksanaan perencanaan jangka panjang daerah dimana periode pembangunan daerah tahun 2021-2026 akan segera dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang dirumuskan harus mampu menjadi “akhir” dari pencapaian visi jangka panjang daerah “Terwujudnya Ogan Ilir yang SANTRI Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Kabupaten Ogan Ilir memiliki “pekerjaan rumah” dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional.

Dalam mengkaji gambaran umum kondisi daerah ini, analisis yang ditelaah lebih kepada data dan informasi yang mengarah pada permasalahan yang berkenaan dengan rumusan kebijakan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini disusun untuk membentuk kerangka logis perumusan kebijakan pembangunan yang didasari dengan data dan informasi yang valid dan relevan. Sedangkan pada data lengkap terkait pencapaian pembangunan secara lebih rinci disusun dalam tabel pencapaian pembangunan daerah yang lebih komprehensif. Berikut berbagai analisis dan kajian dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Ogan Ilir periode pembangunan 2021-2026.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan yang diundangkan tanggal 18 Desember 2003

dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta.

Secara administratif Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan, dengan luas wilayah 2.461,37 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang diikuti Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Muara Kuang, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang. Jumlah desa terbanyak adalah di Kecamatan Pemulutan dengan 25 desa dan Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 desa. Kabupaten Ogan Ilir mempunyai batas kabupaten atau kota perbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara:	Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin
Sebelah Timur:	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Sebelah Selatan :	Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sebelah Barat :	Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih

Tabel II.1.
Wilayah Administrasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Indralaya	17	3
2	Indralaya Utara	15	1
3	Indralaya Selatan	14	0
4	Pemulutan	25	0
5	Pemulutan Barat	11	0
6	Pemulutan Selatan	15	0
7	Tanjung Batu	19	2
8	Payaraman	11	2
9	Tanjung Raja	15	4
10	Sungai Pinang	12	1
11	Rantau Panjang	12	0
12	Muara Kuang	13	1
13	Rambang Kuang	13	0
14	Lubuk Keliat	10	0
15	Rantau Alai	13	0
16	Kandis	12	0
Kabupaten Ogan Ilir		227	14

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Wilayah kecamatan yang lebih luas dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Ogan Ilir yaitu Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Muara Kuang dan Kecamatan Indralaya Utara. Sedangkan kecamatan yang luasnya

lebih kecil yaitu Kecamatan Sungai Pinang, Rantau Panjang dan Kecamatan Kandis.

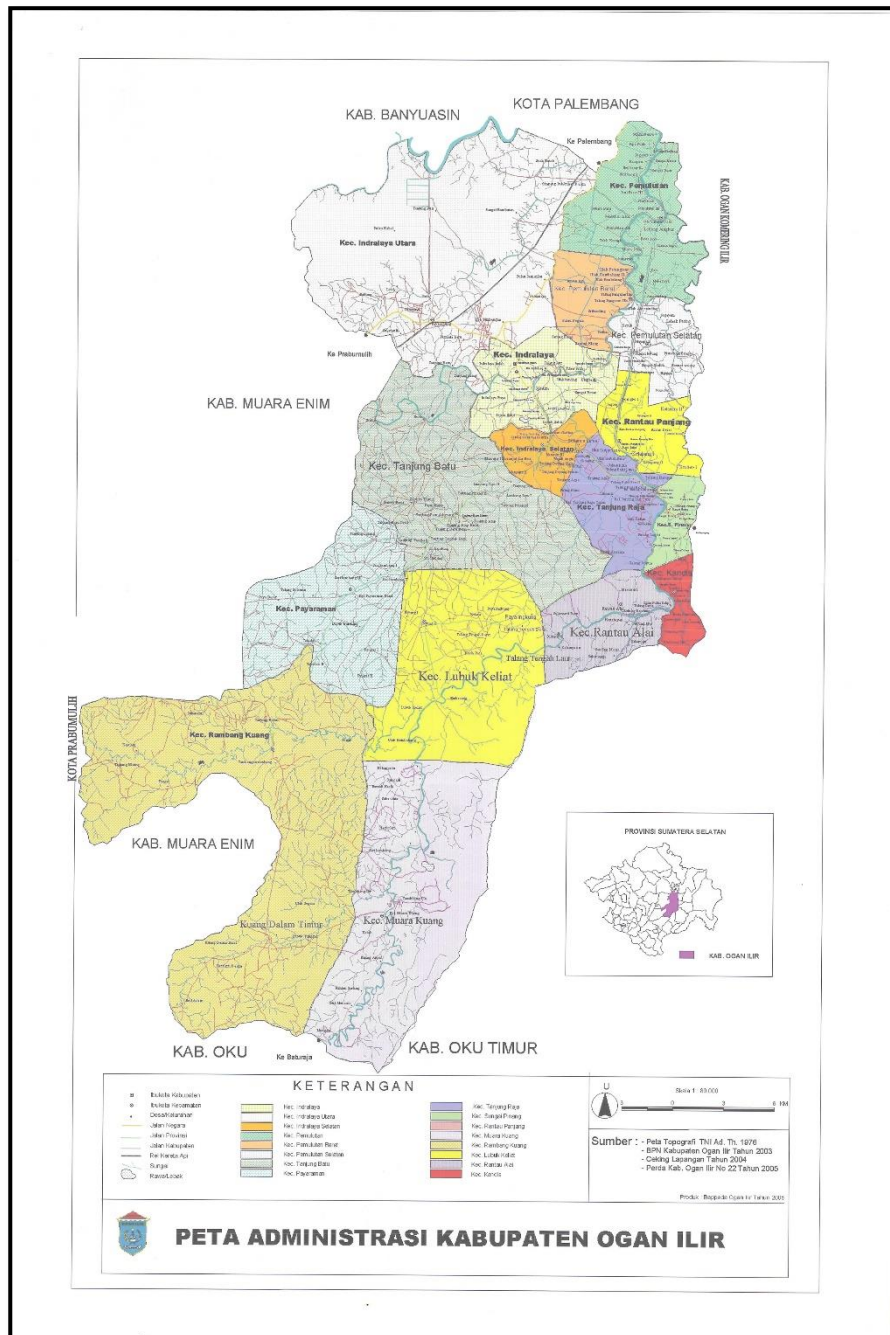
Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pemulutan yang berjumlah 25 desa, dan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya adalah Kecamatan Lubuk Keliat yaitu 10 desa.

Tabel II.2.
Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan
1	Muara Kuang	Kelurahan Muara Kuang
2	Rambang Kuang	Desa Tambang Rambang
3	Lubuk Keliat	Desa Betung II
4	Tanjung Batu	Kelurahan Tanjung Batu Timur
5	Payaraman	Kelurahan Payaraman Timur
6	Rantau Alai	Desa Rantau Alai
7	Kandis	Desa Kandis II
8	Tanjung Raja	Kelurahan Tanjung Raja Utara
9	Rantau Panjang	Desa Rantau Panjang Ulu
10	Sungai Pinang	Kelurahan Sungai Pinang
11	Pemulutan	Desa Pemulutan Ulu
12	Pemulutan Selatan	Desa Sungai Lebung
13	Pemulutan Barat	Desa Talang Pangeran Ulu
14	Indralaya	Kelurahan Indramayu Mulya
15	Indralaya Utara	Desa Tanjung Pering
16	Indralaya Selatan	Desa Meranjat III
Kabupaten Ogan Ilir		

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Bappeda Kabupaten Ogan Ilir, 2021

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Ogan Ilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir yang secara geografis Kabupaten Ogan Ilir terletak di antara 3° 2' LS – 3° 48' LS dan di antara 104° 20' BT – 104° 48' BT, letak geografis Kabupaten Ogan Ilir mempunyai cukup potensi yang strategis untuk mendukung interaksi wilayah hal ini dikarenakan Kabupaten Ogan Ilir berada pada jalur lintas sumatera yang dapat menghubungkan dengan provinsi dan

kota lainnya (Palembang, Jambi, Medan, dan Aceh), yang dapat menjadi potensi guna mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam provinsi, kota dan kabupaten terdekat.

C. Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi

Kabupaten Ogan Ilir adalah suatu wilayah yang didominasi oleh rawa mengingat 65 % dari luas wilayah kabupaten yang terdiri atas rawa lebak dan rawa pasang surut. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan lereng berkisar dari 0 – 5% dengan ketinggian berkisar antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut. Wilayah bagian utara Kabupaten Ogan Ilir merupakan hamparan dataran rendah berawa yang sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, sampai Indralaya Selatan. sedangkan Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan Muara Kuang dengan dataran yang bertopografi datar sampai bergelombang dengan ketinggian sampai 14 meter dari permukaan air laut. Derajat keasaman tanah berkisar antara pH 4,0 sampai pH 6,0.

Tabel II.3.
Tinggi wilayah dan Jarak Ke Ibu Kota di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
1	Muara Kuang	5-35	68
2	Rambang Kuang	13-52	42
3	Lubuk Keliat	5-30	56
4	Tanjung Batu	11-23	18
5	Payaraman	7-32	31,6
6	Rantau Alai	5-12	25,2
7	Kandis	5-9	34,4
8	Tanjung Raja	5-13	18
9	Rantau Panjang	6-11,5	22
10	Sungai Pinang	5-10	21,2
11	Pemulutan	5-10	22
12	Pemulutan Selatan	4,5-11	28
13	Pemulutan Barat	9-10	14
14	Indralaya	10-11	3
15	Indralaya Utara	10-25	16,4
16	Indralaya Selatan	9-20	6

Geologi Regional Kabupaten Ogan Ilir secara tatanan stratigrafi termasuk dalam sub cekungan Palembang, dan merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang terbentuk pada zaman tersier, hingga diakhiri dengan endapan holosen. Stratigrafi Regional Kabupaten Ogan Ilir dari tua ke muda terdiri atas endapan gunung api, endapan sedimen dan endapan permukaan

antara lain Formasi Muara Enim (TMPM), Formasi Kasai (QTK) dan endapan permukaan (Qs dan Qa).

Struktur geologi yang kompleks seperti patahan, lipatan dan ketidakstabilan tanah, tidak ditemui di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa seluruh wilayah Ogan Ilir aman dari kemungkinan bahaya longsor atau gangguan aktifitas geologis terutama gempa bumi. Kendala utama bagi wilayah Ogan Ilir, berupa resiko erosi-sedimentasi yang menimbulkan pendangkalan pada hampir seluruh sungai utama, akibat kemerosotan pengelolaan DAS. Untuk menekan laju pengendapan oleh erosi, setiap kegiatan pembangunan di daerah aliran sungai perlu melalui pendekatan konservasi tanah dan air.

Kabupaten Ogan Ilir dialiri oleh satu sungai besar yaitu Sungai Ogan yang mengalir mulai dari Kecamatan Muara Kuang, Rantau Alai, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Indralaya, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat dan Pemulutan yang bermuara di Sungai Musi Kertapati Kota Palembang, sedangkan sungai kecil antara lain Sungai Kelekar, Sungai Rambang, Sungai Kuang, Sungai Randu yang bermuara di Sungai Ogan, dan Sungai Keramasan yang bermuara di Sungai Musi Palembang. Danau yang ada berupa Danau Lebung Karang yang terletak di sebelah barat Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya, serta rawa Sungai Kelekar yang dijadikan objek wisata alam di Tanjung Putus Kota Indralaya dan menjadi kawasan lokasi perkantoran terpadu Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah yang mempunyai iklim Tropis Basah (Type B) dengan musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim hujan berkisar antara bulan November sampai dengan April. Curah hujan. Curah hujan tertinggi di Ogan Ilir berada pada bulan Mei dengan jumlah curah hujan sebesar 297,81 mm dan terendah di bulan Agustus dengan curah hujan sebesar 58,06 dengan sifat hujan di bawah normal.

Tabel II.4.
Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Sifat Hujan
Januari	226,18	Atas normal
Februari	221,75	Atas normal
Maret	272,25	Atas normal
April	244,93	Atas normal
Mei	297,81	Atas normal

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Sifat Hujan
Juni	206,88	Atas normal
Juli	130,93	Atas normal
Agustus	58,06	Bawah normal
September	171,68	Atas normal
Oktober	262,37	Atas normal
November	282,06	Atas normal
Desember	282,63	Atas normal

Sumber: Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang

D. Jenis Tanah

Jenis tanah didominasi oleh jenis tanah Alluvial dan tanah Podsolik. Tanah alluvial terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ogan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan warna tanah kelabu atau kecoklatan, keadaan tanahnya liat, berpasir dan lembab apabila musim kering akan menjadi keras. Tanah alluvial memiliki susunan humus yang kaya bahan organik yang berasal dari endapan limpasan air sungai.

Tanah alluvial tersebar di Kecamatan Pemulutan, Indralaya, Tanjung Raja, Rantau Alai, Muara Kuang dan sebagian di Tanjung Batu. Tanah podsolik terdapat di daratan yang tidak mengalami penggenangan pada musim hujan, tingkat kesuburan lebih rendah dibandingkan dengan jenis tanah alluvial.

Rincian turunan jenis tanah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir adalah: (a) Alluvial Hidromorf Endapan Liat (Pemulutan, Tanjung Batu, Tanjung Raja dan Indralaya), (b) Alluvial Kelabu Muda (Muara Kuang), (c) Asosiasi Gley Humus dan Organosol (Tanjung Raja dan Indralaya), (d) Hidromorf Kelabu (Muara Kuang dan Tanjung Raja), Podsolik Coklat Kekuningan/Podsolik Merah Kuning (Muara Kuang dan Tanjung Batu), dan (e) Asosiasi Podsolik Coklat Kekuningan dengan Hidromorf Kelabu (Muara Kuang, Indralaya dan Pemulutan), seperti tampak pada Tabel 2.5. Sedangkan derajat keasaman tanah berkisar antara pH 4,0 sampai pH 6,5.

Tabel II.5.
Rincian Jenis tanah yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir.

No	Jenis Tanah	Lokasi Kecamatan
1	Alluvial Hidromorf Endapan Liat	Pemulutan, Tanjung Batu, Tanjung Raja, Rantau Alai dan Indralaya.
2	Alluvial Kelabu Muda	Muara Kuang
3	Asosiasi Gley Humus dan Organosol	Tanjung Raja, Rantau Alai dan Indralaya
4	Hidromorf Kelabu	Muara Kuang, Rantau Alai dan Tanjung Raja
5	Podsolik Coklat Kekuningan/ Podsolik Merah Kuning	Tanjung Batu dan Muara Kuang

No	Jenis Tanah	Lokasi Kecamatan
6	Assosiasi Podsolik Coklat Kekuningan dengan Hidromorf Kelabu	Muara Kuang, Indralaya dan Pemulutan

Sumber: Bappeda Kab. Ogan Ilir, 2015

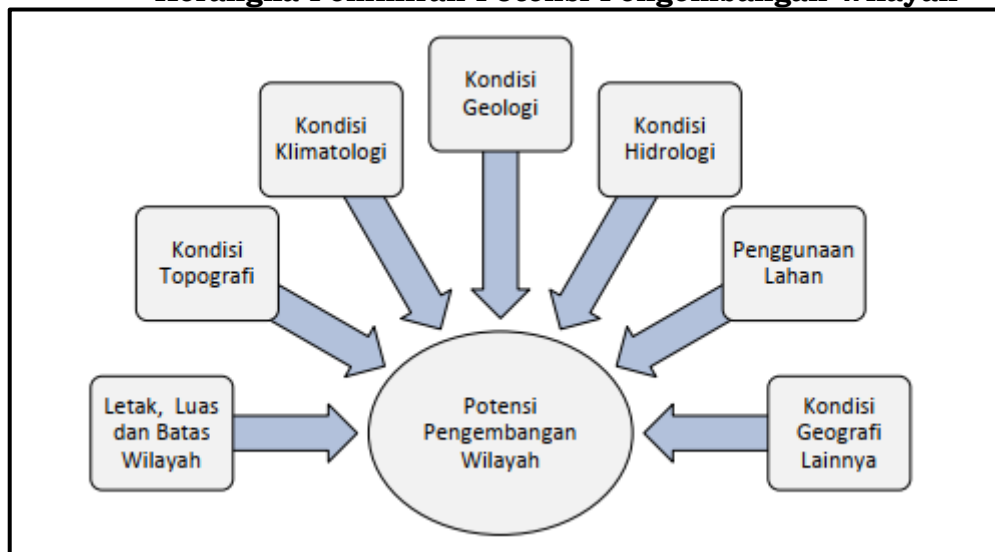
E. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Ogan Ilir dalam arahan RTRW Nasional merupakan bagian dari Kawasan Andalan Palembang dan sekitarnya. Sektor unggulan yang diarahkan pengembangannya pada kawasan ini berupa pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan. Dalam arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Indralaya memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintah, pusat perdagangan dan jasa regional/lokal, pusat pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan dan tanaman keras, pusat pengembangan pendidikan tinggi, pusat pengembangan permukiman dan pelayanan umum. Sedangkan kota Tanjung Raja ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi utama pusat pemerintah kecamatan, pusat perdagangan dan jasa regional/lokal, pusat pengembangan industri manufaktur, pengembangan perkebunan dan tanaman keras dan pusat pengembangan permukiman dan pelayanan umum.

Pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Palembang, Kabupaten Ogan Ilir merupakan bagian tak terpisahkan dari Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Wilayah administrasi Kabupaten Ogan Ilir yang termasuk dalam sistem Metropolitan Palembang adalah: Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Selatan, Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kecamatan Rantau Panjang dan Kecamatan Sungai Pinang. Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kota Satelit bagi Kota Palembang. Penataan kawasan perbatasan diarahkan pada pengelolaan batas wilayah, pengembangan air baku dan air minum, jaringan listrik, pembangunan TPA sampah terpadu (regional) serta peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

Dalam mewujudkan pemanfaatan potensi pengembangan wilayah, harus melihat dukungan dari sisi kondisi geografi daerah baik terkait letak, luas dan batas wilayah; kondisi topografi; klimatologi; geologi; hidrologi; penggunaan lahan dan kondisi geografi lainnya yang mampu berkontribusi positif pada pengelolaan potensi pengembangan wilayah. Jika dikaji secara tepat, maka kondisi geografi akan mampu memberi dampak positif bagi pengelolaan potensi kewilayahan yang dijabarkan melalui RTRW Kabupaten Ogan Ilir.

Gambar II.2
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Gambar G-C.2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung, kawasan rawan bencana dan kawasan budidaya serta penetapan kawasan strategis.

a. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Di Kabupaten Ogan Ilir tidak dijumpai kawasan hutan lindung, kawasan lindung yang ada adalah kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai. Penetapan kawasan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan danau dengan rencana luasan mencapai 1.010,45.

Sedangkan Ruang Terbuka Hijau direncanakan 30 persen terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat terletak menyebar di kawasan perkotaan dalam Kabupaten Ogan Ilir.

b. Rencana Kawasan Rawan Bencana

Wilayah rawan kebencanaan yang paling mungkin terjadi di Kabupaten Ogan Ilir adalah banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Banjir diakibatkan oleh luapan Air sungai-sungai besar seperti sungai Ogan, Sungai rambang, Hal ini bukan disebabkan oleh kondisi geologi wilayah yang tidak stabil, melainkan lebih dikarenakan oleh perilaku kegiatan budidaya manusia yang berlebih-lebihan dan kurang memperhatikan pentingnya kelestarian lingkungan disamping itu juga karena kondisi topografi yang relatif datar mencapai 0 – 2 persen. Daerah rawan banjir dan tanah longsor meliputi kawasan sekitar Sungai Ogan yaitu Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kecamatan Rantau Panjang, Kecamatan Indralaya, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Rantau Alai dan Kecamatan Muara Kuang serta Kecamatan Indralaya Utara, selain kawasan sekitar Sungai Ogan daerah rawan banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdapat pada kawasan sekitar Sungai Rambang yaitu Kecamatan Rambang Kuang.

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan, daerah rawan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir meliputi Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kecamatan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Indralaya Selatan, Kecamatan Muara Kuang, Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Kandis.

16 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir masuk dalam kawasan rawan angin puting beliung.

c. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman dan industri.

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Ogan Ilir terbagi menjadi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 2435,89 Ha.
2. Kawasan hutan produksi tetap untuk tujuan khusus (KHDTK): Kebun raya di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara dengan luas ± 100,30 Ha

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pertanian adalah salah satu kegiatan usaha masyarakat yang sangat penting di suatu wilayah, karena dengan kegiatan pertanian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Begitu juga dengan suatu wilayah berkewajiban untuk dapat menyediakan kebutuhan pokok masyarakatnya dengan hasil produksi dari kegiatan pertanian yang ada. Demikian halnya dengan Kabupaten Ogan Ilir yang harus dapat menghasilkan dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakatnya terutama bahan makanan, baik yang dapat dihasilkan di wilayah sendiri maupun yang datang dari luar wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga pemantapan peruntukkan untuk lahan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu sasaran dalam perencanaan pola ruang RTRW Kabupaten Ogan Ilir.

Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Berikut rencana sebaran luasan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ogan Ilir sampai tahun 2032.

Tabel II.6.
Rencana Luasan dan Sebaran Kawasan
Peruntukan Pertanian Budidaya Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	Indralaya	2916,34	9,47
2	Indralaya Utara	1196,69	3,89
3	Indralaya Selatan	665,35	2,16
4	Pemulutan	7113,32	23,09
5	Pemulutan Barat	2354,16	7,64
6	Pemulutan Selatan	2290,97	7,44
7	Tanjung Batu	-	-
8	Payaraman	-	-
9	Tanjung Raja	1343,03	4,36
10	Sungai Pinang	1628,67	5,29

No	Kecamatan	Luas (ha)	Prosentase (%)
11	Rantau Panjang	3758,84	12,20
12	Muara Kuang	1987,99	6,45
13	Rambang Kuang	-	-
13	Lubuk Keliat	1909,73	6,20
14	Rantau Alai	2319,21	7,53
15	Kandis	1318,11	4,28
	Jumlah	30.802,41	100.00

Sumber: Perubahan RTRW Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032

Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari dengan rencana luasan mencapai 30.802,41 ha. Beberapa komoditas hortikultura di kabupaten Ogan Ilir antara lain beberapa jenis sayur-sayuran dataran rendah seperti kangkung, bayam, buncis. serta beberapa jenis tanaman buah-buahan yang antara lain terdiri dari nanas, jeruk, blewah. Sebaran peruntukan lahan kawasan hortikultura terutama di Kecamatan Indralaya Utara, Rambang Kuang, Muara Kuang, Payaraman dan Tanjung Batu.

Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang menjadi andalan di Kabupaten Ogan Ilir adalah sub sektor tanaman perkebunan. Jenis tanaman yang banyak diusahakan meliputi tanaman perkebunan rakyat yang terdiri atas tanaman karet, kelapa, kelapa sawit dan tebu, serta perkebunan besar yang mengusahakan tanaman karet, kelapa sawit dan tebu. Jenis tanaman perkebunan rakyat yang paling menonjol diusahakan adalah karet, kemudian disusul kelapa sawit dan kelapa.

Dilihat dari data yang ada, menunjukkan bahwa total pemanfaatan ruang untuk lahan/areal perkebunan besar di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 149.778,72 hektar. Dengan demikian wilayah Kabupaten Ogan Ilir masih perlu pengembangan penanaman komoditi perkebunan dengan penambahan areal/luas tanam di wilayah-wilayah kecamatan yang memiliki potensi relatif besar.

Peruntukan Budidaya Peternakan diarahkan dilokasi yang sudah mempunyai aktivitas atau kegiatan peternakan dan kawasan perkebunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi

kawasan peternakan. Kawasan peternakan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir diarahkan di Kecamatan Indralaya Utara seluas 132, 98 Ha, Kecamatan Payaraman seluas 44,12 Ha, Kecamatan Pemulutan 1,12 Ha, Kecamatan Rantau Alai 18,52 Ha, Kecamatan Sungai Pinang 3,92 Ha, Kecamatan Tanjung Batu 40,79 Ha dan Kecamatan Tanjung raja Seluas 21, 33 Ha. Dengan total keseluruhan seluas 262,78 Ha.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari areal budidaya kolam, keramba/waring tancap, keramba jaring apung, Kerung puluh berlokasi menyebar di 16 kecamatan dalam kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah keseluruhan 207,42 Ha.

Mengingat lokasi perikanan budidaya menyebar di kecamatan-kecamatan dengan lokasi-lokasi yang sulit dispasialkan, arahan peruntukan perikanan budidaya di peta pola ruang mash berupa kawasan perkebunan.

Peruntukan perikanan tangkap diarahkan di daerah alur-alur sungai dan rawa yang lokasinya menyebar di 16 Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah keseluruhan 13.756,69 Ha.

4. Kawasan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Muara Kuang, Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Lubuk Keliat.

Kawasan peruntukan pertambangan Batubara terletak di kecamatan Muara Kuang, kecamatan Rambang Kuang, kecamatan Payaraman, kecamatan Lubuk Keliat dan kecamatan Tanjung Batu.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Arahan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Ogan Ilir antara lain sebagai berikut :

- Arah pengembangan Kawasan industri diprioritaskan untuk skala industri besar terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Pemulutan dan Kecamatan Pemulutan Barat, dengan luas minimal 50 (lima puluh) hektar.
- Kawasan peruntukan industri terdiri dari industri kecil dan menengah menyebar di seluruh kecamatan dalam kabupaten Ogan Ilir.

6. Kawasan Peruntukan Wisata

Kawasan wisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata. Kriteria peruntukan wisata mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Ogan Ilir.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Ogan Ilir hingga tahun 2032 seluas 8.587,92 Ha. Pengembangan permukiman ini diarahkan pada wilayah-wilayah yang secara eksisting sudah menjadi permukiman dan perluasannya, baik permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan dengan memperhatikan kesesuaian lahannya.

Kawasan perdesaan diarahkan untuk hunian kepadatan rendah (jarang), bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap tanah, dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas masyarakat desa maupun terhadap potensi lingkungannya (pertanian, peternakan, perkebunan). Kawasan transmigrasi juga termasuk dalam kawasan ini. Kawasan yang dialokasikan untuk pengembangan Transmigrasi di Kabupaten Ogan Ilir diarahkan pada kecamatan – kecamatan yang memiliki wilayah yang relatif luas dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, seperti Kecamatan Muara Kuang, dan Indralaya Utara. Penyebaran kawasan perdesaan terdapat di setiap kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir dengan luas keseluruhan 3.100,18 Ha

Kawasan perkotaan diarahkan untuk hunian kepadatan sedang – tinggi, pengembangan bangunan vertikal, kegiatan untuk perdagangan dan jasa skala regional, industri non polutan yang berorientasi pasar, dengan penyebaran di Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara, Indralaya Selatan, Pemulutan, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Payaraman, Sungai Pinang, Muara Kuang dan Kandis. Luas peruntukan kawasan perkotaan adalah seluas 5.487,73 Ha.

8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan Peruntukan lainnya di Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari kawasan militer dan kawasan perkantoran. Kawasan Militer ini merupakan Kawasan Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdik Armed). Kawasan ini terletak di Kecamatan Rantau Alai dengan luas 50 Ha. Sedangkan kawasan perkantoran merupakan kawasan terpadu kabupaten Ogan Ilir seluas 76,6 hektar yang terdiri dari kantor pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, DPRD, Komplek perumahan dinas, rumah sakit, sarana olahraga dan fasilitas penunjang lainnya.

F. Wilayah Rawan Bencana

1. Banjir

Bencana yang paling mungkin terjadi di Kabupaten Ogan Ilir adalah banjir dan kebakaran lahan. Banjir diakibatkan oleh luapan air sungai-sungai besar seperti Sungai Ogan, Sungai Rambang. Hal ini dikarenakan oleh perilaku manusia dalam kegiatan budidaya yang berlebihan dan kurang memperhatikan pentingnya kelestarian lingkungan disamping dikarenakan kondisi topografi yang relatif datar mencapai 0 – 2 %. Daerah rawan banjir meliputi kawasan sekitar Sungai Ogan yaitu Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kecamatan Indralaya, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Rantau Alai dan Kecamatan Muara Kuang serta kawasan sekitar Sungai Rambang yaitu Kecamatan Rambang Kuang.

Tabel II.7.
Persentase Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)	2020 (Ha)
1.	Luas wilayah kebanjiran	-	51.406	3.045,57	1.462,96	3.675,83
2.	Luas Seluruh Wilayah	-	246.137	246.137	246.137	246.137
3.	Rasio (1/2.)	-	0,209	0,012	0,006	0,015

Sumber: Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ogan Ilir, 2021

Luas wilayah banjir yang menggenangi Kabupaten Ogan Ilir teridentifikasi selama 3 tahun yaitu tahun 2018 hingga 2019 terus mengalami penurunan dari 51.406 Ha pada tahun 2017 dan terus menyusut pada tahun 2019 menjadi 1.462 Ha, meskipun pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi seluas 3.675,83 Ha. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa adanya antisipasi lebih dini terkait bencana banjir yang ada di Kab. Ogan Ilir utamanya perumahan di sekitar Sungai Ogan.

Tabel II.8.

**Persentase luas Wilayah Kebanjiran Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	Rasio
1.	Muara Kuang	2710,8	0,0903577
2.	Rambang Kuang	-	-
3.	Lubuk Keliat	790,03	0,0381644
4.	Tanjung Batu	-	-
5.	Payaraman	175	0,0097219
6.	Rantau Alai	-	-
7.	Kandis	-	-
8.	Tanjung Raja	-	-
9.	Rantau Panjang	-	-
10.	Sungai Pinang	-	-
11.	Pemulutan	-	-
12.	Pemulutan Selatan	-	-
13.	Pemulutan Barat	-	-
14.	Indralaya	-	-
15.	Indralaya Utara	-	-
16.	Indralaya Selatan	-	-
Jumlah		3675,83	0,015

Sumber: Badan Penangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ogan Ilir, 2021

Distribusi luasan banjir di tiap kecamatan memang tidak semua terdampak banjir. Namun beberapa kecamatan di Ogan Ilir ternyata mengalami kebanjiran seperti di Kecamatan Muara Kuang seluas 2.710,8 Ha. Dampak banjir ini merupakan dampak terbesar pada tahun 2020 dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Kebakaran Lahan

Sedangkan kebakaran lahan disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan perilaku masyarakat dalam pembukaan lahan. Daerah rawan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir meliputi Kecamatan Indralaya Utara dan Kecamatan Pemulutan.

**Tabel II.9.
Desa Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Ilir**

No	Kecamatan	Nama Desa
1	Indralaya Utara	Desa Suka Mulia
		Desa Soak Batok
		Desa Sungai Rambutan
		Desa Parit
		Desa Palem Raya
		Desa Pulau Semambu
		Desa Tanjung Pering
		Desa Lorok
		Desa Payakabung
		Desa Tanjung Baru

No	Kecamatan	Nama Desa
		Desa Pulau Kabal
2	Sungai Pinang	Desa Sungai Pinang Jaya
		Desa Sungai Pinang Lagati
3	Rantau Alai	Desa Suka Nanti
		Desa Kelampaian
		Desa Mekar Sari
4	Muara Kuang	Desa Rama Kasih
		Desa Rantau Sialang
		Desa Tanabang Ilir
5	Pemulutan Barat	Arisan Jaya
		Desa Talang Pangeran Barat
		Desa Talang Pangeran Ulu
		Desa Ulak Kembahang I
6	Pemulutan	Desa Simpang Pelabuhan Dalam
		Desa Pelabuhan Dalam
		Desa Muara Baru
		Desa Babatan Saudagar
		Desa Ibul Besar II
		Desa Mekar Jaya
		Desa Kedukan Bujang
		Desa Ibul Besar I
		Desa Ibul Besar III
		Desa Muara Dua
		Desa Teluk Kecapi
		Desa Aurstanding
7	Tanjung Raja	Desa Seri Dalam
		Desa Tanjung Temiang
8	Payaraman	Desa Seri Kembang II
		Desa Talang Seleman
10	Indralaya Selatan	Desa Tanjung Dayang Selatan
		Desa Meranjat I
		Desa Meranjat III
11	Tanjung Batu	Desa Burai

Sumber : BPBD Kab. Ogan Ilir 2019

Luas lahan yang terdampak kebakaran di Kabupaten Ogan Ilir baru tercatat di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 dimana luasannya mencapai 414,63 Ha pada tahun 2018, 1.053,4 Ha pada akhir tahun 2019 dan 118,05 pada tahun 2020. Data ini menggambarkan adanya kebakaran di Sumatera Selatan utamanya di Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan, dan untuk mencegah terjadinya kenaikan diperlukan upaya untuk pembuatan kanal yang tersekat pada zona gambut yang mudah terbakar Ketika musim kemarau datang.

Tabel II.10.
Luas Wilayah Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas wilayah Kebakaran Lahan dan Hutan	-	-	414,63	1.053,4	118,05

Sumber: Badan Penangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ogan Ilir, 2021

3. Kekeringan

Luas kekeringan yang dialami oleh Kab. Ogan Ilir mencapai 766,6 Ha pada tahun 2019. Rasio kekeringan yang ada di Kab. Ogan Ilir adalah 0,003 per ha dan pada tahun 2020 tidak ada laporan, hal ini berarti jumlah wilayah yang mengalami kekeringan masih bisa diatasi oleh pemerintah daerah melalui beberapa progam pemerintah daerah.

Tabel II.11.
Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)	2020
1.	Luas wilayah Kekeringan	-	-	-	766,6	-
2.	Luas Seluruh Wilayah	246.137	246.137	246.137	246.137	246.137
3.	Rasio (1/2.)	-	-	-	0,003	-

Sumber: Badan Penangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ogan Ilir, 2021

Tabel II.12.
Rasio luas Wilayah Kekeringan Menurut Kecamatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah Kekeringan (Ha)	Rasio
1.	Muara Kuang	-	-
2.	Rambang Kuang	-	-
3.	Lubuk Keliat	-	-
4.	Tanjung Batu	-	-
5.	Payaraman	-	-
6.	Rantau Alai	-	-
7.	Kandis	-	-
8.	Tanjung Raja	-	-
9.	Rantau Panjang	-	-
10.	Sungai Pinang	-	-
11.	Pemulutan	-	-
12.	Pemulutan Selatan	-	-
13.	Pemulutan Barat	-	-
14.	Indralaya	-	-
15.	Indralaya Utara	-	-
16.	Indralaya Selatan	-	-
	Jumlah	-	-

Sumber: Badan Penangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ogan Ilir, 2021

Penentuan luas kekeringan berdasarkan laporan dari masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 pemerintah daerah kabupaten

Ogan Ilir melalui BPBD tidak menerima laporan bencana kekeringan, sehingga data luasan kekeringan pada tahun tersebut tidak ada.

Dalam menghadapi bencana kekeringan biasanya pemerintah daerah tanggap dengan memberikan bantuan air bersih dan melakukan program preventif agar tidak terjadi kekeringan yang menimbulkan produktivitas pertanian penduduk berkurang dan pada akhirnya menciptakan kekhawatiran bagi para petani dan usaha lain yang berkaitan dengan pertanian.

2.1.2. Aspek Demografi

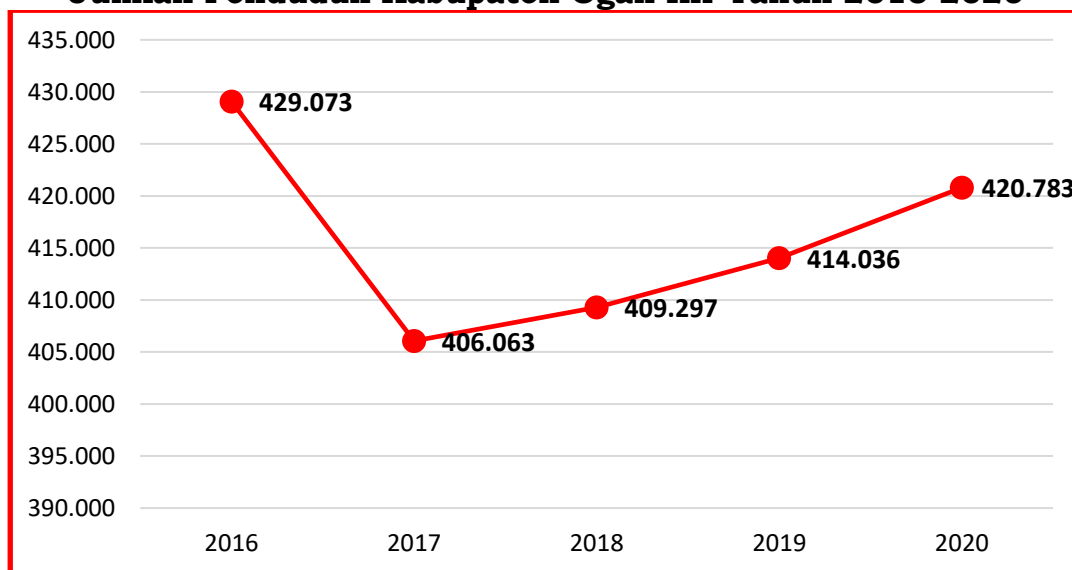
Kependudukan atau demografi merupakan permasalahan yang sangat penting karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan maupun lingkungan. Selain itu, peran penduduk dalam pembangunan sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga penduduk dapat menjadi potensi atau permasalahan pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan bila disertai dengan kualitas yang baik dan tinggi, sebaliknya jika memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan. Kabupaten Ogan Ilir memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.

Masalah kependudukan yang menjadi fokus bahasan antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk yang merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Suatu analisis kependudukan menjadi penting mengingat sifat dan profil penduduk yang selalu mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan waktu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena perubahan komponen-komponen penduduk seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Dengan tersedianya data kependudukan memungkinkan dilakukan suatu analisis mengenai keadaan kependudukan di suatu daerah saat ini.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan penduduk dimana pada tahun 2020 mencapai 420.783 jiwa dengan pertumbuhan penduduk terakhir sebesar 1,63 persen. Sebagian besar penduduk berdomisili di Kecamatan Tanjung Batu sebanyak 47.215 jiwa atau 11,22 persen penduduk. Namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan Sungai Pinang dengan besaran masing-masing 633,06 jiwa/km² dan 620,79 jiwa/km².

Gambar II.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ogan Ilir, Tahun 2021

Tabel II.13.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Indralaya	41.497	9,86	409,97	2,10
2	Indralaya Utara	38.168	9,07	80,81	2,77
3	Indralaya Selatan	22.539	5,36	224,81	0,42
4	Pemulutan	45.539	10,82	370,48	2,23
5	Pemulutan Barat	13.901	3,30	231,68	2,59
6	Pemulutan Selatan	17.019	4,04	276,78	3,19
7	Tanjung Batu	47.215	11,22	179,01	1,46

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk (%)
8	Payaraman	26.234	6,23	145,28	1,95
9	Tanjung Raja	44.574	10,59	633,06	1,08
10	Sungai Pinang	26.458	6,29	620,79	1,73
11	Rantau Panjang	17.221	4,09	421,57	1,12
12	Muara Kuang	19.964	4,74	66,38	(0,11)
13	Rambang Kuang	20.632	4,90	39,02	0,79
14	Lubuk Keliat	17.985	4,27	86,60	0,85
15	Rantau Alai	10.987	2,61	176,75	1,01
16	Kandis	10.850	2,58	215,92	1,90
Jumlah		420.783	100,00	157,83	1,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ogan Ilir, Tahun 2021

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Ogan Ilir utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Ogan Ilir. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Ogan Ilir antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan

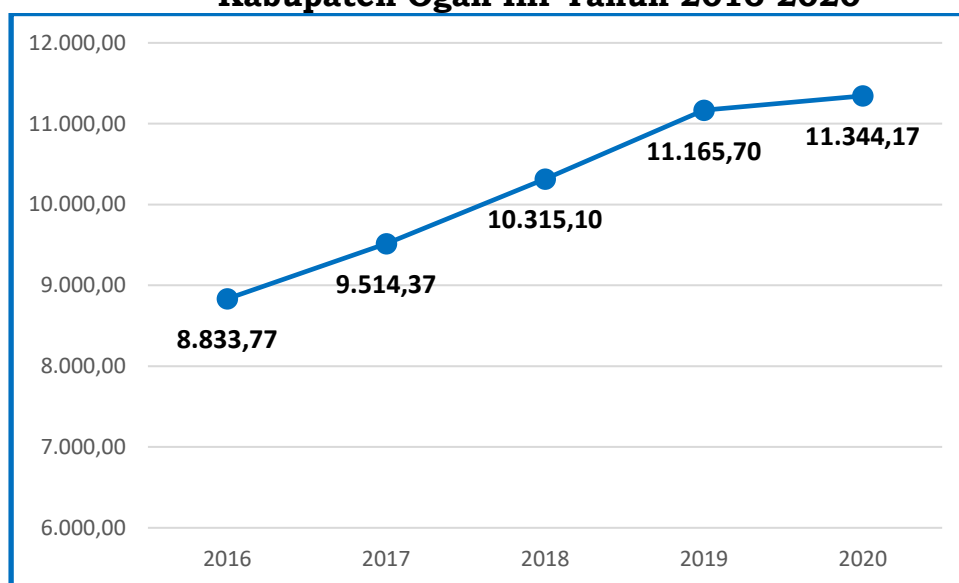
dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Gambar II.4
Nilai PDRB adh Berlaku
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

Tabel II.14.
Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,55	22,06	21,26	20,38	20,98
B	Pertambangan dan Penggalian	7,84	7,65	7,92	8,18	7,71

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
C	Industri Pengolahan	11,21	11,52	11,79	11,81	11,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	17,46	17,55	17,37	17,14	16,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,48	17,59	18,63	19,55	19,40
H	Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,30	1,35	1,41	1,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,21	4,43	4,66	4,94	4,70
J	Informasi dan Komunikasi	0,31	0,33	0,34	0,34	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70	1,69	1,63	1,53	1,52
L	Real Estate	2,65	2,70	2,77	2,84	2,93
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,99	9,82	8,98	8,57	9,00
P	Jasa Pendidikan	1,96	1,90	1,84	1,83	1,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,72	0,70	0,70	0,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,51	0,49	0,50	0,52	0,55
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

Tabel II.15.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,46	1,94	2,10	1,29	1,34
B	Pertambangan dan Penggalan	-0,32	4,21	6,86	7,52	(1,04)
C	Industri Pengolahan	6,23	5,96	6,79	6,53	0,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,98	8,94	9,05	9,31	15,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,78	8,54	8,67	8,92	4,92
F	Konstruksi	9,94	7,24	5,65	6,16	(1,15)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,90	8,12	8,03	7,96	(1,84)
H	Transportasi dan Pergudangan	9,06	9,00	9,48	10,62	(4,81)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,41	8,15	9,43	9,66	(6,16)
J	Informasi dan Komunikasi	7,10	8,32	7,67	8,29	12,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,48	2,45	1,01	0,03	1,06
L	Real Estate	8,60	7,51	7,87	7,92	2,12
M,N	Jasa Perusahaan	6,42	7,34	9,22	9,92	(1,12)
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	4,32	3,13	3,29	3,93

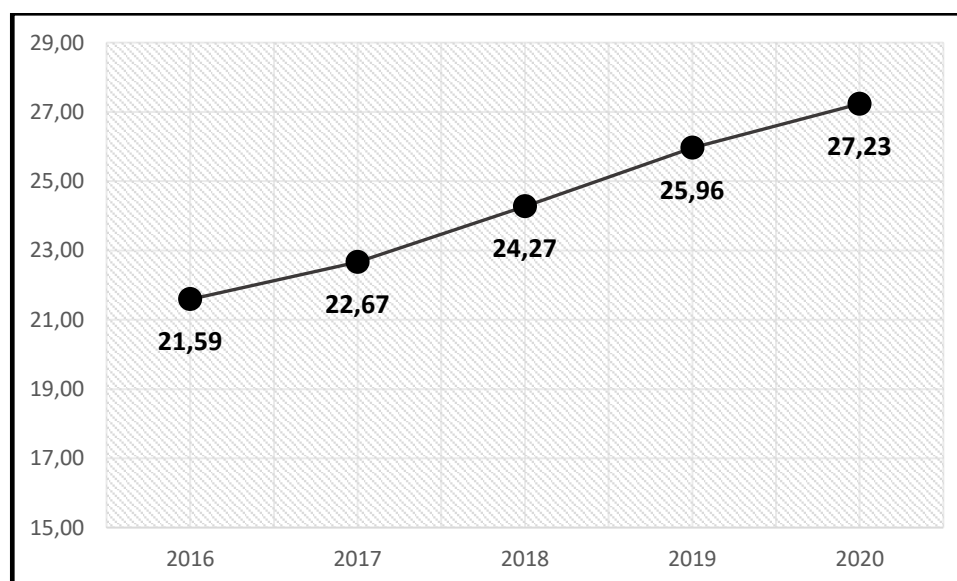
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
P	Jasa Pendidikan	5,45	4,24	4,38	4,76	(1,27)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,30	6,73	3,49	5,74	9,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,45	1,14	5,67	6,21	4,91
PDRB		5,13	5,14	5,18	5,19	0,14

Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

b. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Gambar II.5
PDRB per Kapita
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020



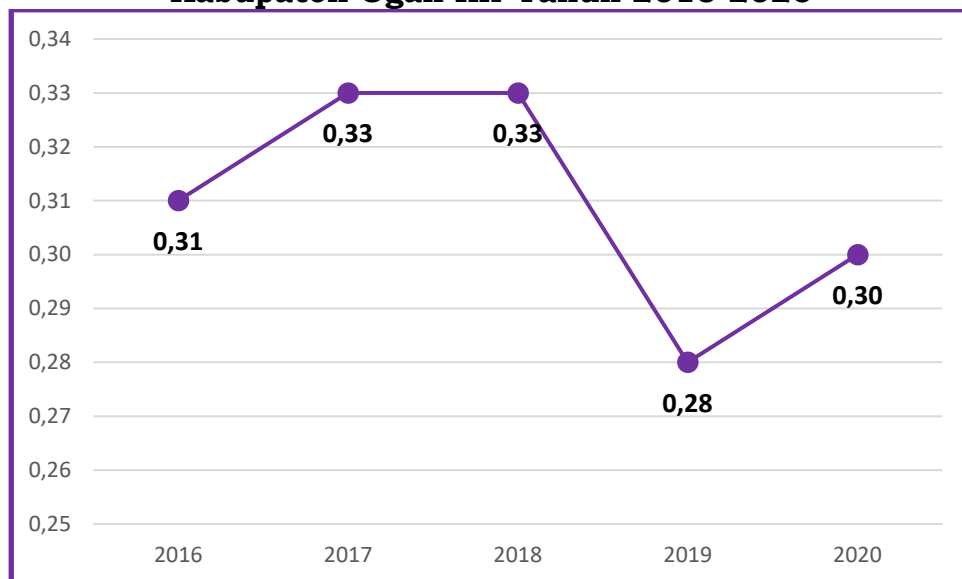
Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

c. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara

horizontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir adalah sulitnya kondisi geografis wilayah. Selain itu, walaupun pemerataan cukup baik, namun dari segi kualitas masih perlu banyak perbaikan.

Gambar II.6
Indeks Gini
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

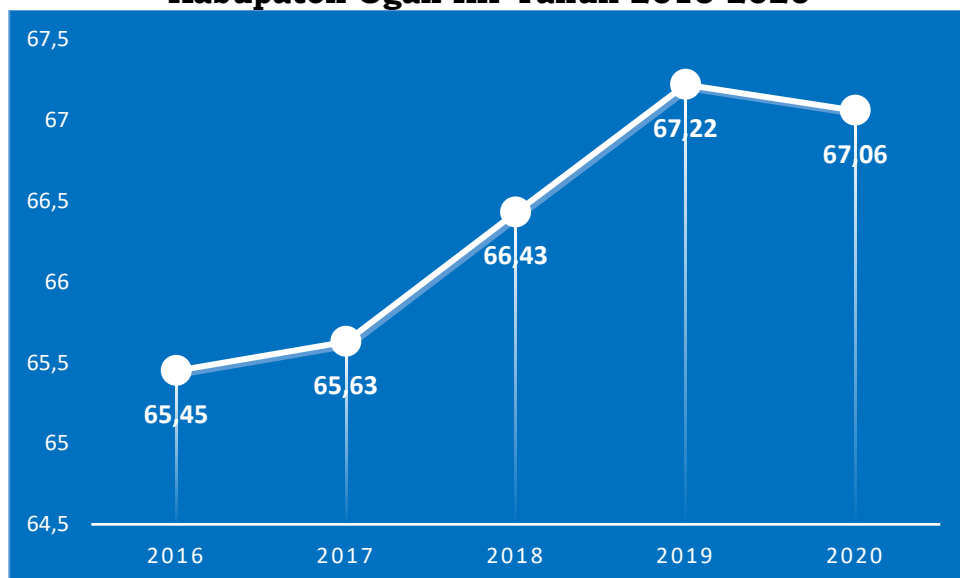
Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Ogan Ilir dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Ogan Ilir.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di

semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar II.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

Tabel II.16.
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	65,45	65,63	66,43	67,22	67,06
Indeks Kesehatan	68,69	68,80	69,17	69,55	69,97
Angka Harapan Hidup	64,65	64,72	64,96	65,21	65,48
Indeks Pendidikan	58,59	58,65	59,38	60,31	60,37
Harapan Lama Sekolah	12,26	12,27	12,28	12,29	12,30
Rata-rata Lama Sekolah	7,36	7,37	7,58	7,85	7,86
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan	9.846	9.972	10.410	10.777	10.424

Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

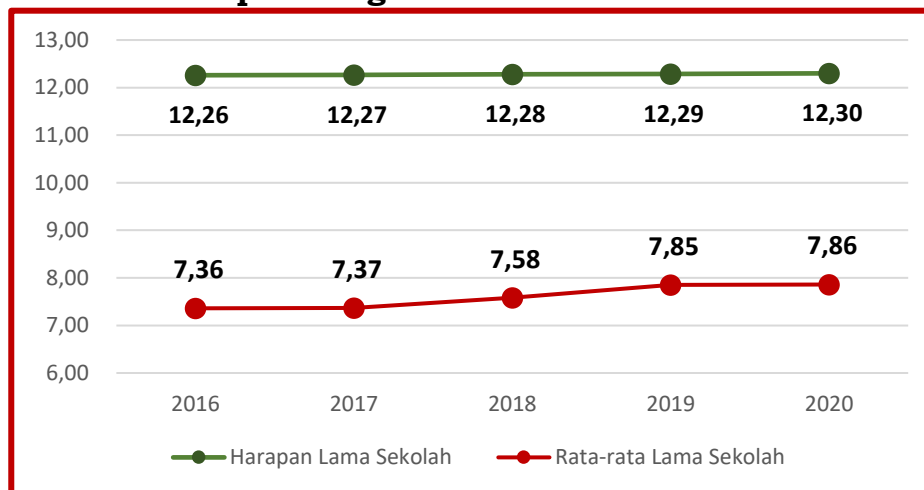
b. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Gambar II.8
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

Di Kabupaten Ogan Ilir, angka rata-rata lama sekolah semakin meningkat dimana pada tahun 2020 mencapai 7,86 tahun yang mengindikasikan bahwa masyarakat berumur lebih dari 25 tahun rata-rata telah mengenyam dunia pendidikan selama 7-8 tahun.

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator

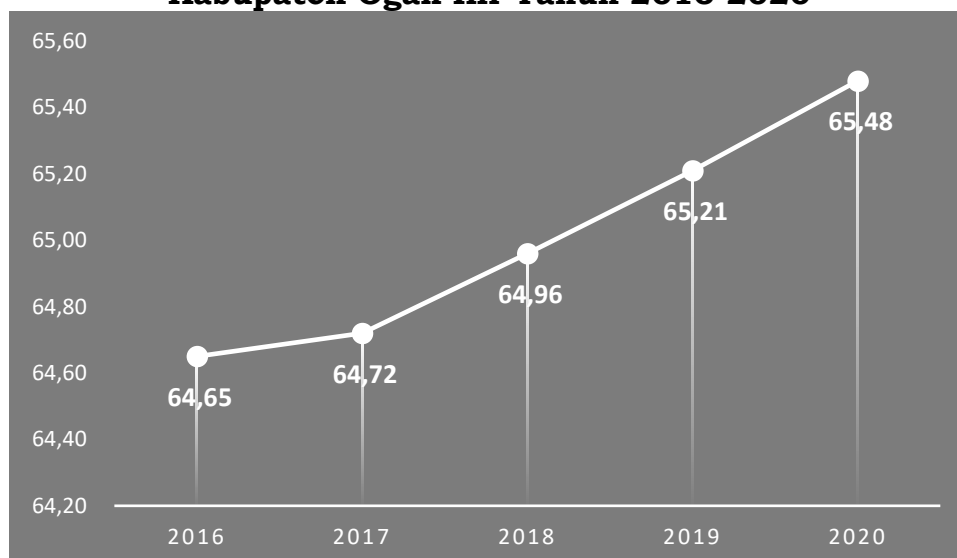
yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Di Kabupaten Ogan Ilir, Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 12,30 tahun pada tahun 2020. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang menginjak usia 7 tahun pada tahun 2020 memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga 12,30 tahun atau mencapai pendidikan tinggi.

c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Gambar II.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020

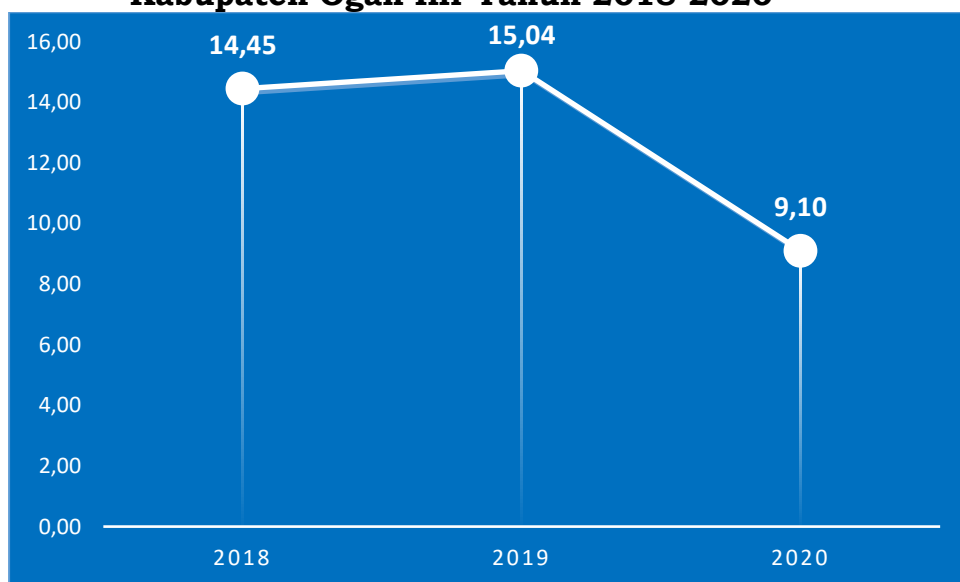


Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

Salah satu permasalahan kesehatan penting yang menjadi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kesehatan di Ogan Ilir adalah tingginya angka stunting di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini menjadikan Ogan Ilir termasuk dalam wilayah konvergensi Stunting. Terlihat bahwa angka stunting di Ogan Ilir cukup tinggi pada tahun 2020 dimana jumlah anak sangat pendek mencapai 658 anak dan anak pendek sebanyak 1.646 anak. Sesuai dengan hasil dari metode pengukuran data prevalansi stunting berdasarkan E-PPGBM. Pada tahun 2018 data prevalansi stunting di angka 14,45 persen meskipun data tersebut belum maksimal selain dikarenakan E-PPGBM baru disosialisasikan juga terkendala SDM yang bertugas melakukan entri data belum begitu mahir dan sering terkendala sinyal. Pada tahun 2019 data prevalansi stunting naik di angka 15,04 persen, dengan data 697 orang stunting dan yang diukur sebanyak 4.634 balita. Akan tetapi data E-PPGBM pada tahun ini juga belum maksimal dikarenakan selain masalah SDM dan sinyal, aplikasi juga sering kehilangan data.

Pada tahun 2020 data prevalansi stunting berdasarkan data yang dimasukkan di aplikasi E-PPGBM sebesar 9,1 persen. Data ini seolah menggambarkan terjadinya penurunan stunting di Kabupaten Ogan Ilir, akan tetapi turunnya angka tersebut disebabkan belum seluruh balita yang diukur datanya dimasukkan ke dalam aplikasi E-PPGBM atau baru 60,7 persen data yang masuk ke aplikasi tersebut.

Gambar II.10
Angka Stunting
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Tabel II.17.

**Angka Stunting Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2020**

No	Kecamatan	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
1	Muara Kuang	5	53	1101	4
2	Tambang Rambang	36	103	1211	80
3	Betung	12	15	1348	2
4	Tanjung Batu	68	175	1512	1
5	Sri Tanjung	38	160	1383	3
6	Payaraman	51	142	1123	71
7	Lebung Bandung	2	12	240	14
8	Mekar Sari	2	33	443	2
9	Kandis	5	11	835	59
10	Tanjung Raja	8	76	988	3
11	Kerinjing	13	36	1135	38
12	Rantau Panjang	0	9	892	23
13	Sungai Pinang	10	27	697	178
14	Pemulutan	73	228	787	6
15	Pegayut	72	118	1035	30
16	Sungai Lebung	58	81	708	25
17	Sungai Keli	20	35	240	20
18	Talang Pangeran	50	108	940	10
19	Indralaya	102	104	1795	25
20	Talang Aur	4	43	608	0
21	Payakabung	5	34	723	0
22	Simpang Timbangan	8	4	1264	0
23	Palem Raya	5	15	504	2
24	Kota Terpadu Mandiri Rambutan	8	18	294	3
25	Tebing Gerinting	3	6	636	4
OGAN ILIR		658	1.646	22.442	603

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Beberapa fasilitas kesehatan mengalami peningkatan capaiannya seperti, jumlah rumah sakit yang bertambah 1 unit di tahun 2018, serta jumlah dokter, tenaga medis, bidan, perawat yang meningkat di setiap tahunnya.

**Tabel II.18.
Indikator Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020**

No	Indikator Fasilitas Kesehatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	25	25	25	25	25
2	Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan	%	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25
3	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,58	0,62	0,61	0,57	0,59
4	Jumlah klinik	Unit	0	0	0	9	10
5	Rasio klinik per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0	0	0	0,22	0,24
6	Jumlah puskesmas pembantu	Unit	16	16	16	17	15
7	Cakupan Puskesmas	%	6,64	6,64	6,64	7,05	6,22

No	Indikator Fasilitas Kesehatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Pembantu Terhadap Jumlah Desa						
8	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,37	0,39	0,39	0,41	0,36
9	Jumlah Rumah Sakit	Unit	2	2	3	3	3
10	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,0047	0,0049	0,0073	0,0072	0,0071
11	Jumlah Rumah Sakit bersalin	Unit	4	4	0	0	0
12	Jumlah Dokter	orang	38	39	67	75	84
13	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,8856	0,9604	1,636	1,811	1,996
14	Jumlah Bidan	orang	239	249	762	770	747
15	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	5,57	6,13	18,61	18,59	17,75
16	Jumlah perawat	orang	248	253	594	606	548
17	Rasio tenaga medis perawat per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	5,77	6,23	14,51	14,63	13,02
18	Jumlah tenaga medis	orang	525	541	1423	1451	1379
19	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	12,23	13,32	34,77	35,04	32,77

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Kebudayaan

Kebudayaan adalah hasil cipta karya dan karsa manusia. Wujud budaya dapat berupa artefak budaya maupun aspek nilai dan norma yang melekat dalam entitas masyarakat tersebut. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan suatu wilayah.

jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2015-2020 tidak mengalami perubahan signifikan dan yang paling banyak memiliki grup kesenian yaitu Kecamatan Tanjung Raja.

Tabel II.19.
Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2015-2020

No	Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indaralaya	-	1	1	1	1	1
2	Indaralaya Utara	-	1	1	1	1	1

No	Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Indaralaya Selatan	-	-	-	-	-	-
4	Tanjung Batu	-	1	1	1	1	1
5	Payaraman	-	-	-	-	-	-
6	Rambang Kuang	-	-	-	-	-	-
7	Muara Kuang	-	-	-	-	-	-
8	Lubuk Keliat	-	-	-	-	-	-
9	Rantau Alai	-	-	-	-	-	-
10	Tanjung Raja	-	1	1	2	2	2
11	Sungai Pinang	-	-	-	-	-	-
12	Kandis	-	-	-	-	-	-
13	Rantau Panjang	-	-	-	-	-	-
14	Pemulutan	-	-	-	-	-	-
15	Pemulutan Selatan	-	-	-	-	-	-
16	Pemulutan Barat	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Ogan Ilir		-	4	4	5	5	5

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Jumlah Gedung Kesenian yang ada di Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun terakhir tidak ada penambahan jumlah gedung, untuk gedung kesenian yang paling banyak yaitu di Kecamatan Indralaya.

Tabel II.20.
Jumlah Gedung Kesenian Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2015–2020

No	Kecamatan	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indaralaya	-	-	-	1	1	1
2	Indaralaya Utara	-	-	-	-	-	-
3	Indaralaya Selatan	-	-	-	-	-	-
4	Tanjung Batu	-	-	-	-	-	-
5	Payaraman	-	-	-	-	-	-
6	Rambang Kuang	-	-	-	-	-	-
7	Muara Kuang	-	-	-	-	-	-
8	Lubuk Keliat	-	-	-	-	-	-
9	Rantau Alai	-	-	-	-	-	-
10	Tanjung Raja	-	-	-	-	-	-
11	Sungai Pinang	-	-	-	-	-	-
12	Kandis	-	-	-	-	-	-
13	Rantau Panjang	-	-	-	-	-	-
14	Pemulutan	-	-	-	-	-	-
15	Pemulutan Selatan	-	-	-	-	-	-
16	Pemulutan Barat	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Ogan Ilir		-	-	-	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, 2021

b. Pemuda dan Olahraga

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2015-2020 mengalami kenaikan terutama dari tahun 2015 hanya memiliki 16 klub olahraga dan mengalami kenaikan pada 2020 yaitu 35 Klub Olahraga.

Tabel II.21.
Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2015–2020

No	Kecamatan	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indaralaya	1	1	2	3	4	4
2	Indaralaya Utara	1	1	1	1	2	2
3	Indaralaya Selatan	1	1	1	1	2	2
4	Pemulutan	1	1	1	2	3	3
5	Pemulutan Barat	1	1	1	1	1	1
6	Pemulutan Selatan	1	1	1	1	2	2
7	Tanjung Batu	1	1	2	3	3	3
8	Payaraman	1	1	1	1	1	1
9	Tanjung Raja	1	2	2	3	4	4
10	Sungai Pinang	1	1	1	1	2	2
11	Rantau Panjang	1	1	1	1	2	2
12	Muara Kuang	1	1	1	1	1	1
13	Rambang Kuang	1	1	1	1	2	2
14	Lubuk Keliat	1	1	1	1	2	2
15	Rantau Alai	1	1	1	1	2	2
16	Kandis	1	1	1	1	2	2
Kabupaten Ogan Ilir		16	17	19	23	35	35

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Jumlah gedung olahraga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan yang artinya selalu ada pembangunan untuk gedung olahraga di Kabupaten Ogan Ilir. Pada tahun 2020 gedung olahraga di Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebanyak 1 gedung olahraga.

Tabel II.22.
Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016–2020

No	Kecamatan	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indaralaya	-	-	1	1	1
2	Indaralaya Utara	-	-	-	-	-
3	Indaralaya Selatan	-	-	-	-	-
4	Pemulutan	-	-	-	-	-
5	Pemulutan Barat	-	-	-	-	-
6	Pemulutan Selatan	-	-	-	-	-
7	Tanjung Batu	-	-	-	-	-
8	Payaraman	-	-	-	-	-
9	Tanjung Raja	-	-	-	-	-
10	Sungai Pinang	-	-	-	-	-
11	Rantau Panjang	-	-	-	-	-
12	Muara Kuang	-	-	-	-	-
13	Rambang Kuang	-	-	-	-	-
14	Lubuk Keliat	-	-	-	-	-
15	Rantau Alai	-	-	-	-	-
16	Kandis	-	-	-	-	-
Kabupaten Ogan Ilir		-	-	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Tabel II.23.
Perkembangan Keolahragaan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	58	58	60	63	83

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	18	21	23	24	24
Jumlah Pembinaan Atlet Muda	138	154	160	172	184
Jumlah Atlet Berprestasi	145	148	150	175	190
Jumlah Prestasi Olahraga	3	4	4	5	5
Jumlah Medali Atlet Muda	6	14	6	2	2

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Secara lebih detail, jumlah pelatih yang bersertifikat meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2020. Di awal periode terdapat 58 atlit yang bersertifikat meningkat menjadi 83 orang di tahun 2020. Sementara itu, jumlah pembinaan cabang olahraga juga terus meningkat dari 18 cabang olahraga di tahun 2016 menjadi 24 cabang olahraga di tahun 2020, meningkat sebanyak 6 cabang olahraga. Indikator selanjutnya adalah jumlah pembinaan atlit muda. Pada indikator ini jumlah atlit muda yang dibina meningkat dari 138 tahun 2016 menjadi 184 di tahun 2020.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pelatih, cabang olahraga serta atlit yang dibina, jumlah atlet berprestasi juga turut meningkat dari 145 di tahun 2016 menjadi 190 di tahun 2020. Sementara itu jumlah olahraga prestasi meningkat meskipun tidak signifikan dari 3 di tahun 2016 menjadi 5 di tahun 2020. Terakhir adalah jumlah medali yang diraih oleh atlit muda. Dalam periode 2016-2020 jumlah medali yang diraih adalah fluktuatif dan cenderung stagnan. Enam buah medali diraih di tahun 2016 dan 2018. Sementara itu, dari periode tersebut titik puncaknya adalah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 14 medali dan menurun di tahun 2019 dan 2020 dengan masing-masing hanya memperoleh 2 medali.

Dari sisi kepemudaan daerah, perkembangan kepemudaan di Kabupaten Ogan Ilir dijabarkan melalui beberapa indikator seperti jumlah pemuda berprestasi, jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan, jumlah organisasi pemuda yang aktif dan jumlah wirausaha muda.

Secara lebih detail, jumlah pemuda berprestasi di Kabupaten Ogan Ilir meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2016-2020. Di awal periode, jumlah prestasi adalah sebanyak 179 kemudian di akhir periode prestasi kepemudaan yang terdiri dari akademis, seni dan budaya serta olahraga meningkat menjadi 311. Lonjakan terbanyak adalah dari tahun 2018-2019 yaitu sebanyak 75 prestasi. Kemudian berkaitan dengan jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan, jumlah pemuda yang ikut serta dalam

aktivitas ini terus meningkat. Di tahun 2016 adalah sejumlah 46.555 pemuda dan di tahun 2020 adalah 59.695 pemuda.

Kemudian dari indikator jumlah organisasi pemuda yang aktif, selama hampir empat tahun hanya ada dua organisasi pemuda yang aktif. Ini kemudian bertambah satu organisasi di tahun 2020 menjadi 3 organisasi kepemudaan yang aktif. Kemudian indikator terakhir adalah jumlah wirausaha muda. Sebagaimana indikator lain mengalami peningkatan, Jumlah wirausaha muda yang aktif juga terus mengalami peningkatan. Diawali dari 15.910 pemuda di tahun 2016 menjadi 22.503 di tahun 2020.

Tabel II.24.
Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2015–2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	179	205	225	300	311
Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan	46.555	46.568	57.526	59.638	59.695
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	2	2	2	3	3
Jumlah Wirausaha Muda	15.910	18.872	22.400	22.464	22.503

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, 2021

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Ogan Ilir.

a. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Ogan Ilir relatif

belum optimal disediakan sehingga analisis ini akan mendukung perumusan kebijakan dalam pemerataan infrastruktur dasar pembangunan.

Panjang jalan di Kabupaten Ogan Ilir menurut data jalan secara umum mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 mencapai 1.405,49 km. Jalan di Kabupaten Ogan Ilir terbagi atas empat status jalan yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Selama 5 tahun dari tahun 2016-2020, hanya jalan provinsi saja yang mengalami peningkatan atau penambahan jumlah Panjang jalan yaitu dari 123,13 km menjadi 167,20 km. Dari panjang jalan tersebut, rasio jalan per jiwa selama kurun waktu 5 tahun berkisar pada angka 0,0032 hingga 0,0034 km/jiwa.

Tabel II.25.
Status dan peran/fungsi jalan di Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016 - 2020

Status jalan	Panjang jalan (km)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan nasional	64,15	64,15	64,15	64,15	64,15
Jalan provinsi	123,13	123,13	145,13	145,13	167,20
Jalan kabupaten	876	876	876	876	876
Jalan desa	298,15	298,15	298,15	298,15	298,14
Total	1.361,43	1.361,43	1.383,43	1.383,43	1405,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ogan Ilir, 2021

Tabel II.26.
Rasio Jalan dengan Penduduk di Kab. Ogan Ilir
Tahun 2015- 2020

Tahun	Jalan (km)	Penduduk (jiwa)	Rasio (km/jiwa)
2015	1380,66	409.171	0,30
2016	1361,43	429.037	0,32
2017	1361,43	406.063	0,30
2018	1383,43	409.297	0,30
2019	1383,43	414.036	0,30
2020	1383,43	416.549	0,30

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ogan Ilir 2021

Pada tahun 2020, secara umum jalan di kabupaten Ogan ilir yang termasuk dalam kondisi baik sebagian besar di dalam wewenang kabupaten/jalan kabupaten yaitu sekitar 242,05 km. Sedangkan jalan desa juga semakin banyak yg diperbaiki untuk percepatan akses ekonomi masyarakat di Kab. Ogan Ilir. Meskipun begitu, secara umum jalan dengan kondisi rusak juga cukup mendominasi dengan panjang jalan rusak sepanjang 345,64 km dan rusak berat 171,48 km .

Tabel II.27.
Kondisi jalan Menurut Jenisnya Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2020

Jenis Jalan	Kondisi					
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat	Jumlah	Persentase (%)
Jalan Nasional	12,77	16,38	35,00	-	64,15	4,56
Jalan Provinsi	63,32	28,07	3,78	4,84	167,20	11,89
Jalan Kabupaten	242,05	243,89	218,58	171,48	876,00	62,33
Jalan Desa	162,05	60,24	75,85	-	298,14	21,21
Total	476,90	367,40	345,64	171,48	1.405,49	100,00

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Jenis sarana sanitasi yang dipakai rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir antara lain toilet siram, pipa saluran pembuangan, tangki septik, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik dan jamban cemplung dengan segel slab. Rumah tangga bersanitasi merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri disetiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri.

Tabel II.28.
Capaian Akses Sanitasi KK
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

No	Kecamatan	Total Desa	Capaian akses sanitasi KK (%)
1	Muara Kuang	14	89,31
2	Rambang Kuang	13	78,09
3	Lubuk Keliat	10	87,98
4	Tanjung Batu	21	97,60
5	Payaraman	13	98,79
6	Rantau Alai	13	74,12
7	Kandis	12	65,30
8	Tanjung Raja	19	97,60
9	Rantau Panjang	12	63,53
10	Sungai Pinang	13	94,25
11	Pemulutan	25	36,45
12	Pemulutan Selatan	15	34,50
13	Pemulutan Barat	11	66,13
14	Indralaya	20	80,64
15	Indralaya Utara	16	83,41
16	Indralaya Selatan	14	91,85
Rata - rata capaian sanitasi		241	75,93

Sumber : Web STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Rumah tangga pengguna air bersih adalah prosentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga tergambar seperti pada tabel berikut ini.

Tabel II.29.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Di Kabupaten Ogan Ilir

Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	56,4	58,38	61,14	68,19	73,08

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2021

Konsumsi air bersih tiap tahun semakin meningkat dibuktikan dengan jumlah kebutuhan rumah tangga yang mengakses air bersih sebanyak 56,4 persen pada tahun 2016 hingga pada tahun 2020 mencapai titik tertinggi yaitu 73,08 persen rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir telah menggunakan air bersih baik dari pihak pemerintah melalui PDAM daerah maupun pihak swasta.

Untuk kawasan kumuh berdasarkan hasil kajian dari kondisi eksisting saat ini pada tingkat kota kecamatan yang ditinjau berdasarkan kepadatan penduduk (>16 jiwa/ha) dan kepadatan rumah/bangunan (> 3,5 unit/ha), terdapat tujuh kelurahan/desa yang diusulkan menjadi lokasi kawasan kumuh dan telah ditinjau melalui identifikasi kawasan permukiman kumuh. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Ulak Segelung dengan kepadatan penduduk 80 penduduk per hektar, sedangkan kepadatan bangunan tertinggi berada di Ibuk Besar II dengan kepadatan bangunan mencapai 28 unit per hektar. Secara rinci hasil tinjauan lokasi kawasan kumuh, ditampilkan sebagai berikut.

Tabel II.30.
Hasil Tinjauan Usulan Lokasi Kawasan Kumuh Di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

No	Kelurahan/desa	Luas (ha)	Penduduk		Rumah dan Bangunan	
			Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/ha)	Jumlah (unit)	Kepadatan (unit/ha)
1	Ulak Segelung	2	1176	588	-	0,00
2	Indralaya Mulya	4	885	248,60	177	49,72
3	Pegayut	2	441	176,40	85	34
4	Pipa Putih	2	409	178,60	91	39,74
5	Ibuk Besar II	4	533	292,86	111	60,99
6	Ibuk Besar III	4	-	0,00	0,00	0,00
7	Sungai Buaya	1,4	501	207,88	95	39,42

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, 2021

b. Perumahan dan Pemukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Ogan Ilir adalah pemenuhan rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat

dikatakan bahwa perumahan rakyat dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh rumah tangga pada umumnya menggunakan dua sumber air, yaitu air tanah atau air PDAM sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan air bersih, sedangkan sebagian yang lain mengkombinasikan penggunaan antara sumber air tanah dengan air PDAM.

Tabel II.31.
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 s.d 2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengguna Air Bersih	44.557	45.701	48.271	51.584	58.706	64.200
2	Jumlah Rumah Tangga	79.409	81.030	82.684	84.371	86.093	87.850
3	<i>Persentase</i>	<i>56,11</i>	<i>56,40</i>	<i>58,38</i>	<i>61,14</i>	<i>68,19</i>	<i>73,08</i>

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2021

Rumah tangga pengguna air bersih adalah prosentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga tergambar seperti pada tabel di atas.

Konsumsi air bersih tiap tahun semakin meningkat dibuktikan dengan jumlah kebutuhan rumah tangga yang mengakses air bersih sebanyak 56,4 persen pada tahun 2016 hingga pada tahun 2020 mencapai titik tertinggi yaitu 73,08 persen rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir telah menggunakan air bersih baik dari pihak pemerintah melalui PDAM daerah maupun pihak swasta.

Pada Tabel terlihat jumlah pengguna air bersih di Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan yang cukup lambat atau sedikit selama kurun waktu 5 tahun (2015-2020). Pertambahan jumlah pengguna air bersih hanya bertambah sekitar 3-6 ribu rumahtangga per tahun.

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rumahtangga Pengguna Air Bersih		
		Jumlah Pengguna Air Bersih	Jumlah Desa Terjangkau PDAM	Jumlah Desa
1	Muara Kuang	988	6	14
2	Rambang Kuang	0	0	13
3	Lubuk Keliat	149	2	10
4	Tanjung Batu	1335	2	21
5	Payaraman	35	1	13
6	Rantau Alai	582	3	13
7	Kandis	0	1	12
8	Tanjung Raja	899	6	19
9	Rantau Panjang	832	6	12
10	Sungai Pinang	2510	10	13
11	Pemulutan	947	3	25
12	Pemulutan Selatan	0	0	15
13	Pemulutan Barat	0	0	11
14	Indralaya	2145	6	20
15	Indaraya Utara	489	1	16
16	Indralaya selatan	317	3	14
Kabupaten Ogan Ilir		11.228	50	241

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2021

Pada Tabel diatas terlihat jumlah pengguna air bersih di setiap kecamatan dalam wilayah administrative Kabupaten Ogan Ilir. Persentase desa yang terjangkau fasilitas PDAM baru mencapai **19,91 persen** untuk seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir, dan masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas PDAM yaitu Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Kandis, Kecamatan Pemulutan Selatan serta Kecamatan Pemulutan Barat.

Kecamatan yang sudah terjangkau PDAM paling banyak adalah Kecamatan Sungai Pinang yang sudah mencapai 76,92 persen. Selain itu kecamatan lainnya baru sebagian yang teraliri fasilitas air bersih dari PDAM.

Berdasarkan kondisi ini, maka diperlukan upaya penambahan unit-unit PDAM yang dapat menjangkau lebih banyak daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini tentunya juga dengan memperhatikan ketersediaan sumber air bersih yang ada di daerah tersebut. Potensi pemanfaatan Daerah aliran sungai (DAS), serta penggunaan air tanah yang memungkinkan agar rumahtangga mampu mengakses air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air rumahtangga sehari-hari. Air bersih merupakan kebutuhan dasar utama yang selayaknya terpenuhi bagi semua masyarakat.

Dari sisi fasilitas kelistrikan daerah, pemenuhan kebutuhan dasar yang juga menjadi indikator kesejahteraan masyarakat adalah fasilitas listrik yang

sudah mampu di akses oleh rumahtangga. Semakin banyak rumahtangga yang telah menikmati fasilitas listrik maka kondisi kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Tabel II.32.
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengguna Listrik	63.413	65.971	71.303	76.049	81.074	81.074
2	Jumlah Rumah tangga	63.770	66.329	71.669	76.331	81.245	81.245
3	Persentase	99,44	99,46	99,49	99,63	99,79	99,79

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Pada tabel terlihat jumlah pengguna listrik rumahtangga di Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi seiring penambahan jumlah rumahtangga. Jika dilihat dari persentase rumahtangga pengguna listrik di kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 99,79 persen di Tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa fasilitas listrik yang tersedia bagi masyarakat sudah memadai dan menjangkau hamper di seluruh rumahtangga di daerah ini.

Penyediaan sanitasi yang baik bagi rumahtangga juga menjadi salah satu indikator perumahan masyarakat yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang baik. Sanitasi yang baik dilihat dari tersedianya sarana MCK yang baik dan dapat digunakan oleh semua anggota rumahtangga.

Tabel II.33.
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah tangga bersanitasi	32.593	48.599	53.651	63.609	64.888	67.312
2	Jumlah Rumah tangga	63.770	66.329	71.669	76.331	81.245	87.850
3	Persentase	51,11	73,27	74,86	75,01	75,37	76,62

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Pada data diatas terlihat jumlah rumahtangga bersanitasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang artinya ketersediaan fasilitas sanitasi secara umum sudah mengalami perbaikan dalam masyarakat. Ketersediaan fasilitas sanitasi pada rumahtangga di Kabupaten Ogan Ilir baru mencapai 82,26 persen, kondisi ini diharapkan dapat terus meningkat hingga mencapai 100 persen yang artinya seluruh rumahtangga di daerah ini telah memiliki sanitasi yang baik.

Jenis sarana sanitasi yang dipakai rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir antara lain toilet siram, pipa saluran pembuangan, tangki septik, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik dan jamban cemplung dengan segel slab. Rumah tangga bersanitasi merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri disetiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri.

Tabel II.34.
Capaian Akses Sanitasi KK
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

No	Kecamatan	Total Desa	Capaian akses sanitasi KK (%)
1	Muara Kuang	14	89,31
2	Rambang Kuang	13	78,09
3	Lubuk Keliat	10	87,98
4	Tanjung Batu	21	97,60
5	Payaraman	13	98,79
6	Rantau Alai	13	74,12
7	Kandis	12	65,30
8	Tanjung Raja	19	97,60
9	Rantau Panjang	12	63,53
10	Sungai Pinang	13	94,25
11	Pemulutan	25	36,45
12	Pemulutan Selatan	15	34,50
13	Pemulutan Barat	11	66,13
14	Indralaya	20	80,64
15	Indralaya Utara	16	83,41
16	Indralaya Selatan	14	91,85
Rata - rata capaian sanitasi		241	75,93

Sumber : Web STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di kabupaten Ogan Ilir baru mencapai 51,75%, dimana cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau baru mencapai 50,56% dan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana dan prasarana umum baru mencapai 55,5%.

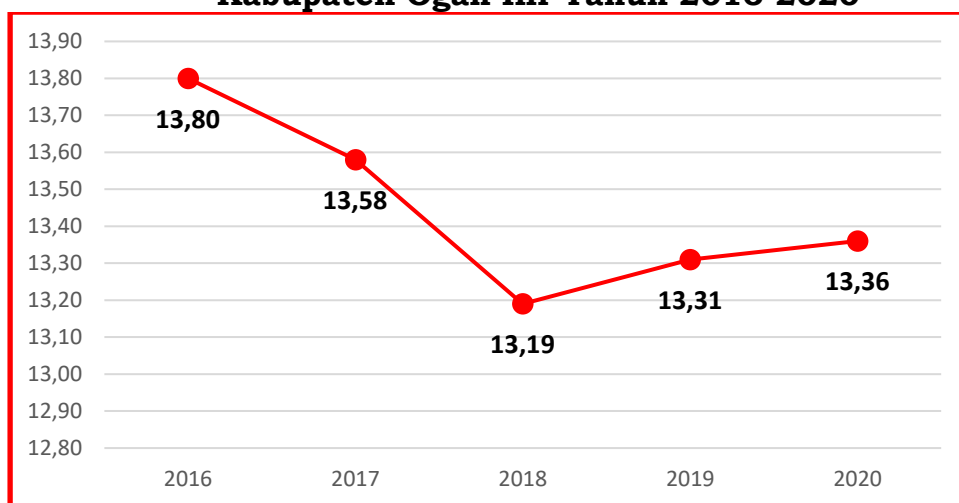
c. Sosial

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang

memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan di Ogan Ilir cukup tinggi dimana pada tahun 2018 sempat mencapai titik terendah sebesar 13,19 persen, namun meningkat menjadi 13,31 persen pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,36 persen. Kenaikan ini merupakan dampak dari peningkatan angka pengangguran dalam dua tahun terakhir terlebih pada tahun 2020 yang meningkat tajam serta pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga mendekati 0,00 persen dikarenakan Pandemi Covid-19. Kedua poin tersebut disinyalir menjadi penyebab utama dari meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2019 dan 2020.

Gambar II.11
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020

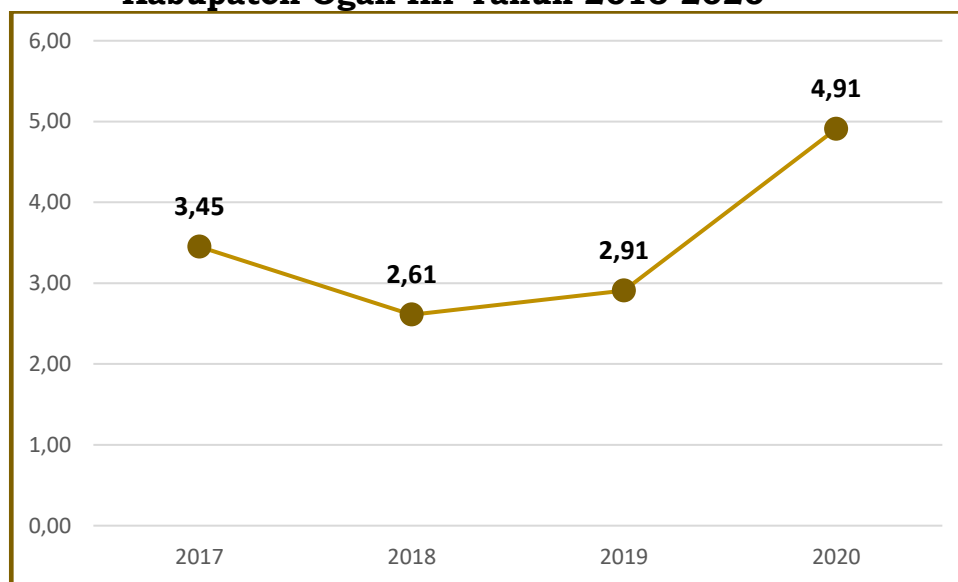


Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

d. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah.

Gambar II.12
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

e. Pemberdayaan Perempuan

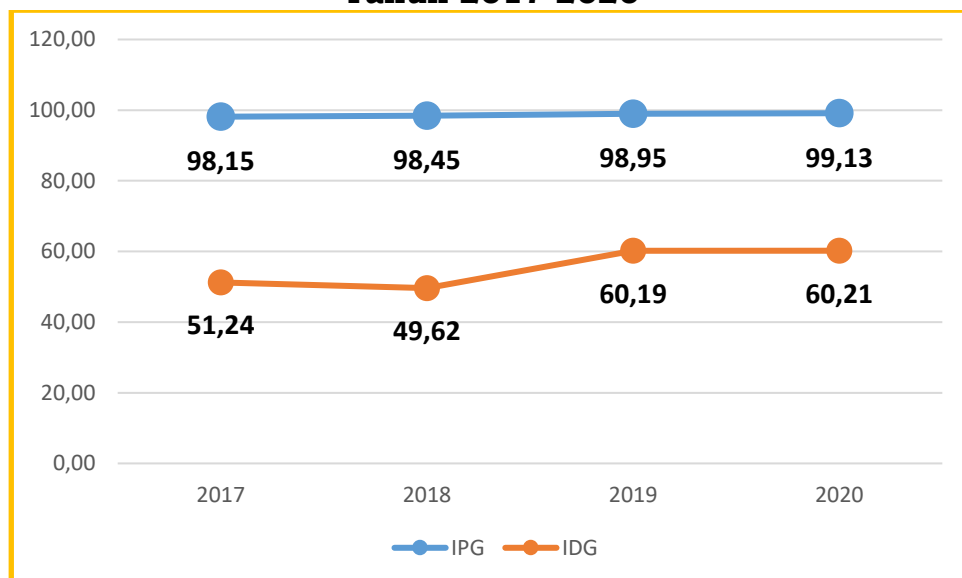
Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, indeks pembangunan gender meningkat dari tahun 2017-2020. Ini menunjukkan adanya penyempitan gap antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indeks Komposit yang merupakan gabungan dari Indeks keanggotaan DPR (parlemen), Indeks pengambilan keputusan dan Indeks distribusi pendapatan. Sebagaimana indeks pembangunan gender yang meningkat, indeks pemberdayaan gender juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam keanggotaan di parlemen,

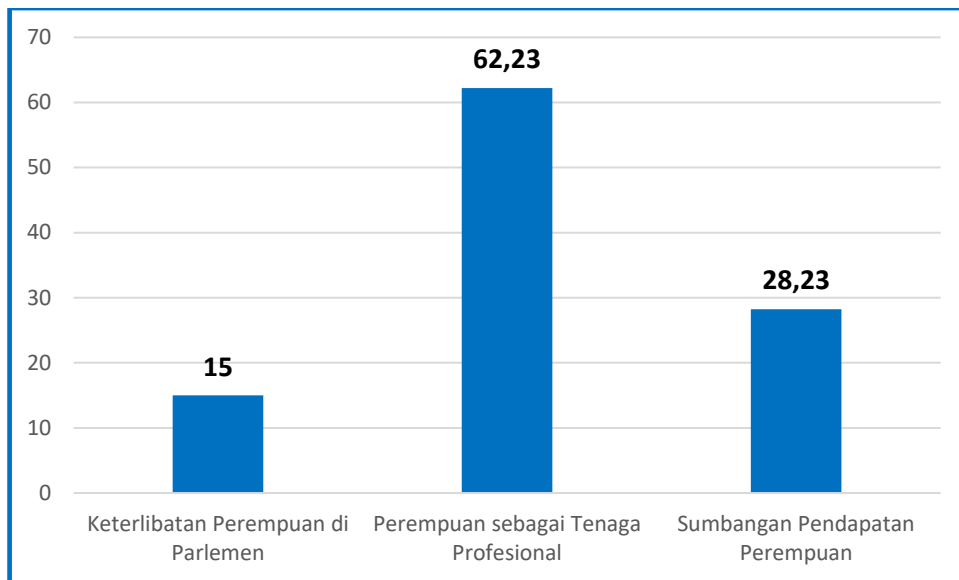
pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan dimana pada tahun 2020 untuk Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 15 persen; Perempuan sebagai Tenaga Profesional sebesar 62,23 persen; dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 28,23 persen.

Gambar II.13
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender
Tahun 2017-2020



Sumber: BPS, 2021

Gambar II.14
Komponen Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021

f. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan yang semakin bervariasi. Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumberdaya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu, UU tersebut telah secara tegas memisahkan wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya Environmental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. IKLH menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

Tabel II.35.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	Nilai IKLH
2016	77,7 (Baik)	-	-	-
2017	88,09 (-	-	-

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	Nilai IKLH
	Sangat Baik)			
2018	81,13 (Baik)	-	-	-
2019	85,42 (Sangat Baik)	68,75 (Cukup)	38,13 (Waspada)	61,50 (Kurang)
2020	87,58 (Sangat Baik)	30,00 (Waspada)	23,14 (Waspada)	51,82 (Kurang)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, 2021

Tabel di atas menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Hutan dan Nilai IKLH secara keseluruhan. Secara umum, ditinjau dari indeks kualitas udara, kualitas udara di Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki permasalahan yang signifikan. Ini adalah nilai indeks selama 2016-2020 adalah baik dan sangat baik. Sementara itu, indeks kualitas air menunjukkan angka cukup dan indeks kualitas tutupan hutan berada di kategori waspada. Secara total, nilai IKLH Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan kategori kurang khususnya pada 2 tahun terakhir.

g. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki andil dalam menopang perekonomian baik nasional maupun daerah. Kapasitas Koperasi dan UKM yang lingkupnya kecil dan terfokus serta didukung oleh pemerintah menjadi bekal dari penguatan perekonomian daerah. Upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas koperasi dan UKM dilakukan dengan pemberian kesempatan berusaha seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan dukungan kemudahan untuk memperoleh permodalan. Selain itu dukungan dalam pengembangan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya juga harus dilakukan untuk mewujudkan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan menguntungkan.

Tingkat kemandirian koperasi dan UKM menjadikan suatu daerah ataupun negara menjadi resilien terhadap guncangan perekonomian nasional. Ini adalah karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memanfaatkan sumber daya lokal. Tujuan intervensi pemerintah dalam urusan koperasi dan UKM adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi serta meningkatkan kemandiriannya. Ini juga ditujukan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah untuk kabupaten / kota terbatas pada izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha Mikro.

Usaha mikro, kecil, menengah merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Secara umum, baik usaha mikro, kecil, maupun menengah jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel II.36.
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Usaha Mikro	17.441	17.887	17.995	18.347	18.577
Jumlah Usaha Kecil	2.046	2.325	2.339	2.342	2.342
Jumlah Usaha Menengah	84	87	88	88	88

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, 2020

Secara lebih detail, dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah, usaha mikro berkembang pesat secara kuantitas, bergerak dari 17.441 di tahun 2015 menjadi 18.577 di tahun 2019. Sementara itu, jumlah usaha kecil juga terus mengalami peningkatan dari 2.046 di tahun 2015 menjadi 2.342 di tahun 2019. Kemudian dari tahun 2015-2019 jumlah usaha menengah bertambah sebanyak 4 usaha. Di tahun 2015 terdapat 84 usaha menengah menjadi 88 usaha menengah di tahun 2019.

h. Penanaman Modal

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian dengan membuka peluang selebar-lebarnya bagi investor baik dalam negeri ataupun luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan memberikan perlakuan yang sama. Tujuan utama dari penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu tujuan jangka panjangnya

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengimplementasikan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Kabupaten Ogan Ilir membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menangani persoalan penanaman modal dan izin usaha.

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

jumlah investor PMDN meningkat lebih dari 100 persen dari tahun 2015 ke 2019, meningkat dari 41 investor menjadi 88 investor. Peningkatan terbanyak adalah pada tahun 2016 ke 2017 dan 2017 ke 2018 yaitu sejumlah 14 investor. Sementara itu jumlah investor PMA adalah 11 investor, stagnan dari tahun 2015-2019. Secara keseluruhan jumlah investor di Kabupaten Ogan Ilir meningkat dari 52 di tahun 2015 menjadi 99 di Tahun 2019.

Tabel II.37.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tahun 2105-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Investor PMDN	41	42	56	70	88
Jumlah Investor PMA	11	11	11	11	11
Total	52	53	67	81	99

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Ogan Ilir, 2020

Secara umum, nilai investasi di Kabupaten Ogan Ilir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2019 diana total realisasi baik PMDN maupun PMA mencapai 272 trilyun rupiah. Angka ini didominasi oleh nilai realisasi investasi PMA sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.38.
Realisasi PMDN dan PMA
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
--------	------	------	------	------	------	---------------------------

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Nilai realisasi investasi PMDN (Rupiah)	291.712.688.447,-	231.345.494.153,-	86.235.830.383	313.294.480.985	127.484.163.971	130
Nilai realisasi investasi PMA (Rupiah)	4.177.441.442.388,-	2.488.998.178.205	1.011.327.960.595	2.703.667.450.904	272.037.602.258.300	2607
Total Realisasi Nilai Investasi (Rupiah)	4.469.154.130.835	2.720.343.672.358	1.097.564.790.979	3.016.961.931.889	272.165.086.422.271	2349

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Ogan Ilir, 2020

i. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Ogan Ilir karena sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Ogan Ilir dan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Rencana pembangunan pertanian di Kabupaten Ogan Ilir adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Secara umum perekonomian kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan di setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2020 dimana terjadi Pandemi Covid-19. Sebagai kategori yang memiliki dominasi terhadap perekonomian wilayah, pertumbuhan sektoral pertanian masih perlu ditingkatkan dimana pada tahun 2020 mencapai 1,34 persen.

Tabel II.39.
Data Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produktivitas padi (ton/tahun)	4.369	4.424	4.309	3.870	3.761
2.	Produktivitas palawija (ton/ha)	7.10	7.66	7.42	7.50	-
3.	Nilai PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.992,22	2.099,16	2.193,42	2.275,79	2.380,28
4.	Struktur Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,55	22,06	21,26	20,38	20,98
6.	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian		1,94	2,10	1,29	1,34
7.	Cakupan bina kelompok petani (%)	46.46	54.85	52.13	50.76	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir, 2020

j. Industri Pengolahan

Data sektor industri menunjukkan sisi yang berlawanan. Jumlah Industri yang meningkat belum dibarengi dengan kontribusi terhadap PDRB dan jumlah nilai produksi secara rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa industri di Kabupaten Ogan Ilir masih didominasi oleh industri kecil dengan produktifitas rendah. Namun demikian potensi ini harus terus dikembangkan untuk semakin menggerakkan perekonomian di Kabupaten Ogan Ilir. Keadaan jumlah usaha industri dan penyerapan tenaga kerja industri seperti digambarkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel II.40.
Data Perkembangan Urusan Industri dan Tenaga Kerja
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah usaha industri	9.133	9.735	10.269	10.374	10.498
	a. Jumlah Perusahaan sektor industri kecil	9.123	9.716	10.240	10.342	10.442
	b. Jumlah Perusahaan sektor industri menengah	8	15	25	28	28
	c. Jumlah Perusahaan sektor industri besar	2	4	4	4	28
2.	Penyerapan tenaga kerja dalam industri	13.627	15.229	16.131	16.319	16.633
	a. Penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil	13.259	14.574	15.359	15.513	15.567
	b. Penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil	158	305	422	456	456
	c. Penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil	210	350	350	350	610

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, 2020

Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan industri di Kabupaten Ogan Ilir Sebagian besar di dominasi oleh usaha kecil. Industri kecil yang terdaftar pada Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir umumnya terdiri dari industri rumah tangga, yakni terdiri dari industri pembuatan kerupuk kemplang, pembuatan ikan asin, pandai besi, pandai mas dan perak, pandai aluminium, pertukangan kayu, pembuatan tenun songket, kain gebeng/brongsong, border dan anyaman-anyaman.

Dari sisi makro, maka terlihat adanya peningkatan nilai tambah produk domestik regional bruto kategori industri pengolahan dimana pada tahun 2020 mencapai 1,34 trilyun rupiah. Angka ini cukup tinggi dengan kontribusi PDRB kategori industri pengolahan sebesar 11,88. Sedangkan terkait pertumbuhan ekonomi, maka diakibatkan dari pandemi Covid-19, maka pertumbuhan

ekonomi mengalami perlambatan yang cukup signifikan hingga mencapai 0,36 persen.

Tabel II.41.
Data Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai PDRB adh Berlaku Kategori Industri Pengolahan (Milyar Rp)	990,17	1.095,93	1.215,80	1.318,66	1.347,44
2.	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	11,21	11,52	11,79	11,81	11,88
3.	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan (%)		5,96	6,79	6,53	0,36
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	68,13	72,88	76,52	78,14	-

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, 2020

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Menurut Engel, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka porsi konsumsi non-pangan semakin besar, sebaliknya konsumsi pangan semakin kecil. Oleh karena itu porsi pengeluaran konsumsi non-pangan menjadi salah satu indikator tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi di Ogan Ilir terlihat sebaliknya dimana pengeluaran konsumsi non pangan mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 40,22 persen dan menurun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 38,38 persen.

Tabel II.42.
Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Juta Rp)	12,79	14,56	15,62	16,70	16,70
2	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita (Juta Rp)	7,64	8,71	9,39	10,23	10,29
3	Persentase pengeluaran konsumsi pangan per kapita (%)	59,78	59,83	60,14	61,29	61,62

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
4	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Juta Rp)	5,14	5,85	6,23	6,46	6,41
5	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (%)	40,22	40,17	39,86	38,71	38,38

Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2021

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Perhubungan

Urusan perhubungan dalam pembangunan lebih difokuskan terkait bagaimana mengangkut orang maupun barang dengan baik. Oleh karena itu, konektivitas dan aksesibilitas wilayah harus mendukung untuk mewujudkan hal tersebut. Terlihat bahwasasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan menurun setiap tahun yang mengindikasikan pertumbuhan jumlah kendaraan yang digunakan lebih tinggi dibanding pertumbuhan panjang jalan yang dibangun. Selain itu terlihat juga bahwa kontribusi sektor pengangkutan terhadap PDRB cukup fluktuatif dimana sempat mencapai 1,41 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi 1,34 persen yang diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

Lain halnya dengan jumlah orang atau barang yang diangkut baik melalui dermaga, bandara maupun terminal. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan umum yang mencapai 63.111 orang pada tahun 2019. Namun hal sebaliknya terjadi pada pengangkutan barang dimana terjadi penurunan jumlah barang yang diangkut.

Tabel II.43.
Indikator Perhubungan
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020

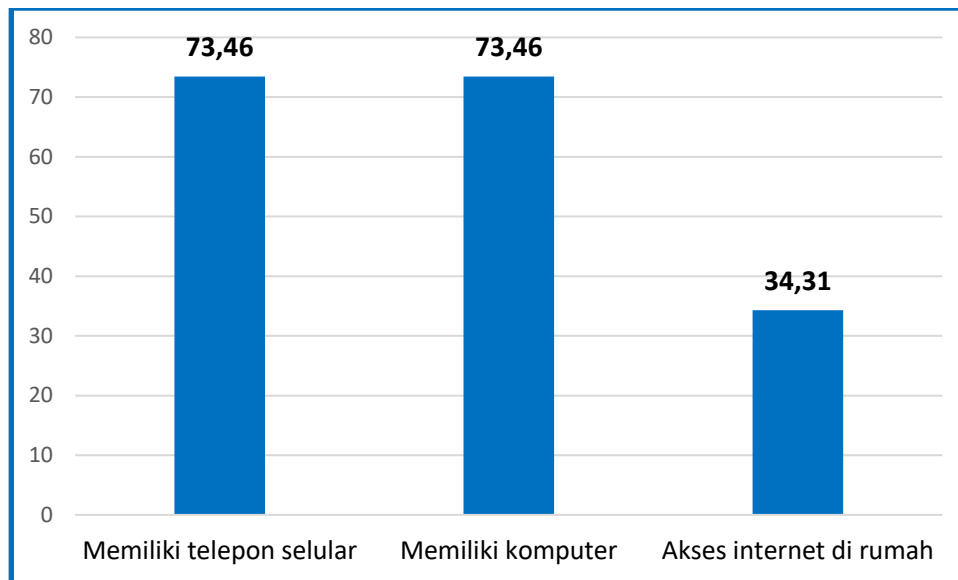
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0007	0,0011	0,0005	0,0003	na
2	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (jiwa)	62.653	62.883	63.018	63.111	na
3	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (ton)	80	72	72	60	na
4	Kontribusi Sektor Pengangkutan Terhadap PDRB (%)	1,23	1,3	1,35	1,41	1,34

Sumber: Dinas Perhubungan, BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2021

b. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan urusan komunikasi dan informatika kepada masyarakat. Bagian ini menggambarkan tentang perkembangan sekaligus masalah yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Pembentukan masyarakat yang informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemantauan informasi dilakukan oleh pemerintah dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. Ini dilakukan dengan membuat berbagai macam program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat dan program peningkatan implementasi *e-government*. Ini dimaksudkan untuk memberikan ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat.

Gambar II.15
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Komunikasi
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir, 2020

Di Tahun 2019, rumah tangga yang memiliki telepon seluler adalah sebanyak 73,46 persen. Jumlah yang sama juga terdapat pada persentase kepemilikan komputer. Sementara itu akses internet di Kabupaten Ogan Ilir masih hanya dinikmati oleh 34,31 persen dari keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir. Ini menunjukkan bahwa *digital divide* atau kesenjangan dalam penggunaan TIK masih cukup besar di Kabupaten Ogan Ilir.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Kriminalitas

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Dari sisi keamanan dan ketertiban, menurunnya jumlah kriminalitas dan maupun pelanggaran perda K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) diharapkan dapat mendukung peningkatan capaian pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Setiap tahun terjadi tindakan kriminalitas dimana yang paling tinggi intensitasnya berada pada tahun 2017 dengan jumlah 76 kasus. Tahun-tahun selanjutnya terjadi penurunan yang signifikan. Tingkat kriminalitas Ogan Ilir masih tergolong cukup baik. Apabila dilihat jenis kriminal, maka yang paling tinggi kasusnya adalah kasus pencurian, penganiayaan, diikuti kasus pembunuhan. Adanya tingkat keamanan yang baik akan memberikan sisi positif pada peningkatan investor dalam menanamkan modalnya di Ogan Ilir

Tabel II.44.
Angka Kriminalitas

Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2015-2020

No.	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus narkoba	-	-	-	-	-	74
2.	Jumlah kasus pembunuhan	1	-	2	1	1	4
3.	Jumlah kejahatan seksual	-	-	-	-	-	25
4.	Jumlah kasus penganiayaan	6	-	60	2	2	21
5.	Jumlah kasus pencurian	12	7	14	1	10	86
6.	Jumlah kasus penipuan	-	-	-	-	-	5
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	-	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	19	7	76	4	13	215
9.	Jumlah penduduk	409.171	429.073	406.063	409.297	414.036	420.783
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)x100.000	4,64	1,63	18,7	0,98	3,14	51,1

Sumber: Polres Ogan Ilir, 2021.

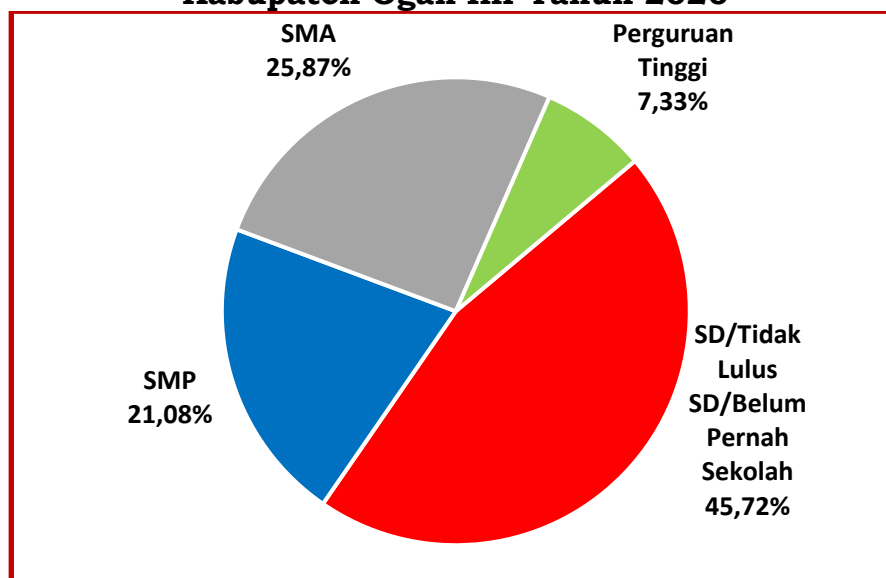
D. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari pendidikan masyarakat yang telah mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

Angkatan kerja merupakan penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang berpotensi menjadi tenaga kerja. Terlihat dari gambar di bawah ini, bahwasanya sebagian besar angkatan kerja baik yang bekerja, sementara tidak bekerja maupun pengangguran adalah penduduk yang berpendidikan SD ke bawah (belum tamat SD atau tidak sekolah). Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kompetensi dan keahlian tenaga kerja sehingga tidak memiliki daya saing di pasar kerja dengan pendapatan yang layak.

Gambar II.16

Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN OGAN ILIR

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Dari capaian indikator yang memiliki target pada perencanaan pembangunan periode sebelumnya, terdapat 34 indikator yang tercapai dengan capaian 100 persen atau lebih dan terdapat 30 indikator yang tidak tercapai dengan capaian di bawah 100 persen.

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel II.45.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,13	5,14	5,18	5,19	0,14	6-7	Tidak Tercapai
01.02	Tingkat inflasi	%	3,68	2,85	2,52	2,06	1,50	3,6-3,75	Tercapai
1.3a	PDRB ADHB	Milyar Rp	8.833,77	9.514,37	10.315,10	11.165,70	11.344,17	-	-
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	21,59	22,67	24,27	25,96	27,23	-	-
01.04	Indeks gini	-	0,31	0,33	0,33	00,28	0,3	0,29	Tercapai
01.05	Persentase Penduduk miskin	%	13,8	13,58	13,19	13,31	13,36	13,5	Tercapai
01.07	Tingkat pengangguran Terbuka	%	na	3,45	2,61	2,91	4,91	2	Tercapai
01.09	Jumlah Penduduk	Jiwa	429.073	406.063	409.297	414.036	420.783	-	-
01.10	Pengeluaran perkapita	Ribu Rp	10.039,00	10.306,00	10.706,00	11.032,00	10.725,00	-	-
01.11	IPM	-	65,44	65,63	66,43	67,22	67,06	69,00	Tidak Tercapai
	-Indeks Pendidikan		58,59	58,65	59,38	60,31	60,37	-	-
	-Indeks Kesehatan		68,69	68,80	69,17	69,55	69,97	-	-
01.12	Nilai SAKIP	-	na	na	Na	52,75	53,19	-	-
01.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	na	84,23	84,23	86,08	-	-
II	Fokus Kesejahteraan Sosial								
02.01	Pendidikan								
02.01.02	Angka melek huruf	%	98,77	98,7	98,7	99,3	99,265	100	Tidak Tercapai
02.01.03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,36	7,37	7,58	7,85	7,86	9	Tidak Tercapai
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	-	119,84	112,96	112,21	116,5	100,22	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	-	80,71	89,42	75,43	76,69	76,69	100	Tidak Tercapai
2.1.4c	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	-	67,96	73,5	69,46	73,45	73,45	-	-
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	-	98,11	96,46	99,16	98,23	88,32	98,75	Tidak Tercapai
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	-	72,96	74,43	73,98	75,36	90,36	82	Tercapai
2.1.5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	-	55,1	57,95	60,12	60,71	Na	-	-
02.01.06	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	12,26	12,27	12,28	12,29	12,3	-	-
02.02	Kesehatan								
02.02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	996,7	996,7	996,8	997,1	Na	-	-
02.02.02	Angka Harapan Hidup	Tahun	64,65	64,72	64,96	65,21	65,48	65,64	Tidak Tercapai
02.02.03	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	/1000 KH	3,3	3,3	3,2	2,9	3,43	-	-
02.02.04	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan	%	17,32	19,07	31,27	na	Na	-	-
02.02.05	Jumlah Balita Gizi Buruk	%	2	0	0	1	7	-	-
02.02.06	Angka kematian ibu melahirkan	/100.000 KH	85,52	52,41	61,53	61,36	83,23	-	-
02.02.07	Rata-rata Lama sakit	hari	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	Jumlah Alat Kontrasepsi yang Digunakan oleh Penduduk							-	-
	-WOW/MOP/IUD/Spiral	alat	6.654	5.540	6.243	5.400	na	-	-
	-Susuk KB	alat	22.412	22.845	26.162	28.111	na	-	-
	-Suntik	alat	57.410	68.561	70.179	74.041	na	-	-
	-Pil	alat	34.608	32.082	32.811	34.865	na	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	-Kondom	alat	6.623	8.485	6.239	5.981	na	-	-
02.02.09	Persentase Balita Yang Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi							-	-
	-BCG	%	91,81	91,45	97,2	85,76	89,1	-	-
	-Campak/Morbili	%	76,75	58,48	97,0	67,17	86,9	-	-
02.03	Pertanahan								
02.04	Ketenagakerjaan								
02.04.01	Rasio penduduk yang bekerja	%	na	96,55	97,39	97,09	na	-	-
III	Fokus Budaya dan Olahraga								
03.01	Kebudayaan								
03.01.01	Jumlah grup kesenian	grup	4	4	5	5	5	10	Tidak Tercapai
03.01.02	Jumlah gedung kesenian	unit	-	-	1	1	1	2	Tidak Tercapai
03.02	Pemuda dan Olahraga								
03.02.01	Jumlah klub olahraga	klub	83	86	87	87	na	-	-
03.02.02	Jumlah gedung olahraga	unit	33	43	46	46	na	-	-
	Aspek Pelayanan Umum								
A	Urusan Pemerintahan Wajib								
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
01.01	Urusan Pendidikan								
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah PAUD		54,78	54,57	63,56	62,03	64,36	-	-
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (7-12)	%	100	99,57	99,75	99,69	88,32	-	-
1.1.1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS (13-15)	%	86,39	88,62	89,68	90,25	98,47	-	-
1.1.1.d	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK (16-18)	%	60,24	67,79	60,17	61,79	Na	-	-
	Rasio ketersediaan sekolah PAUD	per 10.000	34,18	33,41	35,12	35,09	35,79	-	-
1.1.2a	Rasio ketersediaan sekolah	per	57,97	59,38	59,07	59,29	59,88	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	SD	10.000							
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah SLTP	per 10.000	64,08	53,82	55,69	51,17	51,68	-	-
1.1.2c	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	per 10.000	40,49	40,53	57,5	na	na	-	-
	Rasio Murid terhadap Guru PAUD	Per 1 guru	8,6	8,83	10,67	10,74	na	-	-
1.1.3a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	16,55	17,44	17,35	16,61	15,87	-	-
1.1.3b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP	Per 1 guru	15,35	14,28	14,85	14,23	14,15	-	-
1.1.3c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA	Per 1 guru	14,67	14,96	15,27	15,54	15,15	-	-
	Rasio Murid terhadap Guru SMK	Per 1 guru	13,13	13,91	14,52	15,54	14,97	-	-
1.1.4a	Persentase Sekolah SD/MI dalam kondisi bangunan baik	%	82	84	85	89	na	-	-
1.1.4b	Persentase Sekolah SLTP/MTs dalam kondisi bangunan baik	%	86	87	89	92	na	-	-
1.1.5a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,035	Tercapai
1.1.5b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06	0,050	Tidak Tercapai
1.1.5c	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	0,05	0,03	-	-	Na	-	-
1.1.6a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
1.1.6b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	99,99	100	100	100	100	100	Tercapai
1.1.6c	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	99,96	100	na	na	Na	-	-
1.1.7a	Persentase standar rombongan belajar SD/MI/SDLB	%	71,87	71,87	68,75	68,75	Na	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.7b	Persentase standar rombongan belajar SMP/MTs/SMPLB	%	80,55	75	75	75	Na	-	-
01.02	Urusan Kesehatan								
01.02.01	Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir	%	23,85	21,7	26,98	30,79	22,51	-	-
01.02.02	Jumlah Posyandu	Unit	319	334	335	341	341	-	-
	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 Balita	7,70	9,81	8,76	8,33	8,33	-	-
01.02.03	Jumlah Puskesmas	Unit	25	25	25	25	25	-	-
	Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan	%	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	-	-
	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,58	0,62	0,61	0,57	0,59	-	-
01.02.04	Jumlah klinik	Unit	0	0	0	9	10	-	-
	Rasio klinik per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0	0	0	0,21	0,23	-	-
01.02.05	Jumlah puskesmas pembantu	Unit	16	16	16	17	15	-	-
	Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Desa	%	6,64	6,64	6,64	7,05	6,22	-	-
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,4	0,39	0,39	0,24	0,36	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
01.02.06	Jumlah Rumah Sakit	Unit	2	2	3	3	3	-	-
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,0047	0,0049	0,0073	0,0072	0,0071	0,0099	Tidak Tercapai
01.02.07	Jumlah Rumah Sakit bersalin	Unit	0	0	0	0	0	-	-
01.02.08	Jumlah Dokter	orang	38	39	67	75	84	-	-
	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,885	0,96	1,63	1,81	1,99	3,71	Tercapai
01.02.09	Jumlah Bidan	orang	239	249	762	770	747	-	-
	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	5,570	6,13	18,61	18,59	17,75	-	-
01.02.10	Jumlah perawat	orang	248	253	594	606	548	-	-
	Rasio tenaga medis perawat per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	5,78	6,23	14,51	14,63	13,02	-	-
01.02.11	Jumlah tenaga medis	orang	525	541	1558	1630	na	-	-
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	14,05	17,19	37,74	39,37	na	-	-
01.02.12	Tenaga Kefarmasian	Orang	33	31	71	76	71	-	-
01.02.13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95,26	97,33	97,38	95,39	93,60	99	Tidak Tercapai
01.02.14	Cakupan Kunjungan Bayi Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	93,1	93,6	101,2	97,4	93,60	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
01.02.15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	66,51	76,53	81,43	78,05	71,26	93	Tidak Tercapai
01.02.16	Jumlah balita gizi buruk	Jiwa	16	6	16	11	7	-	-
01.02.17	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Jiwa	16	6	16	11	7	-	-
01.02.18	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
01.02.19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	97,51	97,1	93,78	77,18	89,5	100	Tidak Tercapai
01.02.20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC TBA (%)	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
01.02.21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
01.02.22	Jumlah penderita DBD	Kasus	108	37	115	129	102	-	-
01.02.23	Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin	%	87,9	89,1	83,04	210,5	98,9	-	-
	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD								
01.02.25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	82	92,77	79,33	77,33	-	-
01.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
01.03.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49,95	51,10	51,63	27,63	20,05	-	-
01.03.02	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	20,1	26,956	28,99	31,40	36,30	45	Tidak Tercapai
01.03.03	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,49	0,46	0,47	0,47	0,48	-	-
01.03.04	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	%	60,44	64,5	60,54	55,67	Na	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
01.03.05	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	60,44	64,5	60,54	55,67	-	-	-
01.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
01.04.01	Rumah tangga pengguna air bersih	%	56,11	56,4	58,38	68,19	73,08	80	Tidak Tercapai
01.04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	99,46	99,49	99,63	99,79	Na	-	-
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi layak	%	73,27	74,86	71,68	82,26	Na	80	Tercapai
01.04.04	Rasio jumlah rumah tidak layak huni	%	Na	na	na	30927	30621	80	Tidak Tercapai
01.04.05	Persentase Rumah tangga menurut luas lantai								
	<19	%	Na	na	1,95	0,72	Na	-	-
	20-49	%	Na	na	34,03	37,92	Na	-	-
	50-99	%	Na	na	50,95	43,72	Na	-	-
	100-149	%	Na	na	9,02	10,89	Na	-	-
	>150	%	Na	na	4,04	6,74	Na	-	-
01.04.06	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum								
	Leding'	%	Na	na	5,03	1,5	Na	-	-
	Pompa	%	Na	na	19,11	19,38	Na	-	-
	Air dalam kemasan	%	Na	na	19,47	19,33	Na	-	-
	Sumur	%	Na	na	34,77	36,58	Na	-	-
	Sumur tak terlindung	%	Na	na	12,21	12,22	Na	-	-
	Mata air terlindung	%	Na	na	0,28	0,3	Na	-	-
	Mata air tak terlindung	%	Na	na		0,69	Na	-	-
	Air permukaan	%	Na	na	2,58	4,29	Na	-	-
Lainnya	%	Na	na	0	0	Na	-	-	
01.04.07	Persentase Rumah Tangga Fasilitas Jamban								
	-Sendiri	%	Na	na	74,16	75,01	Na	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	-Bersama	%	Na	na	11,84	10,55	Na	-	-
	-MCK/Komunal/Umum	%	Na	na	6,53	4,21	Na	-	-
	- Tidak menggunakan	%	Na	na	0,2	0,2	Na	-	-
	Tidak memiliki	%	Na	na	7,27	10,02	Na	-	-
01.04.08	Persentase Rumah tangga menurut sumber penerangan								
	Listrik PLN	%	Na	na	95,2	95,09	Na	-	-
	Listrik Non PLN	%	Na	na	3,63	4,54	Na	-	-
	bukan Listrik	%	Na	na	1,18	0,37	na	-	-
01.05	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
01.05.01	Angka Kriminalitas		1,63	18,7	0,98	3,14	51,1	5	Tercapai
01.05.02	Jumlah Tindak pidana	Kasus	7	76	4	13	215	-	-
01.05.03	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	5,25	7,09	6,81	5,74	na	-	-
01.05.04	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	35,8	35,51	35,32	34,92	na	-	-
01.05.05	Jumlah Pos Kamling	(Unit)	Na	na	na	210	na	-	-
01.05.06	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	%	Na	na	na	0,87	na	-	-
01.05.07	Jumlah organisasi kesbang, Politik danperlindungan masyarakat yang aktif	Organisasi	122	199	146	150	na	-	-
01.05.08	Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	-	-
01.05.09	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	-	-	-	13,51	na	-	-
01.05.10	Tingkat Waktu Tanggap Bencana	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
01.05.11	Luas WMK	km2	1.120,48	1.120,48	1.120,48	1.120,48	1.120,48	-	-
01.05.12	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%	Na	na	na	42,03	na	-	-
01.06	Urusan Sosial								
01.06.01	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	320	300	155	165	165	-	-
01.06.02	Jumlah penduduk miskin (ribu)	jiwa	57,01	56,85	55,87	57,06	58	-	-
01.06.03 a	Jumlah PMKS yang mendapat Bansos	Orang	8.079	10.410	53.100	85.839	178.049	1074	Tercapai
01.06.03 b	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosol	%	35,38	34,36	27,09	42,37	91,61	-	-
01.06.04	Garis kemiskinan		367.067	386.740	416.098	433.616	469.746	-	-
01.06.05	Jumlah PMKS	%	22.838	30.298	196.043	202.616	194.358	-	-
01.06.06	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	35,38	34,36	27,09	42,37	91,61	15,90	Tercapai
01.06.07	indeks kedalaman kemiskinan	%	2	1,9	2,2	1,82	2,15	-	-
01.06.08	Indeks keparahan kemiskinan	%	0,4	0,37	0,15	0,38	0,53	-	-
01.06.09	Jumlah anak terlantar yang dibina		30	55	116	116	131	-	-
01.06.10	Persentase jumlah anak terlantar yang dibina	%	100	100	100	100	100	-	-
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
02.01	Urusan Tenaga Kerja								
	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu								
02.01.01	Angkatan Kerja	Jiwa	-	236.153	222.874	226.070	222.406	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
02.01.02	Berkerja	Jiwa	-	228.607	217.475	218.755	211.488	-	-
02.01.03	Pengangguran Terbuka	Jiwa	-	7.546	5.399	7.315	10.918	-	-
02.01.04	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	-	64.235	82.312	83.909	95.242	-	-
02.01.05	Jumlah	Jiwa	-	300.388	305.186	309.979	314.775	-	-
02.01.06	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Na	78,62	73,03	72,93	70,02	77	Tidak Tercapai
02.01.07	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Orang	Na	na	na	11 Kasus	Na	20	Tercapai
02.01.08	Tingkat kesempatan kerja	%	Na	96.80	97.58.00	96.76	Na	-	-
02.01.09	Tingkat UMR	Rp.	Na			2.804.450	na	-	-
02.01.10	Jumlah Angkatan Kerja	orang	Na	236.153	222.874	226.070	222.406	-	-
02.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
02.02.01	Persentase perkerja perempuan di lembaga pemerintah	%	4,16	4,5	5	5,5	6	6	Tercapai
02.02.02	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta	%	5	5	5	5	na	5	Tercapai
02.02.03	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	3	8	10	9	na	-	-
02.02.04	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Na	na	na	na	59,7	96	Tidak Tercapai
02.02.05	Jumlah kasus Penyelesaian pengaduan perlindungan anak	kasus	24	22	25	13	na	-	-
02.02.06	Persentase jumlah kasus Penyelesaian pengaduan perlindungan anak	%	100	100	100	100	na	-	-
02.02.07	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Na	98,15	98,45	98,95	99,13	-	-
02.02.08	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Na	51,24	49,62	60,19	60,21	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
02.03	Urusan Pangan								
02.03.01	Ketersediaan energi	(Kkal/kap/hr)	93.40.00	89.80	89.00.00	81.90	na	-	-
02.03.02	Angka Rawan Pangan	%	1.466,50	1.443,40	1.488,20	1.325,00	na	-	-
02.03.03	Skor Pola Pangan Harapan	%	93.40.00	89.80	89.00.00	81.90	na	-	-
02.04	Urusan Pertanahan								
02.05	Urusan Lingkungan Hidup								
02.05.01	Jumlah timbunan sampah	Ton	215	263	280	310	na	-	-
02.05.02	Jumlah Sampah Terangkut	Ton	82	90	102	119	na	-	-
02.05.03	Indeks Kualitas Lingkungan	-				61,50 (Kurang)	51,82	-	-
02.05.04	Indeks tutupan lahan	-				38,13 (Waspada)	23,14	-	-
02.05.05	Indeks Kualitas Udara	-	77,7 (Baik)	88,09 (Sangat Baik)	81,13 (Baik)	85,42 (Sangat Baik)	87,58	-	-
02.05.06	Indeks Kualitas Air	-				68,75 (Cukup)	30,00	-	-
02.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
02.06.01	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	74	90	94	97	95	-	-
02.06.02	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	orang	141.436	140.358	147.148	152.918	na	-	-
02.06.03	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	2%	2%	6%	42%	na	-	-
02.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
02.07.01	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Unit	16	16	16	16	na	-	-
02.07.02	Jumlah LPMK	Unit	227	227	227	227	na	-	-
02.07.03	PKK aktif	Unit	258	258	258	258	na	-	-
02.07.04	Jumlah BUMDes	Unit	47	222	224	226	na	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
02.07.05	Jumlah Polindes	Unit	257	257	na	292	na	-	-
02.07.06	Jumlah desa tertinggal	Desa	na	227	190	86	na	-	-
02.07.07	Jumlah Desa Berkembang	Desa	na	na	37	134	na	-	-
02.07.08	Jumlah Desa Maju	Desa	na	na	na	7	na	-	-
02.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
02.08.01	Persentase KB aktif	%	72	75	74	72	na	72	Tercapai
02.08.02	Total Fertility Rate (TFR)	%	na	2,33	2,3	2,3	na	-	-
02.08.03	Jumlah PUS	pasang	161.254	177.213	178.206	182.378	na	-	-
02.08.04	Jumlah Peserta KB Aktif	orang	127.707	137.513	141.004	148.398	na	-	-
02.08.05	Jumlah klinik Keluarga Berencana (KKB)	orang	109	302	332	332	na	-	-
02.08.06	Persentase unmeet need	%	24,1	21,65	21,46	29,67	na	12	Tidak Tercapai
02.09	Urusan Perhubungan								
02.09.01	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1	-	-
02.09.02	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	170	91	83	138		-	-
02.10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
02.10.01	Web site milik pemerintah daerah	-	na	na	na	7	na	-	-
02.10.02	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	na	na	na	73,46	na	-	-
02.10.03	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	na	na	na	34,31	na	-	-
02.10.04	Persentase rumah tangga yg memiliki komputer/laptop	%	na	na	na	73,46	na	-	-
02.10.05	Jumlah OPD yang memiliki website	OPD	na	na	na	7	na	-	-
02.10.06	Jumlah OPD yang memiliki aplikasi	OPD	1	1	1	5	na	-	-
02.11	Urusan Koperasi, Usaha								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Kecil, dan Menengah								
02.11.01	Persentase koperasi aktif	%	81,37%	81,37%	97,55%	91,71%	na	70	Tercapai
02.11.02	Jumlah koperasi	unit	204	204	204	217	na	-	-
02.11.02	Jumlah Usaha Mikro	unit	17.887	17.995	18.347	18.577	na	-	-
02.11.03	Jumlah Usaha Kecil	unit	2.325	2.339	2.342	2.342	na	-	-
02.11.04	Jumlah Usaha Menengah	unit	87	88	88	88	na	-	-
0,09218 75	Persentase Koperasi yang mengikuti program pemberdayaan	%	10,7	13,40	13,60	14,30	na	-	-
02.11.06	Persentase (%) UMKM yang mengikuti program pemberdayaan	%	0,042	0,071	0,009	0,041	na	-	-
02.12	Urusan Penanaman Modal								
02.12.01	Rata-rata hari proses perijinan investasi	Hari	7	7	4	4	na	-	-
02.12.02	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	53	67	81	99	na	14	Tercapai
2.12.3a	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rp	231,35	86,24	313,29	127,48	na	-	-
2.12.3b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Milyar Rp	2.489,00	1.011,33	2.703,67	272.037,60	na	-	-
02.12.04	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	Izin	1.284	963	1.000	1.532	na	-	-
02.12.05	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	78,73	80,36	81,52	82,25	na	-	-
02.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
02.13.01	Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Orang	179	205	225	300	311	-	-
02.13.02	Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan	Kecamatan	46.555	46.568	57.526	59.638	59.695	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
02.13.03	Persentase organisasi pemuda yang aktif/mandiri	%	2	2	2	3	3	-	-
02.13.04	Jumlah Wirausaha Muda	Orang	15.910	18.872	22.400	22.464	22.503	-	-
02.13.05	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	Orang	58	58	60	63	83	-	-
02.13.07	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	Kali	18	21	23	24	24	-	-
02.13.08	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Kali	138	154	160	172	184	-	-
02.13.09	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	145	148	150	175	190	-	-
02.13.10	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	3	4	4	5	5	-	-
02.13.11	Jumlah Medali Atlet Muda	Medali	6	14	6	2	2	-	-
02.14	Urusan Statistik								
02.14.01	Penyajian Kabupaten Dalam Angka	-	1	1	1	1	1	Ada	Tercapai
02.14.02	Penyajian PDRB Kabupaten	-	1	1	1	1	1	Ada	Tercapai
02.15	Urusan Kebudayaan								
02.15.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	2	2	2	2	4	Tercapai
02.16	Urusan Perpustakaan								
02.16.01	Jumlah perpustakaan	Unit	212	212	212	212	212	215	Tercapai
02.16.02	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1.980	1.211	1.228	1.420	656	4.500	Tidak Tercapai
02.16.03	Judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	2.822	2.958	4.628	4.628	4.978	5.000	Tidak Tercapai
02.16.04	Jumlah Pustakawan	Orang	-	-	-	1	1	-	-
02.16.04	Tenaga Teknis	Orang	3	3	3	3	3	-	-
02.17	Urusan Kearsipan								
B	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
01.01	Nilai ekspor perikanan	milyar							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
01.02	Nilai Produksi perikanan tangkap	000 Rp	2.428.200.000	1.439.200.000	1.611.500.000	1.820.000.000	na	-	-
01.03	Nilai Produksi perikanan budidaya	000 Rp	878.156.795	870.241.850	807.405.000	813.500.000	na	-	-
01.04	Jumlah Rumah Tangga Perikanan budidaya	Ruta	3.422	3.824	3.689	4.025	na	-	-
01.05	Jumlah Rumah Tangga Perikanan tangkap	Ruta	13.780	14.882	13.844	14.280	na	-	-
01.06	Produksi perikanan tangkap	Ton	7.945	7.953	8.458	8.509	8.509	10.460,048	Tercapai
01.07	Produksi perikanan budidaya	Ton	8.341	8.385	7.969	8.060	8.161	9.941,482	Tidak Tercapai
01.08	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	42,24	44,63	45,61	56,76	57,03	61,65	Tidak Tercapai
01.09	Cakupan bina kelompok nelayan budidaya	%	55,12	52,78	53,82	54,16	na	-	-
01.10	Cakupan bina kelompok nelayan tangkap	%	72,82	86,12	89,05	92,02	na	-	-
2	Urusan Pariwisata								
02.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	316	356	7.577	7.831	na	-	-
02.02	Persentase peningkatan jumlah objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan (%)	%	72	75	80	82	na	-	-
02.03	Persentase peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata (%)	%	72	75	80	82	na	-	-
02.04	Persentase peningkatan mutu dan pelayanan pariwisata (%)	%	65	82	85	87	na	-	-
02.05	Persentase penyediaan informasi Pariwisata (%)	%	82	85	88	89	na	-	-
02.06	Persentase tingkat	%	62	65	70	72	na	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	penyerapan tenaga kerja pariwisata (%)								
02.07	Keikutsertaan dalam pameran pariwisata	kali	6	6	10	5	na	-	-
3	Urusan Pertanian								
03.01	Produktivitas padi sawah	ton/ha	4.414	4.462	4.331	3.881	3.881	-	-
03.02	Produktivitas padi ladang	ton/ha	1.719	1.744	2.255	2.202	2.202	-	-
03.03	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,46	1,94	2,1	1,29	1,34	-	-
03.04	Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,55	22,06	21,26	20,38	20,98	76,75	Tidak Tercapai
03.05	Rasio Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	11,94	13,67	14,41	15,02	15,10	30	Tidak Tercapai
03.06	Cakupan bina kelompok petani	%	-	0,57	22,33	26,02	25,35	29,73	Tercapai
03.07	Jumlah produksi daging (sapi, kambing, babi)	Ton	352.566	482.342	611.124	726.549	na	-	-
03.08	Jumlah produksi daging ayam/ungags	Ton	1.819.396	2.755.077	4.038.622	5.786.285	na	-	-
03.09	Cakupan bina kelompok Peternak	Unit	21	54	38	48	na	-	-
03.10	Jumlah Konsumsi Daging per Kapita	(kg/kap/th)	6,25	7,82	8,47	9,18	na	-	-
03.11	Jumlah Konsumsi Telur per Kapita	(kg/kap/th)	9,86	10,45	10,87	11,87	na	-	-
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
04.01	Persentase desa berlistrik	%	98,92	98,97	99,25	99,58	na	-	-
04.02	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%	7,84	7,65	7,92	8,18	7,71	-	-
04.03	LPE sektor pertambangan dan penggalan	%	-0,32	4,21	6,86	7,52	-1,04	-	-
5	Urusan Perdagangan								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
05.01	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	%	16,48	17,59	18,63	19,55	19,40	-	-
05.02	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	90,29	112,25	129,72	147,26	na	-	-
05.03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	729	709	757	780	na	1	Tercapai
05.04	Jumlah sarana perdagangan		3.435	3.452	3.495	3.546		-	-
	Mini market	Unit	30	30	33	34	na	-	-
	Toko	Unit	97	102	112	120	na	-	-
	Kios	Unit	792	792	810	820	na	-	-
	Warung	Unit	2.516	2.528	2.540	2.572	na		
6	Urusan Perindustrian								
06.01	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	11,21	11,52	11,79	11,81	11,88	24,9	Tidak Tercapai
06.02	LPE sektor Industri Pengolahan	%	6,23	5,96	6,79	6,53	0,36	-	-
06.03	Pertumbuhan Industri		598	542	636	780	na	-	-
06.04	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	68,13	72,88	76,52	78,14	na	5	Tercapai
06.05	Jumlah industri kecil	Unit	9.716	10.240	10.342	10.442	na	-	-
	jumlah tenaga kerja industri kecil	Orang	14.574	15.359	15.513	15.567	na	-	-
06.06	Jumlah industri sedang	Unit	15	25	28	28	na	-	-
	jumlah tenaga kerja industri sedang	Orang	305	422	456	456	na	-	-
06.07	Jumlah industri besar	Unit	4	4	4	28	na	-	-
	jumlah tenaga kerja industri besar	Orang	350	350	350	610	na	-	-
06.08	Jumlah sentra IKM yang dibina	IKM	45	46	48	48	na	-	-
06.09	Jumlah wirausaha industri kecil menengah	pelaku usaha	9.731	10.265	10.370	10.470	na	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
7	Urusan Transmigrasi								
C	Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Urusan Perencanaan Pembangunan								
01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
D	Aspek Daya Saing Daerah								
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
I	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	Pangan								
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	12,79	14,56	15,62	16,70	16,70	-	-
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp.	5,14	5,85	6,23	6,46	6,41	-	-
01.03	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	%	40,22	40,17	39,86	38,71	38,38	-	-
2	Pertanian								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
02.01	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,46	1,94	2,1	1,29	1,34	-	-
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan								
01.01	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,0007	0,0011	0,0005	0,0003	na	-	-
01.02	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang/	62.653	62.883	63.018	63.111	na	-	-
		Ton	80	72	72	60	na	-	-
01.03	Kontribusi Sektor Pengangkutan Terhadap PDRB	%	1,23	1,3	1,35	1,41	1,34	-	-
2	Penataan Ruang								
02.01	Luas wilayah banjir	%	na	51.406	3.045,57	1.462,96	3675,83	-	-
02.02	Luas wilayah kekeringan	%	0	0	0	766,6	0	-	-
3	Keuangan								
03.01	jumlah bank dan cabang	unit	na	na	na	6	6	-	-
03.02	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit	89	118	143	169	na	-	-
03.03	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	Unit	3	4	5	5	na	-	-
4	Lingkungan Hidup								
04.01	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	57,97	61,14	58,29	49,43	na	75	Tidak Tercapai
5	Komunikasi dan Informatika								
05.01	Rasio elektrifikasi	%	99,46	99,49	99,63	99,79	na	-	-
05.02	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	na	na	na	73,46	73,46	-	-
III.	Iklim Berinvestasi								
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target 2020)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Masyarakat								
01.01	Angka kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,63	18,7	0,98	3,14	51,1	5	Tercapai
2	Penanaman Modal								
02.01	Lama proses perijinan	(hari)	7	7	4	4	4	4	Tercapai
02.02	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terlayani pada unit PTSP (angka)		1.284	963	1.000	1.532	na	-	-
IV.	Sumber Daya Manusia								
1	Ketenagakerjaan							-	-
01.01	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	0,02	0,022	0,024	0,025	na	-	-
01.02	Rasio ketergantungan	-	0,456	0,481	0,466	0,476	na	-	-

Tabel II.46.
Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2020

No	IKK Outcome	Realisasi
		2020
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		
a) Pendidikan		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	64,36%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	88,32%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	90,36%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	87,76%
b) Kesehatan		
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,048%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,84%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,50%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,35%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	89,50%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81,75%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98,57%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,10%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,47%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,91%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	91,80%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	35,98%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	34,09%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	n.a
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	n.a. (tidak ada pantai)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	n.a
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	2,24%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,47%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	60,75%
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	63,64%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
d) Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	-

No	IKK Outcome	Realisasi
		2020
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	-
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	-
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	306
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	19
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	395.401 orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.150 orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.264 orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	3 menit
f) Sosial		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		
a) Tenaga Kerja		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	-
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	-
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	-
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,00001%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-
c) Pangan		
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	164,55
d) Pertanian		
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	-
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	-
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	5

No	IKK Outcome	Realisasi
		2020
e) Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	51,82
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	-
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	76,5%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	perekaman KTP elektronik	99,45%
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-
3	kepemilikan akta kelahiran	94,20%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	-
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	-
2	Persentase peningkatan status desa mandiri'	-
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana		
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,5 per 1.000 perempuan
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,53%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12%
i) Perhubungan		
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	85
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,3
j) Komunikasi dan Informatika		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	30%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	19,85%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1,13%
l) Penanaman Modal		
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	-
m) Kepemudaan dan Olahraga		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	58,05%
3	Peningkatan prestasi olahraga	1 medali
n) Statistik		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
o) Persandian		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-
p) Kebudayaan		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	-
q) Perpustakaan		
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-
r) Kearsipan		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0

No	IKK Outcome	Realisasi
		2020
Urusan Pilihan		
a) Kelautan dan Perikanan		
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	N.A
b) Pariwisata		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-6,8%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	N.A
3	Tingkat hunian akomodasi	N.A
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	N.A
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	N.A
c) Pertanian		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,761 Ton/Ha
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	-
d) Kehutanan		
e) Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0%
f) Perdagangan		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	-
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-
g) Perindustrian		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	-100%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Ada
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	-
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-
h) Transmigrasi		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
a) Perencanaan dan Keuangan		
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,01%
2	Rasio PAD	0,81%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	54,21%
6	Opini Laporan Keuangan	WTP
b) Pengadaan		
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	-
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	-
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-
c) Kepegawaian		
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak	327,73%

No	IKK Outcome	Realisasi
		2020
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,62%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%
d) Manajemen Keuangan		
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,08%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-50,97%
3	Manajemen Aset	
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,77%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik		
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	-
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	16,67%

2.3. CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN OGAN ILIR

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ogan Ilir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.43
Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2020
1	PENDIDIKAN		
a	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	88,98
b	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	87,76%
c	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	54,26%
2	KESEHATAN		
02.01	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		
a	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	94%
b	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	93,50%
c	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	94,35%
d	Pelayanan Kesehatan Balita	%	88,47%
e	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	81,75%
f	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	92,10%
02.02	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
a	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	98,57%
b	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	98,47%
c	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	98,91%
d	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	91,80%
e	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	35,98%
f	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	34,09%
3.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN		

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI
			2020
	LINMAS		
03.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
03.01.01	PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
a	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kab/Kota	%	100,00%
b	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	13,5%
c	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kab/Kota	%	6%
03.01.02	PENANGULANGAN BENCANA KEBAKARAN		
a	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Ogan Ilir	%	21793%
b	Tingkat waktu tanggap	%	100%
c	Presentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	0%
d	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000 - 5.000 ltr pada WMK	%	0,0000011%
03.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
a	Pelayanan informasi rawan bencana	%	100%
b	Pelayanan pencagahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Na
c	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	Na
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG & BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
a	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	0%
b	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	0%
c	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	0%
d	Berkurangnya rumah tidak layak huni (RTLH)	unit	306
e	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	19
f	Rumah layak huni	%	0%
g	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	73,08%
h	Presentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0%
i	Rumah tangga bersanitasi	%	76,62%
j	Rumah tangga pengguna air bersih	%	63,33%
k	Kawasan kumuh	%	0,806%
l	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	44%
5	BIDANG URUSAN SOSIAL		
a	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	100%
b	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang anak terlantar di luar panti	%	100%
c	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia terlantar di luar panti	%	100%
d	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang gelandangan dan pengemis terlantar di luar	%	100%

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI
			2020
	panti		
e	Pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	%	100%

2.4. CAPAIAN INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola. Kabupaten Ogan Ilir dalam proses perumusan RPJMD Tahun 2021-2026 perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir. Capaian indikator target pembangunan berkelanjutan akan memperlihatkan fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan Ogan Ilir selama ini, sehingga kedepannya mampu merumuskan kebijakan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.44.
Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2020

No TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	13,31%
			1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	85,1%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
				cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.			
					1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%
					1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	0,01%
					1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	21,072
			1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	NA
					1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	90%
					1.4.1.(Prevalensi	79%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
					c)	penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
					1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sedera jat.	88,32%
					1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/serajat.	90,36%
					1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	39,4% (tidak terkait pendapatan)
			1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	5,7%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
		Sosial	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	9,6%
					2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	8,2%
					2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	6,4%
					2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	59,1%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	83,23
					3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	95,39

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
						terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	
					3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,19
			3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3,95
					3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2,5
					3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	3,43
					3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	90%
			3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	-

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
				hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.			
					3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	512
					3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	33,55
			3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	-
					3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	34,1
					3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	13,5%
			3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	13772 : 67988
					3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi	74,12%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
						(CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
					3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	20,60%
					3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2,2%
					3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,5
			3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	85,1%
					3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	85,1
			3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	-
			3.c	Meningkatkan secara signifikan	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi	-

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
				pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.		tenaga kesehatan.	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	65,15%
					4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	32,50%
					4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	100,22
					4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	105,67%
					4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,04
			4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	64,36%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
				sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			
			4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,99%
			4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	69,82%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	7(1 Perbup. 5 SK Bupati, 1 SK Kepala Dinas)
			5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	6 kursi (15%) jumlah 40 kursi
					5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	jumlah perempuan Esselon II = 1 (21,4%) Jumlah

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
							OPD Esselon II = 28
			5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	12%
							-
					5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	67988
			5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	73,46%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	76,62%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
				pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.			
					6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	82,16%
					6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	18,67%
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	2.9 juta rupiah
			8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	21,70%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
			8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	15.000,-
			8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	0,37%
			8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	533 Orang
					8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	7701 orang
			8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	2 km
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri	Ekonomi	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	6,53%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
	Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.			
			9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	73,46%
					9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	34,31%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	Ekonomi	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	0,50%
			10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,	Lingkungan	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	1

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
	Tangguh dan Berkelanjutan			aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.			
			11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	16,70%
			11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	93 pengaduan
			11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan	11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
				perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.			
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	218.7028 ton/tahun
			12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	87.60 ton/tahun

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
				penggunaan kembali.			
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	2208.48 : 239418.17 Ha
			15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	133.81 : 239418.17 Ha
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100%

No. TP B	TUJUAN	PILAR	No. Target	TARGET	No. Indikator	INDIKATOR	2020
	Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan						
			16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	jumlah Eselon II= 6 (21,4%) Jumlah OPD Eselon II= 28
			16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	89,37%
					16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	36,93% (seluruh penduduk, tidak terkait pendapatan)
					16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	81,46%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1 *	Proporsi individu yang menggunakan internet.	73,46 %

No · TP B	TUJUAN	PILAR	No. Targ et	TARGET	No. Indika tor	INDIKATOR	2020
					17.8.1. (a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	34%

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia lebih dari 1 tahun. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi target keuangan negara melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang baru saja selesai dilaksanakan. Berbagai kebijakan fiskal nasional mulai dari pembebasan PPh Pasal 21, 22, dan 25, berbagai stimulus ekonomi dan berbagai macam bantuan social yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu menahan terjadinya resesi ekonomi agar tidak terlalu dalam. Berdasarkan data ekonomi yang telah rilis, ekonomi nasional tahun 2020 yang berkontraksi atau mengalami pertumbuhan negative -2,19%. Berbagai sektor ekonomi nasional (y-on-y) mengalami kontraksi atau pertumbuhan negative terutama sector transportasi dan pergudangan yang mencapai -13,42%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -8,88%; dan Jasa Perusahaan sebesar -7,02%. Beberapa sector yang tumbuh positif ditengah pandemi antara lain: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54%; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,91%; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,98%. Begitu juga jika dilihat dari aspek pengeluaran, seluruh perekonomian nasional juga mengalami pertumbuhan negatif terutama impor yang mencapai -14,71% dan hanya sector konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,94%. Dinamika perekonomian saat ini menyulitkan APBN terutama tahun 2021 dan 2022 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal untuk mampu menyesuaikan diri dengan arus ketidakpastian yang masih akan terus berlangsung setidaknya hingga tahun 2023.

Berbagai skenario dirumuskan, postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN kedepan masih fokus pada pemulihan perekonomian yang kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun

2023. Merujuk pada kondisi tersebut kemudian mengharuskan pemerintah menyesuaikan kembali semua asumsi dan target ekonomi baik di level pusat, level pemerintah provinsi, maupun level pemerintah kabupaten/kota harus melakukan berbagai penyesuaian dan kebijakan ekonomi yang lebih relevan.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang kondisi keuangan daerahnya masih tergantung dana transfer. Oleh karena itu mau tidak mau harus segera melakukan berbagai penyesuaian kebijakan ekonominya. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian berbagai target keuangan daerahnya atau APBD-nya untuk lima tahun kedepan. Untuk itu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ogan Ilir harus mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas dan fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan. Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang di analisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami fluktuasi penurunan. Ditahun 2016 DOFD Kabupaten Ogan Ilir mencapai 8,83% kemudian ditahun 2017 turun menjadi 7,02%, kemudian terus menurun hingga pada tahun 2020 mencapai 5,82%. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai

DOFD Kabupaten Ogan Ilir yang sebesar 6,07% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00% - 10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Ogan Ilir periode tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III. 2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2016	109.762.617.128	1.243.190.688.873	8,83
2	2017	95.711.837.736	1.363.217.799.740	7,02
3	2018	55.362.963.113	1.417.185.838.011	3,91
4	2019	86.150.568.158	1.631.001.559.908	5,28
5	2020	87.849.174.298	1.509.257.842.606	5,82
	Rata-Rata	86.967.432.087	1.432.770.745.828	6,07

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

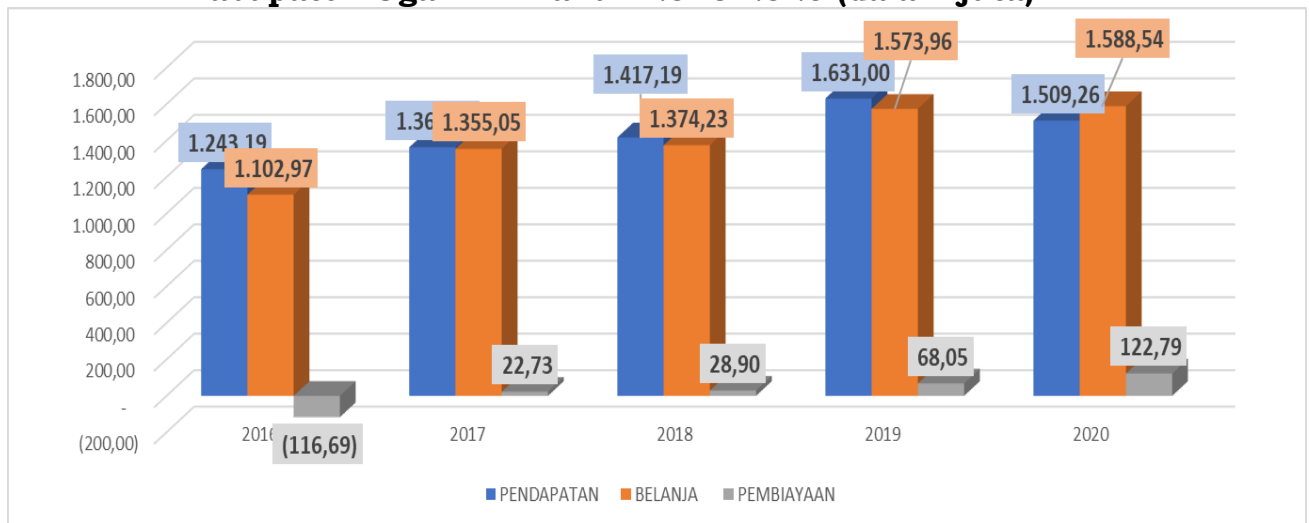
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2016-2020 menunjukkan sedikit peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Perkembangan pendapatan Ogan Ilir mengalami tren fluktuatif namun cenderung meningkat dimana pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,243 Triliun menjadi Rp. 1,509 Triliun pada tahun 2020. Adanya pendapatan yang fluktuatif hingga tahun 2020 tersebut dipengaruhi dampak Covid-19 yang menyebabkan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Secara umum tren peningkatan pada kurun waktu 2016-2020 menyebabkan tren kemampuan belanja daerah yang realisasinya mengalami tren kenaikan dari Rp. 1,102 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,588 Triliun pada tahun 2020. Adapun pada komponen Pembiayaan juga mempunyai tren meningkat akibat dinamika SiLPA yang fluktuatif dan masuknya pembayaran cicilan pokok utang ditahun 2016.

Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

Gambar III. 1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam juta)



Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

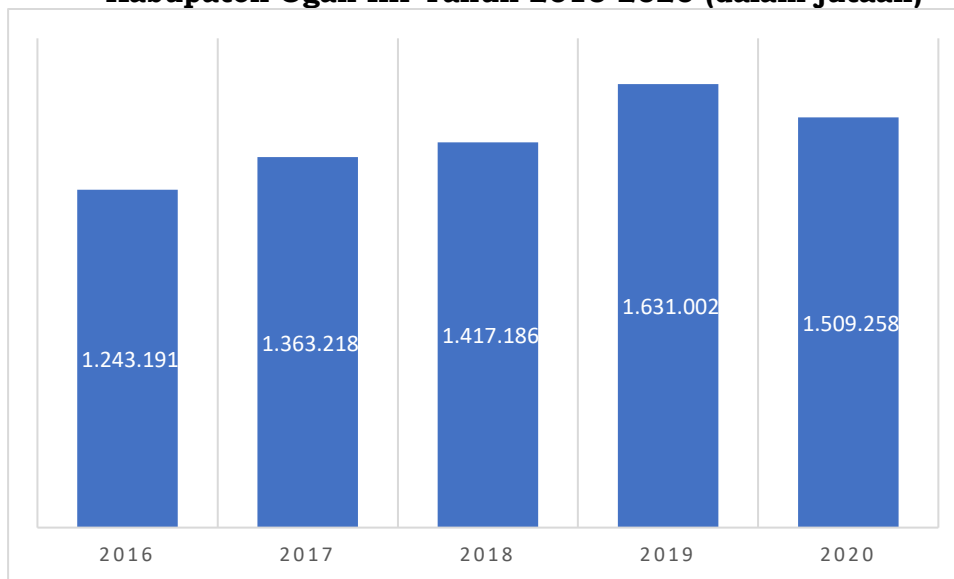
- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk

meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu kebijakan pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami tren fluktuatif meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,97% pertahun dari Rp. 1,243 Triliun ditahun 2016 menjadi 1,509 Triliun ditahun 2020.

Gambar III. 2
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)



Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun. PAD mengalami penurunan sebesar -5,42% pertahun dari Rp. 109,76 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 87,85 miliar ditahun 2020. Pada Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,38% pertahun dari Rp. 993,75 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 1,135 Triliun ditahun 2020. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah tercatat naik hingga 19,64% pertahun dari Rp. 139,68 miliar ditahun 2016, meningkat hingga Rp 286,15 miliar ditahun 2020.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan diantaranya adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,71% per

tahun dan pendapatan retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05% per tahun. Berlawanan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan retribusi daerah, komponen pendapatan pajak dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah justru mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan secara berturut-turut sebesar -4,99% dan -9,25% per tahun.

Sumber pendapatan daerah lainnya ialah berasal dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana kesetimewaan, dan dana desa.

Pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan terdiri atas dana transfer umum (DBH dan DAU) dan dana transfer khusus (DAK). Untuk DBH bersumber dari pajak dan penerimaan sumber daya alam. Sumber pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Untuk DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat terbesar berasal dari dana perimbangan yang rata-rata kontribusinya mencapai 98,8% pertahun. Secara agregat nilai semua komponen pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan cenderung meningkat namun ada komponen didalamnya yang mengalami penurunan yaitu DAU.

Pertumbuhan DBH dan DAK secara berturut-turut meningkat 5,71% dan 9,44% pertahun. Sedangkan komponen lainnya yaitu DAU mempunyai tren menurun sebesar -1,44% pertahun.

Selain dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya secara umum juga mengalami peningkatan 58,75% pertahun dari Rp. 5 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 31,76 miliar ditahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan dana penyesuaian.

Untuk pendapatan transfer antar daerah, tren peningkatannya yang mencapai 16% pertahun terjadi disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil dari Rp. 36,148 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 62,325 miliar ditahun 2020. Sedangkan bantuan keuangan provinsi meningkat dari Rp. 12,46 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 25,68 miliar ditahun 2020.

Untuk Lain-Lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 139,68 miliar menjadi Rp. 286,15 miliar ditahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya secara signifikan pendapatan hibah dari Rp. 1,81 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 83,325 miliar ditahun 2020. Selain itu pendapatan lainnya juga meningkat cukup signifikan dari Rp. 137,869 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 202,824 miliar ditahun 2020.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	1.243.191	1.363.218	1.417.186	1.631.002	1.509.258	4,97
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.763	95.712	55.363	86.151	87.849	-5,42
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	62.844	15.770	19.463	40.820	51.215	-4,99
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.386	4.011	5.640	6.577	5.977	8,05
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.173	2.997	2.912	3.404	3.962	5,71
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.360	72.934	27.348	35.348	26.695	-9,25
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	993.748	1.076.667	1.135.820	1.291.084	1.135.260	3,38
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	945.136	1.011.195	1.067.291	1.171.849	1.047.255	2,60
1.2.1.1	Dana Perimbangan	940.136	1.011.195	1.049.791	1.162.384	1.015.498	1,95
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	145.103	154.477	186.542	235.274	181.164	5,71
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	623.839	619.874	623.349	646.608	588.769	-1,44
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	171.193	236.844	239.900	280.502	245.566	9,44

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.000	-	17.500	9.465	31.757	58,75
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	5.000	-	17.500	9.465	31.757	58,75
1.2.1.3	Dana Desa	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	48.612	65.471	68.529	119.235	88.005	16,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.148	63.251	62.177	104.826	62.325	14,59
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	12.464	2.220	6.353	14.409	25.680	19,81
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.464	2.220	6.353	14.409	25.680	19,81
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	139.680	190.839	226.003	253.767	286.149	19,64
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.811	1.401	48.904	48.578	83.325	160,43
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	137.869	189.439	177.099	205.188	202.824	10,13

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja

transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan mencapai 9,55% pertahun dari Rp. 1,102 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp. 1,588 Triliun ditahun 2020. Peningkatan belanja tersebut seirama dengan peningkatan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dilihat lebih rinci, belanja operasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan mencapai 1,99% pertahun dari Rp. 880,64 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 952,97 miliar di tahun 2020. Kontribusi penyumbang terbesar peningkatan belanja operasi berasal dari peningkatan belanja barang dan jasa (rata-rata peningkatan sebesar 20,03% pertahun). Selain itu peningkatan pada komponen belanja operasi terjadi pada pos belanja hibah dan belanja subsidi yang rata-rata peningkatan sebesar 100% dan 44,52% pertahun dimana belanja hibah ditahun 2016 sebesar Rp. 20,28 miliar menjadi Rp. 88,45 miliar ditahun 2020 serta belanja subsidi hanya terdapat ditahun 2019 dan 2020 dimana pada ditahun 2019 sebesar Rp 750 juta menjadi Rp 3,33 miliar di tahun 2020.

Untuk belanja pegawai mengalami penurunan -0,21% pertahun dari Rp. 542,85 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 538,38 miliar ditahun 2020. Adapun penurunan belanja pegawai bisa dikatakan sebagai upaya meningkatkan ruag fiscal daerah yang digunakan utnuk meningkatkan kualitas belanja publik

Belanja Modal secara agregat juga mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 4,42% pertahun dari Rp. 222,33 miliar (2016) menjadi Rp. 264,32 miliar (2020). Hampir semua komponen belanja modal mengalami peningkatan kecuali Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang rata-rata turun mencapai -11,86% pertahun dari Rp. 194,67 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 117,50 miliar ditahun 2020. Adapun pertumbuhan belanja tanah sangat signifikan mencapai 108,66% pertahun meskipun secara nominal masih relative kecil yaitu dari Rp. 67,29 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 1,275 miliar ditahun 2020. Belanja peralatan dan mesin naik 60,05% pertahun dari Rp. 9,757 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 64,031 miliar ditahun 2020. Sedangkan Belanja Bangunan dan Gedung naik 40,57% pertahun dari Rp. 17,36 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 67,79 miliar ditahun 2020. Begitu juga dengan Belanja Aset Tetap Lainnya yang juga naik 132,03% pertahun dari Rp. 473,17 juta ditahun 2016 menjadi Rp. 13,72 miliar ditahun 2020.

Untuk belanja transfer juga mengalami peningkatan sebesar 9,21% pertahun dari Rp. 239,611 miliar ditahun 2017 menjadi Rp. 312,132 miliar ditahun 2020. Peningkatan belanja transfer tersebut disebabkan oleh meningkatnya belanja "Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa dari Rp. 238,352 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 311,07 miliar ditahun 2020.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	BELANJA	1.102.973,68	1.355.054,71	1.374.234,89	1.573.955,10	1.588.539,49	9,55
2.1	BELANJA OPERASI	880.646,07	769.445,27	820.500,22	955.997,40	952.973,43	1,99
2.1.1	Belanja Pegawai	542.851,88	481.380,18	480.785,76	551.812,78	538.377,58	-0,21
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.545,84	276.958,59	320.381,01	386.331,46	322.811,71	20,03
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	750,00	3.328,37	100,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.5	Belanja Hibah	20.279,94	11.106,50	19.333,46	17.103,16	88.455,77	44,52
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.064,71	-	-	-	-	-100,00
2.1.7	Belanja keuangan	160.903,70	-	-	-	-	-100,00
2.2	BELANJA MODAL	222.327,61	345.998,05	275.666,16	323.235,23	264.317,73	4,42
2.2.1	Belanja Tanah	67,29	4.357,80	2.992,75	2.957,62	1.275,41	108,66
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	9.757,00	49.759,86	39.015,61	61.162,59	64.031,08	60,05
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	17.361,87	31.212,25	71.921,98	47.513,75	67.789,77	40,57
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	194.668,28	243.881,00	145.314,82	190.529,30	117.505,86	-11,86
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	473,17	16.787,13	16.421,01	21.071,96	13.715,61	132,03
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	4.680,97	-	59.115,55	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	-	4.680,97	-	59.115,55	
2.4	BELANJA TRANSFER	-	239.611,40	273.387,53	294.722,47	312.132,78	9,21
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	193,75	394,25	-	-	-100,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	193,75	-	-	-	-100,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	394,25	-	-	-100,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	239.417,65	272.993,28	294.722,47	312.132,78	9,24
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	238.352,94	271.928,57	293.659,69	311.070,00	9,28
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	1.064,71	1.064,71	1.062,78	1.062,78	-0,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	140.217,00	8.163,09	42.950,95	57.046,46	(79.281,65)	0,00

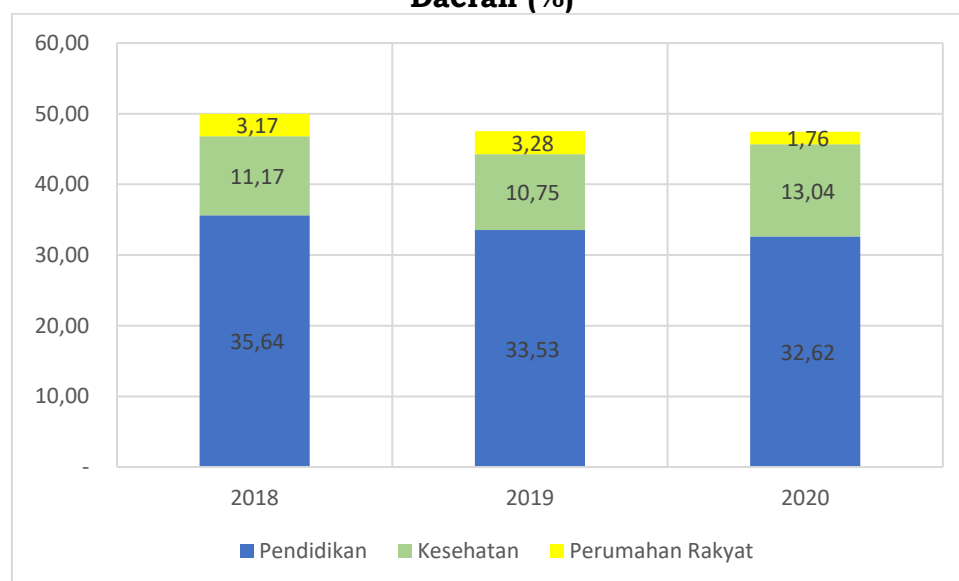
Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Kebijakan belanja daerah untuk memenuhi kewajiban belanja *mandatory* minimal seperti belanja urusan Pendidikan minimal 20% dan urusan

kesehatan minimal 10% telah mampu dipenuhi. Dalam tiga tahun terakhir (tahun 2018-2020) perkembangan alokasi belanja urusan pendidikan selalu di atas 30% dari total belanja daerah yang ada. Rasio belanja urusan Pendidikan ditahun 2018 mencapai 35,64%, tahun 2019 mencapai 33,53% dan tahun 2020 mencapai 32,62%. Meskipun menurun namun tetap patut diapresiasi mengingat alokasi belanjanya telah lebih dari 20% sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu juga dengan perkembangan realisasi belanja urusan kesehatan juga telah melebihi 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Rasio belanja kesehatan ditahun 2018 mencapai 11,17%, tahun 2019 mencapai 10,75% dan tahun 2020 mencapai 13,04% dari total realisasi belanja daerah tahun berkenaan.

Selain urusan Pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir juga telah mengalokasikan belanja urusan perumahan rakyat. Perkembangan alokasi belanja untuk urusan perumahan rakyat trennya menurun dari 3,17% ditahun 2018, kemudian sedikit meningkat ditahun 2019 mencapai 3,28% dan turun menjadi 1,76% ditahun 2020. Penurunan tersebut sangat terkait dengan pandemic Covid-19 yang mulai melanda seluruh daerah di Indonesia.

Gambar III. 3
Perkembangan Proporsi Belanja Urusan Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah (%)



Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Selain belanja untuk memenuhi minimal *mandatory spending* di urusan Pendidikan dan Kesehatan, alokasi Pemerintah Kabupaten Ogan ilir khususnya dalam dua tahun terakhir (2019 dan 2020) juga focus dalam pemenuhan target SPM. Untuk pemenuhan target SPM Pendidikan tahun 2019 telah dikeluarkan anggaran sebesar Rp. 517,715 miliar dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi Rp. 495,679 miliar. Dengan alokasi anggaran tersebut, target yang harus dikerjar lebih cepat adalah terkait indikator jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD yang baru mencapai 50,43% ditahun 2020.

Untuk pencapaian target SPM bidang urusan Kesehatan, tahun 2019 telah dikeluarkan anggaran sebesar Rp. 1,182 miliar dan ditahun 2020 menurun menjadi Rp. 729,43 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut capaian target-target SPM Sebagian besar telah lebih dari 90%. Adapaun capaian target indikator ditahun 2020 yang masih perlu diakselerasi adalah terkait pelayanan kesehatan orang terduga TB (35,98%) dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (34,09%).

Untuk pencapaian target SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, tahun 2019 telah dikeluarkan anggaran mencapai Rp. 5,219 miliar dan meningkat hingga Rp. 23,893 miliar ditahun 2020. Untuk pencapaian target SPM bidang urusan Perumahan Rakyat, tahun 2019 telah dikeluarkan anggaran sebesar Rp. 4,161 miliar dan meningkat hingga Rp. 12,808 miliar ditahun 2020. Untuk pencapaian target SPM bidang urusan Pekerjaan Umum telah dikeluarkan anggaran sebesar Rp. 8,392 miliar ditahun 2019 dan meningkatn menjadi Rp. 9,093 miliar ditahun 2020. Sedangkan untuk pencapaian target SPM bidang urusan Sosial juga telah dikeluarkan anggaran sebesar Rp. 481,32 juta ditahun 2019 dan meningkat menjadi Rp. 1,867 miliar ditahun 2020. Secara keseluruhan realisasi anggaran pemenuhan target SPM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III. 5
Realisasi Anggaran Pemenuhan Target SPM
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dan 2020

No	SPM BIDANG URUSAN	2019	2020
1	Pendidikan	517.715,17	495.679,24
2	Kesehatan	1.182,74	729,43

3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.219,80	23.893,05
4	Perumahan Rakyat	4.161,52	12.808,26
5	Pekerjaan Umum	8.392,44	9.093,90
6	Sosial	481,32	1.867,13

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Ogan Ilir trennya terus mengalami peningkatan sebesar 75,46% pertahun dimana tahun 2016 sebesar Rp. - 116,68 miliar (defisit pembiayaan) menjadi Rp 122,79 miliar di tahun 2020 (surplus pembiayaan). Peningkatan pembiayaan tersebut lebih disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan dari SiLPA sekaligus terjadinya penurunan kewajiban pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo yang hanya menjadi beban pengeluaran ditahun 2016 saja.

Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel III. 6
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	1.243.190,69	1.363.217,80	1.417.185,84	1.631.001,56	1.509.257,84	4,97
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.762,62	95.711,84	55.362,96	86.150,57	87.849,17	-5,42
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	62.843,67	15.769,60	19.462,79	40.820,38	51.214,98	-4,99
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.385,87	4.010,60	5.640,04	6.577,37	5.976,88	8,05
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.172,96	2.997,50	2.912,17	3.404,40	3.962,10	5,71
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.360,12	72.934,15	27.347,96	35.348,41	26.695,21	-9,25
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	993.747,91	1.076.666,53	1.135.819,91	1.291.084,19	1.135.260,10	3,38
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	945.136,28	1.011.195,13	1.067.290,70	1.171.849,45	1.047.255,03	2,60
1.2.1.1	Dana Perimbangan	940.136,28	1.011.195,13	1.049.790,70	1.162.384,12	1.015.497,90	1,95
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	145.103,42	154.477,37	186.541,78	235.273,69	181.163,59	5,71
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	623.839,46	619.873,62	623.348,78	646.608,32	588.768,51	-1,44
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	171.193,41	236.844,15	239.900,14	280.502,11	245.565,79	9,44
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.000,00	-	17.500,00	9.465,33	31.757,13	58,75
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	5.000,00	-	17.500,00	9.465,33	31.757,13	58,75
1.2.1.3	Dana Desa	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	48.611,62	65.471,40	68.529,21	119.234,73	88.005,07	16,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.147,56	63.251,13	62.176,64	104.825,58	62.324,93	14,59
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	12.464,07	2.220,27	6.352,56	14.409,15	25.680,14	19,81
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.464,07	2.220,27	6.352,56	14.409,15	25.680,14	19,81

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	139.680,16	190.839,43	226.002,96	253.766,80	286.148,56	19,64
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.811,42	1.400,65	48.904,32	48.578,38	83.324,80	160,43
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	137.868,74	189.438,78	177.098,64	205.188,43	202.823,77	10,13
2	BELANJA	1.102.973,68	1.355.054,71	1.374.234,89	1.573.955,10	1.588.539,49	9,55
2.1	BELANJA OPERASI	880.646,07	769.445,27	820.500,22	955.997,40	952.973,43	1,99
2.1.1	Belanja Pegawai	542.851,88	481.380,18	480.785,76	551.812,78	538.377,58	-0,21
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.545,84	276.958,59	320.381,01	386.331,46	322.811,71	20,03
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	750,00	3.328,37	100,00
2.1.5	Belanja Hibah	20.279,94	11.106,50	19.333,46	17.103,16	88.455,77	44,52
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.064,71	-	-	-	-	-100,00
2.1.7	Belanja keuangan	160.903,70	-	-	-	-	-100,00
2.2	BELANJA MODAL	222.327,61	345.998,05	275.666,16	323.235,23	264.317,73	4,42
2.2.1	Belanja Tanah	67,29	4.357,80	2.992,75	2.957,62	1.275,41	108,66
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	9.757,00	49.759,86	39.015,61	61.162,59	64.031,08	60,05
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	17.361,87	31.212,25	71.921,98	47.513,75	67.789,77	40,57
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	194.668,28	243.881,00	145.314,82	190.529,30	117.505,86	-11,86
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	473,17	16.787,13	16.421,01	21.071,96	13.715,61	132,03
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	4.680,97	-	59.115,55	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	-	4.680,97	-	59.115,55	
2.4	BELANJA TRANSFER	-	239.611,40	273.387,53	294.722,47	312.132,78	9,21
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	193,75	394,25	-	-	-100,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	193,75	-	-	-	-100,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	394,25	-	-	-100,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	239.417,65	272.993,28	294.722,47	312.132,78	9,24
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	238.352,94	271.928,57	293.659,69	311.070,00	9,28
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	1.064,71	1.064,71	1.062,78	1.062,78	-0,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	140.217,00	8.163,09	42.950,95	57.046,46	(79.281,65)	0,00
3	PEMBIAYAAN	(116.687,10)	22.731,19	28.895,02	68.046,55	122.793,01	75,46
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.812,93	23.529,91	30.894,27	71.845,97	125.093,01	36,71
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	35.812,93	23.529,91	30.894,27	71.845,97	125.093,01	36,71
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	152.500,02	798,72	1.999,25	3.799,43	2.300,00	-64,96
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	151.750,74	-	-	-	-	-100,00
3.2.2	penyertaan modal daerah;	749,29	798,72	1.999,25	3.799,43	2.300,00	32,36
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang- undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(116.687,10)	22.731,19	28.895,02	68.046,55	122.793,01	75,46

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2016-2020 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata peningkatan mencapai 2,25% pertahun. Tercatat jumlah aset Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016 senilai Rp. 2,251 triliun dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 2,460 triliun.

Jika dilihat lebih rinci, maka terlihat bahwa jenis aset yang mengalami penurunan yaitu Aset lancar. Aset lancar mengalami penurunan -5,92% pertahun. Adapun jenis Aset yang meningkat adalah Aset Tetap dan aset lainnya. Aset tetap nilainya dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,16 % pertahun dimana pada tahun 2016 nilainya sebesar 2,112 Triliun, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,301 Triliun. Begitu pula dengan aset lainnya yang juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,75% dari Rp. 12,14 miliar (2016) menjadi Rp. 47,63 miliar (2020). Sedangkan investasi

jangka panjang nilainya naik dari tahun ke tahun dengan peningkatan sebesar 5,8% pertahun dari Rp 26,45 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 33,13 miliar pada tahun 2020.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai kewajiban jangka pendek relatif terus menurun dari tahun ke tahun dengan rata-rata penurunan sebesar -26,27% pertahun dari Rp. 57,96 miliar ditahun 2016 menjadi Rp 17,13 miliar pada tahun 2020. Sedangkan kewajiban jangka panjang besarnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020 relatif tetap yaitu sebesar Rp. 489,597 miliar yang merupakan utang dalam negeri.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Ogan Ilir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,74% dimana pada tahun 2016 sebesar 2,193 Triliun menjadi 2,443 Triliun ditahun 2020. Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Ogan Ilir disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III. 7
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2020

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	ASET						
	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	21.168.750.392	24.024.283.291	63.840.225.046	115.501.996.367	35.934.849.832	14,14
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.064.600	-	-	-	-100,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.812.052	7.469.290	111.067.870	-	6.314.009	7,03
	Kas di Bendahara FKTP	2.356.346.494	3.647.775.119	2.435.968.164	738.288.027	461.062.922	-33,49
	Kas di Bendahara BOS	491.869.304	1.122.969.073	1.010.889.150	3.551.045.519	1.243.811.115	26,10
	Kas di BLUD		2.104.300.522	4.447.823.583	5.301.676.318	5.865.319.958	40,73
	Piutang Pendapatan	74.821.905.989	73.061.211.099	71.618.708.859	80.655.606.355	39.338.211.942	-14,85
	Piutang Lainnya	1.051.505.101	17.392.472	17.392.472	46.052.472	46.052.472	-54,25
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(11.881.001.893)	(12.212.809.869)	(15.951.895.490)	(17.998.784.155)	(20.391.557.246)	-14,46
	Beban dibayar dimuka	88.783.333	118.052.070	164.686.008	504.759.008	152.998.008	14,57
	Persediaan	12.152.428.241	24.946.091.827	36.962.301.038	8.076.802.593	15.886.281.540	6,93
	Jumlah Aset Lancar	100.255.399.013	116.837.799.494	164.657.166.699	196.377.442.504	78.543.344.552	-5,92
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	26.446.468.323	27.313.248.289	29.312.498.289	32.019.967.644	33.132.223.186	5,80
	Jumlah Investasi Permanen	26.446.468.323	27.313.248.289	29.312.498.289	32.019.967.644	33.132.223.186	5,80

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	26.446.468.323	27.313.248.289	29.312.498.289	32.019.967.644	33.132.223.186	5,80
	ASET TETAP						
	Tanah	115.350.742.175	111.057.698.175	110.042.346.175	294.184.368.335	295.031.583.535	26,46
	Peralatan dan Mesin	282.732.171.854	297.637.428.461	326.210.456.084	379.911.583.768	439.402.422.315	11,65
	Gedung dan Bangunan	678.950.926.052	692.715.892.929	780.995.267.379	855.880.860.374	940.924.844.846	8,50
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.911.445.782.366	2.116.212.118.077	2.241.925.849.063	2.441.723.543.070	2.552.747.876.632	7,50
	Aset Tetap Lainnya	43.455.502.310	63.341.064.702	76.022.183.307	94.043.375.049	95.140.630.227	21,64
	Konstruksi dalam Pengerjaan	285.759.837	11.281.915.200	18.140.928.799	24.028.986.685	19.084.120.321	185,87
	Akumulasi Penyusutan	(919.819.043.384)	(1.561.516.192.435)	(1.708.002.363.165)	(1.879.992.510.773)	(2.041.221.034.146)	22,05
	Jumlah Aset Tetap	2.112.401.841.212	1.730.729.925.110	1.845.334.667.643	2.209.780.206.509	2.301.110.443.731	2,16
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	ASET LAINNYA						
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.894.518.584	3.270.969.561	3.270.969.561	1.613.141.616	1.613.141.616	-19,78
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
	Aset Tak Berwujud	-	-	0,00	1.495.550.635	1.495.550.635	0,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	(413.786.693)	(413.786.693)	0,00
	Aset Lain-Lain	8.242.580.215	49.615.913.830	51.380.604.965	45.011.340.830	44.936.293.547	52,80
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain						
	Jumlah Aset Lainnya	12.137.098.800	52.886.883.391	54.651.574.526	47.706.246.389	47.631.199.106	40,75

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	JUMLAH ASET	2.251.240.807.348	1.927.767.856.284	2.093.955.907.157	2.485.883.863.046	2.460.417.210.575	2,25
	KEWAJIBAN						#DIV/0!
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						#DIV/0!
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	12.523.814	-	-		
	Pendapatan Diterima Dimuka	2.217.133.022	2.040.915.268	512.944.913	458.381.718	421.756.213	-33,96
	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka			-	-		
	Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka			-	-		
	Utang Jangka Pendek Lainnya	55.257.219.799	70.595.942.783	26.053.461.442	16.760.694.980	13.559.862.063	-29,62
	Utang Beban	-	-	-	543.032.851	2.655.404.719	389,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	57.474.352.821	72.649.381.865	26.566.406.354	17.762.109.549	16.637.022.995	-26,65
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-		
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-		
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-		
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	489.597.900	489.597.900	489.597.900	489.597.900	489.597.900	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya						
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	489.597.900	489.597.900	489.597.900	489.597.900	489.597.900	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	57.963.950.721	73.138.979.765	27.056.004.254	18.251.707.449	17.126.620.895	-26,27

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	EKUITAS						
	EKUITAS						
	Equitas	2.193.276.856.627	1.854.628.876.519	2.066.899.902.903	2.467.632.155.598	2.443.290.589.680	2,74
	Sisa Kas BLUD						
	Sisa Kas JKN						
	JUMLAH EKUITAS	2.193.276.856.627	1.854.628.876.519	2.066.899.902.903	2.467.632.155.598	2.443.290.589.680	2,74
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.251.240.807.348	1.927.767.856.284	2.093.955.907.157	2.485.883.863.046	2.460.417.210.575	2,25

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Ogan Ilir periode tahun 2016-2020 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sangat berfluktuasi namun mempunyai tren yang relatif meningkat. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ditahun 2016 sebesar 172,96%. Artinya Kabupaten Ogan Ilir ditahun 2016 mempunyai kemampuan menutup hutang jangka pendeknya sebesar 172,96% dari total kewajiban jangka pendeknya. Tahun 2017, rasio lancarnya turun sebesar 159,75%, dan kemudian naik drastis ditahun 2019 menjadi 1075,94%. Kemudian ditahun 2020 turun menjadi 458,60%. Meskipun ditahun 2020 rasionya menurun namun masih dalam kategori likuid. Meskipun masih likuid namun REN rasio tahun 2019 ke 2020 yang relatif menurun perlu diwaspadai. Untuk itu pemerintah Kabupaten Ogan

Ilir harus menjaga agar jumlah kewajibannya agar tidak melebihi aset lancarnya.

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan).

Tabel III. 8
Rasio Lancar Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET LANCAR	100.255,40	116.837,80	164.657,17	196.377,44	78.543,34
KEWAJIBAN LANCAR	57.963,95	73.138,98	27.056,00	18.251,71	17.126,62
RASIO LANCAR	172,96%	159,75%	608,58%	1075,94%	458,60%

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang

digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2016-2020 berfluktuatif tapi cenderung turun secara agregat. Nilai rasio tertinggi terjadi ditahun 2017 yaitu sebesar 3,94% dan yang terendah terjadi ditahun 2020 sebesar 0,70%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2016-2020 tidak pernah lebih dari 3,94% dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Ogan Ilir sangat cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel III. 9
Rasio Hutang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN	57.963,95	73.138,98	27.056,00	18.251,71	17.126,62
EKUITAS	2.193.276,86	1.854.628,88	2.066.899,90	2.467.632,16	2.443.290,59
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	2,64%	3,94%	1,31%	0,74%	0,70%

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif hingga ditahun 2020 mencapai angka 0,70%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 3,79%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan

bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2016-2020 tidak pernah lebih dari 3,79% dari total aset yang ada yang terjadi di tahun 2017. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar dari pada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel III. 10
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 - 2020
(dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN	57.963,95	73.138,98	27.056,00	18.251,71	17.126,62
AKTIVA	2.251.240,81	1.927.767,86	2.093.955,91	2.485.883,86	2.460.417,21
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	2,57%	3,79%	1,29%	0,73%	0,70%

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Ogan Ilir dalam kurun waktu 2016-2019 tren relatif berfluktuasi namun menurun. Adapun rasio ditahun 2016 mencapai 5,20% dan menjadi 3,82% ditahun 2020. Rasio tersebut sempat naik pada tahun 2017 dengan rasio 5,53% dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi 3,00% dan terakhir menjadi 3,82% ditahun 2020. Jika

dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunaan sumberdaya aset tetap ditahun 2016 yang senilai Rp. 2,112 Triliun, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 109,76 Miliar. Sedangkan ditahun 2020 dengan mendayagunakan sumberdaya aset tetap senilai Rp 2,301 triliun, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir justru hanya mendapatkan kenaikan keuntungan Rp. 87,85 miliar. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III. 11
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 – 2020
(dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	109.762,62	95.711,84	55.362,96	86.150,57	87.849,17
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	2.112.401,84	1.730.729,93	1.845.334,67	2.209.780,21	2.301.110,44
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	5,20%	5,53%	3,00%	3,90%	3,82%

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Bedanya, pembandingnya adalah dengan total aktiva.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Ogan Ilir dalam kurun waktu 2016-2020 relatif berfluktuasi namun cenderung menurun. Rasio ditahun 2016 mencapai 4,88% dan menjadi 3,57% ditahun 2020. Dalam kurun waktu tersebut sempat naik ditahun 2017 dengan rasio sebesar 4,96% yang kemudian turun hingga 3,57 % di tahun 2020.

Secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai

kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Tabel III. 12
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2015- 2019 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	109.762,62	95.711,84	55.362,96	86.150,57	87.849,17
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2.251.240,81	1.927.767,86	2.093.955,91	2.485.883,86	2.460.417,21
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	4,88%	4,96%	2,64%	3,47%	3,57%

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ogan Ilir 2016-2020 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi

belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dengan rata-rata rasio sebesar 36,27% pertahun. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur ditahun 2016 sebesar 43,24% dari total pengeluaran daerah dan rasionya berfluktuatif hingga turun mencapai 33,84% ditahun 2020. Meskipun secara rasio menurun, namun secara nominal belanja pemenuhan kebutuhan paratur sebenarnya masih cukup wajar mengingat adanya akomodasi rutin kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah PNS.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 13
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	542.851,88	1.255.473,71	43,24%
2	2017	481.380,18	1.355.853,44	35,50%
3	2018	480.785,76	1.376.234,14	34,93%
4	2019	551.812,78	1.577.754,53	34,97%
5	2020	538.377,58	1.590.839,49	33,84%
Rata-Rata		1.297.604,09	3.578.077,65	36,27%

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat selama tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,41% pertahun dari Rp. 877,60 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 1,003 triliun ditahun 2020. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh naiknya belanja hibah dan belanja transfer bantuan keuangan. Belanja hibah naik dari Rp. 20,27 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 88,455 miliar ditahun 2020 (44,52% pertahun). Sedangkan belanja transfer pos bantuan keuangan meningkat 9,24% pertahun dari Rp. 239,42 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 312,13 miliar ditahun 2020. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 14
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Operasi	725.100,23	492.486,68	500.119,22	569.665,94	630.161,72	(3,45)
1.1	Belanja Pegawai	542.851,88	481.380,18	480.785,76	551.812,78	538.377,58	(0,21)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	750,00	3.328,37	-
1.4	Belanja Hibah	20.279,94	11.106,50	19.333,46	17.103,16	88.455,77	44,52
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.064,71	-	-	-	-	(100,00)
1.6	Belanja keuangan	160.903,70	-	-	-	-	
2	Belanja Transfer	-	239.611,40	273.387,53	294.722,47	312.132,78	9,21
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	193,75	394,25	-	-	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	239.417,65	272.993,28	294.722,47	312.132,78	9,24
3	Belanja Tak Terduga	-	-	4.680,97	-	59.115,55	#DIV/0!
4	Pengeluaran Pembiayaan	152.500,02	798,72	1.999,25	3.799,43	2.300,00	(64,96)
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	151.750,74	-	-	-	-	#DIV/0!
4.2	penyertaan modal daerah;	749,29	798,72	1.999,25	3.799,43	2.300,00	32,36
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	877.600,25	732.896,80	780.186,97	868.187,84	1.003.710,05	3,41

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) perkembangan defisit riil anggaran relatif berfluktuatif namun mempunyai tren negatif. Defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2016, 2016 dan 2020 dimana defisit tahun 2016 sebesar -Rp 12,28 miliar dan defisit tahun 2020 sebesar -Rp 81,58 miliar. Adapun tahun 2017, 2018 dan 2019 terjadi surplus riil anggaran dengan nilai sebesar Rp 7,36 miliar, Rp 40,95 miliar, dan Rp 53,28 juta.

Tabel III. 15
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.243.190,69	1.363.217,80	1.417.185,84	1.631.001,56	1.509.257,84
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.102.973,68	1.355.054,71	1.374.234,89	1.573.955,10	1.588.539,49
3	Pengeluaran Pembiayaan	152.500,02	798,72	1.999,25	3.799,43	2.300,00
	(Defisit Riil)	- 12.283,02	7.364,36	40.951,70	53.247,03	- 81.581,65

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dengan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi ditahun 2016 dan 2020 dapat ditutup oleh SiLPA dimana SiLPA yang dapat dimanfaatkan ditahun 2016 sebesar Rp 35,81 miliar dan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 125,09 miliar.

Tabel III. 16
Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	35.812,93	23.529,91	30.894,27	71.845,97	125.093,01
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-

Total Komposisi Penutup Defisit	35.812,93	23.529,91	30.894,27	71.845,97	125.093,01
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Tabel III. 17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%
Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pinjaman Daerah;	0%	0%	0%	0%	0%
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel III. 18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	% dari SiLPA A	Rp	% dari SiLPA A	Rp	% dari SiLPA A	Rp	% dari SiLPA A	Rp	% dari SiLPA A
Jumlah SiLPA	35.812,93	100 %	23.529,91	100 %	30.894,27	100 %	71.845,97	100 %	125.093,01	100 %
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										

Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	35.812,93	100%	23.529,91	100%	30.894,27	100%	71.845,97	100%	125.093,01	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2026. Dalam konteks pandemik global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPJMD kemungkinan besar akan relatif sama bahkan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin terbatas. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih efektif dan efisien khususnya terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 hingga 2026.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam RPJMD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan data yang dikaitkan dengan informasi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, diantaranya:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan mempertimbangkan target-target keuangan lainnya. Selain itu skenario proyeksi juga dibuat berdasarkan skenario moderat-optimis dengan asumsi tahun 2022/2023 perekonomian baru mulai beranjak normal. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir ini bisa mendekati proyeksi yang logis dan tidak *over estimated* dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

a. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditarget relatif tetap (flat) mengingat adanya pandemi Covid-19 ditahun 2019 dan tahun 2020 yang memungkinkan berdampak pada keuangan negara dan diperkirakan mulai normal pada tahun 2022/2023. Selain itu untuk menghasilkan proyeksi anggaran pembangunan daerah yang lebih riil, maka ada beberapa komponen pendapatan yang dikeluarkan dari proyeksi yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, dan seluruh komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Pendapatan Hibah, Pendapatan

Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya). Adapun seluruh proyeksi menggunakan tahun dasar 2020 dan melihat target RKPD 2022.

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022-2026 ditargetkan naik $\pm 0,81\%$ pertahun. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah ditargetkan naik 5% , pendapatan transfer ditargetkan naik $0,17\%$, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dikeluarkan dari proyeksi.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diproyeksi naik $\pm 5,02\%$ pertahun dimana proyeksi pada tahun 2022 sebesar Rp. 146,400 miliar naik hingga Rp. 178,065 miliar ditahun 2026. Target pertumbuhan PAD tersebut didasarkan asumsi bahwa pendapatan pajak naik $\pm 5\%$ pertahun, Pendapatan Retribusi Daerah naik $\pm 4,5\%$ pertahun, serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik $\pm 5\%$ pertahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang ditargetkan naik $\pm 5,19\%$ pertahun.

Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Adapun sumber utama proyeksi pendapatan pajak dari urutan paling besar berasal dari BPHTB Pemindahan Hak, PBBP2, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya dan BPHTB Pemberian Hak Baru. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 91,140 miliar ditahun 2022 meningkat menjadi Rp. 110,781 miliar ditahun 2026.

Sumber PAD lainnya yaitu pendapatan retribusi diproyeksikan naik sebesar $\pm 4,5\%$ pertahun dimana target pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 10,855 miliar meningkat menjadi Rp. 12,945 miliar ditahun 2026. Target proyeksi retribusi tersebut terutama diperoleh dengan memaksimalkan kontribusi sumber utama retribusi yang dari retribusi

pemberian izin mendirikan bangunan dan retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar $\pm 5\%$ pertahun dimana target tahun 2022 sebesar Rp 3 miliar ditahun 2022 dan ditargetkan meningkat menjadi Rp. 3,646 miliar ditahun 2026 yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga ditargetkan meningkat dengan rata-rata peningkatan $\pm 5,19\%$ pertahun dimana target ditahun 2022 sebesar Rp. 41,404 miliar dan meningkat menjadi Rp. 50,691 miliar ditahun 2026. Target tersebut dicapai dengan memaksimalkan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP, Jasa Giro, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, dan Pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

Seperti asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proyeksi pendapatan transfer diperoleh dengan mengeluarkan komponen DAK yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Komponen Bantuan Keuangan Provinsi dalam Pendapatan Transfer Antar Daerah. Berdasarkan asumsi pendapatan transfer yang ada, proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan relatif tetap dengan kenaikan relatif sangat kecil mencapai 0,17% pertahun dari Rp. 1,040 triliun ditahun 2022 menjadi Rp. 1,047 triliun ditahun 2026. Secara umum kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh relatif tetapnya penerimaan daerah dari transfer pemerintah pusat baik dana perimbangan maupun transfer pemerintah pusat lainnya, adapun peningkatan tersebut hanya berasal dari pendapatan tranfser antar daerah yaitu dari pendapatan bagi hasil.

Oeh karena adanya pandemic Covid-19 yang berefek pada lesunya perekonomian nasional dan global yang mungkin dampaknya masih akan berlangsung sepanjang tahun 2022 hingga beberapa tahun kedepan, maka skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

- a. Dana Perimbangan:

- Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak tidak meningkat nilainya sebagaimana target RKPD 2022, yaitu Rp. 171,053 miliar dari tahun 2022 hingga tahun 2026;
 - Nilai Dana Alokasi Umum tidak meningkat nilainya sebagaimana target RKPD 2022, yaitu Rp. 598,745 miliar dari tahun 2022 hingga tahun 2026.
 - Dana Alokasi Khusus dikeluarkan dari proyeksi.
- b. Dana Insentif Daerah dikeluarkan dari proyeksi.
- c. Dana desa diproyeksikan tidak meningkat nilainya sebagaimana target RKPD 2022, yaitu Rp 202,142 miliar dari tahun 2022 hingga tahun 2026.

Untuk transfer antar daerah hanya bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah yang diproyeksikan meningkat rata-rata dari tahun 2022-2026 sebesar 2,58% pertahun yaitu dari Rp. 68,517 miliar ditahun 2022 menjadi Rp. 75,787 miliar ditahun 2026.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 19
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026
(dalam jutaan)

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	0,81	1.186.859,43	1.193.164,31	1.201.838,76	1.212.527,35	1.225.794,35
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,02	146.400,13	152.605,01	160.679,46	169.586,03	178.065,33
1.1.2001	Pendapatan Pajak Daerah	5	91.140,00	94.482,49	99.650,81	105.505,94	110.781,24
1.1.2002	Pendapatan Retribusi Daerah	4,5	10.855,99	11.183,18	11.742,34	12.329,46	12.945,93
1.1.2003	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
1.1.2004	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,19	41.404,14	43.789,34	45.978,81	48.277,75	50.691,64
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,17	1.040.459,30	1.040.559,30	1.041.159,30	1.042.941,32	1.047.729,02
1.2.2001	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	0	971.941,79	971.941,79	971.941,79	971.941,79	971.941,79
1.2.1.1	Dana Perimbangan	0	769.799,17	769.799,17	769.799,17	769.799,17	769.799,17
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	0	171.053,93	171.053,93	171.053,93	171.053,93	171.053,93
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	0	598.745,24	598.745,24	598.745,24	598.745,24	598.745,24
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Dana Desa	0	202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62
1.2.2002	TRANSFER ANTAR DAERAH	2,58	68.517,51	68.617,51	69.217,51	70.999,53	75.787,23

1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	2,58	68.517,51	68.617,51	69.217,51	70.999,53	75.787,23
1.2.2.2	Bantuan Keuangan		-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	-	-	-	-
1.3.2001	Pendapatan Hibah	0	-	-	-	-	-
1.3.2002	Pendapatan Dana Darurat	0	-	-	-	-	-
1.3.2003	Pendapatan Lainnya	0	-	-	-	-	-

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dialokasikan tiap tahunnya. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran beberapa komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi belanja pegawai ditargetkan naik \pm 3% pertahun. Kenaikan belanja pegawai tersebut digunakan untuk akomodasi kenaikan gaji dan tunjangan serta penambahan jumlah pegawai di beberapa tahun kedepan. Meskipun belanja pegawai terus meningkat namun Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir tetap berkomitmen untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik dan realisasi pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Untuk belanja transfer tahun 2022-2026 yang digunakan untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa (mandatori Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) diproyeksikan nilainya meningkat tiap tahunnya. Begitu juga dengan proyeksi pengeluaran pembiayaan yang nilainya sama sebagaimana target RKPD 2020 yaitu Rp. 3 miliar untuk penyertaan modal daerah. Sedangkan belanja tak terduga (BTT) diproyeksikan sedikit fluktuasi dengan tren menurun 14,19% pertahun dimana alokasi BTT ditahun 2022 sebesar Rp. 17,894,51 miliar kemudian turun menjadi Rp. 12.721,4 miliar ditahun 2026.

Berdasarkan beberapa hal diatas maka total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022-2026 diproyeksikan meningkat 0,81% pertahun dengan nilai secara berturut-turut sebesar, Rp. Rp. 1.183,85943 miliar, Rp. 1.190,16431 miliar, Rp. 1.198,83876 miliar, Rp, 1.209,52735 dan Rp. 1.222,79435 miliar. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan

Mengikat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 20
Proyeksi Belanja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)		Proyeksi
			2022	2023		2024	2025	
2	BELANJA	0,81	1.183.859,43	1.190.164,31	1.198.838,76	1.209.527,35	1.222.794,35	
2.1	BELANJA OPERASI	2,47	710.568,74	727.984,81	745.903,85	764.340,87	783.311,29	
2.1.2001	Belanja Pegawai	3	554.528,91	571.164,78	588.299,72	605.948,71	624.127,18	
2.1.2002	Belanja Barang dan Jasa	0,5	156.039,83	156.820,03	157.604,13	158.392,15	159.184,11	
2.1.2002	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	
2.1.2004	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	
2.1.2005	Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	
2.1.2006	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	
2.1.2007	Belanja keuangan	0	0	0	0	0	0	
2.2	BELANJA MODAL	-5	166.074,04	157.962,87	157.177,03	140.969,83	135.266,41	
2.2.2001	Belanja Modal (Tanah)	-5	801,36	762,22	758,42	680,22	652,7	
2.2.2002	Belanja Peralatan dan Mesin	-5	40.231,50	38.266,57	38.076,20	34.150,00	32.768,34	
2.2.2003	Belanja Bangunan dan Gedung	-5	42.593,14	40.512,86	40.311,32	36.154,64	34.691,88	
2.2.2004	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-5	73.830,36	70.224,43	69.875,08	62.669,96	60.134,43	
2.2.2005	Belanja Aset Tetap Lainnya	-5	8.617,68	8.196,79	8.156,01	7.315,01	7.019,06	
2.2.2006	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0	

	(Belanja Modal BLUD)						
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	0	17.894,51	14.527,53	5.496,03	13.310,57	12.721,40
2.3.2001	Belanja Tak Terduga	-4,91	17.894,51	14.527,53	5.496,03	13.310,57	12.721,40
2.4	BELANJA TRANSFER	0	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
2.4.2001	Belanja Transfer Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	0
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0
2.4.2002	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	0	0	0	0	0	0
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0	0	0	0	0	0
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0	0

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Adapun keseluruhan proyeksi APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2022-2026 Kabupaten ogan Ilir
(dalam jutaan)

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	0,81	1.186.859,43	1.193.164,31	1.201.838,76	1.212.527,35	1.225.794,35
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,02	146.400,13	152.605,01	160.679,46	169.586,03	178.065,33
1.1.2001	Pendapatan Pajak Daerah	5	91.140,00	94.482,49	99.650,81	105.505,94	110.781,24
1.1.2002	Pendapatan Retribusi Daerah	4,5	10.855,99	11.183,18	11.742,34	12.329,46	12.945,93
1.1.2003	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
1.1.2004	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,19	41.404,14	43.789,34	45.978,81	48.277,75	50.691,64
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,17	1.040.459,30	1.040.559,30	1.041.159,30	1.042.941,32	1.047.729,02
1.2.2001	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	0	971.941,79	971.941,79	971.941,79	971.941,79	971.941,79
1.2.1.1	Dana Perimbangan	0	769.799,17	769.799,17	769.799,17	769.799,17	769.799,17
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	0	171.053,93	171.053,93	171.053,93	171.053,93	171.053,93
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	0	598.745,24	598.745,24	598.745,24	598.745,24	598.745,24
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Dana Desa	0	202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62	202.142,62

1.2.2002	TRANSFER ANTAR DAERAH	2,55	68.517,51	68.617,51	69.217,51	70.999,53	75.787,23
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	2,55	68.517,51	68.617,51	69.217,51	70.999,53	75.787,23
1.2.2.2	Bantuan Keuangan		-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	-	-	-	-
1.3.2001	Pendapatan Hibah	0	-	-	-	-	-
1.3.2002	Pendapatan Dana Darurat	0	-	-	-	-	-
1.3.2003	Pendapatan Lainnya	0	-	-	-	-	-
2	BELANJA	0,81	1.183.859,43	1.190.164,31	1.198.838,76	1.209.527,35	1.222.794,35
2.1	BELANJA OPERASI	2,47	710.568,74	727.984,81	745.903,85	764.340,87	783.311,29
2.1.2001	Belanja Pegawai	3	554.528,91	571.164,78	588.299,72	605.948,71	624.127,18
2.1.2002	Belanja Barang dan Jasa	0,5	156.039,83	156.820,03	157.604,13	158.392,15	159.184,11
2.1.2002	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2.1.2004	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
2.1.2005	Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
2.1.2006	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
2.1.2007	Belanja keuangan	0	0	0	0	0	0
2.2	BELANJA MODAL	-5	166.074,04	157.962,87	157.177,03	140.969,83	135.266,41
2.2.2001	Belanja Modal (Tanah)	-5	801,36	762,22	758,42	680,22	652,7
2.2.2002	Belanja Peralatan dan Mesin	-5	40.231,50	38.266,57	38.076,20	34.150,00	32.768,34
2.2.2003	Belanja Bangunan dan Gedung	-5	42.593,14	40.512,86	40.311,32	36.154,64	34.691,88
2.2.2004	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-5	73.830,36	70.224,43	69.875,08	62.669,96	60.134,43

2.2.2005	Belanja Aset Tetap Lainnya	-5	8.617,68	8.196,79	8.156,01	7.315,01	7.019,06
2.2.2006	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	0	0	0	0	0	0
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	0	17.894,51	14.527,53	5.496,03	13.310,57	12.721,40
2.3.2001	Belanja Tak Terduga	-4,91	17.894,51	14.527,53	5.496,03	13.310,57	12.721,40
2.4	BELANJA TRANSFER	0	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
2.4.2001	Belanja Transfer Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	0
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0
2.4.2002	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	0	0	0	0	0	0
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0	0	0	0	0	0
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0	0
	SURPLUS / (DEFISIT)	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	PEMBIAYAAN	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		-	-	-	-	-
3.1.2001	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0	-	-	-	-	-
3.1.2002	Pencairan Dana Cadangan	0	-	-	-	-	-
3.1.2003	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0	-	-	-	-	-
3.1.2004	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0	-	-	-	-	-
3.1.2005	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	-	-	-	-	-

3.1.2006	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.2.2001	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	-	-	-	-	-
3.2.2002	Penyertaan modal daerah;	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.2.2003	Pembentukan Dana Cadangan;	0	-	-	-	-	-
3.2.2004	Pemberian Pinjaman Daerah;	0	-	-	-	-	-
3.2.2005	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendapatan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2022 hingga 2026 diproyeksi dengan tren peningkatan namun relatif datar. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III. 22
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1.186.859,43	1.193.164,32	1.201.838,77	1.212.527,35	1.225.794,35
2.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN					
	<i>(Dikurangi):</i>					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	861.745,56	875.381,41	884.057,6	910.165,36	928.343,83
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	322.113,87	314.782,9	314.781,16	299.361,99	294.450,52

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan

kembali. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel III. 23
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1.186.859,43	1.193.164,32	1.201.838,77	1.212.527,35	1.225.794,35
2.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	1.186.859,43	1.193.164,32	1.201.838,77	1.212.527,35	1.225.794,35
	<i>(Dikurangi):</i>					
3	Belanja Transfer	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
4	Belanja Tak Terduga	17.894,51	14.527,53	5.496,03	13.310,57	12.721,40
5	Pengeluaran Pembiayaan	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	876.642,78	885.947,69	903.080,89	905.310,70	918.577,70

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Dengan kapasitas riil yang tersedia sebagaimana tabel diatas maka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas diatas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III. 24
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	876.642,78	885.947,69	903.080,89	905.310,70	918.577,70
2	Prioritas I	535.500,59	538.575,99	546.680,32	552.357,53	558.269,24
3	Prioritas II	221.180,05	228.827,91	227.304,08	229.060,97	228.136,52
4	Prioritas III	119.962,14	118.543,79	129.096,49	123.892,20	132.171,94
	JUMLAH	876.642,78	885.947,69	903.080,89	905.310,70	918.577,70

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir yang dirumuskan, akan memberikan jalan bagi kepala daerah terpilih dalam mewujudkan kesejahteraan daerah melalui koridor janji politik yang telah ditetapkan sehingga dokumen perencanaan tersebut akan menjadi pengejawantahan setiap langkah kebijakan kepala daerah terpilih. Upaya untuk mewujudkan Ogan Ilir Bangkit menjadi koridor untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Selanjutnya, kebijakan yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah nantinya harus didasari berbagai permasalahan dan isu strategi pembangunan yang relevan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan mampu menjawab problematika pelaksanaan pembangunan selama ini.

Perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Alhasil, jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir pada periode pembangunan berkenaan.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional merupakan suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat. Setiap peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat

harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Ogan Ilir sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran

permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir, yakni: “Belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Ogan Ilir tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik;
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah;
4. Belum optimalnya perwujudan kesejahteraan masyarakat;
5. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar berkelanjutan; dan
6. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar IV.1.
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026



Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparancy*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir yang belum terwujud, beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada, hingga pemerataan pembangunan daerah yang masih berpusat pada daerah perkotaan.

Indeks Reformasi Birokrasi di Ogan Ilir cukup rendah dimana capaian pada tahun 2020 hanya sebesar 35,66 (C) sehingga perlu adanya perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Sedangkan dari Nilai SAKIP sebesar 53,19 dimana capaian ini tergolong tidak maksimal karena dengan angka 53,19 masih jauh dibawah angka Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai SAKIP sebesar 78,94. Ke depan perlu adanya prioritas peningkatan kualitas dan kapabilitas pelaksanaan pemerintahan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi Ogan Ilir menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih minimnya kesadaran ASN maupun rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih

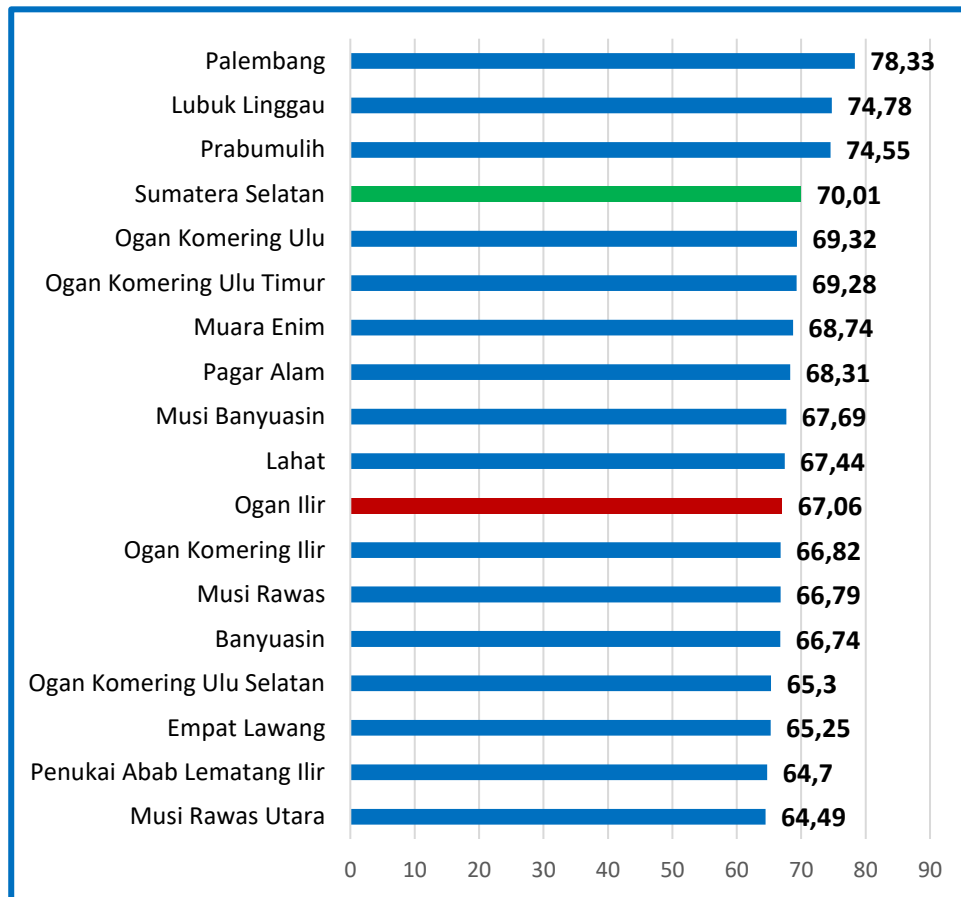
lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan.

2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Ilir (67,06) berada di bawah angka Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 70,01. Dengan capaian ini, IPM Ogan Ilir berada di peringkat ke-10 dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Gambar IV.2.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020

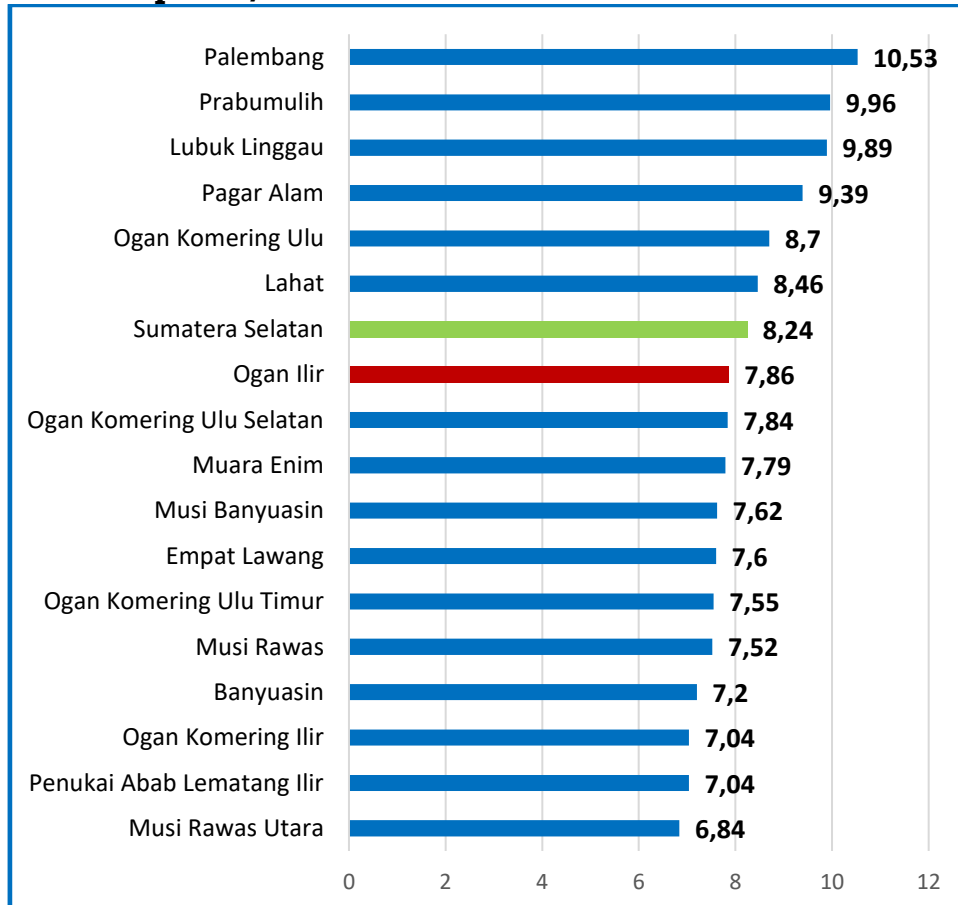


Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

Dari sisi pendidikan, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Ogan Ilir meningkat dari tahun ke tahun. Namun kedua komponen penyusun IPM ini masih berada di bawah angka Provinsi Sumatera Selatan. Capaian rata-rata lama sekolah Ogan Ilir sebesar 7,86 tahun masih belum setinggi Sumatera Selatan yang mencapai 8,24 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah juga memiliki pola yang sama dimana capaiannya masih lebih rendah dibanding angka provinsi. Masih minimnya pelayanan pendidikan seperti kapasitas tenaga pendidik kependidikan, keterbatasan biaya masyarakat miskin dalam menempuh pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang belum optimal, hingga

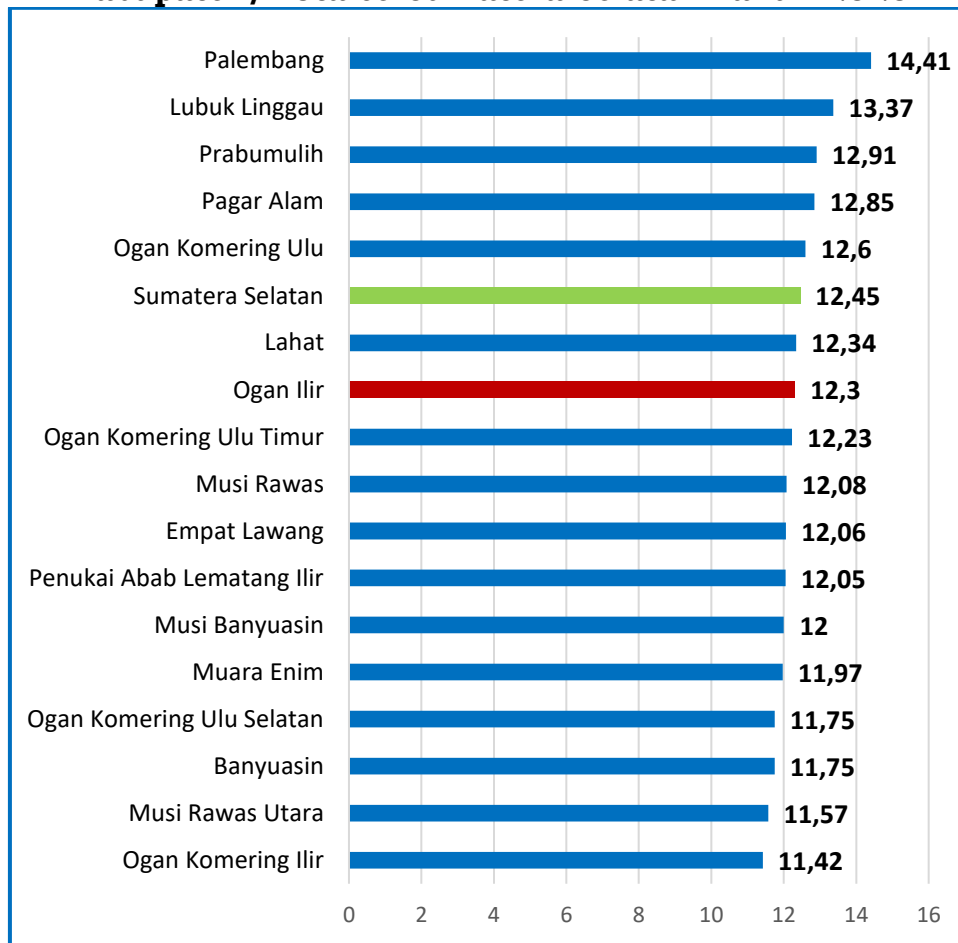
aksesibilitas fasilitas pendidikan menjadikan permasalahan pendidikan perlu dirumuskan secara terinci.

Gambar IV.3.
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020



Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

Gambar IV.4.
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020



Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

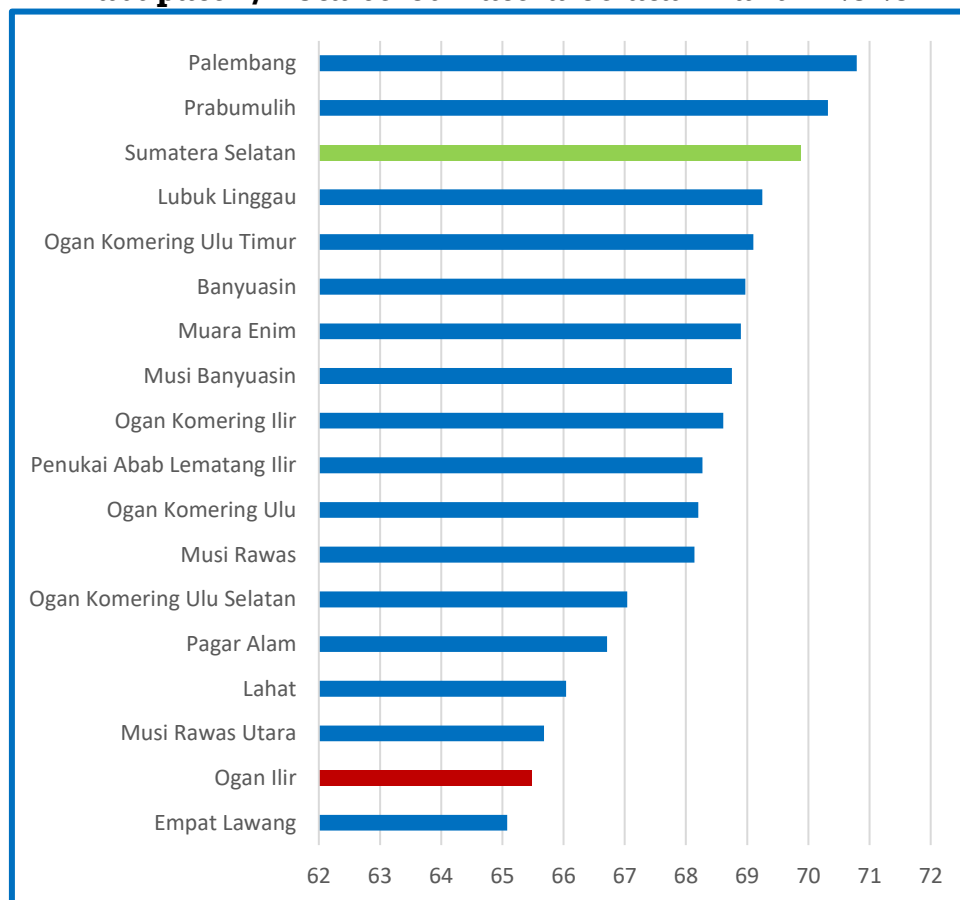
Salah satu concern pemerintah dalam mengembangkan SDM Ogan Ilir adalah peningkatan kapasitas kepemudaan dan olahraga daerah. Terlihat bahwa jumlah klub dan gedung olahraga mengalami peningkatan. Namun prestasi yang saat ini dimiliki masih harus terus ditingkatkan karena jumlah medali atlet muda yang didapatkan mengalami penurunan dari 14 medali pada tahun 2017 menurun menjadi 2 medali pada tahun 2019. Penurunan prestasi ini perlu diupayakan perolehan medali kembali melalui optimalisasi dan peningkatan kualitas pembinaan atlet muda.

Dari komponen kesehatan, terlihat bahwa angka harapan hidup Ogan Ilir masih rendah dimana berada pada peringkat kedua terendah setelah Kabupaten Empat Lawang dengan capaian harapan hidup selama 65,48

tahun. Hal ini menjadikan posisi derajat kesehatan masyarakat Ogan Ilir menjadi sorotan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari sisi lain, adanya arahan Ogan Ilir sebagai salah satu daerah konvergensi stunting menjadikan permasalahan anak stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan daerah. Terlihat cukup tingginya angka stunting yang mencapai 13,07 persen tentu perlu adanya antisipasi dan penyelesaian dari berbagai sektor, khususnya kesehatan dan kemiskinan. Selain itu terdapat beberapa kondisi terkait kesehatan masyarakat seperti semakin meningkatnya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, belum optimalnya layanan kesehatan, hingga kurangnya tenaga kesehatan hingga mewabahnya pandemi Covid-19 yang masih bertambah pasien positif di Ogan Ilir.

Gambar IV.5.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020



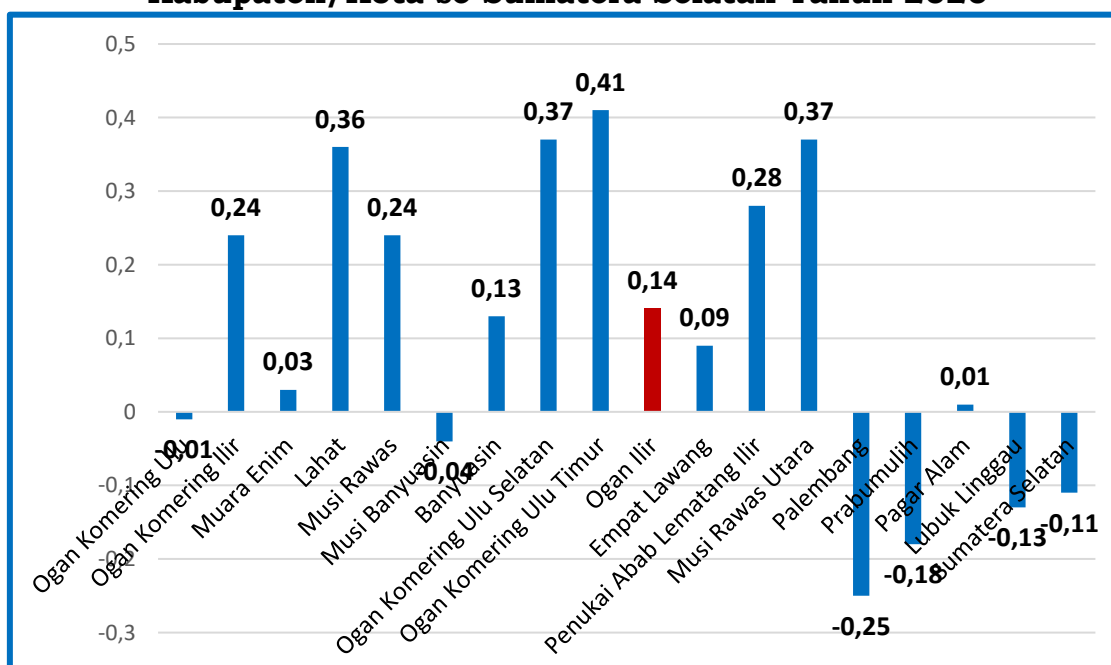
Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Ogan Ilir dimana concern yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan pembangunan, maka terlihat bahwa kemandirian daerah dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan masih minim, Terlihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Derajat Otonomi Fiskal Daerah) pada APBD yang hanya mencapai 5,82 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata lima tahun terakhir sebesar 6,07 persen.

Gambar IV.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020



Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Ogan Ilir melambat namun tetap berada pada posisi pertumbuhan ekonomi positif 0,14 persen. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor pertanian yang tidak terdampak langsung dan signifikan oleh Pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang menyertainya.

Perlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa kategori lapangan usaha dominan pada perekonomian Ogan Ilir namun memiliki pertumbuhan ekonomi melambat bahkan mengalami kontraksi negatif. Sektor yang dominan pada perekonomian daerah sekaligus potensial dalam pembangunan perekonomian Ogan Ilir seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan ekonomi -1,84 persen. Sedangkan sektor dominan industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dari 6,53 persen pada tahun 2019 menjadi 0,36 persen pada tahun 2020. Hanya sektor pertanian saja yang mampu bertahan dari dampak Pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi yang masih stabil di angka 1,34 persen pada tahun 2020.

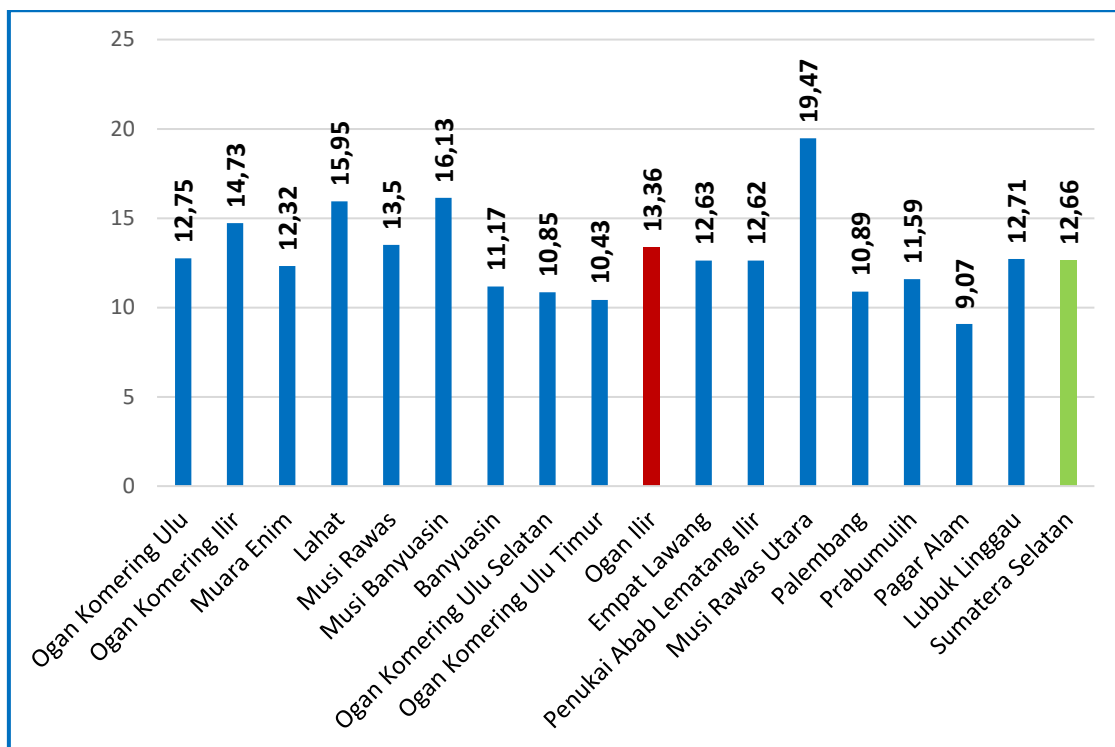
4. Belum optimalnya perwujudan kualitas kesejahteraan masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Terkait hal tersebut, terlihat bahwa angka kemiskinan di Ogan Ilir cukup tinggi hingga mencapai 13,36 persen dan berada di atas angka Sumatera Selatan yang mencapai 12,66 persen. Adapun kesenjangan kesejahteraan di Kabupaten Ogan Ilir masih harus diturunkan dimana angka gini rasio Ogan Ilir tahun 2020 mencapai 0,32 peringkat 8 dari 17 kabupaten/kota tepat berada di bawah Ogan Komering Ulu. Pemerataan

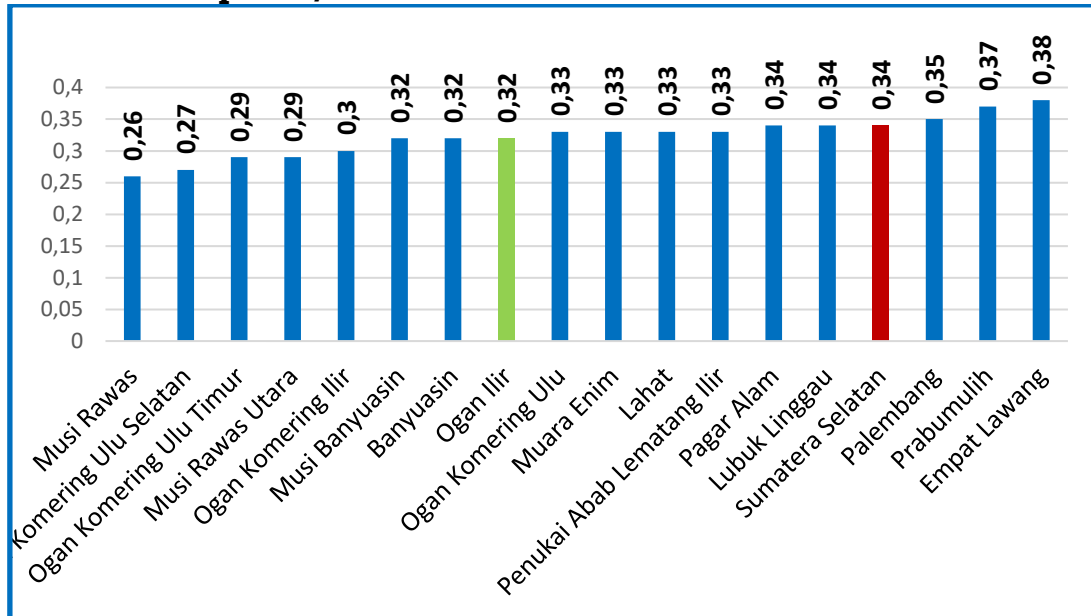
pembangunan daerah dapat ditingkatkan dengan mewujudkan infrastruktur konektivitas yang lebih baik serta memberikan kesempatan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk berkembang baik dari segi pendidikan maupun kesehatan.

Gambar IV.7.
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020



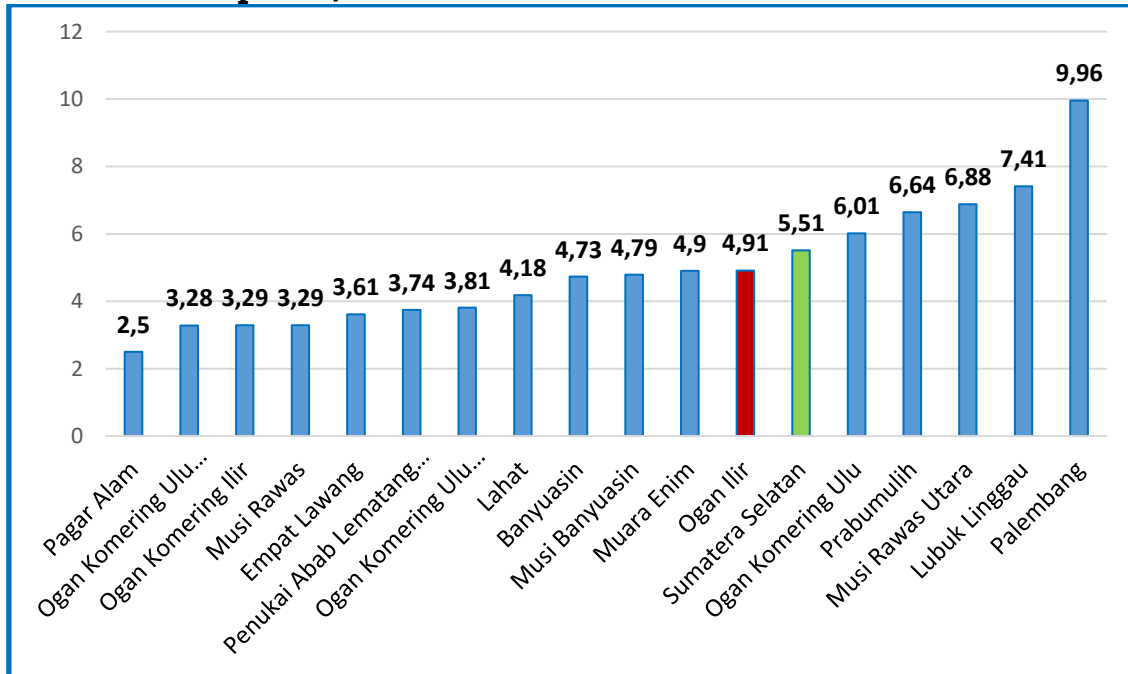
Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

Gambar IV.8.
Indeks Gini
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020



Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

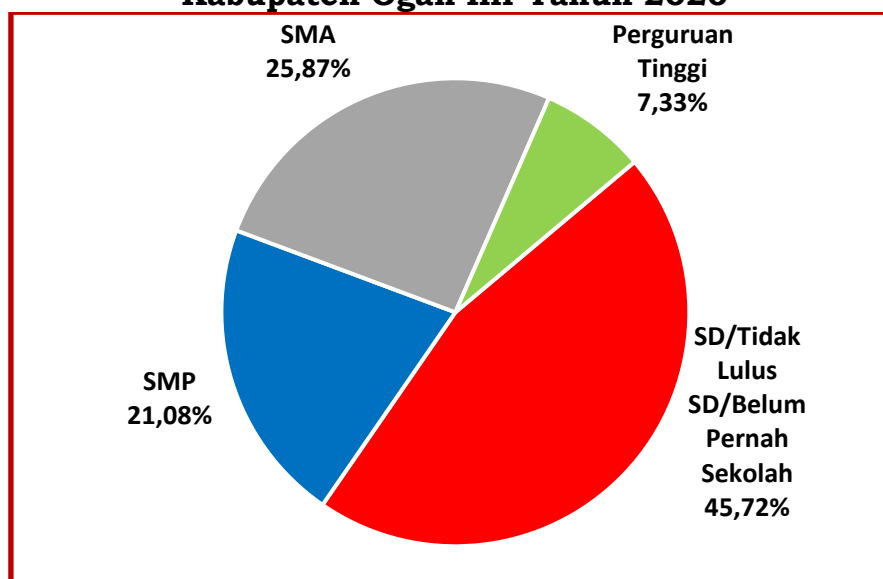
Gambar IV.9.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020



Sumber: BPS Sumatera Selatan, Tahun 2021

Dari sisi ketenagakerjaan, terlihat bahwa angka pengangguran di Ogan Ilir meningkat sebagai dampak COVID-19 menjadi 4,91 persen pada tahun 2020. Jika diperbandingkan dengan daerah sekitar, maka pengangguran di Ogan Ilir cukup tinggi dengan menduduki peringkat ke-enam dan berada tepat di bawah angka Sumatera Selatan. Selain itu, jika melihat dari sisi kompetensi tenaga kerja, maka terlihat bahwa kompetensi sebagian angkatan kerja yang merupakan calon tenaga kerja di Ogan Ilir masih belum optimal dimana sebanyak 45,72 persen angkatan kerja hanya berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Tentu saja hal ini menjadikan pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak maksimal mengingat keahlian yang dimiliki belum mampu bersaing di pasar kerja.

Gambar IV.10.
Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021

5. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar berkelanjutan

Visi konektivitas nasional adalah terintegrasi secara lokal, terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*). Simpul transportasi rantai pasok dapat saling terintegrasi secara efektif dan efisien. Pemerataan pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik (*physical connectivity*) khususnya konektivitas rantai pasok antar wilayah berdasarkan

komoditas. Infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kurangnya infrastruktur dasar mengakibatkan daya saing bangsa menjadi rendah karena infrastruktur dapat meningkatkan kenikmatan antar sektor, komoditas dan wilayah, memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Ogan Ilir kaya akan produk-produk kerajinan seperti pandai besi, pengrajin emas dan perak, pengrajin prabot rumah tangga berbahan dasar aluminium, pengrajin anyaman purun, kerupuk kemplang dan pengrajin songket dan lain-lain. Semua kegiatan ekonomi tersebut diusahakan dalam skala rumah tangga yang tergolong dalam usaha kecil, menengah dan mikro. Sesungguhnya pengusaha dan pengrajin tersebut merupakan aset bagi Kabupaten Ogan Ilir karena tidak banyak wilayah lain memiliki pengrajin dan usaha tersebut. Hal ini sayangnya belum didukung oleh konektivitas atau jaringan rantai pasok yang memadai seperti dibangun infrastruktur sentra produksi komoditas khas lokal. Dampak dari konektivitas antar produsen dan pedagang serta konsumen adalah kurang berkembangnya UMKM khas daerah Ogan Ilir tersebut. Sehingga menyebabkan arus barang dan jasa menjadi tersendat. Akibatnya tidak terjadi kegiatan yang saling melengkapi antar wilayah. Dengan demikian kegiatan ekonomi menjadi tidak optimal karena tidak ditopang oleh konektivitas rantai pasok berdasarkan komoditas.

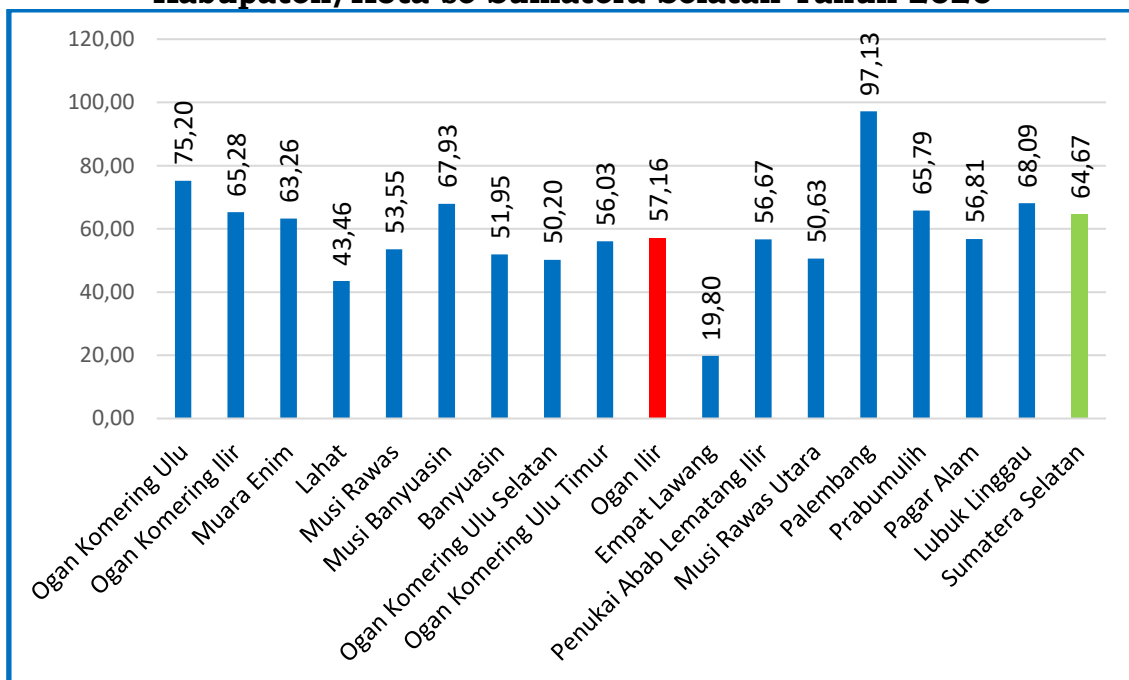
Dengan dibangunnya konektivitas rantai pasok akan memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Memperluas wilayah pertumbuhan melalui konektivitas wilayah *inter-moda supply chain system* yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat pertumbuhan. Selain itu dapat mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan antar daerah sentra produksi dengan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga mendapat manfaat pembangunan.

Permasalahan yang cukup serius dan perlu penanganan yang baik adalah infrastruktur dasar, berupa pengadaan air bersih dan sanitasi. Perkembangan jumlah rumah tangga pengguna air bersih selama 5 tahun

terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2015 sampai 2017 jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat dari 56,40 persen menjadi 61,14 persen. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 58,29 persen dan pada tahun 2019 sempat meningkat drastis yaitu menjadi 69,30 persen dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 57,16 persen.

Angka ini berada jauh di bawah angka Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 64,67 persen. Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri bagaimana untuk meningkatkan kembali rumahtangga pengguna air bersih karena merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar IV.11.
Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Air Minum Bersih Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2020



Sumber: BPS Sumatera Selatan Tahun 2021

Permasalahan sanitasi juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir karena jumlah rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi sebanyak 54,02 persen. Permasalahan air bersih dan sanitasi berkaitan dengan kondisi lingkungan setempat. Dimana Kabupaten Ogan Ilir terdapat banyak rawa lebak dan air menggenang atau banjir di musim hujan maka sulit untuk memastikan air bersih sepanjang tahun. Demikian

juga dengan sanitasi, karena banyak penduduk yang tinggal di sekitar rawa lebak maka buang air dilakukan di rawa lebak tersebut. Oleh karena itu selain membangun infrastruktur fisik, juga diperlukan sosialisasi dan edukasi hidup bersih dan sehat khususnya tentang air bersih dan sanitasi.

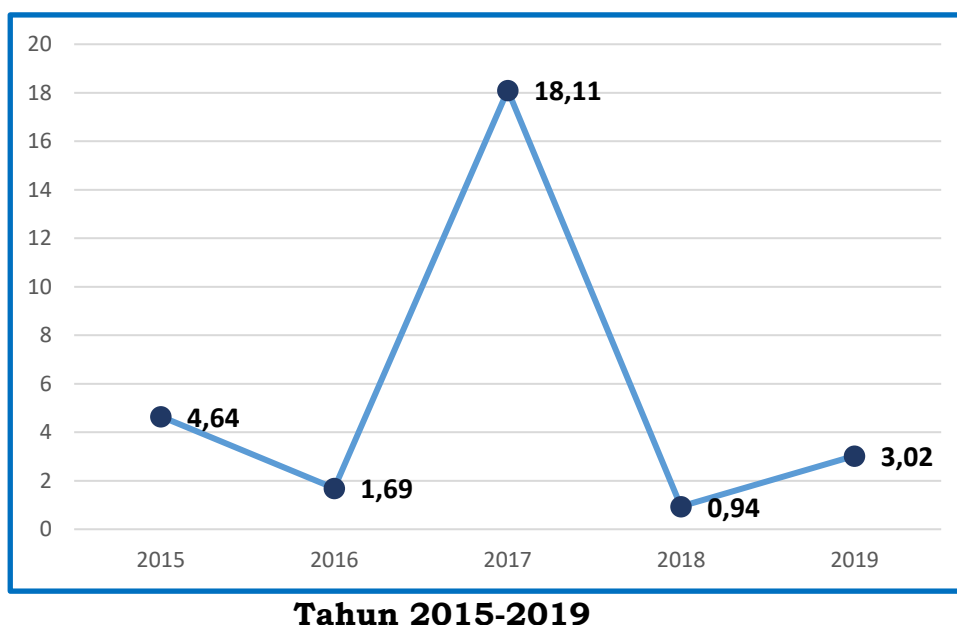
6. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah

Kondusivitas wilayah merupakan upaya untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya kondisi yang kondusif dari segi keamanan maupun politik, maka akan meningkatkan iklim investasi yang mampu menarik penanaman modal daerah.

Adapun kriminalitas yang tertangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2015-2019 yang paling tinggi yaitu di Daerah Pemulutan. Selain itu, kasus yang paling tinggi berada pada tahun 2019. Jenis kriminalitas yang ditangani yang paling banyak di Ogan Ilir merupakan pencurian sehingga perlu adanya penanganan khusus terkait kasus tersebut.

Jika dilihat dari Angka Kriminalitas, maka terlihat adanya peningkatan kasus kriminalitas pada tahun 2017 dengan total 76 kasus tindak kriminal sehingga memiliki capaian angka kriminalitas 18 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini pun berkurang pada tahun 2019, namun meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 3 kasus per 100.000 penduduk.

Gambar IV.12.
Angka Kriminalitas Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Polsek Ogan Ilir, 2020.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Ogan Ilir.

Tabel IV.1
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik	Belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik
	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan

Permasalahan Pokok	Permasalahan
	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
	Merebaknya Pandemi COVID-19 dan tingginya angka Stunting
	Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak
Belum optimalnya pengembangan ekonomi mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian
	Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian
	Belum optimalnya penanaman modal usaha di Ogan Ilir
Belum optimalnya perwujudan kualitas kesejahteraan masyarakat	Pendapatan masyarakat masih belum layak
	Kompetensi dan keterampilan tenaga kerja masih rendah
Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar berkelanjutan	Belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah
	Belum meratanya fasilitas rumah dan pemukiman layak huni
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup
Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah	Belum optimalnya ketahanan keamanan daerah
	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya

tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Ogan Ilir adalah adanya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara

akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi COVID-19. Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Ogan Ilir seperti:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam

mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara

berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;

16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan

17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia

selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Ogan Ilir.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya

penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan

- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan

- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera dilakukan

akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dimana Kabupaten Ogan Ilir termasuk pada Koridor Pertumbuhan.

Pengembangan komoditas unggulan di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan akan difokuskan pada komoditas kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi.

Selain itu, terdapat beberapa proyek prioritas lain di Kabupaten Ogan Ilir yang akan dilaksanakan seperti revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, pengembangan kawasan karet, pembangunan jalan tol trans Sumatera, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan, SPALD-T Skala Permukiman, Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA), dan proyek prioritas pengembangan desa terpadu.

b. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Corona Virus Disease* 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan

tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Perencanaan Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Sumatera Selatan pada periode pembangunan tahun 2018-2023 adalah “Sumsel Maju Untuk Semua”. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan yakni:

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang Tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun di perdesaan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, professional, dan mejunjung tinggi nilai-nilai keimana, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Tabel IV.2
Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

MISI	SASARAN PEMBANGUNAN
MISI I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maju ekonomi kerakyatan; 2. Maju investasi, Industri dan perdagangan; 3. Maju pertanian rakyat dan kedaulatan pangan; 4. Maju kesejahteraan masyarakat; 5. Maju akses energi.
MISI II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maju kesehatan masyarakat; 2. Maju akses Pendidikan berkualitas;

MISI	SASARAN PEMBANGUNAN
	3. Maju pembangunan responsive gender, dan perlindungan anak.
MISI III	1. Maju pelayanan public berkualitas 2. Maju pembangunan yang transparan dan akuntabel 3. Maju aparatur profesional dan berkualitas
MISI IV	1. Maju kualitas lingkungan hidup 2. Maju infrastruktur dan konektivitas
MISI V	1. Maju stabilitas keamanan, ketertiban, dan kehidupan beragama 2. Maju seni budaya dan pariwisata 3. Maju pemuda dan olahraga

Pada arahan kebijakan pengembangan kewilayahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir memiliki Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Strategis, yaitu:

1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi Kawasan Minapolitan Pemulutan Barat (kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi), dan Kebun Raya Sriwijaya dan Kawasan Hutan Rawa Gambut (memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup).
2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi Kawasan Perkotaan Indralaya dan sekitarnya (PKW), Kawasan Koridor Kota Palembang-Indralaya, Kawasan Koridor Indralaya-Tanjung Raja, Kawasan Agropolitan Muara Kuang dan Indralaya Utara, Kawasan Minapolitan Pemulutan Barat, Kawasan Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi (KTM) Parit Rambutan, Kawasan Kurang Berkembang Rambang Kuang dan Muara Kuang.
3. Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya (Palindra) sepanjang 22 Km dengan investasi sekitar Rp. 3,301 Triliun yang dibangun pada tahun 2015-2018 yang merupakan bagian dari 8 (delapan) ruas Trans Sumatera. Selain itu, Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 110 km.

Pada arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Ilir juga merincikan beberapa poin penting, seperti:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,03% - 6,13% melalui sektor unggulan.
2. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,25%, yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3. Peningkatan IPM menjadi 69,89.
4. Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 59,04%, akses air minum layak sebesar 47,96%, dan akses sanitasi layak sebesar 54,80%.
5. Pengembangan Pusat Pendidikan.
6. Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya dan Science Techno Park (STP).
7. Percepatan Pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih-Muara Enim.
8. Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
9. Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
10. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan.

4.2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ogan Ilir

Perencanaan pembangunan jangka panjang Ogan Ilir sudah memasuki periode pamungkas pencapaian visi pembangunan jangka panjang yakni perencanaan pembangunan jangka menengah 2021-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir masa bakti 2021-2026, juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 dengan Visi: “Terwujudnya Ogan Ilir yang SANTRI Menuju Masyarakat Sejahtera”.

SANTRI memiliki dua pengertian pokok yaitu: Pengertian pertama, SANTRI dalam arti harfiah adalah aktifitas kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Ogan Ilir yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam. Pengertian Kedua, adalah sebagai singkatan dari Subur, Amanah Nyaman, Tertib, Religius dan Indah. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kabupaten Ogan Ilir 2005-2025 sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpendidikan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia (HAM) dan demokrasi;
- (3) Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah yang berakhlak mulia, jujur, adil, sejahtera, profesional, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat serta mempermudah pelayanan terhadap masyarakat;
- (4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa dengan pengelolaan pembangunan dan perekonomian masyarakat desa;
- (5) Menjadikan Ogan Ilir sebagai Kawasan pertumbuhan baru bidang perdagangan, perindustrian dan Pendidikan di selatan Kota Palembang;
- (6) Mengembangkan aksesibilitas, pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- (7) Mengembangkan zona agribisnis, agroindustry, industry kecil dan menengah, penguatan kelembagaan dan pemasaran produk;
- (8) Mengelola sumber daya Alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
- (9) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan
- (10) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sehingga terdapat kesetaraan dengan kaum laki-laki sesuai dengan kaidah pengarusutamaan gender.

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Ogan Ilir sehingga menjadi penentu dalam pencapaian target yang dicanangkan dengan prioritas pembangunan yang menyeluruh di semua bidang. Adapun arah kebijaksanaan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 untuk tahap keempat pembangunan jangka menengah daerah adalah:

A. Arah kebijakan Dasar

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diarahkan untuk menjadi SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia, yang dilakukan dengan peningkatan akses dan pemerataan, dan mutu pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan, keluarga berencana, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama dan perlindungan sosial.
- (2) Pengembangan potensi ekonomi lokal yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk lokal untuk bersaing di luar yang dikembangkan dengan peningkatan jumlah, mutu dan produktivitas usaha kecil menengah, penciptaan penguasaan dan penerapan teknologi yang berbasis agribisnis dan agroindustri khususnya yang mendukung ketahanan pangan dan industri rakyat.
- (3) Pembangunan prasarana dasar yang diarahkan pada peningkatan mutu dan pemanfaatan sumber daya air untuk kehidupan, pengembangan sarana perhubungan, pembangunan perumahan dan permukiman sehat yang berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan energi listrik, prasarana sanitasi lingkungan (pengelolaan sampah dan MCK).

B. Arah Kebijakan Strategis:

- (1) Mewujudkan masyarakat Ogan Ilir yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, beretos kerja tinggi dan kompetitif di era globalisasi, berdisiplin tinggi, didasari akhlak mulia dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- (2) Menwujudkan Ogan Ilir yang subur, aman, nyaman, tertib, menjunjung tinggi hak azazi manusia, melaksanakan penegakan hukum, serta menjalankan proses demokrasi dan pendidikan politik yang sehat dan dinamis;
- (3) Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang dapat melayani masyarakat secara prima, menjadikan pemerintah yang baik (good governance), jujur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (4) Menjadikan Ogan Ilir pusat pertumbuhan baru sebagai pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa di selatan Kota Palembang;
- (5) Menjadikan Ogan Ilir sebagai pemasok beras, sayur-sayuran, buah-buahan kebutuhan Kota Palembang dan sekitarnya;
- (6) Memberikan kewenangan otonomi desa yang seluas-luasnya kepada masyarakat perdesaan dalam mengelola sumberdaya dan pembangunan di lingkungan dalam suasana kebersamaan dan gotong royong dengan memanfaatkan potensi lokal untuk mencapai kemakmuran rakyat;
- (7) Menjadikan Ogan Ilir sebagai urat nadi perekonomian regional dan nasional, karena posisinya sebagai poros menuju Palembang, Prabumulih, OKU, OKI dan Provinsi Lampung dan Pulau Jawa;
- (8) Menyiapkan sarana infrastruktur perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten, membuka dan mengembangkan aksesibilitas yang seimbang antar desa di ibu kota kecamatan, dan kecamatan ke Ibukota kabupaten, serta aksesibilitas kecamatan ke perkantoran instansi pemerintah dan pengembangan sarana jalan dalam kota Indralaya sebagai ibukota kabupaten.

4.2.3.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Ogan Ilir. RPJMD Kabupten Ogan Ilir memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. RTRW Kabupaten Ogan Ilir memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011-2031 bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal dengan meningkatkan perekonomian dan integrasi wilayah secara spasial yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ogan Ilir meliputi:

- (1) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun luar wilayah provinsi terutama pada kawasan yang berdekatan dengan Kota Palembang dalam konteks Kawasan Metropolitan Palembang;
- (2) Peningkatan aksesibilitas daerah yang relatif tertinggal melalui pengembangan prasarana wilayah;
- (3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dasar secara terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- (4) Peningkatan upaya pelestarian lingkungan berupa kawasan perlindungan keanekaragaman hayati setempat dan rawa konservasi untuk fungsi ekologis dan biologis;
- (5) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing; dan
- (6) Pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.

Sinkronisasi dan strategi RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Ilir dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Ogan Ilir dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan strategi RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Ilir juga diarahkan:

- (1) Memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- (2) Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- (3) Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah provinsi dan nasional;
- (4) Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- (5) Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (6) Menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar OPD.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan. Telaah terhadap RTRW kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk:

- (1) Terciptanya sinkronisasi dan strategi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota;
- (2) Keterpaduan struktur dan pola ruang dengan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- (3) Memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

4.2.3.4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ogan Ilir

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir wajib memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini menjadi penting mengingat KLHS akan memberikan masukan terkait pembangunan berkelanjutan sebagai amanat Presiden dan Internasional dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan di Kabupaten Ogan Ilir, dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 189 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan terhadap Kabupaten Ogan Ilir.

Dari 17 TPB dengan jumlah indikator 189, indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional adalah berjumlah 92 indikator atau 49 persen, sedangkan indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional berjumlah 19 indikator atau 10 persen, selanjutnya 78 indikator atau 41 persen yang belum memiliki data.

Berdasarkan pilar pembangunan berkelanjutan, maka persentase capaian TPB yang masih rendah diatas dibagi menurut 4 pilar dengan rincian capaian TPB sebagai berikut:

- a) Pilar sosial dengan capaian TPB sebesar 59,4 persen untuk pelaksanaan 57 indikator TPB dari 96 butir tujuan TPB.
- b) Pilar ekonomi dengan capaian TPB sebesar 22,5 persen untuk pelaksanaan 9 Indikator dari 40 butir tujuan TPB;
- c) Pilar lingkungan dengan capaian TPB sebesar 40,6 persen untuk pelaksanaan 13 Indikator dari 32 butir tujuan TPB;
- d) Pilar hukum & tata kelola dengan capaian 61,9 persen untuk pelaksanaan 13 Indikator dari 21 butir tujuan TPB.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Ogan Ilir cukup baik meskipun membutuhkan berbagai *treatment* di beberapa indikatornya yang kemudian akan dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan Ogan Ilir lima tahun mendatang. Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan capaian TPB berstatus belum mencapai target akan dibahas dan dikaji lebih

mendalam sebagai dasar penetapan kebijakan dimaksud. Sedangkan pada capaian TPB yang sudah mencapai target maka dilakukan akselerasi untuk percepatan perwujudan visi pembangunan daerah.

4.2.3.5. Isu Strategis Kabupaten Ogan Ilir

Perumusan isu strategis Kabupaten Ogan Ilir dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Ogan Ilir yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Ogan Ilir, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Ilir periode pembangunan 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut.

a. Ketimpangan Hasil Pembangunan Antar Wilayah Ogan Ilir

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah menyejahterakan masyarakat secara adil dan berkualitas. Oleh karena itu, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, pemerataan juga menjadi perhatian pemerintah dalam perwujudan visi dan misi pembangunannya. Namun hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dimana masih terdapat ketimpangan pelaksanaan pembangunan yang belum dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Ketimpangan yang terjadi di Ogan Ilir merupakan kesenjangan pada pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan infrastruktur pembangunan fisik hingga perekonomian daerah. Ketimpangan yang tampak terlihat antara wilayah bagian utara Ogan Ilir Kota Indralaya jalur lintas Sumatera sampai Tanjung Raja yang relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah bagian Timur (Pemulutan Selatan, Rantau Panjang, Sungai Pinang, Kandis, Betung sampai Muara Kuang). Diharapkan ketimpangan ini dapat diselesaikan dengan berbagai upaya seperti:

- Memberikan kemudahan pertumbuhan investasi di bidang industri
- Mengembangkan pendidikan di seluruh wilayah dengan Kota Indralaya sebagai pusat pendidikan umum dan pusat pendidikan agama Islam
- Mengembangkan usaha dagang dan jasa dengan Kota Indralaya sebagai pusat perdagangan dan jasa
- Mengembangkan kawasan wisata dengan kota Indralaya sebagai pusat rekreasi dan wisata
- Membangkitkan usaha ekonomi kecil menengah di seluruh wilayah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi

b. Ogan Ilir Sebagai Bagian dari Metropolitan Kota Palembang.

Posisi wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagai bagian dari Metropolitan Kota Palembang merupakan posisi yang menguntungkan dan strategis bagi pengembangan pembangunan wilayah. Berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang ada di Kota Palembang dapat mudah dinikmati oleh masyarakat Kota Ogan Ilir mengingat jarak wilayah yang tidak terlampau jauh. Dampak positif juga dirasakan oleh Ogan Ilir dalam hal kerjasama pembangunan dengan Kota Palembang sehingga peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan sebagai tindaklanjut dari rumusan isu strategis ini seperti pembangunan fasilitas akomodasi dan penyediaan makan dan minum (hotel, restaurant, dan sebagainya) termasuk menjadikan kawasan Kota Indralaya sebagai kawasan pemukiman penduduk yang representatif dan berwawasan lingkungan sebagai penyanggah kota Palembang.

c. Perwujudan Perekonomian Mandiri Berbasis Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian utama yang menjadi tulang punggung struktur ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir. Perekonomian yang berasal dari sumber daya alam tersebut, selain ramah lingkungan juga mampu menjadi barometer pembangunan berkelanjutan. Namun meskipun menjadi kontributor utama dalam perekonomian pembangunan, pengelolaan hasil pertanian belum cukup memberi dampak

signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menggerakkan/memberdayakan sektor lain sebagai penunjang perwujudan kesejahteraan lebih merata seperti sektor industri maupun perdagangan. Dengan adanya peningkatan nilai tambah pada produk pertanian, maka secara otomatis perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik dan secara parallel kemiskinan dapat lebih ditekan.

Perekonomian berbasis sektor pertanian (dalam arti luas) diarahkan pada potensi pengembangan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan melalui pengembangan kawasan berbasis Agropolitan (pertanian) dan Minapolitan (perikanan). Upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan ke depan untuk mewujudkan peluang ini adalah dengan membangkitkan pertanian dan perkebunan modern di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir serta membangkitkan usaha perikanan modern di perairan umum dan kawasan budidaya perikanan.

Kabupaten Ogan Ilir masuk ke dalam program *Food Estate* di Sumatera Selatan bersama dengan empat kabupaten lain yakni Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Banyuasin. Selain bermanfaat bagi Nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, maka program ini merupakan kesempatan bagi Ogan Ilir untuk memberdayakan sumber daya alamnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya program ini juga akan meningkatkan kemandirian petani dalam distribusi hasil pertaniannya sehingga tidak bergantung dari tengkulak yang cukup memberikan dampak negatif bagi keuntungan petani.

d. Optimalisasi Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat, Khususnya Pendidikan

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam menjalani aktivitas keseharian. Dengan adanya pemenuhan hak tersebut, maka masyarakat mampu hidup dengan lebih baik, sejahtera dan memperoleh kenyamanan dan keharmonisan dalam hidup. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memenuhi hak dasar

tersebut, khususnya pendidikan yang merupakan modal dasar dalam upaya memperoleh kesejahteraan.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai wilayah yang memiliki daerah dengan aksesibilitas yang cukup sulit, pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Ogan Ilir, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi infomasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Pengembangan SDM terus dilakukan oleh Pemerintah Ogan Ilir selama pembangunan daerah. Meskipun bukan kewenangan kabupaten, namun adanya lembaga perguruan tinggi (UNSRI) memiliki peran vital dalam mengembangkan SDM bahkan sumber daya alam sehingga kedepannya mampu menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam mewujudkan peran tersebut, maka pembangunan lima tahun ke depan perlu diarahkan pada pengembangan Kota Indralaya sebagai pusat *Cyber City* dalam pengembangan Teknologi Informasi pada berbagai kehidupan ekonomi dan perdagangan masyarakat dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah. Selain itu, adanya Litbang di Perguruan tinggi akan menunjang dalam hal penelitian sumber daya energi terbaru dan terbarukan. Dari sisi peningkatan kualitas tenaga kerja, maka Ogan Ilir diarahkan sebagai pusat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Selatan

dalam rangka pemberian ketrampilan calon tenaga kerja mandiri dan professional.

e. Penetapan Ogan Ilir sebagai Pusat Kawasan Perdagangan dan Industri Kerajinan

Selain Sektor Pertanian, kategori lapangan usaha yang memiliki dominasi dalam pembentukan perekonomian di Ogan Ilir adalah kategori perdagangan besar dan eceran serta kategori industri pengolahan. Kedua kategori ini menjadi salah satu tumpuan bagi pergerakan perekonomian Ogan Ilir sekaligus memiliki tenaga kerja yang cukup tinggi dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Melihat potensi tersebut, maka ditetapkanlah Ogan Ilir sebagai pusat kawasan perdagangan industri kerajinan rakyat/industri kecil menengah sehingga akan memiliki nilai tambah yang lebih baik dan mampu memberikan sumbangsih maksimal dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam waktu lima tahun ke depan untuk mewujudkan Ogan Ilir sebagai Pusat Kawasan Perdagangan dan Industri Kerajinan adalah:

- Mengembangkan kawasan sentra usaha industri kerajinan rakyat/usaha industri kecil menengah
- Menyediakan pusat perdagangan industri kerajinan rakyat/industri kecil menengah
- Membantu dalam mempromosikan/memasarkan hasil industri

f. Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Ogan Ilir merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan kemandirian Ogan Ilir lebih baik.

Satu hal yang menjadi perhatian dalam upaya pemerataan infrastruktur dasar kehidupan adalah peningkatan konektivitas/aksesibilitas wilayah. Dalam hal ini Ogan Ilir memiliki kelebihan untuk segera mewujudkannya. Hal ini terlihat dari dibangunnya jalur jalan tol pertama di Sumatera Selatan (PALIANDRA) yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sehingga menjadikan Kabupaten Ogan Ilir berpotensi sebagai pusat perekonomian baru di wilayah Sumatera Selatan. Adanya jalur jalan tol ini diharapkan menjadi pembuka jalan bagi Ogan Ilir untuk lebih menyejahterakan masyarakatnya dengan upaya ke depan seperti menjadikan kota Indralaya sebagai kawasan perdagangan, industri, pertanian, peternakan, pendidikan dan jasa serta mengembangkan kawasan pintu gerbang (gateway) penda Tanjung Senai sebagai kawasan pariwisata perairan, peternakan, perikanan dan wisata religi.

g. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Tingginya angka kemiskinan di Ogan Ilir menjadi suatu permasalahan yang wajib diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai permasalahan pembnagunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara

memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini terlihat dari rendahnya kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Ogan Ilir yang memungkinkan pendapatan yang diterima masih dibawah upah layak.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

Rendahnya pendidikan dan keahlian masyarakat menjadikan angkatan kerja di Kabupaten Ogan Ilir tidak leluasa dalam menentukan pilihan lapangan usaha pekerjaannya. Alhasil, sebagian tenaga kerja hanya memiliki pendidikan yang minim dengan pendapatan yang jauh dari kata layak. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah nantinya akan berupaya untuk:

- Memberikan insentif bagi pengembangan usaha kecil menengah pertanian, perkebunan, peternan, dan perikanan dengan tujuan penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan pendapatan masyarakat
- Memberikan peningkatan ketrampilan teknis dan manajerial terhadap angkatan kerja yang belum bekerja
- Memfasilitasi kerjasama penyaluran tenaga kerja dengan dunia usaha di dalam dan luar negeri
- Memperbanyak event job fair bgi para pencari kerja untuk memberikan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri

h. Implementasi Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Prioritas Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Ogan Ilir adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat

daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya. Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Ogan Ilir.

i. Percepatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam antisipasi penularannya. Wabah sendiri mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus internasional.

Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Ogan Ilir juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun

pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

j. Perwujudan Ketahanan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa alternatif dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Bab V dokumen RPJMD berisi tentang gambaran perencanaan pembangunan yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang dengan berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan, sehingga dirumuskanlah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah. Visi dan Misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Ogan Ilir dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

5.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai cita-cita yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dalam program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang dirumuskan.

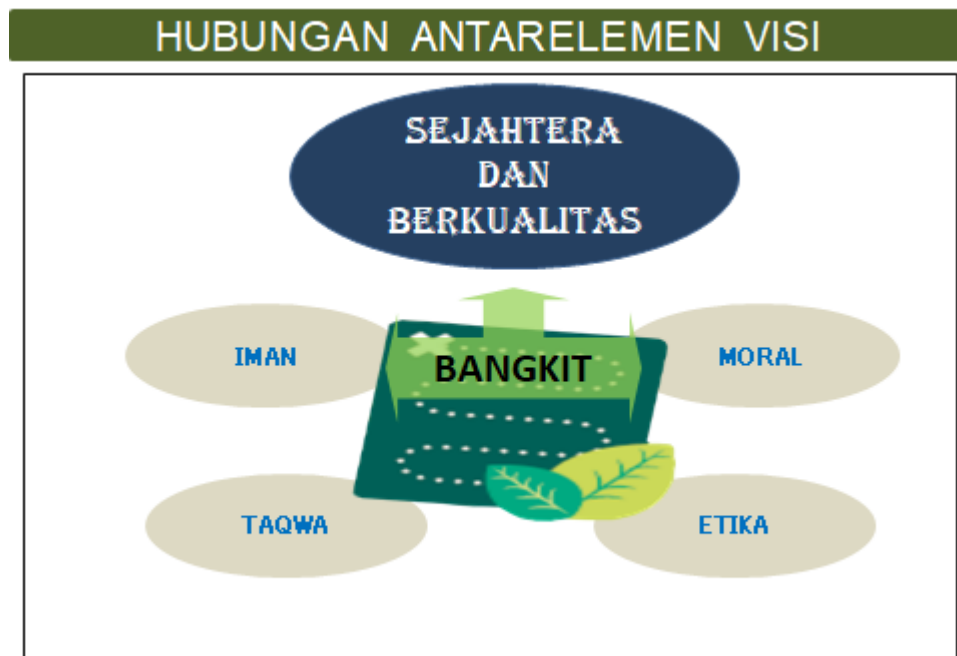
Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan dan

kemampuan serta Visi jangka menengah Kabupaten Ogan Ilir yaitu:

“Ogan Ilir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa selama lima tahun kedepan pencapaian keberhasilan pembangunan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat diukur dari masyarakat yang berkualitas, lebih sejahtera, dan lingkungan yang semakin berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika.

**Gambar V.1.
Elemen Visi Kabupaten Ogan Ilir**



➤ **Berkualitas**

Ogan Ilir Berkualitas merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk menghasilkan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang berkualitas dan handal yang mampu mencapai tingkat mutu dari segala aspek.

➤ **Sejahtera**

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, dimana manusia hidup makmur dan sentosa. Kesejahteraan sering menjadi titik tertinggi pencapaian kepala daerah, karena menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja

kepala daerah. Fokus sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat Ogan Ilir yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian; serta tersedia prasarana dan sarana publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

➤ **Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika**

Masyarakat yang hidup berlandaskan iman, taqwa, moral dan etika merupakan suatu kondisi yang humanis dimana terwujud pergaulan hidup yang baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; saling menghormati antar kepentingan sesama umat manusia menjunjung tinggi agama, moral dan etika. Fokus elemen visi ini ditujukan untuk masyarakat Ogan Ilir agar mengerti kodratnya sebagai manusia dengan mengimplemntasikan hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk agar tercipta kehidupan yang lebih baik.

5.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi diatas, selanjutnya disusun misi yang mencerminkan tentang segala daya dan upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi Ogan Ilir Tahun 2021-2026 yaitu **Ogan Ilir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika.** Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 , sebagai berikut:

1. Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang professional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab

Misi ini diarahkan untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan

kinerja aparatur pemerintah daerah yang dapat melayani masyarakat secara prima, menjadikan pemerintahan yang baik (Good Governance), jujur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.

2. Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan

Sumber daya manusia merupakan entitas yang penting dari pembangunan terlebih dari segi kualitas bukan kuantitas. Di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan, diperlukan manusia yang berkecukupan. Manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, sehingga seluruh aspek baik perekonomian, sosial, budaya akan berjalan dengan baik sesuai dengan jalurnya.

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas Sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Ilir dilakukan untuk dapat menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berpendidikan, berakhlak mulia, sehat, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan peningkatan akses dan pemerataan, peningkatan mutu pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan, keluarga berencana, peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja, peningkatan kualitas kehidupan kerukunan kehidupan umat beragama, dan perlindungan sosial yang dinamis.

3. Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber

daya alam yang berlimpah Perekonomian Kabupaten Ogan Ilir masih didominasi oleh sektor-sektor yang mengandalkan potensi sumber daya alam diantaranya sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian yang mempunyai potensi menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Misi ini diarahkan pada peningkatan daya saing produk lokal sehingga memiliki daya saing yang tinggi dengan peningkatan produksi dan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) disamping dengan penguatan sinergi dan kemitraan berbagai stakeholder yang terkait dengan pembangunan daerah guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

4. Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Penataan wilayah Ogan Ilir sudah terencana dalam bentuk dokumen Rencana tata Ruang Wilayah atau RTRW. RTRW memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan rencana infrastruktur dasar di kabupaten Ogan Ilir. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mewujudkan rencana infrastruktur agar wilayah atau kawasan tersebut berfungsi dan berperan sesuai apa yang di uraikan pada RTRW yang bersangkutan.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penguatan kesiapsiagaan bencana yang mengancam keberadaan sumberdaya potensial, strategis dan kualitas kehidupan masyarakat.

5. Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung Hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika,

dalam suasana aman dan nyaman

Keamanan dan ketertiban merupakan keadaan bebas dari situasi yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Keamanan dan ketertiban wilayah merupakan tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat untuk membantu menjaganya. Sikap toleransi dan menghormati kehidupan orang lain bisa mewujudkan hidup yang damai dan bersahaja yang semua masyarakat impikan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta stabilitas daerah baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan agama dengan peningkatan peran serta masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan melalui penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat serta menjalankan proses demokrasi dan pendidikan politik yang sehat dan dinamis.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Ilir.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Ogan Ilir dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap

sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam melihat benang merah perwujudan pembangunan Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional secara optimal dan relevan, maka perlu sinkronisasi indikator makro yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan target pembangunan Sumatera Selatan pada perencanaan pembangunan Nasional (RPJMN).

Tabel V.1
Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Sumatera Selatan					Indikator	RPJMD Ogan Ilir Tahun 2021-2026						
	Indikator	Target					Indikator	Target					Target					
		2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021		2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	IPM						IPM	70,07	71,08	71,75	72,42	73,09	IPM	68,26	68,73	69,19	69,65	70,11
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38	Tingkat Kemiskinan (%)	12,52	10,00-11,65	9,9-10,78	9,6-9,91	9,2-9,5	Tingkat Kemiskinan (%)	12,24	11,68	11,12	10,56	10,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,12	4,01	3,87	3,75	3,62	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,11	3,71	3,30	2,90	2,50
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,355	0,354	0,353	0,352	0,350	Indeks Gini	0,280	0,270	0,260	0,255	0,250
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,6-5,9	5,5-6,0	5,5-6,1	5,5-6,1	5,5-6,1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	1,76	2,57	3,38	4,19	5,00
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	50,49	54,199	57,077	59,087	62,067	PDRB per Kapita (Juta Rp)	30,18	31,64	33,09	34,55	36,00

Pelaksanaan pembangunan Ogan Ilir dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana keduanya akan mewujudkan capaian pembangunan melalui indikator kinerja makro maupun indikator kinerja utama pembangunan. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Ogan Ilir periode lima tahun mendatang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Reformasi birokrasi diharapkan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsif, dengan indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah
- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab, transparan dan akuntabel, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan inovasi baik untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, diharapkan indikator ini mampu mewakili capaian kualitas layanan publik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat.

Dalam melihat kinerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab, transparan dan akuntabel, maka dapat didekati dengan menganalisis capaian Nilai SAKIP. SAKIP sendiri merupakan rangkaian sistematis dari

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, Nilai SAKIP cukup komprehensif dalam menilai kinerja pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ogan Ilir.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah, dikarenakan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, dan tidak menciptakan ketimpangan yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia dan kesetaraan gender juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan pendidikan, dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan
- Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna, dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan
- Meningkatnya pembangunan yang ramah dan berkeadilan gender, dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan sumber daya manusia secara umum dapat terlihat dari capaian pembangunan pendidikan dan kesehatan. Adapun indikator yang layak untuk mencerminkan pembangunan SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi indikator Tujuan dalam meningkatkan kualitas SDM. IPM sendiri juga dibangun oleh tiga

komponen yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, pada sasaran pembangunan SDM ini menggunakan indikator indeks pendidikan dan indeks kesehatan sebagai indeks komposit penyusun IPM.

Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Jika melihat dari rumusannya, maka IPG ini mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sehingga IPG akan mampu menjadi indikator sasaran dalam melihat pembangunan SDM dari sisi gender.

3. Meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian daerah

Pembangunan ekonomi merupakan proses pembangunan yang mengoptimalkan daya dukung lingkungan dengan ekonomi. Peningkatan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam ini dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang seluas-luasnya yang berbasis pada potensi unggulan daerah.

Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan dilakukan dengan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Keberdayaan kemandirian ekonomi dapat mencerminkan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kabupaten Ogan Ilir yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber perekonomiannya perlu memerhatikan keberlanjutan dari proses pengolahan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan berdampak kumulatif yang dapat menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatkan kapasitas dan pengembangan nilai produk unggulan daerah, dengan indikator sasaran:
 - LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
 - LPE Sektor perdagangan dan industri pengolahan

- Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah, dengan indikator sasaran Tingkat Pertumbuhan Investasi

Dalam meningkatkan daya ungkit pencapaian pembangunan perekonomian daerah, maka perlu adanya sasaran pembangunan daerah yang mengarah pada pemanfaatan potensi produk unggulan daerah dimana dominasi struktur ekonomi disumbang oleh Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan industri pengolahan. Oleh karena itu, indikator yang mencerminkan pembangunan sektor ekonomi tersebut maka digunakan LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan LPE Sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Aktivitas ekonomi yang baik akan memiliki investasi daerah yang stabil dan kondisi daerah yang mendukung iklim investasi. Oleh karena itu, indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi akan mampu mencerminkan pergerakan perekonomian daerah secara umum dan peningkatan penanaman modal daerah khususnya.

4. Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan tidak berhenti pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan tercapainya pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat ditandai oleh tiga hal yang pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin, yang kedua semakin berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur, dan yang ketiga semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk suatu negara. Dalam mengukur kesuksesan pembangunan, utamanya dalam mengatasi persoalan ketidakadilan distribusi hasil hasil pembangunan dilakukan dengan pengukuran ketimpangan ekonomi model indeks gini. Dengan menggerakkan ekonomi berkerakyatan diharapkan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara merata dan berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, dengan indikator

sasaran:

- Indeks Gini
- PDRB per Kapita
- Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat, dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan diselenggarakan. Kesejahteraan masyarakat identik dengan pendapatan masyarakat yang berkorelasi positif dengan kualitas pekerjaan masyarakat sehingga indikator PDRB per Kapita (proxy pendapatan per kapita) diasumsikan mampu melihat pendapatan masyarakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat melihat kemandirian masyarakat. Selain itu, indikator Indeks Gini akan mampu melihat pemerataan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

5. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Pembangunan infrasturktur yang berkualitas, dilakukan dengan pembangunan jalan dan jembatan serta sarana prasarana umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akses jalan dan jembatan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya begitu pula dengan daerah lainnya akan menunjang perekonomian. Selain itu, infrastruktur dasar seperti listrik dan air perlu untuk menunjang kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas konektivitas antar wilayah, dengan indikator sasaran Persentase panjang jalan kondisi mantap
- Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan

- dan permukiman, dengan indikator sasaran Rasio rumah layak huni
- Meningkatnya dukungan dan kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Infrastruktur pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu concern pemerintah daerah dalam mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Dari poin tersebut maka dirumuskan indikator kinerja persentase panjang jalan kondisi mantap untuk melihat konektivitas wilayah yang berkualitas dan rasio rumah layak huni untuk melihat kenyamanan masyarakat dalam mengakses Prasarana Sarana Utilitas Umum. Sedangkan dari sisi keberlanjutannya, terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan mencerminkan bagaimana pembangunan dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlangsungan kualitas ekosistem daerah.

6. Mewujudkan ketentraman, ketertiban masyarakat dan kesadaran demokrasi berlandaskan iman dan taqwa

Kewajiban negara kepada seluruh masyarakat salah satunya adalah memberikan rasa aman, rasa tenteram dan damai, sedangkan masyarakat berkewajiban menjaga norma-norma kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah tidak terlepas dengan adanya sinergi semua pihak dan masyarakat, dengan disediakan ruang untuk membangun komunikasi dan koordinasi, berbagai macam potensi gesekan dapat diredam dengan maksimal. Untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kesadaran demokrasi yang berlandaskan iman dan taqwa, pemerintah daerah dan masyarakat perlu bersinergi dalam mengatasi berbagai potensi permasalahan yang memicu konflik atas dasar Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), yang wajib diselesaikan dengan baik. Kondusivitas pembangunan wilayah di Ogan Ilir tidak hanya dilihat dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga melihat kualitas penanganan bencana daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dan indikator

pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya kondusivitas keamanan masyarakat, dengan indikator sasaran:
 - Angka kriminalitas
 - Indeks Toleransi
- Meningkatnya pemahaman dan integrasi nilai-nilai luhur budaya daerah, dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan

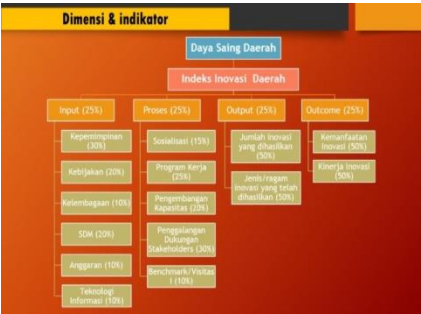
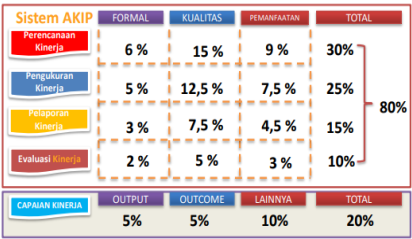
Kondusivitas wilayah merupakan kondisi yang ideal dalam melaksanakan pembangunan dikarenakan iklim investasi akan meningkat, tidak ada konflik antar masyarakat hingga program pemerintahan akan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk melihat hal tersebut di Ogan Ilir, maka disusun indikator kinerja Angka Kriminalitas dan Indeks Toleransi dalam mengukur tingkat kondusivitas wilayah.

Selain kondusivitas wilayah, nilai-nilai luhur budaya daerah juga memiliki posisi yang cukup strategis dalam pembangunan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat. Oleh karena itu, indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan yang terdiri dari ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender akan mampu mengukur pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya daerah dalam pembangunan.

Tabel V.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA									
MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
Misi 1:									
	Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang professional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab								
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		35,66	40,22	48,00	53,60	57,50	60,50

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsif	Indeks Inovasi Daerah		1,591	2.091	2.591	3.091	3.591	4.091
	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab, transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP		53,19	58,03	60,35	62,90	64,12	65,00
Misi 2:									
	Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan								
	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan	IPM	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	67,06	68,26	68,73	69,19	69,65	70,11

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
berdaya saing									
	Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0 $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	60,37	61,54	62,06	62,58	63,11	63,63
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna	Indeks Kesehatan	Ket.AHH = Angka Harapan Hidup $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	69,97	70,56	70,89	71,22	71,55	71,88

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
	Meningkatnya pembangunan yang ramah dan berkeadilan gender	Indeks Pembangunan Gender	$\frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - laki} \times 100$	98,95 (2019)	99,19	99,26	99,34	99,42	99,50
Misi 3:									
Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi									
Meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian daerah		LPE	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	0,14	1,76	2,57	3,38	4,19	5

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
	Meningkatnya kapasitas dan pengembangan nilai produk unggulan daerah	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,73	1,92	2,11	2,31	2,50
		LPE Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP+Pd)t} - PDRB_{(IP+Pd)t-1}}{PDRB_{(IP+Pd)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan Pd= Kategori Perdagangan	-1,84	1,6	3,2	4,8	6,4	8

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
	Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	$\frac{\text{Nilai Investasi}_t - \text{Nilai Investasi}_{t-1}}{\text{Nilai Investasi}_{t-1}} \times 100\%$ Ket: t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	NA	10	12,5	15	17,5	20
	Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	13,36	12,24	11,68	11,12	10,56	10,00
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (Fc_i + Fc_{i-1})$ BPS sudah rilis data Gini Rasio per Kabupaten/Kota	0,300	0,280	0,270	0,260	0,255	0,250
		PDRB per Kapita	$\frac{\text{PDRB adh Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	27,23	30,18	31,64	33,09	34,55	36,00

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
	Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	4,91	4,11	3,71	3,30	2,90	2,50
Misi 4: Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat									
	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Rata-rata indikator terkait capaian infrastruktur dasar pembangunan (subyektif)	NA	66,25	68,13	70,00	71,88	73,50

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
Misi 5:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100\%$	60,75	62,5	65	67,5	70	72,00
	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100\%$ Ket: Rumah layak huni memiliki indikator ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi dan akses air minum	67,92	70	71,25	72,5	73,75	75
	Meningkatnya dukungan dan kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Lahan	51,92	58,45	58,75	59,05	59,35	59,64

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung Hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika, dalam suasana aman dan nyaman									
	Mewujudkan ketentraman, ketertiban masyarakat dan kesadaran demokrasi berlandaskan iman dan taqwa	Persentase penurunan konflik sosial (SARA)	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial}_t - \text{Jumlah Konflik Sosial}_{t-1}}{\text{Jumlah Konflik Sosial}_{t-1}} \times 100\%$ Ket: t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	NA	25	25	25	25	25
	Meningkatnya kondusivitas keamanan masyarakat	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kriminalitas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	3,02	2,58	2,44	2,29	2,15	2,00
		Indeks Toleransi	Menggunakan Survei: Indeks= $\frac{\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}}{\sum \text{Frekuensi}}$ Indeks Toleransi terdiri dari: Indeks Persepsi Indeks Sikap Indeks Kerja Sama	NA	75	75,58	76,15	76,73	77,30

VISI: OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
				-2020					
			Indeks Sikap Pemerintah Indeks Harapan terhadap Pemerintah						
	Meningkatnya pemahaman dan integrasi nilai-nilai luhur budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dimensi penghitungan: Ekonomi budaya, Pendidikan, Ketahanan sosial budaya, Warisan budaya, Ekspresi budaya, Budaya literasi dan Gender	NA	55	56,25	57,5	58,75	60

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, penyusunan strategi yang kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah harus selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijabarkan pada bab terdahulu.

Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Adapun arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan

strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berikut penjelasan strategi pembangunan Kabupaten Ogan Ilir selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021–2026, dapat dilihat pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang professional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab			
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsif	Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab, transparan dan akuntabel	
Misi 2: Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan			
	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna	Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas
		Meningkatnya pembangunan yang ramah dan berkeadilan gender	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			hak anak
Misi 3: Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi			
	Meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya kapasitas dan pengembangan nilai produk unggulan daerah	Percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah
		Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah	
	Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan
		Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat	
Misi 4: Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat			
	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas konektivitas antar wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW
		Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	
		Meningkatnya dukungan dan kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5: Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung Hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika, dalam suasana aman dan nyaman			
	Mewujudkan ketentraman, ketertiban masyarakat dan kesadaran demokrasi berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kondusivitas keamanan masyarakat	Mewujudkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat
		Meningkatnya pemahaman dan integrasi nilai-nilai luhur budaya daerah	

Penjabaran dari strategi Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pertama, Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada reformasi birokrasi yaitu dengan mengoptimalkan menggunakan teknologi infirmasi yang mampu menjadi media interaktif antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan public, situs yang dikelola pemerintah menjadi lebih professional, data ter-update, dengan harapan pemerintah dapat melayani masyarakat dengan efektif dan efisien. Optimalisasi teknologi sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, selain menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, juga dapat menjadi media untuk mengedukasi dan mempersuasi masyarakat terhadap isu pembangunan.

2. Strategi Kedua, Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan suatu wadah yang tepat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mutu, akses dan layanan pendidikan menjadi salah

satu hal yang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing. Peningkatan tersebut dapat didukung dengan adanya peningkatan kualitas Guru/Pengajar dan tenaga kependidikan lainnya. Kurikulum pelajaran di sekolah terutama sekolah dasar perlu adanya muatan lokal pelajaran sekolah untuk mencetak generasi yang berbudaya.

Fasilitas dan aksesibilitas pendidikan juga perlu peningkatan dengan melakukan pemenuhan internet sekolah, program beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi serta pengadaan fasilitas lainnya.

3. Strategi Ketiga, Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas

Aspek kesehatan merupakan hal yang fundamental dalam sisi kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah Ogan Ilir terus melakukan perbaikan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perhatian kepada ibu hamil dan balita dilakukan dengan pemberian vitamin dan makanan tambahan untuk mencegah stunting. Pembangunan dan revitalisasi Rumah Sakit dan Puskesmas menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang merata. Selain itu, kualitas dari tenaga medis juga harus semakin ditingkatkan dengan menambahkan dokter spesialis serta adanya dokter keliling yang bertugas hingga ke pelosok Ogan Ilir sebagai upaya pemerataan akses kesehatan. Di Masa pandemi Covid-19 ini, upaya pencegahan dan penanganan covid-19 masih dilakukan dengan sosialisasi penggunaan masker dan selalu cuci tangan serta peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat bagi penderita Covid-19.

Sebagai daerah yang ditunjuk sebagai konvergensi stunting, diharapkan angka stunting di Ogan Ilir yang cukup tinggi semakin menurun di setiap tahunnya. Konvergensi sendiri merupakan pendekatan

penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas. Hal inilah yang mendasari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk terus meningkatkan jangkauan pelayanan medis maupun sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya keseimbangan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak.

4. Strategi Keempat, Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak

Kesenjangan capaian antara perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia kedepan. Tantangan pembangunan manusia saat ini masih dihadapkan pada persoalan keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender, hal ini masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem dan hak-hak perempuan dan anak dengan harapan tidak ada lagi diskriminasi bagi perempuan untuk mencapai pendidikan. Situasi ini sangat berpengaruh pada proses pembangunan berkelanjutan, dan berdampak pada capaian pembangunan. Penguatan dan peningkatan kualitas terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar seluruh perempuan dan anak memperoleh jaminan kesetaraan.

5. Strategi Kelima, Percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir mengupayakan pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing perekonomian Kabupaten Ogan Ilir. Potensi unggulan Ogan Ilir yang sedang dikembangkan berada di sektor pertanian yang didalamnya terdapat sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor hasil hutan. Selian itu sektor industri dan sektor pariwisata juga diharapkan mampu menjadi pendongkrak perekonomian Ogan Ilir.

Dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan perlu adanya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat melalui program – program

operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi yang produktif. Penerapan teknologi tepat guna pada sektor pertanian juga perlu dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas komoditi yang dihasilkan.

Pengembangan UMKM di Kabupaten Ogan Ilir juga perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pelaku usaha melalui pemanfaatan sumber daya yang ada serta keahlian yang mereka miliki, seperti memanfaatkan hasil olahan pertanian atau perkebunan, mengelola hasil hutan, kerajinan tangan, ataupun penjual makanan dan minuman. Pembinaan terhadap para pelaku UMKM ini terus dilakukan dengan tujuan agar dapat semakin meningkatkan perekonomian. Adanya pengembangan dan pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan ini akan mendorong pertumbuhan industri kecil menengah baru, dan dapat meningkatkan presentasi UMKM yang ada, sehingga akan mendorong pertumbuhan nilai investasi pada sektor industri dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif (nilai investasi) dapat dilakukan dengan meningkatkan kemudahan prosedur perizinan investasi dan meningkatkan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan. Meningkatkan kemudahan prosedur harus didukung oleh dinas terkait dengan menjamin kepastian hukum terkait investasi dan usaha seperti penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha serta pengembangan layanan investasi sehingga dinas terkait dapat memberikan kepastian hukum terhadap investor dan proses perizinan tidak memakan waktu yang lama. Selain itu antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha melalui koordinasi yang intens untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

6. Strategi Keenam, Percepatan pengentasan kemiskinan

Percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan kerberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar dapat menciptakan, mendukung

atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Sasaran dari pengentasan kemiskinan ini adalah masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan percepatan pengentasan kemiskinan diharapkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PPKS menjadi lebih baik. Pendampingan dan pemberian fasilitas untuk para PPKS diharapkan dapat meningkatkan produktivitas angkatan kerja sehingga kapasitas perekonomian masyarakat dapat tercapai.

Aspek penekanan strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penguatan basis data dan bantuan sosial terpadu, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Disisi lain perlu penguatan peran dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ogan Ilir, serta penyiapan perencanaan terpadu penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

Di era pandemi ini, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, dikarenakan banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya. Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir menyediakan Balai Latih Kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.

7. Strategi Ketujuh, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW

Pembangunan infrastruktur dasar bagi suatu daerah merupakan hal utama yang harus dipenuhi karena infrastruktur dasar menjadi salah satu target percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir. Fokus perencanaan infrastruktur di Ogan Ilir adalah mewujudkan infrastuktur yang berkualitas berbasis RTRW. Selain kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan degung bangunan, listrik dan air, merupakan Infrastruktur dasar bagi masyarakat yang menjadi target pembangunan. Yang tidak kalah penting lainnya adalah sanitasi, sarana – prasarana, transportasi, serta jaringan

komunikasi yang mampu meningkatkan konektivitas antardaerah. Selain itu, pembangunan dalam sarana-prasarana transportasi dan jaringan komunikasi dibangun untuk memudahkan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat Ogan Ilir.

8. Strategi Kedelapan, Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup

Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ogan Ilir terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Banyaknya pencemaran yang terjadi mengakibatkan penurunan kualitas air, udara serta lahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ogan Ilir ialah dengan mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, maka akan semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Banyaknya pelaku usaha yang membuka pabrik atau tempat pengelolaan usahanya mengakibatkan dampak lingkungan yang semakin buruk, sehingga Pemerintah Daerah terus mengupayakan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan yang ada agar dampak terhadap lingkungan dapat dikendalikan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga mengoptimalkan untuk peningkatan kesadaran dan Peningkatan Pendidikan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Selain itu, permasalahan sampah juga perlu mendapat perhatian, karena sampah merupakan limbah yang terus ada, sehingga perlu adanya pengelolaan sampah maupun limbah yang ada di masyarakat agar dapat tertangani dengan baik agar tidak semakin menumpuk.

9. Strategi Kesembilan, Mewujudkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk dalam hal menciptakan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir terus meningkatkan partisipasi

masyarakat baik dalam perlindungan masyarakat maupun dalam penanganan bencana, selain itu juga perlu adanya sinergi antara masyarakat dengan TNI dan kepolisian. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam keamanan, maka gangguan akan ketertiban umum dapat diselesaikan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan politik, sosial, budaya juga akan mendukung kemudahan penyelesaian konflik yang ada.

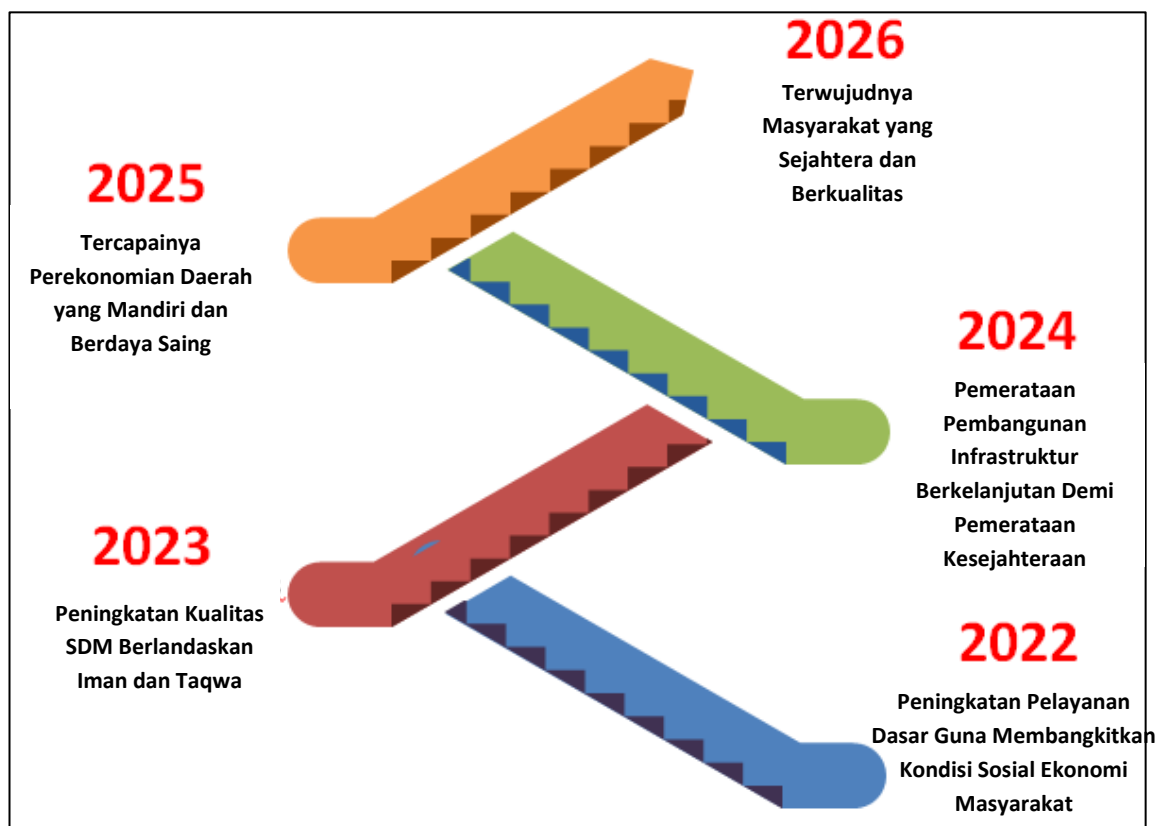
6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPMD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Ogan Ilir setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar VI.1.

Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026



Penjabaran tema/agenda pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026 sesuai gambar diatas adalah sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan Tahun I (2022)

Pada tahun 2022, tema pembangunan Kabupaten Ogan Ilir adalah **Pemulihan Perekonomian Daerah Menuju Pembangunan Berkualitas**. Pada tahun tersebut fokus pembangunan adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Agenda Pembangunan Tahun II (2023)

Agenda pembangunan Tahun kedua RPJMD Kabupaten Ogan Ilir adalah **Peningkatan Kualitas SDM Berlandaskan Iman dan Taqwa**. Pada

tahun tersebut SDM dari sisi spiritual atau keagamaan menjadi dasar peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ogan Ilir.

3. Agenda Pembangunan Tahun III (2024)

Agenda pembangunan Tahun ketiga dari Ogan Ilir adalah **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Pemerataan Kesejahteraan**. Pada tahun tersebut pembangunan infrastruktur terutama untuk kawasan pedesaan tertinggal di Kabupaten Ogan Ilir yang diharapkan dapat pemeratakan kesejahteraan.

4. Agenda Pembangunan Tahun IV (2025)

Pada tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Ogan Ilir adalah **Tercapainya Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing**. Fokus perekonomian kerakyatan untuk mendukung kemandirian masyarakat dan daya saing daerah dikembangkan oleh Kabupaten Ogan Ilir.

5. Agenda Pembangunan Tahun V (2026)

Agenda pembangunan pada tahun 2026 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir RPJMD periode 2022-2026. Pada tahun 2026 ini diharapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Pada tahun 2026 ini pembangunan Kabupaten Ogan Ilir fokus pada tema **Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Berkualitas**. Sama seperti makna visi yang ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka tema pembangunan tahun terakhir diharapkan dapat menjadi ujung ketercapaian visi Kabupaten Ogan Ilir.

Guna mendukung pencapaian kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing tema adalah sebagai berikut.

Tabel VI.2.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2022-2026

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsif	Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi	Mewujudkan pelayanan publik berkualitas berbasis IT					
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab,transparan dan akuntabel		Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah					
		Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN					
Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan	Peningkatan tata kelola layanan pendidikan					
		Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan					
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna	Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas	Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau					
Meningkatnya pembangunan yang ramah dan berkeadilan gender	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak					
Meningkatnya kapasitas dan pengembangan nilai produk unggulan daerah	Percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas	Pembangunan agribisnis sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berskala					

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah	unggulan daerah	wilayah					
		Penguatan UMKM daerah berbasis ekonomi kerakyatan					
		Peningkatan kemudahan berinvestasi					
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas jaminan perlindungan sosial masyarakat					
		Peningkatan kualitas pendapatan masyarakat					
		Peningkatan kualitas angkatan kerja disertai perluasan lapangan usaha					
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas konektivitas antar wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah jalan, jembatan dan irigasi yang menjangkau perdesaan					
		Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat					
Meningkatnya dukungan dan kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan aktivitas yang berpotensi pencemaran lingkungan					

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
		hidup					
Meningkatnya kondusivitas keamanan masyarakat	Mewujudkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah					
Meningkatnya pemahaman dan integrasi nilai-nilai luhur budaya daerah		Pembangunan demokrasi, hukum dan HAM yang jujur dan adil serta bermartabat					

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Prioritas pembangunan daerah ini merupakan program pendukung dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun program dalam janji kampanye Bupati adalah sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur dan sarana prasarana pemerintahan yang inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggungjawab
- 2) Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat baik perizinan maupun non perizinan
- 3) Program peningkatan kualitas layanan pendidikan yang inovatif, berprestasi dan terdepan
- 4) Program peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berstandar, inovatif, kreatif, dan berprestasi
- 5) Program peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis melalui perluasan areal, intensifikasi dan rehabilitasi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
- 6) Program pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan daya saing produk usaha kerajinan rakyat/industri kecil menengah berbasis teknologi informasi
- 7) Program peningkatan investasi penanaman modal di daerah
- 8) Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah jalan, jembatan dan irigasi yang menjangkau pedesaan

- 9) Program pengelolaan SDA energi dan mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- 10) Program pembinaan politik dan demokrasi
- 11) Program peningkatan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat
- 12) Program pembangunan sosial, seni budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga
- 13) Program peningkatan daya saing mutu dan ketrampilan tenaga kerja
- 14) Program pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat bergama
- 15) Program peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM dalam nuansa aman dan nyaman

Janji kampanye Bupati Kabupaten Ogan Ilir dalam Program-Program Strategis Tahun 2021–2026 yang kemudian diadopsi menjadi program prioritas pembangunan daerah dengan nomenklatur program sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun daftar program janji kampanye dan adopsinya ke dalam nomenklatur program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel VI.3.
Daftar Program Prioritas Kepala Daerah dalam Janji Kampanye

No.	Program Janji Kampanye	Program prioritas pembangunan daerah dengan nomenklatur sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 050-3708 Tahun 2020	OPD Penanggungjawab
1	Program peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur dan sarana prasarana pemerintahan yang inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggungjawab	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat baik perizinan maupun non perizinan	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
3	Program peningkatan kualitas layanan pendidikan yang inovatif, berprestasi dan terdepan	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Program peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berstandar, inovatif, kreatif, dan berprestasi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Program peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis melalui perluasan areal, intensifikasi dan rehabilitasi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
6	Program pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan daya saing produk usaha kerajinan rakyat/industri kecil menengah berbasis teknologi informasi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm

7	Program peningkatan investasi penanaman modal di daerah	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
8	Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah jalan, jembatan dan irigasi yang menjangkau pedesaan	Program penyelenggaraan jalan	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perumahan dan kawasan permukiman
9	Program pengelolaan SDA energi dan mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup
10	Program pembinaan politik dan demokrasi	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan kesatuan bangsa dan politik
11	Program peningkatan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan polisi pamong praja
12	Program pembangunan sosial, seni budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
13	Program peningkatan daya saing mutu dan ketrampilan tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja
14	Program pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas pemberdayaan masyarakat desa
15	Program peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM dalam nuansa aman dan nyaman	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Badan kesatuan bangsa dan politik

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena sangat strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan maka dilaksanakan melalui program prioritas yang mempunyai keterkaitan langsung dalam mencapai tujuan dan sasaran, dengan kebijakan dan program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel VI.4.

Keterkaitan antara Misi Tujuan, Sasaran dan Program pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD	
			2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Misi 1:																
Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang professional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab																
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan reformasi birokrasi																
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsive																
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi public	Persentase Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	1,544,030,099	100	1,844,377,614	100	1,376,372,928	100	1,330,985,596	100	1,485,758,067	100	7,581,524,304	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa dan kelurahan siaga aktif (Dengan Satuan:Persentase (%))	97,09	98	332.726.833	98	314.233.215	100	337.427.498	100	314.248.655	100	317.251.162	100	1.615.887.363	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Rumah Sakit (Dengan Satuan:Persentase	100	19,45	9.512.248.412	41,32	9.845.149.317	60,78	9.512.215.596	80,32	8.000.996.536	100	7.874.872.268	100	44.745.482.129	Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir

			(%)														
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (Dengan Satuan:persentase (%))	12	11	271.216.689	11	434.081.591	11	440.109.271	11	452.388.395	11	490.476.757	11	2.088.272.703	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (Dengan Satuan:dokumen)	100	100	338.909.286	100	331.262.468	100	330.469.480	100	329.350.266	100	351.280.512	100	1.681.272.012	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	271.973.704	100	322.414.272	100	229.750.484	100	232.122.066	100	246.757.831	100	1.303.018.357	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pelayanan Dokumen Kependudukan berjalan dengan baik (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	102.423.865	100	121.454.799	100	86.549.499	100	87.438.054	100	92.947.143	100	490.813.360	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Dengan Satuan:persentase (%))	80	84	909.138.898	88	1.281.034.190	92	1.061.493.122	96	1.075.292.588	100	1.242.483.790	100	5.569.442.588	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:jumlah)	15	20	274.917.623	22	330.677.571	24	323.243.901	26	511.253.342	28	560.344.351	28	2.000.436.788	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab,transparan dan akuntabel																	
		Program pengelolaan keuangan daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:persentase (%))	9.01	13	2.320.938.100	13.1	2.320.938.100	13.15	2.320.938.100	13.2	2.320.938.100	13.25	2.320.938.100	13.25	11.604.690.500	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Opini Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan Keuangan)	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	

			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Dengan Satuan:persentase (%))	7.99	8.18	-	8.26	-	8.35	-	8.43	-	8.51	-	8.51	-	
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (Dengan Satuan:persentase (%))	54.21	55.85	-	56.41	-	56.98	-	57.55	-	58.12	-	58.12	-	
		Program penyelenggaraan pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Dengan Satuan:Level)	2	2	1.671.280.000	3	1.941.560.000	3	1.671.280.000	3	1.722.280.000	3	1.697.480.000	3	8.703.880.000	Inspektorat daerah
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (Dengan Satuan:persentase (%))	N/A	80	6.266.061.300	85	8.827.513.425	90	10.221.500.440	95	11.774.585.505	95	13.210.633.330	95	50.300.294.000	Sekretariat daerah

		Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian di Daerah (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80	3.270.294.000	85	4.660.808.100	85	5.328.429.315	90	6.021.693.712	95	6.959.947.769	95	26.241.172.896	Sekretariat daerah
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A (Dengan Satuan:Ada/Tidak)	Ada	Ada	1.303.922.000	Ada	1.795.243.000	Ada	1.320.243.000	Ada	1.988.245.000	Ada	1.788.245.000	Ada	8.195.898.000	Badan perencanaan pembangunan daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	1.153.602.500	100	3.844.718.000	100	3.760.917.000	100	3.785.417.000	100	4.209.917.000	100	4.209.917.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Misi 2:																	
membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan sdm yang berprestasi dan terdepan																	
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing																	
Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan pendidikan																	

			Program pengelolaan pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:persentase (%))	50.43	55.35	21.952.232.000	55.9	17.753.000.000	56.46	18.196.825.000	57.03	18.651.745.625	57.06	19.118.039.266	57.06	95.671.841.89	Dinas pendidikan dan kebudayaan
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan - Dasar (Dengan Satuan:persentase (%))	93.78	96.59	-	97.53	-	98.47	-	99.41	-	100	-	100	-	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan - Menengah Pertama (Dengan Satuan:persentase (%))	94	96.81	-	97.75	-	98.69	-	99.63	-	100	-	100	-	

			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Dengan Satuan:persentase (%))	97.55	87.76	-	89.52	-	90.42	-	91.32	-	92.24	-	93.16	-	
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	90	515.000.000	90	334.773.985	95	365.653.081	95	641.061.868	98	754.388.274	98	2.376.718.445	Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Pengembangan Daya saing Keolahragaan (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	90	420.000.000	90	1.199.655.399	95	931.666.394	95	1.511.919.528	98	1.611.326.288	98	6.550.096.944	Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna																	
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Dengan Satuan:tahun)	65.48	65.864	69.442.465.396	66.079	68.356.468.809	66.294	66.569.859.853	67.509	65.073.780.001	66.724	64.387.829.265	66.724	333.830.403.324	Dinas Kesehatan

		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Kompeten di Bidangnya (Dengan Satuan:Orang)	420	50	50.000.000	150	65.000.000	150	59.000.000	150	59.000.000	150	59.000.000	650	292.000.000	Dinas kesehatan
Meningkatnya pembangunan yang ramah dan berkeadilan gender																	
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan yang baik (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	90.000.000	100	2.000.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Misi 3:																	
membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi																	
Meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian daerah																	
Meningkatnya kapasitas dan pengembangan nilai produk unggulan daerah																	
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Dengan Satuan:persentase (%))	342.2	348.2	175.515.300	348.2	180.000.000	348.2	150.000.000	348.2	320.000.000	348.2	320.000.000	348.2	1.145.515.300	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan (Tangkap) (Dengan Satuan:Ton)	10.460	9.023	93.447.600	9.227	93.447.600	9.498	93.447.600	9.651	890.000.000	9.651	890.000.000	9.651	2.060.342.800	Dinas perikanan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana	Produktivitas Pertanian Perhektar Per tahun (Dengan	3.129	3.5	299.806.800	3.6	300.000.000	3.7	130.000.000	3.85	305.250.000	4	305.512.500	4	1.340.569.300	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

			pertanian	Satuan: Ton/Ha)														
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (Dengan Satuan: usaha mikro)	1.13	1.95	74.522.350,00	1.95	74.522.350,00	1.95	74.522.350,00	3.37	133.754.360,00	3.37	133.754.360,00	3.37	491.075.769,00	Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	90	100.000,00	90	90.129.496	95	97.675.467	95	169.952.566	98	198.530.951	98	635.529.242	Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	53.487.800,00	100	53.487.800,00	100	53.487.800,00	100	96.001.085,00	100	96.001.085,00	100	352.465.569,00	Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Indikator Turunan Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan: persentase (%))	ada	ada	192.554.150,00	ada	192.554.150,00	ada	192.554.150,00	ada	345.600.441,00	ada	345.600.441,00	ada	1.268.863.332,00	Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm

Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah																	
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:jumlah)	15	20	164.354.500	22	180.000.000	24	189.000.000	28	198.450.000	30	208.372.500	30	940.177.000	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
		Program pelayanan penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota (Dengan Satuan:persentase (%))	72.48	76.92	123.350.000	78.45	173.350.000	80.02	152.500.000	81.62	350.000.000	83.26	350.000.000	83.26	1.149.200.000	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat																	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat																	
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	624.020.000	100	624.020.000	100	624.020.000	100	1.137.500.000	100	1.343.680.000	100	4.353.240.000	Dinas sosial
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Terlaksananya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	1.905.000.000	100	1.505.000.000	100	1.505.000.000	100	1.555.000.000	100	1.925.000.000	100	8.395.000.000	Dinas pemberdayaan masyarakat desa
		Program pemberdayaan sosial	Cakupan PSKS yang berkompetensi (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	96.000.000	100	96.000.000	100	96.000.000	100	96.000.000	100	296.000.000	100	680.000.000	Dinas sosial

Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat																	
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	0.2	0.266	650.000.000	0.293	800.000.000	0.322	700.000.000	0.354	1.702.000.000	0.39	1.870.000.000	0.39	5.722.000.000	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja
		Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (Dengan Satuan:%)	12.8	13.188	90.000.000	13.320	220.000.000	13.453	200.000.000	13.587	250.000.000	13.723	375.000.000	13.723	1.135.000.000	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja
Misi 4:																	
membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat																	
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan																	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas konektivitas antar wilayah																	
		Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	60.75	65.42	21.707.320.000	67.06	21.707.320.000	68.73	28.816.658.200	70.45	19.032.320.000	72.21	20.742.744.000	72.27	112.006.362.200	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW Kab. Ogan Ilir (Dengan Satuan:Persen)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.100.000.000	100	5.300.000.000	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman																	

		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	100	1.975.000.000	100	1.975.000.000	100	2.850.000.000	100	1.975.000.000	100	1.975.000.000	100	10.750.000.000	Perumahan dan kawasan permukiman
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase jumlah perumahan yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:persentase (%))	0	5	2.300.000.000	10	2.000.000.000	15	3.350.000.000	22	3.231.706.600	30	4.231.706.600	30	15.113.413.200	Perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya dukungan dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan																	
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten (Dengan Satuan:indeks)	51,92	65.29	640.000.000	66.02	510.000.000	66.74	510.000.000	67.47	620.000.000	68.19	620.000.000	68.19	8.095.000.000	Dinas lingkungan hidup
Misi 5:																	
membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung hukum dan ham sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika, dalam suasana aman dan nyaman																	
Mewujudkan ketentraman, ketertiban masyarakat dan kesadaran demokrasi berlandaskan iman dan taqwa																	
Meningkatnya kondusivitas keamanan masyarakat																	
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Konflik Bernuansa Sosial dan Budaya (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	290.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	61.000.000	Badan kesatuan bangsa dan politik
Meningkatnya pemahaman dan integrasi nilai-nilai luhur budaya daerah																	

			Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Konflik Bernuansa Kesukuan (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	295.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	735.000.000	Badan kesatuan bangsa dan politik
			Program pengembangan kebudayaan	Peningkatan Mutu Tenaga Kebudayaan (Dengan Satuan:persentase (%))	72.05	80	1.028.120.002	80	1.165.150.002	80	1.269.198.914	80	1.468.131.169	80	1.520.695.944	80	6.451.296.031	Dinas pendidikan dan kebudayaan
Total Prioritas 1							141.388.293.798		143.769.660.216		154.025.376.664		149.257.332.560		155.245.342.673		533.779.268.456	

6.4 Arahan Kebijakan Pengembangan Kewilayahan (Kawasan Strategis)

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Mengacu pada pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten (Permen PU No 16 Tahun 2009), Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Ogan Ilir , dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel VI.5.
Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

NO	FUNGSI KOTA	KRITERIA
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan Diusulkan oleh pemerintah kabupaten
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

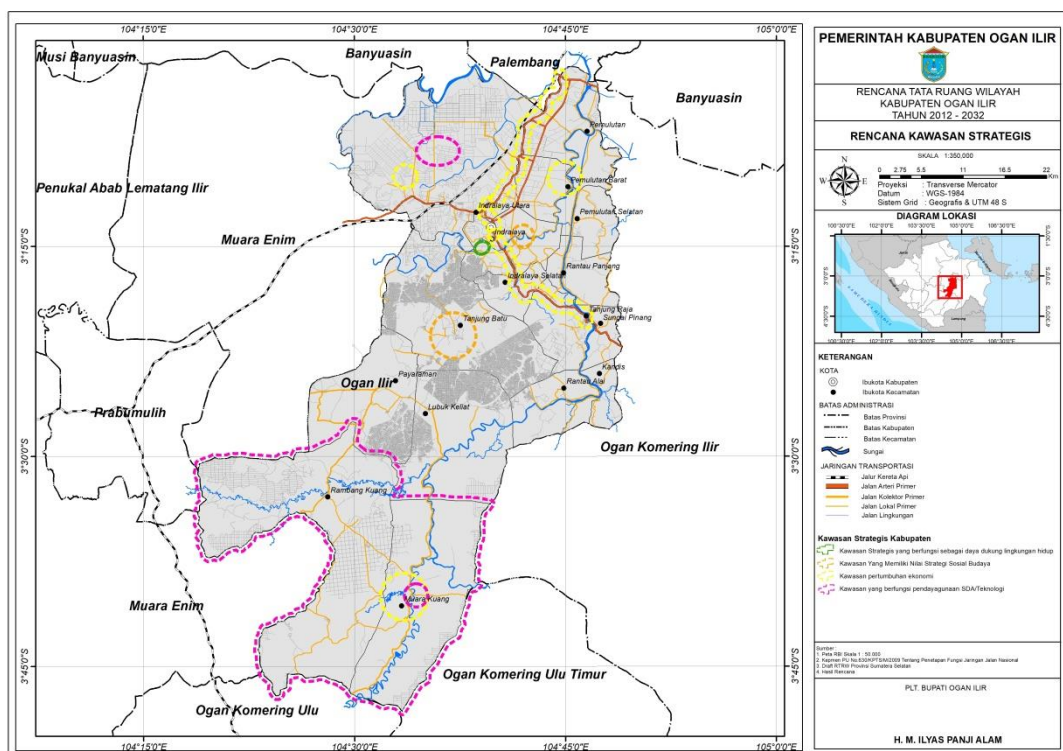
Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16 Tahun 2009

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Ogan Ilir dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKN terletak di Kecamatan Indralaya.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW terletak di Perkotaan Indralaya meliputi wilayah di kecamatan Indralaya, kecamatan Indralaya Selatan, kecamatan Indralaya Utara dan kecamatan Pemulutan.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL terletak di Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Rantau Panjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Tanjung Batu.

- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK berlokasi di Kecamatan Muara Kuang.
- (5) Pusat kegiatan sebagai PPL, berlokasi di:
- Kecamatan Pemulutan Barat;
 - Kecamatan Pemulutan Selatan;
 - Kecamatan Rambang Kuang;
 - Kecamatan Rantau Alai;
 - Kecamatan Lubuk Keliat;
 - Kecamatan Kandis.

Gambar VI.2.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Ogan Ilir



Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Ogan Ilir adalah kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Ogan Ilir dan Kawasan Strategis Kabupaten dijelaskan sebagai berikut

1. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Ogan Ilir

Kawasan strategis provinsi yang sudah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 – 2032 adalah kawasan strategis, seperti:

1. Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang
2. Kawasan Koridor Palembang – Prabumulih
3. Kawasan Minapolitan Burai di Kecamatan Indralaya Utara

Tabel VI.6
Penetapan dan Arah Penanganan Kawasan Strategis
Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Ilir

NO	KAWASAN STRATEGIS	KRITERIA	ARAHAN PENANGANAN
1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang.	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan metropolitan • Pengembangan pembangunan vertikal • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah
2	Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi ekonomi cepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas

NO	KAWASAN STRATEGIS	KRITERIA	ARAHAN PENANGANAN
		tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;	pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian
3	Kawasan Minapolitan a. Kabupatén Ogan Ilir b. Ogan Komering Ilir c. Ogan Komering Ulu d. OKU Timur e. Banyuasin f. OKU Selatan g. Musi Banyuasin h. Musi Rawas i. Kota Palembang	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : 1) Sektor unggulan perikanan dan industri yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dari sektor perikanan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan;	• Mempertahankan luasan lahan budidaya perikanan • Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya • Meningkatkan pendapatan nelayan/pembudidaya dengan program multiaktivitas minabisnis • Mengembangkan kawasan minabisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2032

2. Kawasan Strategis Kabupaten Ogan Ilir

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan kawasan strategis yang perlu penanganan strategis dan termasuk kawasan strategis yang sudah ditetapkan nasional dan provinsi. Kawasan strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Ogan Ilir adalah:

5.1.3.1 **Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi** Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi;

- a. Kawasan Perkotaan Inderalaya
- b. Kawasan Koridor Kota Palembang – Inderalaya
- c. Kawasan Koridor Inderalaya – Tanjung Raja
- d. Kawasan Agropolitan Muara Kuang dan Inderalaya Utara
- e. Kawasan Minapolitan

a. Kawasan Perkotaan Inderalaya

Kota Inderalaya adalah pusat koleksi dan distribusi untuk skala regional/ kabupaten karena merupakan ibukota Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, Kota Inderalaya juga merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRWN (PP. 26 Tahun 2008).

Strategi pengembangan Kota Inderalaya ini adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi
2. Pengaturan pemanfaatan ruang kota
3. Pengembangan sentra bisnis dan perdagangan agro
4. Pengembangan fasilitas transportasi regional dan lokal

b. Kawasan Koridor Kota Inderalaya-Palembang

Kawasan strategis ini merupakan kawasan yang menghubungkan Kota Inderalaya (sebagai ibukota Kabupaten Ogan Ilir dan Pusat Kegiatan Primer di Kabupaten Ogan Ilir) dan Kota Palembang (Ibukota Provinsi Sumatera Selatan/ Pusat Kegiatan Nasional). Untuk tahun-tahun yang akan datang koridor ini akan menjadi sangat berkembang dan perlu mendapat penanganan yang strategis sebagai antisipasi permasalahan tata ruang dan lingkungan.

Kawasan koridor ini memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akses jalan regional seperti kegiatan industri atau zona industri, pergudangan, rest area, pariwisata dan rekreasi (agro-tourism) dan perdagangan.

Strategi pengembangan Koridor Kota Inderalaya – Palembang ini adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
2. Pengaturan ruang pemanfaatan ruang koridor Kota Indralaya – Palembang
3. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
4. Pengembangan sektor unggulan kawasan
5. Penataan ruang kawasan

c. Kawasan Koridor Kota Indralaya-Tanjung Raja

Kawasan strategis ini merupakan kawasan yang penghubung Kota Indralaya sebagai pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Ogan Ilir dengan wilayah pengembangan Timur dengan Kota Kecamatan Tanjung Raja sebagai pusat kegiatan. Pada saat ini koridor ini sangat berkembang, dan diperkirakan pada masa yang akan datang koridor ini akan lebih berkembang dan perlu mendapat penanganan yang strategis sebagai antisipasi permasalahan tata ruang dan lingkungan. Kawasan koridor ini memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akses jalan regional seperti kegiatan perdagangan dan perumahan.

Strategi pengembangan Koridor Kota Indralaya – Tanjung Raja ini adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
2. Pengaturan ruang pemanfaatan ruang koridor Kota Indralaya – Tanjung Raja
3. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
4. Pengembangan sektor-sektor unggulan kawasan.

d. Kawasan Pengembangan Agropilitan (Kecamatan Muara Kuang dan Indralaya Utara)

Kawasan Muara Kuang di bagian Selatan Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan sebagai kawasan pengembangan berbasis pertanian (agropolitan) dengan dasar pertimbangan bahwa kawasan ini pada

saat ini masih kurang berkembang bila dibandingkan dengan kawasan di sebelah utara wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang relatif dekat dengan Kota Palembang. Selain itu wilayah ini didukung oleh potensi sektor perkebunan yang cukup besar.

Sedangkan di Kecamatan Indralaya Utara terdapat kawasan yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan yaitu berupa *Agro Techno Park* yang pengembangannya bekerjasama dengan BPPT.

Strategi pengembangan Kawasan Agropolitan adalah :

1. Pengembangan klaster-klaster atau kawasan sentra produksi pertanian
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian
3. Mendorong kegiatan industri pengolahan komoditas pertanian
4. Penyiapan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan agropolitan.

e. Kawasan Minapolitan

Konsep mengenai minapolitan merupakan konsep yang berkembang untuk mengembangkan sektor perikanan dengan menjadikan kawasan perikanan dapat berkembang secara mandiri. Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya.

Kota perikanan dapat merupakan kota menengah atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi

juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha perikanan, industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain.

Di Kabupaten Ogan Ilir direncanakan akan dikembangkan kawasan minapolitan yang berpusat di Kota Indralaya, Indralaya Utara, dan Pemulutan. Kawasan minapolitan ini mencakup kecamatan-kecamatan yang memang potensial untuk pengembangan sektor perikanan, baik dengan memanfaatkan sungai-sungai maupun rawa lebak.

Strategi pengembangan kawasan minapolitan ini antara lain :

- Melakukan pengembangan sistem kota-kota yang merupakan hirarki pelayanan kawasan minapolitan
- Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, jaringan jalan, dan jaringan utilitas.
- Pengembangan prasarana energi, telekomunikasi dan pengairan dilakukan untuk mendukung sistem kegiatan (*activity system*).
- Pengembangan prasarana sosial-ekonomi dilakukan untuk memantapkan / membentuk sistem pusat-pusat permukiman.
- Meningkatkan pelayanan moda transportasi air (sungai)
- Meningkatkan keterkaitan ekonomi dengan Kota Palembang melalui peningkatan aksesibilitas.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah untuk perodesasi RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif merupakan wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program setiap tahun dalam perodesasi perencanaan jangka menengah. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.

Perumusan indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Program pembangunan dan program PD dalam RPJMD ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran dan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil pagu PD yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Selanjutnya Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 yang kemudian dituangkan dalam Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 secara rinci tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1.186.859,43	1.193.164,32	1.201.838,77	1.212.527,35	1.225.794,35
2.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN					
	<i>(Dikurangi):</i>					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	861.745,56	875.381,41	884.057,60	910.165,36	928.343,83
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	322.113,87	314.782,90	314.781,16	299.361,99	294.450,52

Sumber: TAPD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

Dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya

PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 7.2
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1.186.859,43	1.193.164,32	1.201.838,77	1.212.527,35	1.225.794,35
2.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	1.186.959,43	1.193.164,32	1.201.838,77	1.212.527,35	1.225.794,35
	<i>(Dikurangi):</i>					
3	Belanja Transfer	289.322,14	289.689,10	290.261,85	290.906,08	291.495,25
4	Belanja Tak Terduga	17.894,51	14.527,53	5.496,03	13.310,57	12.721,40
5	Pengeluaran Pembiayaan	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	876.642,78	885.947,69	903.080,89	905.310,70	918.577,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, 2021 (diolah)

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah

terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Program pembangunan dan program perangkat daerah, dalam RPJMD ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target *outcomes* hingga *impacts* serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Indikasi program pada penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ini dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut. (Lampiran 7.3)

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 - 2026**

5.055.208.420																	4.711.341.506																	11.166.333.526																	-7.406.604.400																	8.091.662.115																
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																				
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5																																																																								
				K		K		K		K		K		K			K																																																																			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			262.607.342.967		262.263.476.053		268.718.468.073		250.145.530.147		265.643.796.662		1.309.378.613.902																																																																						
010101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	94,16	100	238.169.280.658,00	100	241.807.809.973,52	100	247.660.707.602,78	100	228.358.715.703,40	100	243.303.288.384,20	100	1.199.299.802.321,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
010102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:persentase (%))	97,55	100	21.952.232.000,00	100	17.753.000.000,00	100	18.196.825.000,00	100	18.651.745.625,00	100	19.118.039.266,00	100	95.671.841.891,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan - Dasar (Dengan Satuan: persentase (%))	97,55	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan - Menengah Pertama (Dengan Satuan:persentase (%))	97,55	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Dengan Satuan:persentase (%))	97,55	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
010103	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Mutu Pendidikan (Dengan Satuan:Persentase (%))	NA	90	75.337.000,00	90	76.000.000,00	90	77.900.000,00	90	79.847.500,00	90	81.843.688,00	90	390.928.188,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
010104	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dengan Satuan:Persentase (%))	85,21	86	122.863.648,00	87	122.948.431,00	88	125.999.740,00	89	129.142.921,00	90	131.316.251,00	90	632.270.991,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
022202	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Mutu Tenaga Kebudayaan (Dengan Satuan: persentase (%))	72,05	80	1.028.120.002	80	1.165.150.002	80	1.269.198.914	80	1.468.131.169	80	1.520.695.944	80	6.451.296.031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
022203	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Mutu Pelaku Seni (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	80	218.170.002,00	80	247.230.002,00	80	269.350.000,00	80	311.640.001,00	80	322.910.000,00	80	1.369.300.005,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
022204	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Mutu Lembaga dan Data Sejarah (Dengan Satuan: Persentase (%))	61,84	80	244.900.001,00	80	245.330.001,00	80	251.430.001,00	80	257.690.000,00	80	262.050.000,00	80	1.261.400.003,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
022205	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya cagar budaya (Dengan Satuan: Persentase (%))	61,84	80	796.439.656,00	80	846.007.643,00	80	867.056.815,00	80	888.617.228,00	80	903.653.129,00	80	4.301.774.471,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																																																				
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																				
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5																																																																								
				K		K		K		K		K		K																																																																						
	DINAS KESEHATAN			137.873.693.369		137.465.574.869		136.958.866.519		136.892.587.334		138.156.295.231		689.392.406.845																																																																						
010201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	80	68.281.227.973,00	85	68.944.106.060,00	85	70.207.506.666,00	90	71.619.157.333,00	90	73.548.850.966,00	90	352.600.848.997,00	Dinas Kesehatan																																																																				

010202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia Harapan Hidup (Dengan Satuan:tahun)	65,64	66	69.442.465.396,00	66,5	68.356.468.809,00	67	66.569.859.853,00	67,5	65.073.780.001,00	68	64.387.829.265,00	68,5	333.830.403.324,00	Dinas Kesehatan
010203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi di b i d a n g n y a (D e n g a n Satuan:Persentase)	80	82	150.000.000,00	85	165.000.000,00	90	181.500.000,00	95	199.650.000,00	100	219.615.000,00	100	915.765.000,00	Dinas Kesehatan
010204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengawasan obat dan makanan (Dengan Satuan: Persentase (%))	100	100	Rp 480.985.000	100	Rp 337.083.500	100	Rp 370.791.850	100	Rp 407.871.035	100	Rp 448.658.139	100	2.045.389.524,00	Dinas Kesehatan
010205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa dan kelurahan siaga aktif (Dengan Satuan: Persentase (%))	97,09	98	Rp 290.000.000	98	Rp 319.000.000	100	Rp 292.000.000	100	Rp 321.200.000	100	Rp 283.705.000	100	Rp 1.505.905.000	Dinas Kesehatan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	137.873.693.369,00											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN ILIR			28.571.566.000	29.571.566.000	28.571.566.000	28.571.566.000	28.571.566.000	143.857.830.000							
010201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)		20	21.728.923.862	40,13	21.878.923.862	60,12	21.716.423.862	80,08	21.688.923.862	100	21.641.423.862	100	108.654.619.310	Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir
010202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Rumah Sakit (Dengan Satuan: Persentase (%))	100	19,45	6.742.642.138	41,32	7.577.642.138	60,78	6.746.142.138	80,32	6.773.642.138	100	6.821.142.138	100	34.661.210.690	Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir
010203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Kompeten di Bidangnya (Dengan Satuan:Orang)	420	50	50.000.000	150	65.000.000	150	59.000.000	150	59.000.000	150	59.000.000	650	292.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir
010205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kemitraan Yang Terjalin (Dengan Satuan: persentase (%))	100	20	50.000.000	40	50.000.000	60	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			38.850.609.000	38.850.609.000	51.796.505.000	38.850.609.000	40.850.609.000	209.198.941.000							
010301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	80	80	12.192.289.000	82	12.192.289.000	85	14.630.746.800	87	12.192.289.000	90	12.496.865.000	90	63.704.478.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:%)	0,53	2	1.305.000.000	3	1.305.000.000	5	2.610.000.000	8	1.705.000.000	10	1.930.000.000	10	8.855.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Dengan Satuan:%)	18,62	25		30		33		35		38		38		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010303	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rumah tangga pengguna air bersih (Dengan Satuan:%)	73,08	75	700.000.000	80	700.000.000	83	840.000.000	85	1.400.000.000	87	1.400.000.000	87,00	5.040.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota (Dengan Satuan:%)	2,24	3,5		4		4,5		5		6		6		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010304	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (Dengan Satuan:unit)	7	10	300.000.000	12	300.000.000	15	360.000.000	18	300.000.000	20	360.000.000	20	1.620.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah tangga bersanitasi (Dengan Satuan:%)	76,62	78	500.000.000	80	500.000.000	82	600.000.000	85	500.000.000	88	500.000.000	88	2.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase (Dengan Satuan:%)	23	25	250.000.000	28	250.000.000	30	300.000.000	33	250.000.000	35	300.000.000	35	1.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010307	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah kawasan strategis yang ditangani infrastruktur kawasan p e r m u k i m a n (D e n g a n Satuan:kawasan)	NA	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	5	1.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010308	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010309	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	80	85	465.000.000	88	465.000.000	90	1.050.000.000	95	940.000.000	100	1.040.000.000	100	3.960.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	60,75	62,50	21.707.320.000	65	21.707.320.000	67,50	28.816.658.200	70	19.032.320.000	72	20.742.744.000	72	112.006.362.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi dan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten (Dengan Satuan:%)	NA	20	81.000.000	25	81.000.000	30	89.100.000	32	81.000.000	35	81.000.000	35	413.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
010312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW Kab. Ogan Ilir (Dengan Satuan:%)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.100.000.000	100	5.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN			24.009.789.172		24.009.725.308		26.009.829.661		25.009.731.870		26.009.743.526		125.048.819.537		
010401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	97,14	100	13.055.880.149,00	100	13.290.793.138,00	100	13.065.748.607,00	100	13.063.835.792,00	100	13.057.628.526,00	100	65.533.886.212,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
010402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (Dengan Satuan: persentase (%))	66,67	100	3.299.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	100	16.499.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

010403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	100	1.975.000.000	100	1.975.000.000	100	2.850.000.000	100	1.975.000.000	100	1.975.000.000	100	10.750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
010404	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	JUMLAH LUASAN KAWASAN KUMUH YANG TERTANGANI (Dengan Satuan:Ha)	NA	0,15	175.000.000,00	0,15	175.000.000,00	0,15	175.000.000,00	0,15	175.000.000,00	0,15	175.000.000,00	0,75	875.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
010405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jumlah perumahan yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	100	2.300.000.000	100	2.000.000.000	100	3.350.000.000	100	3.231.706.600	100	4.231.706.600	100	15.113.413.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
010406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	NA	84.960.001,00	NA	83.970.001,00	NA	84.020.000,00	NA	82.390.000,00	NA	84.470.001,00	NA	419.810.003,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
021002	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Dengan Satuan:dokumen)	NA	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250	250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
021004	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	2.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
021005	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	100	2.000.000.000	100	2.066.968.000	100	2.066.968.000	100	2.066.968.000	100	2.066.968.000	100	10.267.872.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
021006	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Luasan Redistribusi (Dengan Satuan:meter persegi)	NA	NA	84.977.695,00	NA	83.994.843,00	NA	84.043.268,00	NA	82.415.557,00	NA	84.489.768,00	NA	419.921.131,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
021007	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penggunaan Tanah Ulayat (Dengan Satuan: persentase)	NA	NA	84.971.327,00	NA	83.999.326,00	NA	84.049.786,00	NA	82.415.921,00	NA	84.480.631,00	NA	419.916.991,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
021008	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

021009	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
021010	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			9.073.017.000		9.783.247.000		9.073.017.000		9.073.017.000		9.073.017.000		15.897.567.290		
010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	Rp 8.684.017.000	100	Rp 9.067.247.000	100	Rp 8.684.017.000	100	Rp 8.684.017.000	100	Rp 8.684.017.000	100	Rp 15.477.567.290	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
010502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang diselesaikan	100	100	Rp 389.000.000	100	Rp 716.000.000	100	Rp 389.000.000	100	Rp 389.000.000	100	Rp 389.000.000	100	Rp 420.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.941.568.073		4.687.268.073		4.687.268.073		4.687.268.073		5.687.268.073		23.690.640.365		
010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	87	100	1.481.291.323,00	100	1.725.623.823,00	100	1.725.623.823,00	100	1.725.623.823,00	100	2.412.002.500,00	100	9.070.165.292,00	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
010502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:dokumen)	Dokumen Komitmen Kebencanaan antar Lembaga	Dokumen Komitmen Kebencanaan antar Lembaga	16.412.500,00	Dokumen Komitmen Kebencanaan antar Lembaga	16.412.500,00	Dokumen Komitmen Kebencanaan antar Lembaga	16.412.500,00	Dokumen Komitmen Kebencanaan antar Lembaga	16.412.500,00	Dokumen Komitmen Kebencanaan antar Lembaga	30.000.000,00	Dokumen Komitmen Kebencanaan antar Lembaga	95.650.000,00	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah

010503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cara Menanggulangi Bencana di Kabupaten (Dengan Satuan: jumlah bencana)	4	1	2.441.124.250,00	1	2.901.644.250,00	1	2.901.644.250,00	1	2.901.644.250,00	1	3.166.678.073,00	1	14.312.735.073,00	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
010504	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kesiapan dalam menghadapi bencana Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan: Dokumen dan Barang)	Rambu Peringatan, Dokumen laporan bencana, dan Alat sistem informasi	Rambu Peringatan, Dokumen laporan bencana, dan Alat sistem informasi	2.740.000,00	Rambu Peringatan, Dokumen laporan bencana, dan Alat sistem informasi	43.587.500,00	Rambu Peringatan, Dokumen laporan bencana, dan Alat sistem informasi	43.587.500,00	Rambu Peringatan, Dokumen laporan bencana, dan Alat sistem informasi	43.587.500,00	Rambu Peringatan, Dokumen laporan bencana, dan Alat sistem informasi	78.587.500,00	Rambu Peringatan, Dokumen laporan bencana, dan Alat sistem informasi	212.090.000,00	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			4.105.849.125	5.360.216.535	3.360.088.981	3.360.084.128	3.860.107.028	20.046.345.797							
010401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	100	2.609.365.792,00	100	3.625.117.687,00	100	2.276.945.801,00	100	2.293.263.699,00	100	2.865.481.804,00	100	13.670.174.783,47	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
010504	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTAE LAYANAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Dengan Satuan:Persentase (%))	NA	100	1.496.483.333,00	100	1.735.098.848,00	100	1.083.143.180,00	100	1.066.820.429,00	100	994.625.224,00	100	6.376.171.014,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
	DINAS SOSIAL			4.715.138.000	4.715.138.000	4.715.138.000	5.715.138.000	7.770.338.000	27.630.890.000							
010601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	3.302.375.000	100	3.302.375.000	100	3.302.375.000	100	3.344.118.000	100	4.069.858.000	100	17.321.101.000	Dinas Sosial
010602	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PSKS yang berkompetensi (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	96.000.000	100	96.000.000	100	96.000.000	100	96.000.000	100	296.000.000	100	680.000.000	Dinas Sosial
010603	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani (Dengan Satuan: persentase (%))	0	0		0		0		0		100		100		
010604	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial dan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV yang tertangani (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	1.124.800.000	100	2.384.800.000	Dinas Sosial
010605	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	624.020.000	100	624.020.000	100	624.020.000	100	1.137.500.000	100	1.343.680.000	100	4.353.240.000	Dinas Sosial
010606	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Korban Bencana yang tertangani (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	227.520.000	100	227.520.000	100	227.520.000	100	577.520.000	100	736.000.000	100	1.996.080.000	Dinas Sosial
010607	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Taman Makam Pahlawan yang Dikelola (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	165.223.000	100	165.223.000	100	165.223.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	895.669.000	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K		
				K		K		K		K		K				
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			6.586.735.509		7.886.799.173		7.386.762.113		9.886.306.675		10.386.306.675		42.134.111.468		
020701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	78	5.480.735.509	80	6.221.799.173,00	82	5.971.762.113,00	85	7.179.306.675,00	90	7.141.306.675,00	90	31.996.111.468,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ada/Tidak dokumen perencanaan tenaga kerja	Tidak	Tidak	0	ada	20.000.000	Tidak	0	Tidak	0	Tidak	0	ada	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
020703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	100	650.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	1.702.000.000	100	1.870.000.000	100	5.722.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
020704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (Dengan Satuan:%)	13	13	90.000.000	14	220.000.000	15	200.000.000	15	250.000.000	15	375.000.000	72	1.135.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
020705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:%)	60	62	126.000.000	65	315.000.000	65	280.000.000	70	350.000.000	70	525.000.000	70	1.596.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
033203	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman yang dibina (Dengan Satuan:UPT)	5	5	95.000.000	5	120.000.000	5	115.000.000	5	140.000.000	5	150.000.000	5	620.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
033204	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:kawasan)	2	2	70.000.000	2	190.000.000	2	120.000.000	2	265.000.000	2	325.000.000	2	970.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Ada/Tidak Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	NA	ADA	75.000.000	TIDAK	0	TIDAK	0	TIDAK	0	TIDAK	0	ADA	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K		
				K		K		K		K		K				
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			21.129.980.680		24.128.605.000		21.628.605.000		31.763.081.000		32.263.081.000		130.913.352.680		
020901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	96	100	17.221.934.680,00	100	19.328.475.000	100	18.033.605.000	100	21.340.190.000	100	21.340.190.000	100	97.264.394.680,00	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
020902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras Sesuai Kebutuhan) (Dengan Satuan:persentase (%))	0,418	0,431	1.000.000	0,443	1.000.000	0,455	1.000.000	0,468	1.000.000	0,480	1.000.000	0,480	5.000.000	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
020903	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras Sesuai Kebutuhan) (Dengan Satuan:persentase (%))	0,418	0,431	175.515.300	0,443	180.000.000	0,455	150.000.000	0,468	320.000.000	0,480	320.000.000	0,480	1.145.515.300	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
020904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras Sesuai Kebutuhan) (Dengan Satuan: persentase (%))	0,418	0,431	75.000.000	0,443	75.000.000	0,455	50.000.000	0,468	75.000.000	0,480	75.000.000	0,480	350.000.000	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

032702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun (Dengan Satuan: Ton/Ha)	3,761	3,90	771.162.700	3,95	1.078.420.000	4,00	580.000.000	4,05	5.710.641.000	4,10	5.770.378.500	4,10	13.910.602.200	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
032703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun . (Dengan Satuan: Ton/Ha)	3,761	3,90	299.806.800	3,95	300.000.000	4,00	130.000.000	4,05	305.250.000	4,10	305.512.500	4,10	1.340.569.300	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
032704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular. (Dengan Satuan: Persen)	96	100	116.661.200	100	571.710.000	100	425.000.000	100	875.000.000	100	1.050.000.000	100	3.038.371.200	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
032705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktifitas Pertanian Perhektar Pertahun	3761	3,90	184.000.000	3,95	185.000.000	4,00	110.000.000	4,05	185.000.000	4,10	300.000.000	4,10	964.000.000	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
032706	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun. (Dengan Satuan: Ton/Ha)	3,761	3,90	95.900.000	3,95	220.000.000	4,00	160.000.000	4,05	450.000.000	4,10	600.000.000	4,10	1.525.900.000	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
032707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun . (Dengan Satuan: persentase (%))	96	100	2.189.000.000	100	2.189.000.000	100	1.989.000.000	100	2.501.000.000	100	2.501.000.000	100	11.369.000.000	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			13.280.050.766		13.374.665.192		13.874.685.457		14.374.695.520		14.843.830.000		69.778.794.793		
021101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	na	100	4.793.635.266,00	100	4.654.665.192,00	100	1.954.685.457,00	100	4.771.695.520,00	100	4.988.830.000,00	100	14.682.379.293,00	Dinas Lingkungan Hidup
021102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Integrasinya RPPLH dalam rencana pembanguna Kabupaten (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	130.000.000,00	100	200.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	540.000.000,00	100	6.335.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan KLHS untuk KRP tingkat Provinsi (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan RPPLH Kabupaten Kota (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
021103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten (Dengan Satuan: indeks)	52	52	640.000.000,00	52,12	510.000.000,00	52,22	510.000.000,00	52,32	620.000.000,00	52,42	620.000.000,00	52,42	8.095.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
021104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penjabaran dan konsistensi pengelolaan keanekaragaman hayati (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	2.364.585.000,00	100	2.555.000.000,00	100	2.555.000.000,00	100	2.695.000.000,00	100	2.695.000.000,00	100	12.844.585.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
021105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 (Dengan Satuan: Badan Usaha)	24	50	60.000.000,00	50	95.000.000,00	60	95.000.000,00	60	183.000.000	75	135.000.000,00	75	505.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah LB3 yang di Kelola (Dengan Satuan: jumlah (M3))	600	600		600		600		600		700		700		Dinas Lingkungan Hidup
021106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Penjabaran dan Konsistensi Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	100.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	130.000.000,00	100	130.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

021107	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	verifikasi MHA dan Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	15.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
021108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penjabaran dan Konsistensi Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	84.920.000,00	100	80.000.000,00	100	65.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	479.920.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
021109	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penjabaran konsistensi penghargaan lingkungan hidup (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	525.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
021110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penjabaran Konsistensi penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00	100	110.000.000	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	265.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
021111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penjabaran konsistensi pengelolaan Persampahan (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	4.966.910.500,00	100	5.010.000.000,00	100	8.075.000.000	100	5.385.000.000,00	100	5.385.000.000,00	100	25.746.910.500,00	Dinas Lingkungan Hidup	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K			
				K		K		K		K		K					
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.678.695.000		9.178.695.000		6.678.695.000		6.678.695.000		7.178.695.000		38.393.475.000			
021201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	7.512.219.716	100	7.993.695.000	100	6.678.695.000	100	6.678.695.000	100	7.178.695.000	100	36.041.999.716	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
021202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Masyarakat yang memiliki KK, KTP-El,KIA dan Surat Pindah Datang (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	960.000.000	100	960.000.000	100	-	100	-	100	-	100	1.920.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
021203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	61.475.284	100	67.000.000	100	-	100	-	100	-	100	128.475.284	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
021204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pelayanan Dokumen Kependudukan berjalan dengan baik (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	115.000.000	100	124.000.000	100	-	100	-	100	-	100	239.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
021205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya buku profil dan Agregat (Dengan Satuan: persentase)	100	100	30.000.000	100	34.000.000	100	-	100	-	100	-	100	64.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K			
				K		K		K		K		K					
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				18.561.215.950		7.000.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000		8.500.000.000		49.061.215.950			
021301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	4.192.721.700	100	4.691.000.000	100	4.691.000.000	100	4.468.750.000	100	5.155.000.000	100	23.198.471.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
021302	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Terlaksananya Program Penataan Desa (Dengan Satuan:persentase (%))	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	0	100	100.000.000	100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	

021303	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	60.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	310.000.000	D i n a s Pemberdayaan Masyarakat Desa
021304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Program Administrasi Pemerintah Desa (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	12.353.494.250	100	704.000.000	100	704.000.000	100	1.926.250.000	100	1.220.000.000	100	16.907.744.250	D i n a s Pemberdayaan Masyarakat Desa
021305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terlaksananya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	1.905.000.000	100	1.505.000.000	100	1.505.000.000	100	1.555.000.000	100	1.925.000.000	100	8.395.000.000	D i n a s Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6.991.593.019		6.991.593.019		6.991.593.019		6.991.593.019		7.491.030.519		41.598.152.672		
020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	6.635.030.519	100	6.635.030.519	100	6.635.030.519	100	6.635.030.519	100	6.768.030.519	100	33.308.152.672	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
020802	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan yang baik (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	90.000.000	100	2.000.000.000	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
020803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (Dengan Satuan: persentase (%))	12	11	40.000.000	11	40.000.000	11	40.000.000	11	40.000.000	11	55.000.000	11	215.000.000	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
020805	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya data tentang kondisi anak di Ogan Ilir (Dengan Satuan:dokumen)	75	65	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	65	180.000.000	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
020806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (Dengan Satuan:dokumen)	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	200.000.000	100	1.950.000.000	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana

021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	370.000.000	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pembinaan dan Keluarga Berencana (D e n g a n Satuan:persentase (%))	100	100	31.562.500	100	31.562.500	100	31.562.500	100	31.562.500	100	93.000.000	100	75.000.000	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000	100	3.500.000.000	D i n a s Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K	K		
				K		K		K		K		K					
DINAS PERHUBUNGAN				6.766.809.557		6.266.760.334		6.766.786.213		7.266.806.544		7.766.822.152		34.833.984.800			
021501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	70	75	6.205.131.557,00	80	5.386.760.334,00	85	5.826.786.213,00	90	5.826.786.213,00	95	5.826.786.213,00	95	18.112.306.800,00	Dinas Perhubungan	
021502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota (Dengan Satuan: persentase (%))	85	89,5	561.678.000,00	91	880.000.000,00	92,5	940.000.000,00	94	1.440.020.331,00	95,5	1.940.035.939,00	95,5	16.721.678.000,00	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten (Dengan Satuan:persentase (%))	0	27		45		63		82		100		100		Dinas Perhubungan	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K	K		
				K		K		K		K		K					
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				4.466.123.555		5.966.205.349		4.464.108.147		4.466.101.694		4.966.122.530		24.330.661.275			
021601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	1.756.064.552	100	2.497.513.544	100	1.768.262.093	100	1.804.833.510	100	1.950.090.666	100	9.776.764.365	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian	
021602	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	1.544.030.099	100	1.844.377.614	100	1.376.372.928	100	1.330.985.596	100	1.485.758.067	100	7.581.524.304	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian	
021603	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Dengan Satuan:persentase (%))	80	84	909.138.898	88	1.281.034.190	92	1.061.493.122	96	1.075.292.588	100	1.242.483.790	100	5.569.442.588	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian	

022002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:persentase (%))	90	90	143.170.003	90	191.310.001	100	142.890.003	100	142.110.000	100	160.380.003	100	781.860.010	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian
022102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatkan pelayanan persandian dalam rangka pengamanan informasi (Dengan Satuan:persentase (%))	90	90	113.720.003	90	151.970.000	100	115.090.001	100	112.880.000	100	127.410.004	100	621.070.008	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU				5.272.944.000		5.772.944.000		5.272.944.000		8.272.944.000		8.772.944.000		33.364.720.000		
021801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	80	4.829.298.270,00	82	5.237.240.633,00	84	4.749.090.633,00	86	7.334.494.000,00	86	7.813.571.500,00	88	29.963.695.036	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
021803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:jumlah)	15	20	164.354.500,00	22	180.000.000,00	24	189.000.000,00	26	198.450.000,00	28	208.372.500,00	30	940.177.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
021804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota (Dengan Satuan:persentase (%))	9,25	10,00	123.350.000,00	12,50	173.350.000,00	15,00	152.500.000,00	17,50	350.000.000,00	20,00	350.000.000,00	22,00	1.149.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
021805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyaran Rupiah) (Dengan Satuan:rata - rata)	98,35	98,45	79.723.230,00	98,55	92.353.367,00	98,70	92.353.367,00	98,85	240.000.000,00	98,95	251.000.000,00	99,15	755.429.964	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
021806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:investor)	15	20	76.218.000,00	22	90.000.000,00	24	90.000.000,00	26	150.000.000,00	28	150.000.000,00	30	556.218.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				3.915.791.000		3.916.035.540		3.916.032.446		5.916.147.219		6.416.165.349		24.080.426.511		
021901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	80	2.572.415.000	85	602.509.174	85	664.144.731	90	1.151.615.420	95	1.365.394.830	95	4.329.506.883	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
021902	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan K e p e m u d a a n (D e n g a n Satuan:persentase (%))	NA	90	515.000.000	90	334.773.985	95	365.653.081	95	641.061.868	98	754.388.274	98	2.376.718.445	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
021903	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya saing Keolahragaan (Dengan Satuan:persentase)	NA	90	420.000.000	90	1.199.655.399	95	931.666.394	95	1.511.919.528	98	1.611.326.288	98	6.550.096.944	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
021904	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	50.000.000	100	539.817.479	100	580.122.766	100	655.187.832	100	1.021.844.993	100	3.295.184.956	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
032602	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	90	50.000.000	90	894.350.006	95	1.000.610.006	95	1.305.830.004	98	903.270.010	98	5.096.480.033	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM			6.291.125.587			6.291.108.854			6.291.103.884			11.291.395.870			11.291.374.790			41.456.108.985			
021701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	5.033.596.065,00	100	5.034.839.333,00	100	5.035.874.362,00	100	8.923.680.690,00	100	8.923.669.610,00	100	32.951.660.060,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
021702	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Dengan Satuan:persentase (%))	19,85	34,3	36.936.840,00	34,30	36.936.840,00	34	36.936.840,00	30	132.590.112,00	30,00	132.590.112,00	30,00	375.990.745,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
021703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang kuat dan taat pada aturan (Dengan Satuan:persentase (%))	19,85	34,3	14.689.700,00	34,30	14.689.700,00	34,30	14.689.700,00	59,27	52.730.796,00	59,27	52.730.796,00	59,27	149.530.692,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
021704	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (Dengan Satuan:persentase (%))	19,85	34,3	42.805.281,00	34,30	42.805.281,00	34,30	42.805.281,00	59,27	153.655.727,00	59,27	153.655.727,00	59,27	435.727.298,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
021705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya SDM Koperasi yang mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:persentase (%))	19,85	34,3	179.336.900,00	34,30	179.336.900,00	34,30	179.336.900,00	59,27	321.877.829,00	59,27	321.877.829,00	59,27	1.181.766.357,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
021706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapat Dukungan/ Fasilitas (Dengan Satuan: persentase (%))	19,85	34,3	97.550.001,00	34,30	96.290.000,00	34,30	95.250.001,00	59,27	116.270.000,00	59,27	116.260.000,00	59,27	521.620.002,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
021707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (Dengan Satuan:usaha mikro)	1,13	1,95	74.522.350,00	1,95	74.522.350,00	1,95	74.522.350,00	3,37	133.754.360,00	3,37	133.754.360,00	3,37	491.075.769,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
021708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Skala Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil (Dengan Satuan:usaha mikro)	1,13	1,95	215.400.000,00	1,95	215.400.000,00	1,95	215.400.000,00	3,37	386.604.677,00	3,37	386.604.677,00	3,37	1.419.409.354,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
033002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan/ IUTM,dll) (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	20.904.000,00	100	20.904.000,00	100	20.904.000,00	100	37.518.961,00	100	37.518.961,00	100	137.749.922,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
033003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	53.487.800,00	100	53.487.800,00	100	53.487.800,00	100	96.001.085,00	100	96.001.085,00	100	352.465.569,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
033004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Dengan Satuan:persentase (%))	8,78	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	179.482.208,00	7	179.482.208,00	7	658.964.417,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						
033005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya skala produk ekspor pada daerah kabupaten/ kota (Dengan Satuan:persentase (%))	N.A	100	60.745.500,00	100	60.745.500,00	100	60.745.500,00	100	109.027.365,00	100	109.027.365,00	100	400.291.230,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM						

033006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.	5,71	7,6	40.127.000,00	7,60	40.127.000,00	7,6	40.127.000,00	10,12	72.020.826,00	10,12	72.020.826,00	10,12	264.422.652,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
033007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (Dengan Satuan:persentase (%))	16,69	22,21	13.236.000,00	22,21	13.236.000,00	22,21	13.236.000,00	29,57	23.756.265,00	29,57	23.756.265,00	29,57	87.220.530,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
033102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Indikator Turunan Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan: persentase (%))	ada	ada	192.554.150,00	ada	192.554.150,00	ada	192.554.150,00	ada	345.600.441,00	ada	345.600.441,00	ada	1.268.863.332,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
033103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait (Dengan Satuan:persentase (%))	0,89	1,18	50.072.000,00	1,18	50.072.000,00	1,18	50.072.000,00	1,58	89.870.331,00	1,58	89.870.331,00	1,58	329.956.663,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
033104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70	80	65.162.000,00	80	65.162.000,00	80	65.162.000,00	95	116.954.197,00	95	116.954.197,00	95	429.394.393,00	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
SEKRETARIAT DAERAH				55.734.909.653		61.458.138.807		61.458.090.257		62.458.061.684		62.457.945.080		303.567.145.481		
040101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	80	46.198.554.353,00	80	47.969.817.282,00	85	45.908.160.502,00	85	44.661.782.467,00	95	42.287.363.981,00	95	227.025.678.585,00	Sekretariat Daerah
040102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (Dengan Satuan: persentase (%))	N/A	80	6.266.061.300,00	85	8.827.513.425,00	90	10.221.500.440,00	95	11.774.585.505,00	95	13.210.633.330,00	95	50.300.294.000,00	Sekretariat Daerah
040103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian di Daerah (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80	3.270.294.000,00	85	4.660.808.100,00	85	5.328.429.315,00	90	6.021.693.712,00	95	6.959.947.769,00	95	26.241.172.896,00	Sekretariat Daerah
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
SEKRETARIAT DPRD				83.744.148.962		87.195.977.912		90.901.252.970		94.798.015.782		98.847.250.533		455.486.646.157		
040201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	44.222.210.212	100	45.909.255.762	100	47.837.008.250	100	49.869.372.363	100	51.967.988.481	100	239.805.835.067	Sekretariat DPRD
040202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat alat kelengkapan DPRD Provinsi /Kab/Kota (Dengan Satuan: Ada)	Ada	Ada	39.521.938.750	Ada	41.286.722.150	Ada	43.064.244.720	Ada	44.928.643.419	Ada	46.879.262.052	Ada	215.680.811.090	Sekretariat DPRD

		Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana kerja tahunan (RKPD) (Dengan Satuan:Ada)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Sekretariat DPRD
		Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen Anggaran setwan DPRD (Dengan Satuan:Ada)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Sekretariat DPRD
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH			12.668.998.584		12.668.964.879		12.668.954.870		12.668.936.567		12.668.912.916		63.344.767.816		
050101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	80	9.752.196.584,00	85	8.945.221.879,48	85	9.618.711.870,22	90	8.911.191.566,60	90	9.045.667.915,80	90	46.272.989.816,10	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
050102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Dengan Satuan:Ada/Tidak)	Ada	Ada	1.303.922.000,00	Ada	1.795.243.000,00	Ada	1.320.243.000,00	Ada	1.988.245.000,00	Ada	1.788.245.000,00	Ada	8.195.898.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
050103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD, Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Dengan Satuan: Persentase)	90	90	1.612.880.000,00	90	1.928.500.000,00	90	1.730.000.000,00	90	1.769.500.000,00	90	1.835.000.000,00	90	8.875.880.000,00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			16.968.296.980		16.968.296.980		16.968.296.980		16.968.296.980		16.968.296.980		84.880.644.900		
050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	85	13.897.358.880	85	13.897.358.880	85	13.897.358.880	85	13.897.358.880	85	13.897.358.880	85	69.525.954.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
050202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:persentase (%))	9,01	13,00	2.320.938.100	13,10	2.320.938.100	13,15	2.320.938.100	13,20	2.320.938.100	13,25	2.320.938.100	13,25	11.604.690.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Opini Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan Keuangan)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Dengan Satuan:persentase (%))	9,77	8,18		8,26		8,35		8,43		8,51		8,51		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	Program prioritas pembangunan	(outcome)	Kinerja Awal RPJMD	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		RPJMD		Daerah Penanggung Jawab
				K		K		K		K		K		K		
	KECAMATAN PAYARAMAN			2.916.490.000		2.972.975.000		2.995.842.380		3.022.342.380		3.033.542.380		14.941.192.140		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	90	2.878.490.000	95	2.913.975.000	95	2.923.842.380	95	2.928.342.380	100	2.931.542.380	100	14.576.192.140	Kecamatan payaraman
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM (Dengan Satuan: nilai)	NA	80	10.000.000	80	18.000.000	80	22.000.000	85	39.000.000	85	45.000.000	85	134.000.000	Kecamatan payaraman
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Warga yang diajak kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan (Dengan Satuan: orang)	NA	90	27.000.000	90	34.000.000	90	39.000.000	90	41.000.000	90	41.000.000	90	182.000.000	Kecamatan payaraman
		Persentase Desa beradministrasi baik sesuai dengan Permendagri (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	75		75		75		85		85		85		Kecamatan payaraman
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Menurunnya angka kriminalitas dan konflik (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	75	1.000.000	75	2.000.000	75	4.000.000	85	4.000.000	85	4.000.000	85	15.000.000	Kecamatan payaraman
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang). (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80	0	80	5.000.000	80	7.000.000	90	10.000.000	90	12.000.000	90	34.000.000	Kecamatan payaraman
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
	KECAMATAN LUBUK KELIAT			1.556.558.500		1.557.058.000		1.557.058.000		1.557.058.000		1.557.058.000		7.785.290.000		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	11	1.513.058.000	11	1.505.058.000	11	1.505.058.000	11	1.505.058.000	11	1.505.058.000	11	7.533.290.000	Kecamatan Lubuk Keliat
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	77	11.500.000	78	11.500.000	79	11.500.000	80	11.500.000	81	11.500.000	81	57.500.000	Kecamatan Lubuk Keliat
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan Urusan yang dilaksanakan oleh Camat (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	60	25.000.000	75	33.000.000	80	33.000.000	85	33.000.000	85	33.000.000	85	157.000.000	Kecamatan Lubuk Keliat
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Menurunnya Kriminalitas dan konflik SARA di Masyarakat (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	70	500	65	1.500.000	60	1.500.000	55	1.500.000	50	1.500.000	50	6.500.000	Kecamatan Lubuk Keliat
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang). (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	75	6.000.000	80	5.000.000	85	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	26.000.000	Kecamatan Lubuk Keliat
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki administrasi Tata pemerintahan yang baik (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80	1.000.000	80	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	90	1.000.000	90	5.000.000	Kecamatan Lubuk Keliat
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
	KECAMATAN MUARA KUANG			3.003.547.000		3.166.924.350		3.179.924.350		3.198.924.350		3.647.058.400		16.176.378.450		

070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	80	2.947.547.000	85	3.094.924.350	85	3.094.924.350	85	3.094.924.350	100	3.537.058.400	0	15.769.378.450	Kecamatan Muara Kuang	
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai SKM. (Dengan Satuan: nilai)	NA	80	10.000.000	80	18.000.000	80	22.000.000	85	39.000.000	85	45.000.000	85	134.000.000	Kecamatan Muara Kuang	
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai dengan Permendagri. (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	75	27.000.000	75	34.000.000	75	39.000.000	85	41.000.000	85	41.000.000	85	182.000.000	Kecamatan Muara Kuang	
		Jumlah Warga yang diajak kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan. (Dengan Satuan: orang)	NA	90		90		90		90		90		90		Kecamatan Muara Kuang	
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentanse Menurunnya angka kriminalitas dan konflik. (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	75	1.000.000	75	2.000.000	75	4.000.000	85	4.000.000	85	4.000.000	85	15.000.000	Kecamatan Muara Kuang	
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang) (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80	18.000.000	80	18.000.000	80	20.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000	90	76.000.000	Kecamatan Muara Kuang	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				K		K		K		K		K		K			
	KECAMATAN RAMBANG KUANG			3.752.837.500		1.753.446.495		1.753.445.110		1.753.442.577		1.753.439.303		8.767.224.645			
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	11	1.703.018.000	11	1.682.945.995	11	1.662.445.110	11	1.648.442.577	11	1.635.439.303	11	8.331.905.645	Kecamatan Rambang Kuang	
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan. (Dengan Satuan:Persentase (%))	NA	77	7.819.000	78	11.000.000	79	14.500.000	80	18.000.000	81	19.000.000	81	70.319.000	Kecamatan Rambang Kuang	
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Permendagri dan Permendes (Dengan Satuan: Persentase (%))	NA	65	35.000.000	70	45.000.000	75	55.000.000	80	60.000.000	85	70.000.000	85	265.000.000	Kecamatan Rambang Kuang	
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Menurunnya Kriminalitas dan konflik SARA di Masyarakat. (Dengan Satuan:Persentase (%))	NA	70	1.000.000	65	4.500.000	60	4.500.000	55	5.000.000	50	6.000.000	50	21.000.000	Kecamatan Rambang Kuang	
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang) (Dengan Satuan:Persentase (%))	NA	75	6.000.000	80	10.000.000	85	15.000.000	85	20.000.000	90	20.000.000	90	71.000.000	Kecamatan Rambang Kuang	
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki administrasi Tata pemerintahan yang baik. (Dengan Satuan:Persentase (%))	NA	80	500	80	500	85	2.000.000	85	2.000.000	90	3.000.000	90	8.000.000	Kecamatan Rambang Kuang	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				K		K		K		K		K		K			
	KECAMATAN INDRALAYA			3.860.531.457		3.860.531.457		3.860.531.457		3.860.531.457		3.860.531.457		19.302.657.285			
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	90	3.793.613.957	95	3.793.613.957	95	3.793.613.957	95	3.793.613.957	100	3.793.613.957	100	18.968.069.785	Kecamatan Indralaya	
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM (Dengan Satuan: persentase)	NA	80	26.317.500	80	26.317.500	80	26.317.500	85	26.317.500	85	26.317.500	85	131.587.500	Kecamatan Indralaya	

070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai dengan Permendagri (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	75		75		75		85		85		85		88.000.000	Kecamatan Indralaya
		Jumlah Warga yang diajak kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan (Dengan Satuan: orang)	NA	90		90		90		90		90		90			Kecamatan Indralaya
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentanse Menurunnya angka kriminalitas dan konflik (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	75		75		75		85		85		85		17.500.000	Kecamatan Indralaya
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang) (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80		80		80		90		90		90		97.500.000	Kecamatan Indralaya
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				K		K		K		K		K		K			
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN				1.485.714.000		1.485.714.000		1.485.714.000		1.485.714.000		1.485.714.000		7.428.570.000			
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	87	1.436.364.000	89	1.436.364.000	95	1.436.364.000	95	1.436.364.000	100	1.436.364.000	100	7.181.820.000		Kecamatan Indralaya Selatan
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM. (Dengan Satuan:nilai)	NA	79	12.100.000	81	12.100.000	83	12.100.000	89	12.100.000	90	12.100.000	90	60.500.000		Kecamatan Indralaya Selatan
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Beradministrasi Baik Sesuai Permendagri dan Permendes (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	90	30.000.000	92	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	150.000.000		Kecamatan Indralaya Selatan
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Menurunnya Kriminalitas dan konflik SARA di Masyarakat (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	85	500.000	88	500.000	90	500.000	90	500.000	95	500.000	95	2.500.000		Kecamatan Indralaya Selatan
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di K e c a m a t a n . (D e n g a n Satuan:persentase (%))	NA	88	5.750.000	88	5.750.000	88	5.750.000	95	5.750.000	95	5.750.000	95	28.750.000		Kecamatan Indralaya Selatan
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki administrasi Tata Pemerintahan yang baik (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	85	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	95	1.000.000	100	1.000.000	100	5.000.000		Kecamatan Indralaya Selatan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				K		K		K		K		K		K			
KECAMATAN INDRALAYA UTARA				2.882.766.000		2.882.766.000		2.882.766.000		2.882.766.000		2.882.766.000		14.413.830.000			
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	0	100	2.410.164.098,00	100	2.410.164.098,00	100	2.410.164.098,00	100	2.410.164.098,00	100	2.410.164.098,00	100	12.050.820.490,00		Kecamatan Indralaya Utara
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM . (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	80	70.600.200,00	81	70.600.200,00	82	70.600.200,00	82	70.600.200,00	83	70.600.200,00	84	353.001.000,00		Kecamatan Indralaya Utara
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan Beradministrasi Baik Sesuai Permendagri dan Permendes (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	60	402.001.702,00	60	402.001.702,00	73	402.001.702,00	80	402.001.702,00	100	402.001.702,00	100	2.010.008.510,00		Kecamatan Indralaya Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	KECAMATAN TANJUNG RAJA			4.485.969.000		4.495.969.000		4.495.969.000		4.495.969.000		4.495.969.000		22.469.845.000		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	0	100	4.029.253.000,00	100	4.029.253.000,00	100	4.029.253.000,00	100	4.029.253.000,00	100	4.029.253.000,00	100	20.146.265.000,00	Kecamatan Tanjung Raja
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM. (Dengan Satuan: nilai)	NA	80	16.116.000,00	80	16.116.000,00	80	16.116.000,00	85	16.116.000,00	85	16.116.000,00	85	80.580.000,00	Kecamatan Tanjung Raja
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Warga yang diajak kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan, (Dengan Satuan: orang)	NA	10	440.600.000,00	10	440.600.000,00	10	440.600.000,00	10	440.600.000,00	10	440.600.000,00	10	2.203.000.000,00	Kecamatan Tanjung Raja
		Persentase Desa beradministrasi baik sesuai dengan Permendagri (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	75		75		75		85		85		85		Kecamatan Tanjung Raja
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang) (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80	0,00	80	10.000.000,00	80	10.000.000,00	90	10.000.000,00	90	10.000.000,00	90	40.000.000,00	Kecamatan Tanjung Raja
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	KECAMATAN RANTAU ALAI			1.376.804.637		1.376.800.975		1.376.799.888		1.376.797.899		1.376.795.328		6.883.998.727		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	76	78	1.114.757.317,00	80	1.134.317.182,00	80	1.137.874.832,00	85	1.137.018.052,00	90	1.141.762.388,00	90	5.665.729.771,00	Kecamatan Rantau Alai
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM, (Dengan Satuan:persentase (%))	80	80	118.939.296,00	80	111.608.095,00	85	111.459.604,00	85	113.350.541,00	85	112.517.291,00	90	567.874.827,00	Kecamatan Rantau Alai
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat Kecamatan dan desa (Dengan Satuan:persentase(%))	80	80	141.529.087,00	85	129.421.829,00	85	126.051.266,00	85	125.023.310,00	90	121.151.156,00	90	643.176.648,00	Kecamatan Rantau Alai
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pelayanan umum (Dengan Satuan:persen)	100	100	1.578.937,00	100	1.453.869,00	100	1.414.186,00	100	1.405.996,00	100	1.364.493,00	100	7.217.481,00	Kecamatan Rantau Alai
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K		K		
	KECAMATAN KANDIS			1.571.135.291		1.571.131.110		1.571.129.870		1.571.127.600		1.571.124.666		7.855.648.537		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	76	78	1.482.923.291	80	1.482.569.110	80	1.467.067.870	85	1.467.065.600	90	1.461.574.666	90	7.361.200.325	Kecamatan Kandis
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ikm, (Dengan Satuan:nilai)	NA	70	16.712.000	75	17.062.000	80	19.062.000	85	19.062.000	90	19.550.000	100	91.448.100	Kecamatan Kandis
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat Kecamatan dan desa (Dengan Satuan:jumlah)	NA	4	50.750.000	6	50.750.000	8	60.000.000	10	60.000.000	12	65.000.000	12	286.500.012	Kecamatan Kandis
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pelayanan umum di kecamatan (Dengan Satuan:persentase)	80	80	20.750.000	85	20.750.000	85	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	116.500.100	Kecamatan Kandis

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K		
				K		K		K		K		K				
	KECAMATAN SUNGAI PINANG			2.697.893.648		2.746.357.214		2.697.884.340		2.697.880.443		2.697.875.406		13.489.420.309		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	0	2.231.029.270	7	2.261.984.836	7	2.199.511.962	7	2.182.508.065	7	2.121.503.028	7	10.948.066.419	Kecamatan Sungai pinang
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM . (Dengan Satuan: nilai)	NA	80	12.492.000	80	18.000.000	80	25.000.000	85	40.000.000	85	100.000.000	85	195.492.000	Kecamatan Sungai pinang
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Warga yang diajak kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan (Dengan Satuan: orang)	NA	90	8.000.000	90	10.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	90	54.000.000	Kecamatan Sungai pinang
		Persentase Desa beradministrasi baik sesuai dengan Permendagri (Dengan Satuan: persentase)	NA	75		75		75		85		85		85		Kecamatan Sungai pinang
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Menurunnya angka kriminalitas dan konflik (Dengan Satuan: persentase (%))	NA	75	0	75	10.000.000	75	15.000.000	85	17.000.000	85	18.000.000	85	60.000.000	Kecamatan Sungai pinang
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang) (Dengan Satuan:persentase (%))	NA	80	446.372.378	80	446.372.378	80	446.372.378	90	446.372.378	90	446.372.378	90	2.231.861.890	Kecamatan Sungai pinang
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K		
				K		K		K		K		K				
	KECAMATAN RANTAU PANJANG			1.443.029.948		1.443.026.111		1.443.024.971		1.443.022.886		1.443.020.192		7.215.124.108		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	76	78	1.096.214.288	80	1.094.957.492	80	1.093.810.446	85	1.092.648.600	90	1.091.516.504	90	5.469.147.330	Kecamatan Rantau Panjang
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM (Dengan Satuan:jumlah)	8	8	154.695.052	10	155.927.681	10	157.033.458	15	158.178.131	20	159.280.312	20	785.114.634	Kecamatan Rantau Panjang
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat Kecamatan dan desa (Dengan Satuan:jumlah)	NA	4	190.270.661	6	190.282.856	8	190.298.646	10	190.327.609	12	190.339.698	12	951.519.470	Kecamatan Rantau Panjang
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pelayanan umum di k e c a m a t a n (D e n g a n Satuan:persentase (%))	80	80	1.849.947	85	1.858.082	85	1.882.421	90	1.868.546	100	1.883.678	100	9.342.674	Kecamatan Rantau Panjang
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		K		
				K		K		K		K		K				
	KECAMATAN PEMULUTAN			2.049.665.444		2.049.659.993		2.049.658.374		2.049.655.413		2.049.651.586		10.248.290.810		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	76	78	1.511.220.679	80	1.511.920.182	80	1.511.918.986	85	1.511.916.804	90	1.511.913.979	90	7.559.594.154	Kecamatan Pemulutan
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM (Dengan Satuan:nilai)	NA	78	36.461.609	80	36.461.512	80	36.461.483	80	36.461.430	81	36.461.362	0	182.307.396	Kecamatan Pemulutan
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	461.983.156	100	461.981.927	100	461.981.563	100	461.980.895	100	461.980.033	100	2.309.907.574	Kecamatan Pemulutan

070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Dengan Satuan:persentase (%)	80	80	40.000.000	85	39.296.372	85	39.296.342	90	39.296.284	100	39.296.212	100	196.481.686	Kecamatan Pemulutan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
KECAMATAN PEMULUTAN BARAT				1.370.496.226		1.370.492.582		1.370.491.499		1.370.489.519		1.370.486.960		6.852.456.786		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	90	1.309.496.226	95	1.309.492.582	95	1.309.491.499	95	1.309.489.519	100	1.309.486.960	100	6.547.456.786	Kecamatan Pemulutan Barat
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan (Dengan Satuan:persentase (%)	NA	65	20.000.000	67	20.000.000	70	20.000.000	75	20.000.000	81	20.000.000	81	100.000.000	Kecamatan Pemulutan Barat
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Permendagri dan Permedes (Dengan Satuan: persentase(%))	NA	65	27.000.000	67	27.000.000	70	27.000.000	75	27.000.000	81	27.000.000	81	135.000.000	Kecamatan Pemulutan Barat
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Menurunnya angka kriminalitas dan konflik di kec. Pemulutan Barat (Dengan Satuan: Persen)	N/A	70	2.000.000	65	2.000.000	60	2.000.000	55	2.000.000	50	2.000.000	50	10.000.000	Kecamatan Pemulutan Barat
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang) (Dengan Satuan:persentase(%))	NA	65	10.000.000	67	10.000.000	70	10.000.000	75	10.000.000	81	10.000.000	81	50.000.000	Kecamatan Pemulutan Barat
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki administrasi Tata pemerintahan yang baik (Dengan Satuan:persentase(%))	NA	65	2.000.000	67	2.000.000	70	2.000.000	75	2.000.000	81	2.000.000	81	10.000.000	Kecamatan Pemulutan Barat
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN				1.461.571.155		1.461.567.269		1.461.566.114		1.461.564.003		1.461.561.274		7.307.829.815		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	NA	0	1.400.937.155	7	1.393.567.269	7	1.386.566.114	7	1.369.564.003	7	1.308.561.274	7	6.859.195.815	Kecamatan Pemulutan Selatan
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM, (Dengan Satuan: nilai)	NA	80	15.634.000	80	18.000.000	80	25.000.000	85	40.000.000	85	100.000.000	85	198.634.000	Kecamatan Pemulutan Selatan
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Beradministrasi baik sesuai dengan Permendagri. (Dengan Satuan:persentase (%)	NA	75	30.000.000	75	35.000.000	75	35.000.000	75	35.000.000	75	35.000.000	75	170.000.000	Kecamatan Pemulutan Selatan
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di Kecamatan (jumlah yang hadir dan diundang) (Dengan Satuan:persentase (%)	NA	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	90	17.000.000	90	18.000.000	90	80.000.000	Kecamatan Pemulutan Selatan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				K		K		K		K		K				K
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.394.031.000		4.394.031.000		9.152.799.529		4.394.031.000		4.394.031.000		26.728.923.529		

080101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	100	100	3.814.031.000	100	3.814.031.000	100	6.772.799.529	100	3.814.031.000	100	3.814.031.000	100	22.028.923.529	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
080102	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Konflik Bernuansa Kesukuan (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	295.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	735.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
080103	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Konflik Bernuansa Politik (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	130.000.000	100	130.000.000	100	810.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	1.330.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
080104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Aktif (Dengan Satuan:persentase (%))	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	240.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	480.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
080105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Konflik Bernuansa Sosial dan Budaya (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	290.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	610.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
080106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (Dengan Satuan: persentase (%))	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	745.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.545.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL:					876.642.780.000		885.947.680.000		903.080.880.000		905.310.700.000		938.109.960.000		4.406.955.798.983	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII.1
Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Provinsi Sumatera Selatan					RPJMD Ogan Ilir Tahun 2021-2026						
	Indikator	Target					Indikator	Target					Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023		2022	2023	2024	2025	2026
1	IPM						IPM	70,07	71,08	71,75	72,42	73,09	IPM	68,26	68,73	69,19	69,65	70,11
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38	Tingkat Kemiskinan (%)	12,52	10,00-11,65	9,9-10,78	9,6-9,91	9,2-9,5	Tingkat Kemiskinan (%)	12,24	11,68	11,12	10,56	10,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,12	4,01	3,87	3,75	3,62	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,11	3,71	3,30	2,90	2,50
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,355	0,354	0,353	0,352	0,350	Indeks Gini	0,280	0,270	0,260	0,255	0,250
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,6-5,9	5,5-6,0	5,5-6,1	5,5-6,1	5,5-6,1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	1,76	2,57	3,38	4,19	5,00
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	50,49	54,19 9	57,07 7	59,08 7	62,06 7	PDRB per Kapita (Juta Rp)	30,18	31,64	33,09	34,55	36,00

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026

No.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	35,66	40,22	48,00	53,60	57,50	60,50	60,50
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1.591	2.091	2.591	3.091	3.591	4.091	4.091
3	Nilai SAKIP	Nilai	53,19	58,03	60,35	62,90	64,12	65,00	65,00
4	IPM	Indeks	67,06	68,26	68,73	69,19	69,65	70,11	70,11
5	Indeks Pendidikan	Indeks	60,37	61,54	62,06	62,58	63,11	63,63	63,63
6	Indeks Kesehatan	Indeks	69,97	70,56	70,89	71,22	71,55	71,88	71,88
7	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,95 (2019)	99,19	99,26	99,34	99,42	99,50	99,50
8	LPE	%	0,14	1,76	2,57	3,38	4,19	5,00	5,00
9	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	1,34	1,73	1,92	2,11	2,31	2,50	2,50
10	LPE Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan	%	-1,84	1,6	3,2	4,8	6,4	8,0	8,0
11	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	%	na	10	12,5	15	17,5	20	20
12	Angka Kemiskinan	%	13,36	12,24	11,68	11,12	10,56	10,00	10,00
13	Indeks Gini	Indeks	0,300	0,280	0,270	0,260	0,255	0,250	0,250
14	PDRB per Kapita	Juta Rp	27,23	30,18	31,64	33,09	34,55	36,00	36,00
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,91	4,11	3,71	3,30	2,90	2,50	2,50
16	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	na	66,25	68,13	70,00	71,88	73,50	73,50
17	Persentase panjang jalan kondisi Mantap	%	60,75	62,5	65	67,5	70	72,00	72,00
18	Rasio rumah layak huni	%	67,92	70	71,25	72,5	73,75	75	75
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	51,92	58,45	58,75	59,05	59,35	59,64	59,64
20	Persentase penurunan konflik sosial (SARA)	%	na	25	25	25	25	25	25
21	Angka kriminalitas	per 100.000 penduduk	3,02 (2019)	2,58	2,44	2,29	2,15	2,00	2,00
22	Indeks Kerukunan Antar	-	na	75	75,58	76,15	76,73	77,30	77,30

	Umat Beragama								
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	na	55	56,25	57,5	58,75	60,00	60,00

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel VIII.3 sebagai berikut:

Tabel VIII.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017)
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Pembangunan					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	0,14	1,76	2,57	3,38	4,19	5	5
01.02	Tingkat inflasi	%	2,06	2	2	2	2	2	2
1.3a	PDRB ADHB	Milyar Rp	11.344,17	12.982,08	13.689,46	14.399,80	15.121,80	15.846,71	15.846,71
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	27,23	30,18	31,64	33,09	34,55	36	36
01.04	Indeks gini	-	0,3	0,28	0,27	0,26	0,255	0,25	0,25
01.05	Persentase Penduduk miskin	%	13,36	12,24	11,68	11,12	10,56	10	10
01.07	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,91	4,11	3,71	3,3	2,9	2,5	2,5
01.09	Jumlah Penduduk	Jiwa	416.549	430.155	432.663	435.171	437.679	440.186	440.186
01.10	Pengeluaran perkapita	Ribu Rp	10.725,00	11.400,80	11.610,60	11.820,40	12.030,20	12.240,00	12.240,00
01.11	IPM	-	67,06	68,26	68,73	69,19	69,65	70,11	70,11
	Indeks Pendidikan	-	60,37	61,54	62,06	62,58	63,11	63,63	63,63
	Indeks Kesehatan	-	69,97	70,56	70,89	71,22	71,55	71,88	71,88
II	Fokus Kesejahteraan Sosial								
02.01	Pendidikan								
02.01.02	Angka melek huruf	%	99,265	99,583	99,742	99,901	100	100	100
02.01.03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,86	8,196	8,344	8,492	8,64	8,788	8,788
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	-	116,5	110,53	109,45	108,38	107,30	106,22	106,22
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	-	76,69	79,01	79,80	80,60	81,41	82,22	82,22
2.1.4c	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	-	73,45	75,68	76,43	77,20	77,97	78,75	78,75
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	-	98,23	99,37	99,67	99,98	100,00	100,00	100,00
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	-	75,36	77,64	78,42	79,20	80,00	80,80	80,80
2.1.5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	-	60,71	62,55	63,18	63,81	64,44	65,09	65,09
02.01.	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	12,3	12,32	12,33	12,34	12,35	12,36	12,36

06									
02.02	Kesehatan								
02.02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	997,1	997,41	997,54	997,67	997,8	997,93	997,93
02.02.02	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,48	65,864	66,079	66,294	66,509	66,724	66,724
02.02.03	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	/1000 KH		2,59	2,46	2,33	2,2	2,07	2,07
02.02.04	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan	%	31,27	25	22,5	20	17,5	15	15
02.02.05	Jumlah Balita Gizi Buruk	%	1	0	0	0	0	0	0
02.02.06	Angka kematian ibu melahirkan	/1000 KH	0,006	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003
02.02.08	Jumlah Alat Kontrasepsi yang Digunakan oleh Penduduk								
	-WOW/MOP/IUD/Spiral	Org	5.400	4.583	4.277	3.971	3.665	3.359	3.359
	-Susuk KB	Org	28.111	34.069	36.110	38.152	40.193	42.234	42.234
	-Suntik	Org	74.041	90.728	95.879	101.030	106.181	111.332	111.332
	-Pil	Org	34.865	34.267	34.417	34.567	34.717	34.867	34.867
	-Kondom	Org	5.981	4.955	4.537	4.120	3.703	3.286	3.286
02.02.09	Persentase Balita Yang Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi								
	-BCG	%	85,76	88,36	89,24	90,13	91,04	91,95	91,95
	-Campak/Morbili	%	67,17	69,21	69,90	70,60	71,30	72,02	72,02
02.03	Pertanahan								
02.04	Ketenagakerjaan								
02.04.01	Rasio penduduk yang bekerja	%	97,09	95,89	96,29	96,7	97,1	97,5	97,5
III	Fokus Budaya dan Olahraga								
03.01	Kebudayaan								
03.01.01	Jumlah grup kesenian	grup	33	33	33	34	34	34	34
03.01.	Jumlah gedung kesenian	unit	17	17	17	18	18	18	18

02									
03.02	Pemuda dan Olahraga								
03.02.01	Jumlah klub olahraga	klub	87	87	87	88	88	88	88
03.02.02	Jumlah gedung olahraga	unit	46	46	46	47	47	47	47
	Aspek Pelayanan Umum								
A	Urusan Pemerintahan Wajib								
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
01.01	Urusan Pendidikan								
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah PAUD		62,03	63,91	64,55	65,19	65,85	66,50	66,50
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (7-12)	%	99,69	100	100	100	100	100	100
1.1.1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS (13-15)	%	90,25	92,98466 525	93,91451 19	94,85365 702	95,80219 359	96,76021 553	96,76021 553
1.1.1.d	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK (16-18)	%	61,79	63,66229 879	64,29892 178	64,94191 1	65,59133 011	66,24724 341	66,24724 341
	Rasio ketersediaan sekolah PAUD	per 10.000	35,79	37,24	37,98	38,74	39,52	40,31	40,31
1.1.2a	Rasio ketersediaan sekolah SD	per 10.000	59,88	61,09	61,70	62,31	62,94	63,57	63,57
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah SLTP	per 10.000	51,68	52,72	53,25	53,78	54,32	54,86	54,86
1.1.2c	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	per 10.000	57,5	59,83	60,43	61,04	61,65	62,26	62,26
	Rasio Murid terhadap Guru PAUD	Per 1 guru	10,74	10	10	10	10	10	10
1.1.3a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	15,87	15	15	15	15	15	15
1.1.3b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP	Per 1 guru	14,15	15	15	15	15	15	15
1.1.3c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA	Per 1 guru	15,15	15	15	15	15	15	15
	Rasio Murid terhadap Guru SMK	Per 1 guru	14,97	15	15	15	15	15	15
1.1.4a	Persentase Sekolah SD/MI dalam kondisi bangunan baik	%	89	90	90	91	91	92	92
1.1.4b	Persentase Sekolah SLTP/MTs dalam kondisi bangunan baik	%	92	92	92	93	93	93	93
1.1.5a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0,02	0	0	0	0	0	0
1.1.5b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	0,06	0	0	0	0	0	0
1.1.5c	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	-	0	0	0	0	0	0
1.1.6a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6c	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%		100	100	100	100	100	100
1.1.7	Persentase standar rombongan belajar	%	68,75	72,96	74,42	75,91	77,42	78,97	78,97

	SD/MI/SDLB								
1.1.8	Persentase standar rombongan belajar SMP/MTs/SMPLB	%	75	77,27	78,05	78,83	79,61	80,41	80,41
01.02	Urusan Kesehatan								
01.02.01	Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir	%	22,51	22,06	21,84	21,62	21,41	21,19	21,19
01.02.02	Jumlah Posyandu	Unit	722	722	722	722	722	722	722
	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 Balita	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
01.02.03	Jumlah Puskesmas	Unit	25	25	25	25	25	25	25
	Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan	%	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25
	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
01.02.04	Jumlah klinik	Unit	7	8	8	9	9	10	10
	Rasio klinik per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,016	0,019	0,019	0,022	0,022	0,025	0,025
01.02.05	Jumlah puskesmas pembantu	Unit	17	18	18	19	19	19	19
	Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Desa	%	7,05	7,47	7,47	7,88	7,88	7,88	7,88
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
01.02.06	Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	3	3	3	3	3
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
01.02.07	Jumlah Rumah Sakit bersalin	Unit	4	4	4	4	4	4	4
01.02.08	Jumlah Dokter	orang	60	65	65	68	68	70	70
	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	14,49	15,11	15,02	15,63	15,54	15,90	15,90
01.02.09	Jumlah Bidan	orang	833	850	850	860	860	860	860
	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	20,12	19,76	19,65	19,76	19,65	19,54	19,54
01.02.10	Jumlah perawat	orang	580	590	590	595	595	600	600
	Rasio tenaga medis perawat per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	14,01	13,72	13,64	13,67	13,59	13,63	13,63

01.02.11	Jumlah tenaga medis	orang	1630	1640	1640	1650	1650	1650	1650
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	39,37	38,13	37,90	37,92	37,70	37,48	37,48
01.02.12	Tenaga Kefarmasian	na	70	72	72	74	74	74	74
01.02.13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	85,28	87,86	88,74	89,63	90,53	91,43	91,43
01.02.14	Cakupan Kunjungan Bayi Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	97,4	100,35	101,35	102,37	103,39	104,43	104,43
01.02.15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	78,05%	80,41%	81,22%	82,03%	82,85%	83,68%	83,68%
01.02.16	Jumlah balita gizi buruk	Jiwa	11	10	10	9	9	9	9
01.02.17	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Jiwa	11	10	10	9	9	9	9
01.02.18	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
01.02.19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	77,18	100	100	100	100	100	100
01.02.20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC TBA (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
01.02.21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
01.02.22	Jumlah penderita DBD	Kasus	56	40	38	36	34	32	32
01.02.23	Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin	%	8,06	9,33	9,80	10,29	10,80	11,34	11,34
	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD								
01.02.25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	79,33	81,73	82,55	83,38	84,21	85,05	85,05
01.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
01.03.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49,31	57,09	59,94	62,94	66,09	69,39	69,39
01.03.	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi	%	33,62%	35	37,5	40	42,5	45	45

02	Baik								
01.03.03	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,0033	0,0035	0,0035	0,0035	0,0036	0,0036	0,0036
01.03.04	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	%	55,67	64,44	67,67	71,05	74,60	78,33	78,33
01.03.05	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	na	20	22,5	25	27,5	30	30
01.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
01.04.01	Rumah tangga pengguna air bersih	%	49,43	54,01	55,63	57,30	59,02	60,79	60,79
01.04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	99,79	99,88	99,9	99,92	99,94	99,96	99,96
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi layak	%	82,26	84,75	85,60	86,46	87,32	88,19	88,19
01.04.04	Rasio jumlah rumah tidak layak huni	%	48,25	70	71,25	72,5	73,75	75	75
01.04.05	Persentase Rumah tangga menurut luas lantai								
	<19	%	0,72	0,66	0,64	0,62	0,6	0,58	0,58
	20-49	%	37,92	37,83	37,8	37,77	37,74	37,71	37,71
	50-99	%	43,72	43,81	43,84	43,87	43,9	43,93	43,93
	100-149	%	10,89	10,92	10,93	10,94	10,95	10,96	10,96
>150	%	6,74	6,77	6,78	6,79	6,8	6,81	6,81	
01.04.06	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum								
	Leding'	%	1,5	5	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8
	Pompa	%	19,38	21	21,1	21,2	21,3	21,4	21,4
	Air dalam kemasan	%	19,33	21	21,05	21,1	21,15	21,2	21,2
	Sumur	%	36,58	37,1	36,95	36,8	36,65	36,5	36,5
	Sumur tak terlindung	%	12,22	12	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
	Mata air terlindung	%	0,3	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34
	Mata air tak terlindung	%	0,69	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56
	Air permukaan	%	4,29	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6
Lainnya	%	0	0	0	0	0	0	0	
01.04.07	Persentase Rumah Tangga Fasilitas Jamban								
	-Sendiri	%	75,01	77,41	78,21	79,01	79,81	80,61	80,61

	-Bersama	%	10,55	10,25	10,15	10,05	9,95	9,85	9,85
	-MCK/Komunal/Umum	%	4,21	3,91	3,81	3,71	3,61	3,51	3,51
	- Tidak menggunakan	%	0,2	2	3	4	5	6	6
	Tidak memiliki	%	10,02	9,42	9,22	9,02	8,82	8,62	8,62
01.04.08	Persentase Rumah tangga menurut sumber penerangan								
	Listrik PLN	%	95,09	95,69	95,89	96,09	96,29	96,49	96,49
	Listrik Non PLN	%	4,54	3,49	3,14	2,79	2,44	2,09	2,09
	bukan Listrik	%	0,37	0,22	0,17	0,12	0,07	0,02	0,02
01.05	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
01.05.01	Angka Kriminalitas	Per 100.000 penduduk	3,02	2,58	2,44	2,29	2,15	2,00	2,00
01.05.02	Jumlah Tindak pidana	Kasus	391	375	360	345	330	315	315
01.05.03	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	5,74	6,09	6,21	6,34	6,46	6,59	6,59
01.05.04	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	34,92	35,98	36,34	36,70	37,07	37,44	37,44
01.05.05	Jumlah Pos Kamling	(Unit)	210	215	217	219	221	223	223
01.05.06	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	%	0,87	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8
01.05.07	Jumlah organisasi kesbang, Politik danperlindungan masyarakat yang aktif	-	150	155	157	159	161	163	163
01.05.08	Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100
01.05.09	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	13,51	100	100	100	100	100	100
01.05.10	Tingkat Waktu Tanggap Bencana	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
01.05.11	Luas WMK	km2	1.120,48	1.120,48	1.120,48	1.120,48	1.120,48	1.120,48	1.120,48
01.05.12	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%	42,03	45	50	55	60	65	65
01.06	Urusan Sosial								

01.06.01	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	165	170	170	172	172	175	175
01.06.02	Jumlah penduduk miskin (ribu)	jiwa	58	57,83	58,05	58,27	58,49	58,71	58,71
01.06.03a	Jumlah PMKS yang mendapat Bansos	Org	85.839	90.000	91.500	93.000	94.500	96.000	96.000
01.06.03b	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	42,37	50,63	54,63	58,64	62,64	66,65	66,65
01.06.04	Garis kemiskinan	Rp.	469.746	515.547	540.770	565.994	591.217	616.440,60	616.440,60
01.06.05	Jumlah PMKS	%		185.000	170.000	155.000	140.000	125.000	125.000
01.06.06	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	42,37	50,63	54,63	58,64	62,64	66,65	66,65
01.06.07	indeks kedalaman kemiskinan	%	2,15	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6
01.06.08	Indeks keparahan kemiskinan	%	0,53	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46
01.06.09	Jumlah anak terlantar yang dibina	Orang	na	125	130	135	140	145	145
01.06.10	Persentase jumlah anak terlantar yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
02.01	Urusan Tenaga Kerja								
	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu								
02.01.01	Angkatan Kerja	Jiwa	222.406	230000	234000	238000	242000	246000	246000
02.01.02	Berkerja	Jiwa	218.755	220.547,00	225.318,60	230.146,00	234.982,00	239.850,00	239.850,00
02.01.03	Pengangguran Terbuka	Jiwa	7.315	9.453,00	8.681,40	7.854,00	7.018,00	6.150,00	6.150,00
02.01.04	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	83.909	94.366	95.162	95.957	96.753	97.548	97.548
02.01.	Jumlah	Jiwa	314.775	324.366	329.162	333.957	338.753	343.548	343.548

05									
02.01.06	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,02	70,91	71,09	71,27	71,44	71,61	71,61
02.01.07	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Orang	11 KASUS	10 kasus	10 kasus	10 kasus	9 kasus	9 kasus	9 kasus
02.01.08	Tingkat kesempatan kerja	%	96.76	95,89	96,29	96,7	97,1	97,5	97,5
02.01.09	Tingkat UMR	Rp.	2.804.450	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
02.01.10	Jumlah Angkatan Kerja	orang	222.406	230000	234000	238000	242000	246000	246000
02.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
02.02.01	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta	%	5	5	5	5	5	5	5
02.02.02	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	9	8	8	7	7	7	7
02.02.03	Jumlah kasus Penyelesaian pengaduan perlindungan anak	kasus	13	12	12	12	11	11	11
02.02.04	Persentase jumlah kasus Penyelesaian pengaduan perlindungan anak	%	100	100	100	100	100	100	100
02.02.05	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,65	99,19	99,26	99,34	99,42	99,5	99,5
02.02.06	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	28,8	29,57	29,82	30,07	30,32	30,57	30,57
02.03	Urusan Pangan								
02.03.01	Ketersediaan energi	(Kkal/kap/h r)	81.90	90	90,5	91	91,5	92	92
02.03.02	Angka Rawan Pangan	%	1.325,00	1250	1200	1150	1100	1050	1050
02.03.03	Skor Pola Pangan Harapan	%	81.90	90	90,5	91	91,5	92	92
02.04	Urusan Pertanahan								
02.05	Urusan Lingkungan Hidup								
02.05.01	Jumlah timbunan sampah	Ton	310	280	275	270	265	260	260

02.05.02	Jumlah Sampah Terangkut	Ton	119	130	140	150	160	170	170
02.05.03	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	16,70	19,33	20,30	21,31	22,38	23,50	23,50
02.05.04	Indeks Kualitas Lingkungan	-	61,50 (Kurang)	65,29	66,02	66,74	67,47	68,19	68,19
02.05.05	Indeks tutupan lahan	-	38,13 (Waspada)	29,04	31,99	34,94	37,89	40,84	40,84
02.05.06	Indek Kualitas Udara	-	85,42 (Sangat Baik)	83,17	83,27	83,37	83,47	83,57	83,57
02.05.07	Indek Kualitas Air	-	68,75 (Cukup)	67,15	67,25	67,35	67,45	67,55	67,55
02.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
02.06.01	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	97	97,5	97,75	98	98,25	98,5	98,5
02.06.02	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	orang	152.918	153500	154250	155000	155750	156500	156500
02.06.03	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	42%	50	52,5	55	57,5	60	60
02.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
02.07.01	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	-	16	16	16	16	16	16	16
02.07.02	Jumlah LPMK	Unit	227	227	227	227	228	228	228
02.07.03	PKK aktif	Unit	258	258	258	260	260	265	265
02.07.04	Jumlah BUMDes	Unit	226	226	226	228	228	230	230
02.07.05	Jumlah Polindes	Unit	292	300	305	310	315	320	320
02.07.06	Jumlah desa tertinggal	Desa	86	70	65	60	55	50	50
02.07.07	Jumlah Desa Berkembang	Desa	134	150	154	158	162	165	165

02.07.08	Jumlah Desa Maju	Desa	7	7	8	9	10	12	12
02.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
02.08.01	Persentase KB aktif	%	72	75	76	77	78	80	80
02.08.02	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
02.08.03	Jumlah PUS	pasang	182.378	187.904	189.783	191.681	193.598	195.534	195.534
02.08.04	Jumlah Peserta KB Aktif	orang	148.398	152.895	154.424	155.968	157.527	159.103	159.103
02.08.05	Jumlah klinik Keluarga Berencana (KKB)	orang	332	332	332	332	332	332	332
02.08.06	Persentase unmeet need	%	29,67	27,5	25	22,5	20	17,5	17,5
02.09	Urusan Perhubungan								
02.09.01	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1	1	1
02.09.02	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	138	110	100	90	80	70	70
02.10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
02.10.01	Web site milik pemerintah daerah	-	7	8	8	9	9	10	10
02.10.02	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	73,46	75,69	76,44	77,21	77,98	78,76	78,76
02.10.03	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	34,31	36,41	37,14	37,88	38,64	39,41	39,41
02.10.04	Persentase rumah tangga yg memiliki komputer/laptop	%	73,46	75,69	76,44	77,21	77,98	78,76	78,76
02.10.05	Jumlah OPD yang memiliki website	OPD	7	8	8	9	9	10	10
02.10.06	Jumlah OPD yang memiliki aplikasi	OPD	5	5	6	6	7	7	7
02.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
02.11.	Persentase koperasi aktif	%	91,71%	94,49%	95,43%	96,39%	97,35%	98,33%	98,33%

01									
02.11.02	Jumlah koperasi	unit	217	217	220	220	220	222	222
02.11.02	Jumlah Usaha Mikro	unit	18.577	19.140	19.331	19.525	19.720	19.917	19.917
02.11.03	Jumlah Usaha Kecil	unit	2.342	2.413	2.437	2.461	2.486	2.511	2.511
02.11.04	Jumlah Usaha Menengah	unit	88	91	92	92	93	94	94
0,0921875	Persentase Koperasi yang mengikuti program pemberdayaan	%	14,30	15,57	16,02	16,47	16,92	17,37	17,37
02.11.06	Persentase (%) UMKM yang mengikuti program pemberdayaan	%	0,041	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
02.12	Urusan Penanaman Modal								
02.12.01	Rata-rata hari proses perijinan investasi	Hari	4	4	4	4	4	4	4
02.12.02	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	15	20	22	24	28	30	30
2.12.3 a	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Investor	127,48	137,29	140,72	144,24	147,84	151,54	151,54
2.12.3 b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Milyar Rp	272.037,60	292.954,74	300.278,61	307.785,58	315.480,22	323.367,22	323.367,22
02.12.04	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	Ijin	1.532	1750	1900	2050	2200	2350	2350
02.12.05	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	%	na	10	12,5	15	17,5	20	20
02.12.06	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	80	82	84	86	86	88	88
02.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
02.13.01	Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Orang	300	310	315	320	325	330	330
02.13.02	Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan	Kecamatan	59.638	61.445	62.060	62.680	63.307	63.940	63.940
02.13.03	Persentase organisasi pemuda yang aktif/mandiri	%	3	4	4	5	5	5	5
02.13.04	Jumlah Wirausaha Muda	Wirausaha	22.464	22.600	22.625	22.650	22.675	22.700	22.700

02.13.05	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	Pelatih	63	65	65	67	67	67	67
02.13.07	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	Kegiatan	24	24	24	25	25	25	25
02.13.08	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Kegiatan	172	175	175	180	180	180	180
02.13.09	Jumlah Atlet Berprestasi	Prestasi	175	177	179	181	183	185	185
02.13.10	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	5	5	5	6	6	7	7
02.13.11	Jumlah Medali Atlet Muda	Medali	2	4	4	5	5	6	6
02.14	Urusan Statistik								
02.14.01	Penyajian Kabupaten Dalam Angka	-	1	1	1	1	1	1	1
02.14.02	Penyajian PDRB Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	1
02.15	Urusan Kebudayaan								
02.15.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	2	2	2	2	2	2	2
02.16	Urusan Perpustakaan								
02.16.01	Jumlah perpustakaan	Unit	212	212	212	212	212	212	212
02.16.02	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1.420	1.507	1.537	1.568	1.599	1.631	1.631
02.16.03	Judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	4.628	4.911	5.009	5.110	5.212	5.316	5.316
02.16.04	Jumlah Pustakawan	Orang	1	1	1	2	2	2	2
02.16.05	Tenaga Teknis	Orang	3	3	3	3	3	3	3
02.17	Urusan Kearsipan								
B	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
01.01	Nilai ekspor perikanan	milyar							
01.02	Nilai Produksi perikanan tangkap	000 Rp	1.820.000.	1.847.436	1.856.673	1.865.957	1.875.287	1.884.663	1.884.663

			000	.728	.911	.281	.067	.502	.502
01.03	Nilai Produksi perikanan budidaya	000 Rp	813.500.000	825.763.614	829.892.432	834.041.894	838.212.104	842.403.164	842.403.164
01.04	Jumlah Rumah Tangga Perikanan budidaya	Ruta	4.025	4.086	4.106	4.127	4.147	4.168	4.168
01.05	Jumlah Rumah Tangga Perikanan tangkap	Ruta	14.280	14.495	14.568	14.641	14.714	14.787	14.787
01.06	Produksi perikanan tangkap	Ton	16.828,76	17.082	17.168	17.254	17.340	17.427	17.427
01.07	Produksi perikanan budidaya	Ton	9.488,88	9.632	9.680	9.728	9.777	9.826	9.826
01.08	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	59,6	61,41	62,02	62,64	63,27	63,90	63,90
01.09	Cakupan bina kelompok nelayan budidaya	%	54,16	55,80	56,36	56,92	57,49	58,07	58,07
01.10	Cakupan bina kelompok nelayan tangkap	%	92,02	93	93,5	94	94,5	95	95
2	Urusan Pariwisata								
02.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	7.831	8.593	8.847	9.101	9.355	9.609	9.609
02.02	Persentase peningkatan jumlah objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan (%)	%	82	84,48	85,33	86,18	87,04	87,92	87,92
02.03	Persentase peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata (%)	%	82	84,48	85,33	86,18	87,04	87,92	87,92
02.04	Persentase peningkatan mutu dan pelayanan pariwisata (%)	%	87	89,64	90,53	91,44	92,35	93,28	93,28
02.05	Persentase penyediaan informasi Pariwisata (%)	%	89	91,70	92,61	93,54	94,48	95,42	95,42
02.06	Persentase tingkat penyerapan tenaga kerja pariwisata (%)	%	72	74,18	74,92	75,67	76,43	77,19	77,19
02.07	Keikutsertaan dalam pameran pariwisata	kali	5	6	7	7	8	9	9
3	Urusan Pertanian								
03.01	Produktivitas padi sawah	kuintal/ha	53,73	54,54	54,81	55,09	55,36	55,64	55,64
03.02	Produktivitas padi ladang	kuintal/ha	36,81	37,36	37,55	37,74	37,93	38,12	38,12
03.03	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	1,34	1,73	1,92	2,11	2,31	2,5	2,5
03.04	Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	20,98	21,19	21,30	21,40	21,51	21,62	21,62
03.05	Rasio Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	15,10	15,25	15,32	15,40	15,48	15,55	15,55
03.06	Cakupan bina kelompok petani	%	50,76	52,30	52,82	53,35	53,88	54,42	54,42
03.07	Jumlah produksi daging (sapi, kambing, babi)	Ton	726.549	748.564	756.050	763.610	771.246	778.959	778.959
03.08	Jumlah produksi daging ayam/unggas	Ton	5.786.285	5.961.615	6.021.231	6.081.444	6.142.258	6.203.681	6.203.681

03.09	Cakupan bina kelompok Peternak	Unit	48	50	52	52	55	55	55
03.10	Jumlah Konsumsi Daging per Kapita	(kg/kap/th)	9,18	9,46	9,55	9,65	9,74	9,84	9,84
03.11	Jumlah Konsumsi Telur per Kapita	(kg/kap/th)	11,87	12,23	12,35	12,48	12,60	12,73	12,73
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
04.01	Persentase desa berlistrik	%	99,58	99,65	99,7	99,75	99,8	99,85	99,85
04.02	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	7,71	7,97	8,00	8,02	8,05	8,08	8,08
04.03	LPE sektor pertambangan dan penggalian	%	-1,04	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,5
5	Urusan Perdagangan								
05.01	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	%	19,40	20,35	20,73	21,12	21,50	21,89	21,89
05.02	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	147,26	204,65	223,49	242,33	261,17	280,00	280,00
05.03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	780	834	854	874	895	915	915
05.04	Jumlah sarana perdagangan		3.546	3650	3689	3726	3764	3801	3801
	-Mini market	Unit	34	38	40	41	43	44	44
	-Toko	Unit	120	143	151	159	167	175	175
	-Kios	Unit	820	849	860	870	880	890	890
	-Warung	Unit	2.572	2.620	2.638	2.656	2.674	2.692	2.692
6	Urusan Perindustrian								
06.01	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	11,88	12,29	12,46	12,62	12,78	12,95	12,95
06.02	LPE sektor Industri Pengolahan	%	0,36	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4
06.03	Pertumbuhan Industri	Unit	780	800	820	840	860	880	880
06.04	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	78,14	80,51	81,31	82,13	82,95	83,78	83,78
06.05	Jumlah industri kecil	Unit	10.442	10.758	10.866	10.975	11.084	11.195	11.195
	jumlah tenaga kerja industri kecil	Orang	15.567	17500	17750	18000	18250	18500	18500
06.06	Jumlah industri sedang	Unit	28	35	35	40	40	45	45
	jumlah tenaga kerja industri sedang	Orang	456	500	500	600	600	700	700
06.07	Jumlah industri besar	Unit	28	30	30	32	32	32	32
	jumlah tenaga kerja industri besar	Orang	610	750	750	900	900	900	900
06.08	Jumlah sentra IKM yang dibina	IKM	48	50	50	52	52	52	52
06.09	Jumlah wirausaha industri kecil menengah	pelaku usaha	10.470	10.770	10.870	10.970	11.070	11.170	11.170
7	Urusan Transmigrasi								
07.01	Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat	IKM	NA	78	80	82	85	90	90

07.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
07.03	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	20	30	40	50	60	70	70
07.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	100	100	100
07.05	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	UPT	5	5	5	5	5	5	5
07.08	Jumlah kawasan transmigrasi	Kawasan	2	2	2	2	2	2	2
C	Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Urusan Perencanaan Pembangunan								
01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Keuangan								
02.01	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3.92	3.95	3.98	3.99	4	4	4
02.02	Jumlah PD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	PD	na	1	1	1	1	1	5
02.03	Menurunnya kasus KKN	Kasus	na	5	5	4	4	4	4
02.04	Opini laporan keuangan pemerintah	-	na	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
02.05	Peningkatan PAD			5%	5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
3	Kepegawaian								
03.01	Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	%	na	25	27,5	30	32,5	35	35
03.02	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon	%	na	75	77,5	80	82,5	85	85
4	Pengawasan								
04.01	Persentase Tindak Lanjut Temuan (internal)	%	na	70	72	75	80	85	85
04.02	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	na	72	67	62	57	52	52
5	Urusan penunjang lainnya								

05.01	Rasio Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Yang Terealisasi	%	na	100	100	100	100	100	100
05.02	Nilai Lakip Kabupaten	-	na	58,03	60,35	62,9	64,12	65	65
D	Aspek Daya Saing Daerah								
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
I	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	Pangan								
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	4.137.809	4.263.189	4.305.821	4.348.879	4.392.368	4.436.291	4.436.291
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp.	2.676.278	2.668.257	2.665.589	2.662.923	2.660.260	2.657.600	2.657.600
	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	-	64,68	62,59	61,91	61,23	60,57	59,91	59,91
2	Pertanian								
02.01	LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	1,34	1,73	1,92	2,11	2,31	2,5	2,5
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan								
01.01	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,0003	0,0035	0,0035	0,0035	0,0036	0,0036	0,0036
01.02	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang/ Ton	63.111 60	65.000 75	66.000 75	67.000 77	68.000 77	69.000 80	69.000 80
01.03	Kontribusi Sektor Pengangkutan Terhadap PDRB	%	1,34	1,37	1,38	1,39	1,41	1,42	1,42
2	Penataan Ruang								
02.01	Luas wilayah kebanjiran	%	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004
02.02	Luas wilayah kekeringan	%	0,0029	0,0029	0,0027	0,0025	0,0023	0,0021	0,0021
3	Keuangan								
03.01	jumlah bank dan cabang	unit	6	6	6	6	7	7	7
03.02	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	unit	169	172	174	176	178	180	180
03.03	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	unit	5	5	5	5	6	6	6
4	Lingkungan Hidup								
04.01	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	49,43	54,01	55,63	57,30	59,02	60,79	60,79
5	Komunikasi dan Informatika								
05.01	Rasio elektrifikasi	%	99,79	99,88	99,9	99,92	99,94	99,96	99,96

05.02	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	73,46	75,69	76,44	77,21	77,98	78,76	78,76
III.	Iklm Berinvestasi								
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat								
01.01	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	3,02 (2019)	2,58	2,44	2,29	2,15	2,00	2,00
01.02	Jumlah demo	-	na	0	0	0	0	0	0
2	Penanaman Modal								
02.01	Lama proses perijinan	(hari)	4	4	4	4	4	4	4
02.02	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terlayani pada unit PTSP (angka)	Ijin	1.532	1750	1900	2050	2200	2350	2350
IV.	Sumber Daya Manusia								
1	Ketenagakerjaan								
01.01	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	0,025	0,030	0,031	0,033	0,034	0,036	0,036
01.02	Rasio ketergantungan	-	0,476	0,464	0,462	0,459	0,457	0,454	0,454

Tabel VIII.4
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026

No	IKK Outcome	Kondisi Awal	Target				
		2019	2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	50,43%	55,35%	55,90%	56,46%	57,03%	57,60%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,78%	96,59%	97,53%	98,47%	99,41%	100,00%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94%	96,81%	97,75%	98,69%	99,63%	100,00%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	87,76%	89,52%	90,42%	91,32%	92,24%	93,16%
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,048%	2,86%	3,80%	4,74%	5,67%	6,61%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,84%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,50%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,53%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	89,47%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	81,75%	100%	100%	100%	100%	100%

	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98,56%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,10%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,47%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,90%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	91,79%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	35,98%	36,70%	37,07%	37,44%	37,82%	38,19%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	34,09%	34,78%	35,12%	35,47%	35,83%	36,19%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,53%	0,61%	0,64%	0,68%	0,71%	0,75%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	n.a. (tidak ada pantai)	n.a. (tidak ada pantai)	n.a. (tidak ada pantai)	n.a. (tidak ada pantai)	n.a. (tidak ada pantai)	n.a. (tidak ada pantai)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	18,62%	21,55%	22,63%	23,76%	24,95%	26,20%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	2,24%	2,59%	2,72%	2,86%	3,00%	3,15%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang	92,47%	100%	100%	100%	100%	100%

	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik						
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	60,75%	65,42%	67,06%	68,73%	70,45%	72,21%
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	63,64%	68,53%	70,25%	72,00%	73,80%	75,65%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	0%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	32,07%	34,03%	34,71%	35,41%	36,12%	36,84%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	0%	5%	10%	15%	22,5%	30%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	395.401 orang	395.401 orang	395.401 orang	395.401 orang	395.401 orang	395.401 orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.150 orang	1.150 orang	1.150 orang	1.150 orang	1.150 orang	1.150 orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.264 orang	1.264 orang	1.264 orang	1.264 orang	1.264 orang	1.264 orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	11,09%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	21,87%	22,533%	22,758%	22,986%	23,215%	23,448%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	0,20%	0,266%	0,293%	0,322%	0,354%	0,390%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	76.976.963,5 2	77.208.125,4 2	77.285.333,5 4	77.362.618,8 8	77.439.981,5 0	77.517.421,4 8
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	12,80%	13,188%	13,320%	13,453%	13,587%	13,723%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,37	3,319702329	3,303103817	3,286588298	3,270155357	3,25380458
c) Pangan							

1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	348,20%	348,20%	348,20%	348,20%	348,20%	348,20%
d) Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	42,25%	42,25%	42,25%	42,25%	42,25%	42,25%
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	51,92	65,29	66,02	66,74	67,47	68,19
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	16,7%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	99,45%	100%	100%	100%	100%	100%
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	29,33%	50,68%	60,82%	72,98%	87,58%	100,00%
3	kepemilikan akta kelahiran	94,20%	97,05%	98,02%	99,01%	100,00%	100,00%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	1005	10	12	14	18	20
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							

1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	91,20%	93,96%	94,90%	95,85%	96,81%	97,78%
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	0%	5	5	10	10	15
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,5 per 1.000 perempuan	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,53%	79,71%	80,11%	80,51%	80,92%	81,32%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,02%	11,66%	11,55%	11,43%	11,32%	11,20%
i) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	85	89,5	91	92,5	94	95,5
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,300	0,310	0,320	0,330	0,340	0,350
j) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	5,35%	9,24%	11,09%	13,31%	15,98%	19,17%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	19,85%	34,30%	41,16%	49,39%	59,27%	71,13%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1,13%	1,95%	2,34%	2,81%	3,37%	4,05%
l) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	72,48%	76,92%	78,45%	80,02%	81,62%	83,26%
m) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	21,87%	23,90%	24,61%	25,35%	26,11%	26,90%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	58,05%	61,60%	62,84%	64,09%	65,37%	66,68%
3	Peningkatan prestasi olahraga	22 medali	25	27	29	32	35

n) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
o) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0%	20%	20%	20%	30%	30%
p) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	12,38%	16,48%	18,13%	19,94%	21,93%	24,13%
q) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	0	0	0	0	0	0
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	0	0	0	0
r) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0	0	0	0	0	0
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	0	0	0	0	0
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	16.670.056 Kg	17.000.000	17.500.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-96,90%	20%	20%	25%	25%	30%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-74,95%	30%	35%	40%	45%	50%
3	Tingkat hunian akomodasi	21,38					

			28,46	31,30	34,43	37,88	41,66
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	8,18	10,89	11,98	13,17	14,49	15,94
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,05%	1,40%	1,54%	1,69%	1,86%	2,05%
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,129 Ton/Ha	3,5	3,6	3,7	3,85	4
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	2000%	100%	100%	100%	100%	100%
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	16,69%	22,21%	24,44%	26,88%	29,57%	32,52%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	5,71%	7,60%	8,36%	9,20%	10,12%	11,13%
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	-100%	20%	20%	20%	20%	20%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,89%	1,18%	1,30%	1,43%	1,58%	1,73%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan	0%	0%	0%	0%	0%	0%

	pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota						
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70%	80%	85%	90%	95%	100%
h) Transmigrasi							
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,01%	11,99%	13,19%	14,51%	15,96%	17,56%
2	Rasio PAD	0,81%	1,08%	1,19%	1,30%	1,43%	1,58%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	54,21%	55,85%	56,41%	56,98%	57,55%	58,12%
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	75,14%	77,42%	78,19%	78,97%	79,76%	80,56%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,94%	29,94%	29,94%	29,94%	29,94%	29,94%
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	327,73%	340%	355%	370%	385%	400%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,62%	9%	10%	11%	13%	15%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,08%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-50,97%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Manajemen Aset						
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7,94%	8,18%	8,26%	8,35%	8,43%	8,51%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	16,70%	19,33%	20,30%	21,31%	22,38%	23,50%

8.2 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

(iii) penyusunan rencanapemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini

Tabel VIII.5
Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026

	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDIDIKAN							
01.01	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH							
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	88,98%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum	100%	87,76%	89,52%	90,42%	91,32%	92,24%	93,16%

	menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	54,26%	55,35%	55,90%	56,46%	57,03%	57,60%
2	KESEHATAN							
02.01	PELAYANAN KESEHATAN DASAR							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	94,00%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	93,50%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	94,35%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	88,47%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	81,75%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	98,57%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	92,10%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	98,47%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	98,91%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	91,80%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	35,98%	36,70%	37,07%	37,44%	37,82%	38,19%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	34,09%	34,78%	35,12%	35,47%	35,83%	36,19%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	72,19%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	92,47%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	na	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	na	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	na	100%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL							
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.3 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB /SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel VIII.6
Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026

No · TP B	TUJUAN	PILAR	No. Targ et	TARGET	No. Indikat or	INDIKATOR	Kondisi Awal 2019	Target				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	13,31%	12,24%	11,68%	11,12%	10,56%	10%
			1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	85,95	88,55	89,44	90,33	91,24	92,15
					1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

						Ketenagakerjaan.						
					1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
					1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	21072	21.711	21.928	22.147	22.368	22.592
			1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,19	96,34	96,86	97,31	97,70	98,03
					1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					imunisasi dasar lengkap.						
					1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	74,12%	76,37%	77,13%	77,90%	78,68%	79,47%
					1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	-	-	-	-	-	-
					1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	-	-	-	-	-	-
					1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	-	-	-	-	-	-
					1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	96,06%	98,97%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%
					1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	91,60%	94,38%	95,32%	96,27%	97,24%	98,21%
					1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	80,03% (tidak terkait pendapatan)	85	86	87	88,5	90
					1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	-	-	-	-	-	-

						baik dari PLN dan bukan PLN.						
			1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	-	-	-	-
					1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	-	-	-	-	-	-
					1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	-	-	-	-
					1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	-	-	-	-	-
					1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	-	-	-	-	-	-
					1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat	-	-	-	-	-	-

						pertumbuhan yang berisiko tinggi.						
					1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	-	-	-	-	-
					1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	1	1	1
			1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	-	-	-
					1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase	-	-	-	-	-	-

						dari total belanja pemerintah.						
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).						
		Sosial			2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
		Sosial			2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.						
		Sosial			2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.						
		Sosial	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	9,10%	6,70%	6,63%	6,56%	6,50%	6,43%

				internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
					2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	17,6%	17,08%	16,91%	16,74%	16,57%	16,40%
					2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,60%	1,55%	1,54%	1,52%	1,51%	1,49%
					2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	-	-	-	-	-	-
					2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	49,10%	48,07%	47,59%	47,12%	46,65%	46,18%
					2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	-	-	-	-	-	-
		Sosial	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian						

				pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.		(rupiah per tenaga kerja).						
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	61,36	59,54	58,94	58,35	57,77	57,19
					3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95,39	96,828016 17	97,312156 25	97,798717 04	98,287710 62	98,779149 17
					3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49	94,19	95,609926 02	96,087975 65	96,568415 53	97,051257 61	97,536513 9

						tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.						
			3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3,27	3,17	3,14	3,11	3,08	3,05
					3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2,45	2,38	2,35	2,33	2,31	2,28
					3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2,86	2,78	2,75	2,72	2,69	2,67
					3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	74,14%	72%	71%	71%	70%	69%

				bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
					3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	781	758	750	743	735	728
					3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	-	-	-	-	-	-
					3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	-	-	-	-	-	-
					3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	25	27,5	30	32,5	35	37,5
					3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	-	-	-	-	-	-
					3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	-	-	-	-	-	-
					3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	-	-	-	-	-	-
		3,4		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	7,9	7,67	7,59	7,51	7,44	7,36

				pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
					3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	48,2	46,77	46,30	45,84	45,38	44,93
					3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	30,40%	29,50%	29,20%	28,91%	28,62%	28,33%
					3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	-	-	-	-	-	-
					3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	25	25	25	25	25	25
			3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	-	-	-	-	-	-
			3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	0,20	0,31	0,35	0,41	0,47	0,54

				dalam strategi dan program nasional.								
					3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	74,12%	75,24%	75,61%	75,99%	76,37%	76,75%
					3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	20,60%	21,54%	21,86%	22,19%	22,52%	22,86%
					3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2,2%	2,23%	2,24%	2,26%	2,27%	2,28%
					3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,6	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
			3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	-	-	-	-	-	-
					3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem	351809	352.865	353.218	353.572	353.925	354.279

						kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.						
					3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	85,95	88,55	89,44	90,33	91,24	92,15
			3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	7,9	7,67	7,59	7,51	7,44	7,36
			3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	- Tenaga Medis : 665 org , - Bidan PTT : 174 Org, - Dokter : 35 Org	- Tenaga Medis : 680 org , - Bidan PTT : 180 Org, - Dokter : 50 Org	- Tenaga Medis : 695 org , - Bidan PTT : 185 Org, - Dokter : 55 Org	- Tenaga Medis : 6710 org , - Bidan PTT : 190 Org, - Dokter : 60 Org	- Tenaga Medis : 725 org , - Bidan PTT : 195 Org, - Dokter : 65 Org	- Tenaga Medis : 740 org , - Bidan PTT : 200 Org, - Dokter : 70 Org
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar	Sosial	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)	-	-	-	-	-	-

	Sepanjang Hayat untuk Semua			berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		matematika.						
					4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	65,15%	69,14%	70,52%	71,93%	73,37%	74,84%
					4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	32,50%	37,62%	39,50%	41,48%	43,55%	45,73%
					4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	101%	100,51%	100,50%	100,49%	100,48%	100,47%
					4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	104,94%	104,63%	104,52%	104,42%	104,31%	104,21%
					4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,85	8,20	8,34	8.349,00	8,64	8,78
			4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	62,03%	63,91%	64,55%	65,19%	65,85%	66,50%
			4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi	-	-	-	-	-	-

				dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.		dan komunikasi (TIK).						
			4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	-	-	-	-	-	-
			4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,99%	100%	100%	100%	100%	100%
					4.6.1.(b)	Persentase angka	-	-	-	-	-	-

)	melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.							
			4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	-	-	-	-	-	
			4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	69,82%	71,94%	72,65%	73,38%	74,12%	74,86%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan	Sosial	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung	7(1 Perbup. 5 SK	7(1 Perbup. 5 SK Bupati,	8(1 Perbup. 6 SK Bupati,	8(1 Perbup. 6 SK Bupati,	9(1 Perbup. 7 SK Bupati,	9(1 Perbup. 7 SK Bupati,

	Memberdayakan Kaum Perempuan			terhadap kaum perempuan dimanapun.		pemberdayaan perempuan.	Bupati, 1 SK Kepala Dinas)	1 SK Kepala Dinas)	1 SK Kepala Dinas)	1 SK Kepala Dinas)	1 SK Kepala Dinas)	1 SK Kepala Dinas)
			5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	-	-	-	-	-
					5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	-	-	-	-	-	-
					5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	-	-	-	-	-
					5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	-	-	-	-	-	-
			5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa,	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum	-	-	-	-	-	-

				serta sunat perempuan.		umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.						
			5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	6 kursi (15%) jumlah 40 kursi	6 kursi (15%) jumlah 40 kursi	6 kursi (15%) jumlah 40 kursi	6 kursi (15%) jumlah 40 kursi	6 kursi (15%) jumlah 40 kursi	6 kursi (15%) jumlah 40 kursi
							-					
					5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	jumlah perempuan Eselon II = 6 (21,4%) Jumlah OPD Eselon II = 28	jumlah perempuan Eselon II = 6 (21,4%) Jumlah OPD Eselon II = 28	jumlah perempuan Eselon II = 6 (21,4%) Jumlah OPD Eselon II = 28	jumlah perempuan Eselon II = 6 (21,4%) Jumlah OPD Eselon II = 28	jumlah perempuan Eselon II = 6 (21,4%) Jumlah OPD Eselon II = 28	jumlah perempuan Eselon II = 6 (21,4%) Jumlah OPD Eselon II = 28
			5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	15%	11,66%	11,55%	11,43%	11,32%	11,20%

				and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
					5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	67988	69.013	69.358	69.705	70.053	70.404
			5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	73,46%	74,57%	74,94%	75,31%	75,69%	76,07%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.						
					6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.						
					6.1.1.(c)	Proporsi populasi						

					yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.							
			6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	-	-	-	-	-
					6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	67,72%	68,74%	69,08%	69,43%	69,78%	70,13%
					6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	82,16%	83,40%	83,82%	84,23%	84,66%	85,08%
					6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	18,67%	24,85%	27,33%	30,07%	33,08%	36,38%
					6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang						

						terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.							
			6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.							
			6.4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-	-	-	-	-	-	-

				mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
			6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).						
					6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.						
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	2.9 juta rupiah	3 juta rupiah	3,25 juta rupiah	3,25 juta rupiah	3,5 juta rupiah	3,5 juta rupiah
					8.1.1.(a)	PDB per kapita.						
			8.2	Mencapai tingkat produktivitas	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga						

				ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.						
			8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	-	-	-	-	-	-
					8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	-	-	-	-	-	-
					8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	21,70%	23,03%	23,49%	23,96%	24,44%	24,93%
			8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	15.000,-					

				dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
			8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	0,37%	0,36%	0,36%	0,35%	0,35%	0,34%
			8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	-	-	-	-	-	-
					8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	130 Orang	200	220	240	270	300
					8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	7701 orang	8500	8800	9100	9550	10000
					8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-

					8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	-	-	-	-	-	-
			8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	-	-	-	-	-	-
					9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	6,53%	3%	3,50%	4%	4,50%	5%
					9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	-	-	-	-	-	-

			9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.						
			9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	-	-	-	-	-	-
					9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	73,46%	74,57%	74,94%	75,31%	75,69%	76,07%
					9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	34,31%	37,49%	38,62%	39,77%	40,97%	42,20%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah	10.1.1*	Koefisien Gini.	-	-	-	-	-	-

				40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
					10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	0,50%	12,24%	11,68%	11,12%	10,56%	10%
			10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	-	-	-	-	-	-
			10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	-	-	-	-	-
			10.4	Mengadopsi	10.4.1.(Proporsi peserta	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	b)	Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.						
			11,2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak,	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	-	-	-	-	-	-

				penyangang disabilitas dan orang tua.								
					11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	1	1	1	1	1	1
			11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penangan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	-	-	-	-	-	-
			11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	-	-	-	-
					11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	-	-	-	-	-
					11.5.2.(Jumlah kerugian	-	-	-	-	-	-

				a)	ekonomi langsung akibat bencana.								
			11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	16,70%	19,33%	20,30%	21,31%	22,38%	23,50%	
			11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	93 pengaduan	85	82	79	75	70	
			11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	-	-	-	-	-	-	

				adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
					11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1	1	1	1	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	218,7028 ton/tahun	239 ton/tahun	246 ton/tahun	253 ton/tahun	260 ton/tahun	267 ton/tahun

				dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
			12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	87,60 ton/tahun	92,60	94,45	96,34	98,26	100,23
			12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	-	-	-	-	-	-
			12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	-	-	-	-	-	-
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan	Lingkungan	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.						

	Dampaknya			alam di semua negara.								
			13,2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	-	-	-	-
					13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	-	-	-	-	-	-
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	LINGKUNGAN	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	2208.48 : 239418.17 Ha	2100 : 239418,17 Ha	2000 : 239418,17 Ha	1900 : 239418,17 Ha	1800 : 239418,17 Ha	1700 : 239418,17 Ha
			15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan,	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi	133.81 : 239418.17 Ha	150 : 239418,17 Ha	165 : 239418,17 Ha	180 : 239418,17 Ha	200 : 239418,17 Ha	225 : 239418,17 Ha

				memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.		terhadap luas lahan keseluruhan.						
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	-	-	-	-	-	-
					16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	-	-	-	-	-	-
					16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12	-	-	-	-	-	-

						bulan terakhir.						
			16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	-	-	-	-	-	-
					16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	-	-	-	-	-	-
					16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	-	-	-	-	-	-
			16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
					16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	-	-	-	-	-	-
			16.5	Secara substansial mengurangi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	-	-	-	-	-

				korupsi dan penyuaapan dalam segala bentuknya.								
			16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).						
					16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	-	-	-	-	-
					16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
					16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lemba	-	-	-	-	-	-

					ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
			16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).					
					16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	jumlah Esselon II= 6 (21,4%) Jumlah OPD Esselon II= 28	jumlah Esselon II= 6 (21,4%) Jumlah OPD Esselon II= 28	jumlah Esselon II= 6 (21,4%) Jumlah OPD Esselon II= 28	jumlah Esselon II= 6 (21,4%) Jumlah OPD Esselon II= 28	jumlah Esselon II= 6 (21,4%) Jumlah OPD Esselon II= 28
			16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	89,37%	94,84%	96,74%	98,67%	100,00%
					16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	36,93% (seluruh penduduk, tidak terkait pendapatan)	41,50%	43%	44,50%	46%
					16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	81,46%	97,05%	98,02%	99,01%	100,00%
			16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas	-	-	-	-	-

				dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.		PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
			16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	-	-	-	-	-
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						
				Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.						

				telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
					17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband						
			17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	73,46 %	74,57%	74,94%	75,31%	75,69%	76,07%
					17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	34%	37,49%	38,62%	39,77%	40,97%	42,20%
			17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan						

				pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.		dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
					17.17.1 . (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
			17.1 8	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras,	17.18.1 . (a)							

				etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
			17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)						
					17.19.2 (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	-	-	-	-	-	-
					17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	-	-	-	-	-	-

BAB IX

PENUTUP

Bab Penutup menguraikan bagaimana mengoperasionalkan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPJMD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Kabupaten Ogan Ilir dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Ogan Ilir yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ogan Ilir, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Masa jabatan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir periode 2021-2026, akan berakhir pada tahun 2024 dan akan terjadi transisi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menyatakan bahwa kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan akan dilaksanakan

pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota pada bulan November 2024. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Ilir periode 2021-2026. Pada saat masa transisi diharapkan pergantian kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD sebagaimana di maksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2024.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha,

agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.

2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2022 hingga 2026.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja OPD.
5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa

Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.

7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan YME, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir pada masa yang akan datang.